



MENGUKIR ASA DIPLOMASI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

2024

MENGUKIR ASA DIPLOMASI

MENGIKIR ASA DIPLOMASI

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENANGGUNG JAWAB	Wisnu Utomo (penulis); Priyanto Rohmattullah (penulis); Astri Kusuma Mayasari (penulis); Wiwik Widiastuti (penulis); Nourma Nusanti (penulis); Wisnu Utomo (editor); Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Mengikir Asa Diplomasi / penulis, Wisnu Utomo, Priyanto Rohmatullah, Astri Kusuma Mayasari, Wiwik Widiastuti, Nourma Nusanti, [dan 10 lainnya] ; editor, Wisnu Utomo
EDISI	Cetakan 1, 2025
PUBLIKASI	Jakarta Pusat : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2025
DESKRIPSI FISIK	318 halaman : ilustrasi ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7023-03-2
SUBJEK	Diplomasi
KLASIFIKASI	327.2 [23]

P e n u l i s :

Wisnu Utomo	Fika Annisa Nurtrisyantri
Priyanto Rohmatullah	Omar Farizi Wonggo
Astri Kusuma Mayasari	Dizar Ramadhan Sabana
Dyah Widiastuti	M. Singgih Pangestu
Nourma Nusanti	Ghifari Athallah Ramadhan
Karina Apriladhatin	Aisha R. Kusumasomantri
Vallisa Aulia Rahmi	Annisa Dina Amalia
Tri Azmi Khairunnisa	

Editor:

Wisnu Utomo

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Dikeluarkan oleh:

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Cetakan I, 2025



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAMBUTAN

Saya menyambut baik terbitnya buku “Mengukir Asa Diplomasi”. Buku ini merupakan dokumen yang berisi kumpulan tulisan, *policy paper*, dan kajian yang disusun dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan nasional. Dalam buku ini kita bisa membaca catatan, pemikiran dan perspektif yang ditulis oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Strategi kebijakan luar negeri Indonesia menentukan pijakannya di dalam kontestasi kekuatan regional dan global. Hal ini sangat bergantung dari kapasitas Indonesia dalam mengerahkan instrumen kebijakan yang tepat dan kalkulatif baik di dalam maupun luar negeri. Dengan menguatnya interdependensi antar negara sebagai hasil dari keterbukaan dan interkoneksi ekonomi, orientasi kebijakan yang semata melihat ke dalam bukan lagi merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil. Belum lagi, disrupsi keamanan yang diakibatkan oleh isu-isu non-tradisional dan tidak lagi mengenal batas teritori negara, terasa nyata saat ini dari isu lingkungan, ekstremisme, dan pandemi yang bersifat trans-nasional. Realita ini menuntut Indonesia untuk dapat merajut kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri yang secara mutual menjawab kepentingan nasional sekaligus menjadi penggerak stabilitas dan pertumbuhan global yang berkualitas.

Kepada Tim Penulis, saya sampaikan penghargaan dan ucapan selamat atas karya tulis yang sangat bernilai ini. Saya mengharapkan buku ini menjadi sumber referensi bagi berbagai pihak untuk dapat memahami berbagai asa atas kinerja diplomasi Indonesia.

Jakarta, November 2024

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan

Bogat Widyatmoko

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
Pengantar Editor	1
Bagian Satu:	
Menjadi Kekuatan Global Secara Selektif	12
• Kemanfaatan Keanggotaan Organisasi Internasional	13
• Menggali Kunci Manfaat Keanggotaan	23
• Menyeleksi Keanggotaan	32
Bagian Dua:	
Melangkah Maju Bersama Untuk Bersaing di Tingkat ASEAN	43
• Komitmen Indonesia di ASEAN	45
• Makna Institusional dalam Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia	50
• Selayang Pandang: Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia	54
• Tantangan dan Hambatan yang Menghadang Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia	59
• Komitmen Sekretariat ASEAN-Indonesia dalam Mengimplementasi Pilar ASEAN	62
• Upaya Membangun Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia yang Kuat	67
Bagian Tiga:	
Penguatan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri dari Radikalisme dan Ekstremisme	73
• ISIS: Ancaman Keamanan Bagi Pemerintah Indonesia	75
• <i>Counter Violence Extremism</i>	78
• Mengenali Potensi Ancaman yang Dihadapi WNI di Luar Negeri	81
• Meningkatnya Gelombang Kepulangan Simpatisan ISIS ke Tanah Air	86

• Mendalami Permasalahan Terorisme di Indonesia	92
• Memagari WNI di Luar Negeri dari Ancaman Ekstremisme dan Radikalisme	114
Bagian Empat:	
<i>Economic Intelligence</i>	133
Pemanfaatan Data <i>Economic Intelligence</i> Kementerian Luar Negeri	
• Memahami <i>Economic Intelligence</i>	135
• <i>Economic Intelligence</i> Sebagai Basis Data	142
• <i>Economic Intelligence: Peluang dan Tantangan</i>	146
• Menyelisik Permasalahan Sistemik dan Pengaruhnya Terhadap <i>Economic Intelligence</i>	160
• Analisis Kebijakan Pemanfaatan <i>Economic Intelligence</i>	173
• Rekomendasi Pemanfaatan Dokumen <i>Economic Intelligence</i>	199
Bagian Lima:	
Penguatan Diplomasi Perwakilan	211
• Perwakilan Sebagai Alat Dalam Memastikan Kehadiran Pemerintah di Luar Negeri	213
• Mengenal Perwakilan Negara Lain	222
• Memperkuat Diplomasi Perwakilan RI	228
Bagian Enam:	
Komitmen Indonesia di Forum G20	237
• Tinjau Ulang Proses Pelaksanaan Komitmen Indonesia di Forum G20	239
• Kerja Sama Internasional (Sebuah Kajian Pustaka)	243
• Kesenjangan Implementasi-Komitmen Indonesia di Forum G20 Bidang Pendidikan Vokasi	254
Epilog	299
Tantangan dan Langkah ke Depan	301
• Mencari Kompas Kekuatan Indonesia	303
• Membangun Pijakan yang Kokoh di Panggung Dunia	306
Tim Penulis	311

Pengantar Editor





Rationale: Meningkatkan Peran Indonesia

Indonesia memiliki karakteristik yang unik, antara lain sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, negara dengan penduduk muslim terbanyak, serta negara kepulauan terbesar. Ciri khas yang menjadi identitas tersebut merupakan modal unggulan untuk menggalang solidaritas dalam mencapai tujuan pembangunan. Terlebih, pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045. Pada progresnya, sebagai *upper-middle income country*, Indonesia harus mampu mengoptimalkan peran di panggung global. Salah satu cara yaitu melalui kebijakan luar negeri yang memberikan manfaat konkret terhadap kepentingan nasional.

Dari segi penajaman instrumen kebijakan, upaya peningkatan peran Indonesia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keanggotaan dan kontribusi pada ratusan forum/organisasi internasional. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Indonesia perlu benar-benar meninjau manfaat yang didapatkan sebagaimana Perpres No. 30/2019. Hal ini selaras dengan naskah visi-misi Pemerintah RI: “Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia”

(Widodo dan Kalla, 2014:13). Untuk itu, keikutsertaan Indonesia bukanlah formalitas semata, namun harus dilandasi motif kepentingan nasional. Di tingkat regional, sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN, Indonesia perlu meningkatkan peran dan kepemimpinan melalui berbagai strategi. Dalam hal ini, Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN-Indonesia dibentuk antara lain sebagai pempunan kegiatan, koordinasi, dan dukungan pembentukan komunitas ASEAN secara nasional. Untuk memperkuat Setnas, dilakukan revisi Keppres No. 23 Tahun 2012 dengan urgensi kondisi lapangan yang belum terakomodasi dalam Keppres¹, serta perkembangan kendala dan tantangan yang menghambat kinerja Setnas.

Selain itu, penajaman instrumen kebijakan perlu dilakukan untuk penguatan dan perlindungan WNI di luar negeri dari radikalisme dan ekstremisme. Perkembangan pola terorisme, dari struktur organisasi hingga motivasi, memaksa pemerintah mengencangkan proteksi. Misalnya, berbeda dengan Al-Qaeda, ISIS mengecam segala bentuk pemerintahan modern. Narasi ISIS menarik sejumlah WNI sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Tanpa proses deradikalisasi yang efektif, tumbuh risiko penyebaran narasi radikal oleh para WNI yang telah kembali ke negeri ini. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya mampu mengakomodir dimensi sosial dan kemanusiaan, namun juga mempertimbangkan aspek keamanan nasional yang tepat sasaran, sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan.

Penajaman instrumen kebijakan pada ketiga isu tersebut dapat meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global serta mendorong efektifitas pencapaian kepentingan nasional. Pada implementasinya, pencapaian kepentingan nasional juga perlu diperkuat melalui optimalisasi ekonomi luar negeri.

Dalam melakukan ekspansi produk ke luar negeri, pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri menyusun *economic intelligence* dan/atau *market intelligence* yang memuat informasi pasar, misalnya lokasi geografis, basis konsumen, dan informasi relevan lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, perlu dikaji tiga aspek utama: karakter informasi, proses penyusunan, serta diseminasi dan pemanfaatan.

¹ Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* Penguatan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 18 September 2018

Pemanfaatan dokumen *economic intelligence* dapat berkontribusi bagi *stakeholders*, terutama para eksportir dan pelaku usaha, untuk mengetahui potensi ekspor yang dapat dikembangkan di negara tujuan ekspor. Selain itu, peran perwakilan RI sangat krusial dalam mendorong diplomasi ekonomi. Presiden Joko Widodo secara khusus mengharapkan perwakilan RI menjadi ujung tombak diplomasi perdagangan Indonesia di mancanegara. Maka dari itu, diplomasi perwakilan perlu diperkuat, mengingat banyaknya jumlah kantor perwakilan yang ada belum sepadan dengan kontribusi terhadap kepentingan nasional.

Pada pelaksanaannya, Indonesia telah tergabung dalam G20 sebagai forum kerja sama ekonomi internasional yang berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi. Dinamika perdagangan maupun krisis global yang lebih sering terjadi dewasa ini memacu Indonesia untuk berupaya lebih keras melampaui jeratan *middle income trap*. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan *human capital* melalui perbaikan kualitas pendidikan vokasi. Pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha dan pasar dalam rangka menarik investasi dan pekerjaan yang layak sehingga meningkatkan perekonomian bangsa.

Potret: Lika-liku Pelaksanaan

Pencapaian cita-cita Indonesia melalui optimalisasi kebijakan dan potensi yang dimiliki pada nyatanya mengalami dinamika yang kadang tak terduga. Di lapangan, potret implementasi kebijakan dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari koordinasi, kerangka regulasi, hingga faktor eksternal.

Walaupun sebagian besar forum/organisasi internasional yang diikuti Indonesia termasuk kategori 'bermanfaat' karena sejalan dengan prioritas nasional, namun masih ada keanggotaan yang tidak bermanfaat terhadap pencapaian kepentingan nasional. Selain tidak selaras dengan agenda dan kebijakan prioritas nasional, beberapa forum/organisasi sudah tidak aktif dan mengalami disfungsi, tidak memiliki dasar hukum,

maupun tidak ada partisipasi Indonesia pada kegiatan-kegiatannya. Ketidakefektifan keanggotaan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kuatnya pengaruh negara-negara besar, kompleksitas kelembagaan organisasi internasional yang tumpang-tindih (*overlapping*), serta rendahnya komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif. Terkait penguatan peran Indonesia di ASEAN, banyak akademisi menyepakati bahwa Indonesia secara alamiah merupakan pemimpin ASEAN. Pada saat yang sama, kepemimpinan Indonesia hanya kuat di sektor politik-keamanan saja, sedangkan sektor ekonomi dan sosial-budaya belum kuat.² Indonesia dianggap belum mampu mengoordinasikan kebijakan ASEAN secara kompak dan inklusif. Upaya peningkatan peran Indonesia melalui Setnas ASEAN-Indonesia antara lain terhambat akibat masalah garis koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan SDM dan anggaran.

Seiring dengan upaya peningkatan peran dengan pendekatan ke luar (*outward looking*), Indonesia juga sangat perlu memperhatikan peran yang secara langsung berdampak ke dalam. Peran Indonesia pada penguatan dan perlindungan WNI di luar negeri dari radikalisme dan ekstremisme masih mengalami beberapa tantangan. Kalahnya ISIS tahun 2019 berdampak pada peningkatan jumlah *returnee* dan *deportant* WNI yang kembali ke Indonesia. Bergabungnya WNI ke organisasi teroris tidak otomatis menghilangkan status kewarganegaraannya, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi WNI dari status *stateless*. Namun, beberapa ancaman yang ditimbulkan dari kepulangan yaitu: 1) potensi penyebraran paham radikal; 2) munculnya residivis; 3) transfer teknologi teror lokal.

Isu-isu tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian kepentingan nasional, khususnya melalui peningkatan peran Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.

Pada optimalisasi ekonomi luar negeri, sebagai salah satu kepentingan nasional, permasalahan yang ditemui dalam pemanfaatan *economic intelligence* bermula dari penyusunan yang dianggap belum terencana dengan baik dan belum menekankan *evidence-based approach*; perlunya bantuan atau 'intervensi' pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran dan peningkatan aktivitas

² Ralf Emmers, "Indonesia's Role in ASEAN: A Case of Incomplete and Sectoral Leadership" *The Pacific Review*, Vol. 27, No. 4 (2014): 557-558

ekspor, serta terdapat miskordinasi internal. Pada lingkup diplomasi ekonomi, banyaknya jumlah kantor perwakilan belum sepadan dengan pencapaian kepentingan nasional. Perwakilan menghadapi tantangan teknis seperti struktur perwakilan dan juga permasalahan substantif seperti ketiadaan dokumen perencanaan dari pemerintah.

Dalam implementasi komitmen Indonesia di G20, terdapat kesenjangan antara komitmen dan implementasi di bidang vokasi. Hal tersebut dikarenakan beragam faktor, diantaranya: 1) Keterbatasan akses; 2) Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan; dan 3) Koordinasi lintas K/L yang belum optimal.

Berdasarkan latar belakang dan potret permasalahan tersebut, buku ini akan menganalisis faktor permasalahan sehingga menghasilkan rekomendasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung Indonesia dalam mewujudkan asa melalui kekuatan global dan regional yang kokoh.

Bagian Satu



Menjadi Kekuatan Global Secara Selektif

Wisnu Utomo
Priyanto Rohmatullah
M. Singgih Pangestu



Ringkasan Eksekutif

Politik luar negeri Indonesia menekankan bahwa keterlibatan di lingkup internasional harus memberikan dampak langsung kepada rakyat. Tak terkecuali, keanggotaan Indonesia dalam beragam organisasi internasional. Pada saat ini, menurut catatan Kementerian Luar Negeri, ada sebanyak 220 organisasi internasional yang diikuti Indonesia. Di samping menunjukkan keaktifan dalam forum internasional, banyaknya keanggotaan Indonesia di organisasi internasional juga memiliki permasalahan terutama berhubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Tulisan ini merupakan analisis evaluatif terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional. Diharapkan hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kebijakan luar negeri, khususnya efektivitas keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional.

Hasil analisis evaluatif memperlihatkan bahwa keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional dapat golongan ke dalam tiga kategori kualitatif: bermanfaat, kurang bermanfaat, dan tidak bermanfaat. Kategorisasi ini didasarkan pada dua konsep kepentingan yakni kepentingan nasional (indikatornya adalah *nawacita*, 'Poros Maritim Dunia', tiga prioritas kebijakan luar negeri) dan kepentingan internasional (indikatornya adalah identitas Indonesia sebagai *global problem solver*). Kemudian diketahui pula bahwa ketidakefektifan organisasi internasional yang diikuti Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kuatnya pengaruh negara-negara besar, kompleksitas kelembagaan organisasi internasional yang banyak tumpang-tindih (*overlapping*), dan rendahnya komitmen Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif di organisasi tersebut.

Pada akhirnya, beberapa rekomendasi bagi keperluan pengambilan kebijakan luar negeri sehubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu: mempertahankan status keanggotaan Indonesia dalam organisasi yang dinilai bermanfaat, meninjau ulang status keanggotaan dalam organisasi yang dinilai kurang bermanfaat, dan keluar dari organisasi internasional yang dinilai tidak bermanfaat. Selain itu, rekomendasi kebijakan juga mencakup beberapa hal yang dianggap strategis antara lain: menerapkan strategi *soft balancing* dan *hedging* terhadap negara kuat yang mendominasi organisasi internasional, menerapkan strategi *trade-off* (memilih salah satu dan meninggalkan yang lain) untuk organisasi yang tumpang tindih, dan mendorong Indonesia untuk lebih aktif membangun reputasi di tingkat global sebagai *global problem solver*.



Kemanfaatan Keanggotaan Organisasi Internasional

Indonesia di Organisasi Internasional

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional difokuskan pada pemenuhan kepentingan domestik dengan menitikberatkan pada masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dalam naskah visi-misinya, yaitu “meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia” (Widodo dan Kalla, 2014:13). Kecenderungan ini mengindikasikan karakteristik kebijakan luar negeri Jokowi yang ‘*down to earth*’, realistis, dan konkret. Slogan “*pro-people diplomacy*” menjadi sebuah pedoman yang menuntun kebijakan luar negeri Indonesia untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan lain.

Salah satu implikasi dari kecenderungan ini adalah pemerintah Indonesia memiliki pandangan bahwa keterlibatan di lingkup internasional harus memberikan dampak langsung kepada Indonesia. Tak terkecuali dalam hal keanggotaan Indonesia pada pelbagai organisasi internasional. Saat ini, menurut catatan Kementerian Luar Negeri, sebanyak 220 organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Dari jumlah itu, ada 47 lembaga negara yang memiliki status keanggotaan di dalam organisasi-organisasi tersebut. Jumlah keanggotaan terbanyak yaitu Kementerian Luar Negeri (sebanyak 47 organisasi internasional), termasuk diantaranya Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Disusul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebanyak 20 organisasi internasional, dan Kementerian Pertanian (15 organisasi internasional). Di samping menunjukkan keaktifan Indonesia dalam pelbagai forum internasional, banyaknya keanggotaan Indonesia di organisasi internasional juga memiliki kelemahan terutama berhubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Jumlah keanggotaan sebanyak itu membuat pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang keanggotaan tersebut. Apakah keikutsertaan Indonesia dalam ratusan organisasi internasional tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, atau tidak. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional tidak boleh hanya berdasarkan pada formalitas belaka dan tidak memberikan kontribusi positif baik bagi negara maupun dunia. Dengan kata lain, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional harus dilandasi motif kepentingan nasional.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi anggaran, Pemerintah pernah melakukan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia

“keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional harus benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara”

dalam organisasi internasional. Berdasarkan evaluasinya, Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengevaluasi 75 organisasi internasional serta mempertahankan 112 organisasi yang bersifat strategis dan 46 yang bersifat teknis. Evaluasi tersebut berkaitan dengan masalah

anggaran (Kompas, 2016). Tidak lama setelah itu, Indonesia memutuskan keluar dari enam organisasi internasional. Namun sayangnya,

pemerintah tidak merilis daftar organisasi yang tidak lagi diikuti Indonesia dengan alasan etika (CNN, 2016).

Menguntungkan atau Merugikan

Tidak semua organisasi internasional memberi manfaat maksimal bagi negara yang terlibat di dalamnya. Keanggotaan Indonesia dalam banyak organisasi internasional memang menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan dalam beberapa hal. Parameter untuk menilai efektivitas keanggotaan tersebut didasarkan pada dua hal pokok: kepentingan nasional dan kepentingan internasional.

Pertama, kepentingan nasional merupakan parameter utama untuk menentukan apakah keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional memberikan manfaat bagi negara atau tidak. Pandangan ini sudah menjadi pemahaman umum (*commonsense*) baik di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum. Dalam konteks ini, indikator kepentingan nasional sejalan dengan konsepsi pemerintahan tentang prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu agenda prioritas pemerintah dan prioritas kebijakan luar negeri yaitu menjaga kedaulatan, perlindungan terhadap WNI, dan diplomasi ekonomi.

Kedua, parameter untuk melihat utilitas organisasi internasional bagi Indonesia adalah apakah dengan status keanggotaan tersebut Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional dan memberi peluang besar untuk berkontribusi bagi kepentingan global. Parameter kedua ini lebih menyoroti dimensi eksternal dari kepentingan nasional (*beyond national interest*) karena bagaimanapun sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak dulu berkomitmen untuk turut serta dalam usaha-usaha memecahkan masalah-masalah global. Indikator untuk mengukurnya adalah dengan melihat apakah keanggotaan Indonesia dalam suatu organisasi internasional mampu memfasilitasi Indonesia untuk memainkan peran-peran internasional sebagai agenda *setter*, *norm-setter*, *bridge-builder*, dan *peacemaker*.

Kurang Optimal dalam Memenuhi Target Kepentingan Nasional

Saat terpilih menjadi presiden Indonesia ketujuh, pasangan Jokowi-JK merumuskan sembilan agenda prioritas sebagai ujung tombak kebijakan-kebijakannya. Sembilan agenda prioritas ini dinamakan 'nawacita'. Gagasan ini jelas sekali tertuang dalam naskah visi-misi Jokowi-JK pada saat kampanye pemilihan presiden. Sembilan agenda prioritas itu adalah (Widodo dan Kalla, 2014:6–11):

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

“Nawacita diterjemahkan ke dalam tiga prioritas kebijakan luar negeri: menjaga kedaulatan NKRI, melindungi WNI dan aset negara di luar negeri, serta meningkatkan diplomasi ekonomi”

Nawacita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga prioritas kebijakan luar negeri yaitu: menjaga kedaulatan NKRI, melindungi WNI dan aset negara di luar negeri, serta meningkatkan diplomasi ekonomi. Tiga agenda prioritas tersebut muncul dari konsepsi pemerintahan Jokowi mengenai 'Poros Maritim Dunia' yang disampaikan pada saat KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2015. Jokowi

menyampaikan bahwa visi 'Poros Maritim Dunia' memiliki lima pilar yaitu (Sekretariat Kabinet, 2015):

1. Membangun budaya maritim;
2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut;
3. Membangun infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Kerja sama maritim melalui diplomasi;
5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Jika kita menggunakan parameter nawacita dan tiga prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di atas, berikut ini merupakan analisis keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional. Skala penilaian dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu bermanfaat, kurang bermanfaat, dan tidak bermanfaat. **Bermanfaat** berarti keanggotaan Indonesia memberi keuntungan bagi Indonesia. **Kurang bermanfaat** berarti keuntungan yang diperoleh Indonesia tidak seberapa dibandingkan kontribusi Indonesia kepada organisasi tersebut. **Tidak bermanfaat** berarti keanggotaan tersebut sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Pertama, dari hasil analisis evaluatif terbukti bahwa sebagian besar organisasi internasional yang diikuti Indonesia masuk kategori 'bermanfaat' karena sejalan dengan visi nawacita, tiga prioritas kebijakan luar negeri Jokowi, dan berdampak bagi peningkatan peran global Indonesia. Diantaranya adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang bermanfaat untuk menunjang agenda nawacita pemerintahan Jokowi, salah satunya adalah berupaya memajukan demokrasi dan HAM. Kemudian ada International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dan International Maritime Organization (IMO) yang bermanfaat dalam upaya pemerintah Indonesia menegakkan kedaulatan di laut serta menangani aneka kejahatan maritim. Keanggotaan Indonesia dalam ITLOS dengan demikian konsisten dengan visi 'Poros Maritim Global'. Kemudian ada IAEA atau Badan Tenaga Atom Internasional yang berkontribusi bagi upaya Indonesia mengembangkan energi nuklir untuk pembangkit listrik. Center of International Forestry Research (CIFOR) juga vital bagi kepentingan nasional Indonesia terutama berkaitan dengan konservasi hutan Indonesia yang sudah semakin berkurang.

Kedua, ada keanggotaan yang kurang begitu berkontribusi bagi kepentingan nasional dan global Indonesia. Sebagai contoh, Islamic Fiqh Academy (IFA) yang didirikan pada 1981 oleh resolusi OKI tidak

termasuk ke dalam agenda prioritas kebijakan luar negeri. Organisasi ini memfokuskan pada kajian hukum syariah Islam dan penerapannya dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai perbankan syariah. Selain itu, International Islamic News Agency (IINA) juga anak organisasi dari OKI yang berfokus pada berita-berita tentang dunia Islam. Ruang lingkup organisasi ini juga tidak masuk kategori agenda prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Organisasi lain yang kurang signifikan kontribusinya bagi Indonesia adalah International Federation of Arts Council and Culture Agencies (IFACCA) karena Indonesia jarang terlibat di dalamnya. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi ini barangkali hanya sekedar formalitas dibandingkan substantif. Contoh satu lagi adalah International Sericultural Commission (ISC) yang berfokus pada pengembangbiakan ulat sutera. Meskipun ini bisa menjadi peluang komoditas bagi ekonomi nasional, urgensitasnya dapat dikatakan kurang dalam menopang ekonomi kerakyatan.

Ketiga, organisasi yang tidak bermanfaat bagi Indonesia. Dari sejumlah organisasi yang diikuti Indonesia, ada sejumlah organisasi internasional yang sudah tidak aktif atau tidak berfungsi. Sebagai contoh, Regional Network for Agriculture Machinery (RNAM) terbukti sudah tidak aktif sejak 2002. Kemudian ASEAN-China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD) yang sebetulnya sangat penting untuk menanggulangi perdagangan narkoba dari China ke Indonesia. Namun, organisasi ini terbukti tidak efektif dan mengalami disfungsi sejak 2015 sehingga tidak berpengaruh terhadap kepentingan Indonesia dalam perang melawan narkoba. Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) juga contoh organisasi yang tidak penting bagi Indonesia karena sudah tidak aktif sejak 1996. Sementara Centre for Alleviation of Poverty through Secondary Crops Development in Asia and the Pacific (CAPSA) tidak aktif sejak 2006. Selain disfungsi, beberapa organisasi internasional yang diikuti Indonesia terbukti tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Misalnya Asia Pacific Association of Forestry Research Institutions, International Federation of Beekeepers' Association (APIMONDIA), dan Wetland International (WI). Sementara Pacific Science Association (PSA) tidak penting karena Indonesia terbukti jarang mengikuti kegiatan-kegiatan (mayoritas seminar, konferensi, dan temu ilmiah) yang diselenggarakan oleh PSA.

Kesimpulannya, organisasi internasional yang diikuti Indonesia, sebagian besar memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Namun, sebagian organisasi itu kurang signifikan pengaruhnya bagi negara khususnya jika dihubungkan dengan prioritas pemerintah yang terkait kebijakan luar negeri. Sebagian kecil organisasi tersebut terbukti sudah tidak berfungsi sehingga keanggotaan Indonesia di dalamnya tidak memberikan dampak apapun bagi negara.

Kurang Optimal dalam Meningkatkan Daya Ungkit (*leverage*) Indonesia di Tingkat Internasional

Mengukur efektivitas keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak cukup hanya melihat pada satu aspek – kepentingan nasional – saja melainkan ada aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu kepentingan global. Mengapa ini penting menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah Indonesia memutuskan keluar atau tidak dalam suatu organisasi internasional?

Paling tidak ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, Indonesia adalah *emerging power* yang peranannya di dunia internasional semakin penting. Indonesia dianggap ‘kekuatan terbesar ketiga di Asia’ (Reid, 2012), ‘Global Swing States’ (Kliman and Fountaine, 2012), ‘kekuatan demokratis yang sedang tumbuh’ (Acharya, 2014), ‘global multilateralist’ (Shekhar, 2014), ‘kekuatan menengah yang sedang bangkit’ (Roberts, Habir and Sebastian, 2015), dan label-label prestisius lainnya. *Kedua*, Indonesia menyandang peran-peran internasional yang membuat Indonesia ikut memikul tanggung jawab global sebagai anggota masyarakat internasional. Peran itu adalah *problem-solver* (ikut memecahkan problem-problem global) dan *peacemaker* (mendorong terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia). Peran sebagai *problem-solver* meliputi beberapa peran yakni *agenda-setter*, *norm-setter*, dan *bridge-builder*. Sebagai kekuatan menengah (*middle power*), kebijakan luar negeri Indonesia tidak boleh hanya terfokus pada kepentingan diri sendiri (*selfish*) melainkan juga ikut aktif menjadi pemecah masalah global.

Masing-masing peran internasional itu merepresentasikan jati diri bangsa Indonesia yang diaktualisasikan dalam kebijakan luar negeri.

Peran sebagai *agenda-setter*, misalnya, merepresentasikan identitas Indonesia sebagai 'negara maritim' atau 'negara kepulauan' karena dengan memainkan peran itu di forum-forum multilateral, Indonesia bisa menyuarakan aspirasinya bahkan mengarahkan isu yang sedang dibahas ke hal-hal menyangkut isu maritim. Sebagaimana diketahui, kerja sama maritim merupakan salah satu agenda prioritas dalam kebijakan luar negeri Jokowi. Sebagai *norm-setter*, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional merepresentasikan identitas sebagai 'negara demokrasi terbesar ketiga' dan 'negara Muslim terbesar di dunia'. Indonesia merupakan contoh kasus unik dimana Islam dan demokrasi mampu hidup berdampingan dengan damai. Dengan identitas ini Indonesia bisa mendorong terciptanya tata kelola hubungan antar negara yang berdasarkan pada aturan dan norma alih-alih kekuatan. Sebagai *bridge-builder*, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional membuka peluang Indonesia untuk menjembatani perbedaan antar anggota yang berbeda kepentingan dan budaya. Hal ini konsisten dengan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ke-bhinneka-an. Terakhir, sebagai *peacemaker*, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional menjadi modal penting untuk mengupayakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Indonesia tentu mampu mengupayakan perdamaian dengan bekerja sendiri (misalnya memediasi dua negara yang berkonflik), akan tetapi dengan menjadi anggota suatu organisasi internasional peran itu relatif lebih efektif karena bisa mempengaruhi negara lain untuk mendukung Indonesia.

Berikut ini adalah contoh-contoh hasil evaluasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional dikaitkan dengan manfaatnya bagi peningkatan peran global Indonesia. Sama seperti skala penilaian di bagian sebelumnya, evaluasi diberi kategori 'bermanfaat', 'kurang bermanfaat', dan 'tidak bermanfaat'.

Pertama, sebagian organisasi internasional yang diikuti Indonesia cukup signifikan dalam mendorong peningkatan peran global Indonesia. Sebagai contoh, seluruh organisasi di bawah naungan PBB khususnya yang mengurus perdamaian di kawasan konflik atau Peacekeeping Operation (PKO) sangat vital bagi upaya Indonesia turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang memberikan landasan konstitusional bagi politik luar negeri Indonesia untuk mengirimkan

pasukan penjaga perdamaian (pasukan Garuda). Hingga hari ini Indonesia berada di peringkat 9 negara kontributor pasukan penjaga perdamaian terbesar dengan jumlah 2,683 personel (United Nations Peacekeeping, tanpa tanggal). Selain itu, organisasi internasional lain yang juga vital bagi saluran Indonesia untuk ikut menjadi “*global problem-solver*” adalah organisasi yang menangani persoalan lingkungan hidup seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer (VC FUND 1030 INS), Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, dan Protokol Kyoto. Kenapa organisasi-organisasi lingkungan hidup ini penting bagi Indonesia? Sebab Indonesia mempunyai kapasitas dan kapabilitas mengambil peran kunci dari negara-negara berkembang karena reputasinya dalam kebijakan deforestasi dan suplai energi, serta kebijakan luar negerinya yang cenderung mengambil jalan tengah antara negara maju dan berkembang (Jotzo dalam Reid, 2012:93). Menurut Verghese (2018), Indonesia adalah contoh terbaik tentang pentingnya aksi menanggulangi dampak negatif dari perubahan iklim karena tingginya tingkat kerawanan Indonesia terhadap bencana alam akibat kerusakan lingkungan.

Kedua, ada organisasi-organisasi yang kurang dapat mendorong aktualisasi Indonesia sebagai *global problem solver*. Organisasi-organisasi yang sangat teknis seperti International Hydrographic Organization (IHO), Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML), International Commission of Large Dams (ICOLD), International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), International Cartographic Association (ICA), International Satellite System for Search and Rescue (COSPAS-SARSAT), dan International Geosphere Biosphere Program (IGBP) agaknya kurang cocok untuk mendorong partisipasi Indonesia di lingkup internasional karena sifatnya yang terlampau teknis dan spesifik. Selain itu, organisasi-organisasi teknis semacam itu lebih bermanfaat dari sisi domestik ketimbang membantu meningkatkan pengaruh Indonesia di level internasional.

Ketiga, organisasi-organisasi yang tidak penting dalam arti bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut tidak berpeluang menyediakan *platform* bagi Indonesia untuk mengaktualisasikan identitasnya sebagai *global problem solver*. Sebagai contoh, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines Facilitation Center (BIMP-FC) tidak relevan untuk kepentingan global Indonesia semata-mata karena cakupannya yang terlampau sempit, bahkan lebih kecil dari ASEAN. Juga, organisasi ini ruang lingkup isunya hanya dalam bidang ekonomi khususnya penyaluran tenaga kerja, barang dan jasa di empat negara tersebut. Organisasi yang berfokus pada hal-hal teknis juga tidak relevan misalnya saja United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) yang berperan sebagai lembaga pelatihan dan penelitian. Selain itu, organisasi yang hirau dengan isu-isu yang terlampau seperti Animal Production and Health Commission for Asia and the Pacific (APHCA) dan bidang pariwisata seperti Pacific Area Travel Association (PATA) dan ASEAN National Tourism Organization (NTO) tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi yang cukup penting bagi peningkatan peran global Indonesia meskipun barangkali bermanfaat dari sisi domestik.

“suatu organisasi internasional dianggap ‘penting’ ditentukan salah satunya oleh kontribusinya terhadap aktualisasi identitas Indonesia sebagai *global problem solver* dan *peacemaker*”

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa kategorisasi apakah suatu organisasi internasional dianggap ‘penting’, ‘kurang penting’, dan ‘tidak penting’ ditentukan salah satunya oleh kontribusinya terhadap aktualisasi identitas Indonesia sebagai *global problem solver* dan *peacemaker*. Sebagian besar organisasi internasional yang berjangkauan global dan primer seperti semua organisasi di bawah naungan PBB, IAEA, UNFCC, ICRC, dan regional seperti ASEAN, IORA sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif Indonesia di level global. Sementara sebagian organisasi internasional yang terlalu berfokus pada hal-hal teknis dan sangat spesifik dapat dianggap ‘kurang penting’ dan ‘tidak penting’ semata-mata karena Indonesia tidak dapat memanfaatkan organisasi itu untuk meningkatkan pengaruhnya di panggung politik internasional.



Menggal Kunci Manfaat Keanggotaan

*B*erbagai permasalahan tentang status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional memancing pertanyaan: mengapa sebagian organisasi-organisasi internasional yang diikuti Indonesia tidak mampu memberikan manfaat bagi Indonesia, baik di tataran domestik maupun internasional? Jawabannya beragam tergantung dari sudut pandang analisisnya.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan tiga sudut pandang yakni sudut pandang eksternal, internal, dan dari negara anggota itu sendiri (Indonesia). *Pertama*, sudut pandang eksternal menyoroti peran dominan negara-negara kuat dalam menentukan efektivitas suatu organisasi internasional. Asumsi dasar pandangan ini adalah semakin besar dominasi negara kuat dalam organisasi internasional, semakin kecil manfaat yang bisa diraih Indonesia dari organisasi tersebut.

Kedua, sudut pandang internal menyoroti kelemahan di level institusional yakni organisasi internasional itu sendiri. Hal ini menyangkut desain kelembagaannya yakni *regime complexity*-nya. Kompleksitas institusi internasional memiliki tiga pola yaitu *parallel*, *overlapping*, dan *nesting*. Ketiganya mempengaruhi efektivitas institusi

internasional tersebut dalam memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan negara anggotanya.

Ketiga, sudut pandang aktor menyoroti kemauan dari negara anggota (Indonesia) dalam keikutsertaannya pada organisasi internasional. Hal ini menyangkut apakah ada kemauan politik (*political will*) dari Indonesia untuk pro-aktif memanfaatkan organisasi tersebut atau tidak. Komitmen suatu negara terhadap organisasi internasional akan menentukan apakah organisasi itu berdampak bagi negara anggota atau tidak.

Faktor Internasional: Hegemoni Negara Kuat

Tidak dapat dipungkiri, hubungan internasional kerap kali didominasi oleh segelintir negara besar. Negara-negara lain seringkali hanya mengikuti aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar itu.

"negara kuat mendominasi sistem internasional sehingga keberadaan organisasi internasional tak lebih dari alat kepentingan bagi negara-negara kuat"

Menurut Waltz (1979:109) bahwa tugas-tugas besar dan penting menyangkut kepentingan global hanya bisa dilakukan oleh negara yang mempunyai kapabilitas besar. Ini artinya, politik internasional seolah-olah hanya menjadi arena permainan negara-negara kuat saja. Negara-negara

lain seolah tidak punya pilihan kecuali menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan negara-negara kuat tersebut.

Hal ini tidak terkecuali berimbas pada keberadaan organisasi internasional. Menurut logika di atas, negara kuat mendominasi sistem internasional sehingga keberadaan organisasi internasional tak lebih dari alat kepentingan bagi negara-negara kuat. Kita ambil contoh misalnya yang paling kentara adalah DK PBB. Lembaga penjamin keamanan internasional ini sejak lama dianggap melambangkan 'aristokrasi global' (Mahubani, 2009:222). Bagaimana tidak, lembaga itu sejak berdirinya pasca Perang Dunia II hingga saat ini masih dikuasai oleh lima negara saja (AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia) atau P5 (lima anggota tetap DK PBB). Keistimewaan yang dimiliki anggota tetap DK PBB dalam

banyak hal kontraproduktif dalam upaya penciptaan stabilitas keamanan internasional. Konflik kepentingan sangat mewarnai mekanisme pengambilan keputusan di lembaga bergengsi ini. Dalam isu konflik Israel-Palestina, misalnya, - dimana Indonesia berkomitmen terhadap kemerdekaan Palestina - AS hampir dipastikan akan selalu menggagalkan resolusi yang condong ke Palestina. Dari tahun 1976 sampai 2006 saja, AS sudah mem-veto 42 resolusi yang kritis kepada Israel (Mearsheimer and Walt, 2007:40). Hal ini jelas menunjukkan kuatnya pengaruh negara besar dalam mengendalikan organisasi internasional.

Selain DK PBB, lembaga internasional lain yang juga melambangkan kekuatan adidaya adalah Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan WTO. Ketiga lembaga itu merupakan 'segitiga kotor' (*unholy trinity*) negara-negara Barat untuk menguasai dunia (lihat misalnya, Peet, 2009). Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan dunia itu pada dasarnya lebih merepresentasikan kepentingan AS dan Inggris untuk merekonstruksi tatanan internasional pasca perang (lihat misalnya, Ikenberry dalam Goldstein and Keohane, 1993; Ikenberry 2001). Salah satu agenda politik negara-negara besar dalam organisasi itu adalah menetapkan aturan main yang dulu begitu terkenal dengan sebutan 'program penyesuaian struktural' (*Structural Adjustment Program*) yang populer pada era Orde Baru. Adanya aturan ini memungkinkan negara-negara besar untuk mengintervensi kebijakan negara-negara berkembang supaya sejalan dengan agenda politik mereka atau sekurang-kurangnya tidak berpotensi menentang Barat.

Meskipun di satu sisi keberadaan ketiga lembaga ini membantu Indonesia terutama dalam hal pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi ujung tombak kebijakan Jokowi, di sisi lain Indonesia tentu harus konformis dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan ketiga lembaga tersebut. Dengan kata lain, jika kebijakan pemerintah Indonesia tidak sejalan dengan visi mereka, maka mustahil ketiga lembaga itu akan bersedia membantu Indonesia. Di sinilah independensi pemerintah Indonesia akan diuji.

Faktor Institusional: Kompleksitas Kelembagaan

Apakah suatu negara memperoleh manfaat dari keanggotaannya pada organisasi internasional juga dipengaruhi oleh faktor internal dari organisasi itu sendiri. Faktor internal yang dimaksud adalah kompleksitas dalam hal desain kelembagaannya. Kompleksitas kelembagaan organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih lembaga internasional bersinggungan

“kompleksitas kelembagaan organisasi internasional menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan efektivitas organisasi tersebut”

dalam hal ruang lingkup dan tujuannya (Betts, 2013:69). Ketika negara memutuskan ikut serta dalam institusi internasional, ia bisa jadi tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah menjadi anggota dari lembaga internasional lain yang memiliki kemiripan dalam hal ruang lingkup kerja sama dan tujuannya. Kompleksitas kelembagaan organisasi internasional menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan efektivitas organisasi tersebut (Alter and Meunier, 2009).

Kompleksitas institusi internasional terbagi menjadi tiga bentuk: *parallel*, *overlapping*, dan *nesting* (lihat Young, 1996; Aggarwal, 1998; Alter and Meunier, 2009). Paralel adalah kondisi dimana dua atau lebih organisasi internasional memiliki ruang lingkup yang berbeda namun tujuannya sama. Hal ini membuat organisasi internasional tersebut saling melengkapi. Contohnya adalah Organisation of Asia Pacific News Agency (OANA) dan International Islamic News Agency (IINA). Sedangkan *overlapping* adalah kondisi dimana ruang lingkup dan tujuan dua atau lebih organisasi internasional saling tumpang-tindih sehingga menyulitkan negara anggota untuk pengambilan keputusannya. Hal ini dikarenakan bisa jadi antara satu organisasi dan organisasi internasional lainnya saling bertolak-belakang. Contohnya adalah Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dan Asian Development Bank (ADB). Keduanya sama-sama berfokus pada pembiayaan pembangunan namun berbeda otoritas dan kewenangannya. Terakhir, *nesting* adalah kondisi dimana satu organisasi internasional berada di bawah payung organisasi lainnya. Jadi ruang lingkungannya lebih sempit dibanding organisasi di atasnya. Contohnya adalah International Research and Training Institute for the

Advancement of Women (INSTRAW) yang berada di bawah United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) dan Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation of OIC (COMSTECH) yang berada di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Dari tipologi kompleksitas institusi internasional di atas, jelas bahwa tipe *overlapping* cenderung berdampak negatif terhadap kebijakan negara anggota. Keanggotaan suatu negara pada banyak institusi internasional yang masih dalam satu ruang lingkup dapat mengurangi efektivitas institusi tersebut. Keterlibatan Indonesia di 233 organisasi internasional berpotensi menciptakan situasi *overlapping* ini. Dari hasil analisis, ditemukan banyak organisasi internasional yang tumpang-tindih ruang lingkungannya. Berikut ini adalah sejumlah organisasi internasional yang saling tumpang tindih:

1. Asian Schools Sports Federation (ASSF) tumpang tindih dengan ASEAN Schools Sports Council (ASSC). Keduanya hanya berbeda dalam hal ruang lingkup kawasannya saja.
2. Southeast Asia Regional Branch of ICA (SARBICA) tumpang tindih dengan Southeast Asia-Pacific Audio-Visual Archives Association (SEAPAVAA) dan International Council on Archives (ICA).
3. International Federation of Social Science Organizations Secretariat Office (IFSSO) tumpang tindih dengan Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC).
4. ASEAN Tourism Association (ASEANTA) tumpang tindih dengan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan Pacific Area Travel Association (PATA).
5. Centre for Science and Technology of Non-Aligned Movement (NAM) tumpang tindih dengan organisasi di bawah naungan OKI Other Developing Countries dan Standing Committee for Scientific and Technological Co-operation of OIC (COMSTECH).
6. Asia and Pacific Seed Association (APSA) tumpang tindih dengan International Seed Testing Association (ISTA).
7. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) tumpang tindih dengan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Keduanya hanya berbeda dalam hal jenis ikan tuna yang menjadi perhatian.

Di samping contoh di atas, masih banyak lagi organisasi internasional yang tumpang tindih yang diikuti oleh Indonesia. Hal ini mengindikasikan paling tidak tiga hal. *Pertama*, pemerintah Indonesia kurang melakukan kajian matang sebelum memutuskan bergabung dalam organisasi tertentu sehingga barangkali pemerintah tidak menyadari sudah ada organisasi serupa yang diikuti. *Kedua*, pemerintah Indonesia kemungkinan mengira dengan mengikuti banyak organisasi internasional akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Pandangan ini sebenarnya tidak salah. Namun sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, tidak semua organisasi internasional bermanfaat. *Ketiga*, terkait dengan politik anggaran. Keterlibatan di banyak organisasi internasional bisa menjadi sumber pendapatan lembaga yang mengikutinya. Sebuah lembaga pemerintah akan mengajukan anggaran untuk masuk menjadi anggota sebuah organisasi internasional. Padahal kenyataannya tidak ada perencanaan yang jelas terkait kegiatan apa yang produktif bagi lembaga tersebut. Hal ini jelas merupakan pemborosan anggaran negara.

Faktor Negara Anggota: Lemahnya Komitmen

Faktor ketiga tidak optimalnya keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional adalah lemahnya komitmen negara dalam mengikuti kegiatan dalam suatu organisasi internasional. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, pemerintah tidak punya cukup sumber daya – terutama anggaran – untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional. *Kedua*, tidak adanya perencanaan yang jelas serta sikap pro-aktif pemerintah dan lembaga pemerintah yang tercatat sebagai anggota pada organisasi internasional tersebut. Dalam konteks ini, mengikuti pelbagai organisasi internasional tak lebih daripada formalitas belaka. Formalitas keanggotaan ini terkadang dipakai sebagai ajang gengsi karena salah satu indikator kinerja sebuah lembaga adalah keterlibatan dalam organisasi internasional.

Jika faktor pertama bersifat teknis-finansial, faktor kedua lebih condong pada keseriusan pemerintah untuk memanfaatkan organisasi internasional demi mendapatkan kepentingan tertentu. Menurut Chayes dan Chayes (1993), suatu negara bersedia mematuhi atau mengikuti aturan dalam institusi internasional karena tiga hal: efisiensi, kepentingan, dan norma. Suatu negara akan aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional manakala dirasa organisasi itu membantu negara anggota dalam menentukan prioritas kebijakan dan proses pengambilan keputusannya. Dengan status keanggotaannya,

“keengganan negara anggota berpartisipasi dalam organisasi internasional karena tidak efisien, tidak ada kepentingan, dan tidak berkomitmen terhadap aspek-aspek normatif hubungan internasional”

suatu negara dapat menghemat biaya perumusan kebijakan karena sudah diambil alih oleh organisasi tempat dia berada. Sebagai contoh, keanggotaan Indonesia dalam United Nations Population Fund (UNFPA) dapat memfasilitasi pemerintah mengenai advokasi, saran kebijakan, dan manajemen pengetahuan mengenai masalah kependudukan sehingga pemerintah tidak perlu repot-repot merumuskan sendiri kebijakannya.

Keaktifan negara anggota juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan; apakah organisasi internasional yang diikuti tersebut benar-benar memberikan keuntungan atau tidak. Meskipun berstatus anggota, terkadang negara baru menyadari bahwa keanggotaannya ternyata tidak mendatangkan keuntungan. Alhasil, negara memilih untuk membiarkan saja status keanggotaannya tanpa tindak lanjut. Analoginya seperti anggota sebuah organisasi yang tidak pernah ikut segala kegiatan yang diadakan karena merasa ia tidak mendapatkan manfaat dari organisasi tersebut sekalipun statusnya masih anggota. Keaktifan Indonesia di banyak organisasi internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih merasa organisasi itu penting bagi pemenuhan kepentingan, baik kepentingan nasional maupun global.

Terakhir, faktor norma juga berperan di balik tingkat keaktifan negara dalam organisasi internasional. Menurut logika ini, suatu negara aktif dalam sebuah organisasi karena merasa itu merupakan hal yang ‘baik’ atau ‘pantas’ untuk dilakukan (lihat misalnya, March and Olsen,

2004). Keikutsertaan dalam organisasi internasional bukan semata-mata karena negara merasa diuntungkan dari keberadaan organisasi itu melainkan karena pertimbangan moral/etis dan sosial. Negara kadangkala menyadari bahwa dirinya adalah anggota masyarakat internasional yang perlu melakukan sesuatu untuk kepentingan umum (*common good*). Sebagai contoh, keterlibatan Indonesia dalam operasi penjagaan perdamaian PBB mencerminkan upaya menunjukkan citra diri Indonesia sebagai “*‘global good Samaritans’, ‘good international citizens’,* atau sebagai anggota grup *‘non-aligned’* dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni *‘great power’,* atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakukan” (Hutabarat, 2015:52). Keterlibatan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim atau UNFCC, misalnya, merupakan “komitmen Indonesia untuk menjadi solusi perubahan iklim” (Kementerian Luar Negeri RI, 2016). Jadi intinya, partisipasi aktif Indonesia dalam pelbagai organisasi internasional salah satunya didorong oleh motivasi etis-normatif.

Ketiga faktor di atas dapat menjelaskan mengapa Indonesia tidak memiliki komitmen terhadap beberapa organisasi internasional yang ia ikuti namun negatif. Jadi, keengganan negara anggota berpartisipasi dalam organisasi internasional bisa jadi karena tidak efisien (dalam arti sumber daya), tidak ada kepentingan yang dapat diraih, dan tidak berkomitmen terhadap aspek-aspek normatif hubungan internasional. Jika diaplikasikan ke dalam kasus Indonesia sekarang ini, maka faktor kepentingan berpengaruh paling signifikan diantara faktor lainnya. Sejalan dengan karakteristik kebijakan luar negeri Jokowi yang mengusung prinsip pragmatisme, keterlibatan internasional harus dibatasi hanya pada organisasi yang benar-benar melayani kepentingan nasional Indonesia. Lebih spesifik, organisasi tersebut haruslah sejalan dengan agenda prioritas yang sudah digariskan dalam nawacita dan tiga prioritas kebijakan luar negeri. Di samping itu, rendahnya partisipasi Indonesia di sejumlah organisasi internasional juga dipengaruhi oleh orientasi politik luar negeri Jokowi yang condong pada isu-isu domestik. Kecondongan ini menguras waktu, pikiran, dan sumber daya pemerintah sehingga pemerintah terkesan mengabaikan arti penting organisasi internasional. Jangankan organisasi-organisasi yang tidak populer di telinga awam, di tingkat ASEAN saja pemerintah saat ini cenderung

kurang bergairah untuk berpartisipasi aktif (lihat misalnya, Shekhar, 2015; Cook, 2016).

Pendekatan Jokowi yang mementingkan bilateralisme ketimbang multilateralisme juga turut andil dalam mengurangi derajat partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional. Berbeda dengan pendahulunya - Susilo Bambang Yudhoyono - yang sangat bersemangat membawa Indonesia di panggung-panggung multilateral, Jokowi tidak terlalu percaya dengan multilateralisme untuk mencapai kepentingan nasional (lihat misalnya, Qin 2015; Willis, 2017). Di banyak forum multilateral, Jokowi justru memanfaatkannya untuk menjajaki kerja sama bilateral dengan negara mitra. Sebagai contoh, selama tahun 2017 saja, Presiden Jokowi sudah berkali-kali melakukan pertemuan bilateral pada saat mengikuti forum-forum multilateral. Pada KTT G20 di Hamburg, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin dari AS, Belanda, Australia, Norwegia, Korea Selatan, Vietnam, dan Kanada. Pada KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski. Di tahun yang sama, pada KTT Asia Timur di Manila, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pada KTT IORA di Jakarta, Jokowi dan Jusuf Kalla mengadakan pertemuan bilateral dengan sembilan kepala negara anggota IORA; Bangladesh, Mozambik, Yaman, Iran, Oman, India, Singapura, Somalia dan Zanzibar. Bilateralisme di satu sisi memiliki dampak positif bagi pencapaian kepentingan nasional. Namun di sisi lain, kebijakan luar negeri yang terlampau pragmatis dapat menggerus kontribusi Indonesia di lingkup global.



Menyeleksi Keanggotaan

*P*ada tulisan sebelumnya telah diuraikan masalah-masalah mendasar keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional dan memahami faktor penyebabnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dari kondisi-kondisi tersebut. Rekomendasi kebijakan ini didasarkan pada kategorisasi organisasi internasional berdasarkan pada analisis evaluatif menggunakan kerangka nawacita, 'Poros Maritim Dunia', dan tiga prioritas kebijakan luar negeri Jokowi. perlu digarisbawahi bahwa karena analisis ini bersifat akademis, maka rekomendasi kebijakan yang diuraikan di sini sangat mungkin berbeda dengan perspektif pemerintah. Pemerintah tetap memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan kebijakan mana yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Opsi Kebijakan 1: Mempertahankan Keanggotaan

Untuk kategori organisasi yang bermanfaat, baik dari segi kesesuaiannya dengan kepentingan nasional – indikatornya program pemerintah, ‘Poros Maritim Dunia’, tiga prioritas kebijakan luar negeri – maupun kepentingan internasional – indikatornya mampu mendorong Indonesia memainkan peran sebagai *global problem solver* – maka disarankan kepada pemerintah untuk mempertahankan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Hal ini tentu sudah dipahami oleh pemerintah.

Opsi Kebijakan 2: Meninjau Ulang Keanggotaan

Untuk organisasi internasional yang kurang bermanfaat, pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan pemerintah melalui dua hal. *Pertama*, pemerintah bisa melakukan analisis SWOT terhadap organisasi tersebut untuk melihat apakah organisasi tersebut lebih banyak manfaatnya ketimbang kerugiannya. *Kedua*, pemerintah bisa melakukan langkah proaktif dengan mendorong organisasi tersebut supaya program-programnya sejalan dengan kepentingan Indonesia. Langkah ini menuntut pemerintah menjadi *agenda-setter* yang dapat menggiring opini dan mengkooptasi negara-negara lainnya untuk sepakat dengan gagasan yang diusulkan Indonesia.

Opsi Kebijakan 3: Keluar dari Organisasi yang Kadaluwarsa

Untuk organisasi internasional yang tidak bermanfaat, terutama karena kadaluwarsa dan lemahnya payung hukum, pemerintah Indonesia sebaiknya keluar dari keanggotaan organisasi tersebut. Keluar dari sebuah organisasi internasional tentu saja sebuah pilihan yang dilematis. Di satu sisi, kebijakan tersebut merupakan langkah efisiensi yang dapat menghemat pengeluaran pemerintah dan merampingkan keanggotaan di forum-forum internasional. Artinya, kebijakan tersebut akan menguntungkan dari segi domestik. Namun di sisi lain, kebijakan itu

mungkin akan merugikan secara internasional karena tidak populer di mata internasional. Dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak punya komitmen terhadap organisasi.

Persepsi negatif dunia internasional ini bisa menjadi bumerang bagi prospek hubungan Indonesia dan negara-negara anggota lain. Bukan tidak mungkin negara lain akan memandang buruk reputasi Indonesia dalam institusi multilateral. Hal ini bisa diantisipasi melalui penguatan diplomasi bilateral dengan negara-negara anggota secara lebih intensif sehingga tidak mengurangi kadar kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

Opsi Kebijakan 4: *Soft Balancing* dan *Hedging*

Mengingat fakta bahwa organisasi internasional besar seperti PBB, APEC, G20, IORA, IMF, WTO, Bank Dunia, OKI, bahkan ASEAN tidak pernah luput dari pengaruh negara-negara besar terutama AS, Rusia, dan China, Indonesia harus berhati-hati supaya tidak terseret arus konflik kepentingan negara-negara kuat tersebut. Prinsip ‘bebas-aktif’ dan ‘mendayung di banyak karang’ harus tetap menjadi pedoman Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara strategi dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena kepentingan nasional kita condong ke salah satu kekuatan besar lantas Indonesia tidak bisa lagi bersikap independen tetapi condong ke negara tersebut (*bandwagon*). Sebaliknya, hegemoni negara besar dalam organisasi internasional yang kita ikuti juga bukan berarti Indonesia harus melawan secara terang-terangan (*balancing*) karena bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Strategi yang dapat dilakukan Indonesia ada dua: *soft balancing* dan *hedging*. Pertama, strategi *soft balancing* dilakukan dengan membentuk koalisi antarnegara namun bersifat non-ofensif untuk meredam ambisi negara kuat dalam suatu organisasi internasional (Paul dalam Paul, Wirtz and Fortmann, 2004:14). Kedua, strategi *hedging* berada di tengah-tengah antara *bandwagoning* (mendukung kepentingan negara kuat) dan *balancing* (menentang negara kuat). Jadi strategi ini mengesankan sikap ambivalen Indonesia di tengah rivalitas negara-negara besar. Tetapi

ambivalensi ini penting supaya Indonesia tidak terseret arus politik negara-negara besar. Strategi *hedging* akan mengurangi resiko buruk akibat kebijakan yang terlalu condong ke negara besar (*bandwagoning*) atau terlalu ofensif kepada negara besar (*balancing*) (Koga, 2017).

Opsi Kebijakan 5: Memilih Salah Satu Organisasi yang Tumpang-Tindih

Terkait dengan organisasi internasional yang *overlapping*, pemerintah Indonesia sebaiknya memilih salah satu organisasi yang memiliki kemiripan fokus/isu. Hal ini penting untuk menghindari inefisiensi terkait anggaran dan efektivitas keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut. Prinsip utamanya adalah penekanan pada kualitas bukan kuantitas. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan *trade-off* dimana mengorbankan salah satu organisasi untuk memaksimalkan perolehan keuntungan dari organisasi lain. Dengan catatan, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kinerja organisasional di tingkat internasional sebagai kompensasi dari keputusan keluar dari organisasi yang dianggap *overlapping* tersebut. Hal ini kembali erat kaitannya dengan komitmen negara anggota untuk memaksimalkan organisasinya.

Opsi Kebijakan 6: Meningkatkan Partisipasi di Tingkat Global

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan partisipasi di tingkat internasional sebagai sarana untuk membangun reputasi (*reputation building*). Hal ini penting sebab tanpa keterlibatan aktif Indonesia di tingkat global, dunia internasional tidak dapat menilai apakah Indonesia mampu memainkan peran sebagai *global problem solver* atau tidak. Keaktifan di tingkat global, terutama menyangkut upaya-upaya memecahkan aneka ragam permasalahan global menjadi semacam *test case* bagi Indonesia. Lagi pula, konstitusi sudah mengamanatkan bahwa Indonesia harus aktif ikut serta dalam upaya penciptaan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak memandang kebijakan internasionalis sebagai antitesis dari kebijakan yang mementingkan domestik.

Sebaliknya, aktivisme politik luar negeri Indonesia adalah kebutuhan sekaligus kewajiban Indonesia baik sebagai aktor internasional maupun anggota masyarakat internasional. Keduanya harus bisa berjalan secara sinergis, seimbang, dan komplementer.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav. 2014. *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapore: World Publishing.
- Aggarwal, Vinod (ed). 1998. *Institutional Designs for A Complex World: Bargaining, Linkages, and Nesting*. Ithaca: Cornell University Press.
- Alter, Karen and Sophie Meunier. 2009. "The Politics of International Regime Complexity." *Perspectives on Politics*, Vol. 7, No. 1, pp. 13-24.
- Betts, Alexander. 2013. "Regime Complexity and International Organizations: UNHCR as a Challenged Institutions." *Global Governance*, Vol. 19, No. 1, pp. 69-81.
- Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes. 1993. "On Compliance." *International Organization*, Vol. 47, No. 2, pp. 175-205.
- CNN Indonesia. 2016. "RI pertimbangkan keluar dari enam organisasi internasional." 23 Desember. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161223141741-106-181763/ri-pertimbangkan-keluar-dari-enam-organisasi-internasional>, diakses 6 November 2018.
- Cook, Malcolm. 2016. "Duterte, Jokowi, and ASEAN." *ISEAS Commentary*, 10 Mei. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/3072-duterte-jokowi-and-asean>, diakses 8 November 2018.
- Hutabarat, Leonard. 2015. "Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 11, No. 1, pp. 47-65.
- Ikenberry, G. John. 1993. "Creating a Yesterday's New World Order: Keynesian 'New Thinking' and the Anglo-American Postwar Settlement." Dalam Judith Goldstein and Robert Keohane (eds), *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Ithaca: Cornell University Press. pp. 57-86.
- Ikenberry, G. John. 2001. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jotzo, Frank. 2012. "Can Indonesia Lead on Climate Change?" Dalam Anthony Reid (ed), *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore: ISEAS. pp. 92-115.

- Kementerian Luar Negeri RI. 2016. "Perubahan Iklim." 6 Januari. Tersedia di: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx>, diakses 8 November 2018.
- Kliman, Daniel and Richard Fountain (2012) *Global Swing States: Brazil, India, Indonesia, Turkey, and the Future of International Order*. Washington, DC: German Marshall Fund.
- Koga, Kei. 2017. "The Concept of 'Hedging' Revisited: The Case of Japan's Foreign Policy Strategy in East Asia's Power Shift." *International Studies Review* (2017), DOI: <https://doi.org/10.1093/isr/vix059>
- Kompas. 2016. "Penghematan, Indonesia evaluasi keikutsertaan di 75 organisasi internasional." 22 Desember. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/19061391/penghematan.indonesia.evaluasi.keikutsertaan.di.75.organisasi.internasional>, diakses 6 November 2018.
- Mahbubani, Kishore. 2009. *Can Asian Think?* Singapore: Marshall Cavendish International.
- March, James and Johan Olsen. 2004. "The Logic of Appropriateness." *ARENA Working Paper* 04/09.
- Mearsheimer, John and Stephen Walt. 2007. *The Israel Lobby and US Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Paul, T.V. 2004. "Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance." Dalam T.V. Paul, James Wirtz, and Michael Fortmann (eds), *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford, CA: University of California Press. pp. 1-25.
- Peet, Richard. 2009. *Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO*. London: Zed Book.
- Qin, Sophie. 2015. "A Retreat from multilateralism: foreign policy restructuring under Joko Widodo." *Australian Outlook*, 23 Desember. Tersedia di: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/a-retreat-from-multilateralism-foreign-policy-restructuring-under-jokowi/>, diakses 8 November 2018
- Reid, Anthony (ed). 2012. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore: ISEAS.
- Roberts, Christopher, Ahmad Habir, and Leonard Sebastian (eds). 2015. *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and Regional Order*. New York: Palgrave Macmillan.

- Sekretariat Kabinet RI. 2015. "Inilah prioritas politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan." 8 Januari. Tersedia di: <http://setkab.go.id/inilah-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan/>, diakses 7 November 2018.
- Sekretariat Kabinet RI. 2016. "Presiden minta keanggotaan Indonesia di 233 organisasi internasional dievaluasi." 22 Desember. Tersedia di: <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-keanggotaan-indonesia-di-233-organisasi-internasional-dievaluasi/>, diakses 6 November 2018.
- Shekar, Vibhanshu. 2014. *Indonesia's Rise: Seeking Regional and Global Roles*. New Delhi: ICWA.
- Shekhar, Vibhanshu. 2015. "Realist Indonesia's Drift Away from ASEAN." *Asia Pacific Bulletin*, No. 323, 30 September.
- United Nations Peacekeeping. Tanpa tanggal. "Troops and Police Contributors". Tersedia di: <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>, diakses 8 November 2018.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Widodo, Joko dan Jusuf Kalla. 2014. *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Willis, David. 2017. "Indonesia's Choice: Not the Indian Ocean, but Bilateralism." *The Diplomat*, 14 Maret. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2017/03/indonesias-choice-not-the-indian-ocean-but-bilateralism/>, diakses 8 November 2018.
- Young, Oran. 1996. "Institutional Linkages in International Society: Polar Perspectives." *Global Governance*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-23.

Bagian Dua



Melangkah Maju Bersama Untuk Bersaing Di Tingkat ASEAN

Penguatan Sekretariat Nasional
ASEAN – Indonesia

Astri Kusuma Mayasari
Vallisa Aulia Rahmi
Dizar Ramadhan Sabana



Ringkasan Eksekutif

Sejak didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) telah mengalami perubahan dan perkembangan menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan. Hal ini dituangkan melalui dokumen Visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama dan Cetak Biru ASEAN 2025 yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. ASEAN juga merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Perlu adanya peningkatan peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui berbagai strategi.³ Untuk mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan terkait ASEAN di Indonesia, telah dibentuk Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN–Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – Indonesia.

Pembentukan Setnas ASEAN–Indonesia merupakan mandat dari Piagam ASEAN pasal 13 mengenai kewajiban membentuk Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota.⁴ Dalam hal ini, Setnas ASEAN–Indonesia bertugas sebagai pimpinan kegiatan pada tingkat nasional, menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional, mengoordinasikan dan mendukung persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN, memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional, dan berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN.⁵ Setnas ASEAN–Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dimana sebanyak 92 Pejabat Eselon I dari 48 Kementerian dan Lembaga merupakan anggotanya.

Pada tahun 2019 Setnas ASEAN–Indonesia menginisiasi dilakukannya revisi Keppres No.23 Tahun 2012, dengan tujuan utama memperkuat Setnas ASEAN–Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa kondisi di lapangan yang belum terakomodasi dalam Keppres tersebut.⁶ Terlebih dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang menghambat kinerja Setnas ASEAN–Indonesia dalam mengoordinasikan kegiatan ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi terkini peran Setnas ASEAN–Indonesia dan memformulasikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan fungsi koordinasi oleh Setnas ASEAN–Indonesia. Tulisan ini akan fokus pada perumusan mekanisme koordinasi Setnas ASEAN–Indonesia dan penyusunan rencana kerja Setnas ASEAN–Indonesia mengikuti dokumen Visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama agar Indonesia dapat bersaing di tingkat ASEAN.

³ RPJMN 2015-2019, Bappenas, Hal. 6-8, <http://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50077>

⁴ ASEAN Charter, Pasal 13, Hal.11 <http://www.asean.org/storage/images/archive/AC-Indonesia.pdf>

⁵ Setnas ASEAN-Indonesia, <http://setnas-asean.id/tentang-kami>, Pada 10 Agustus 2018

⁶ Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* Penguatan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 18 September 2018




Komitmen Indonesia di ASEAN (Sebuah Tinjauan Pustaka)

*K*ajian akademis mengenai ASEAN telah banyak diterbitkan oleh berbagai pihak. Aspek yang dibahas pun beragam, mulai dari kerangka institusional umum ASEAN hingga implementasi kebijakan spesifik ASEAN di suatu negara. Tulisan ini membahas penguatan Setnas ASEAN Indonesia yang bertugas mengoordinasikan kegiatan ASEAN di tingkat nasional. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan membahas tulisan yang mengkaji implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN. Tinjauan pustaka akan terbagi dalam dua bagian, yakni pembahasan literatur yang mengkaji implementasi umum Cetak Biru ASEAN/Komunitas dan literatur yang mengkaji posisi atau kebijakan Indonesia di ASEAN. Literatur yang digunakan di sini adalah kajian akademis yang telah melalui *peer reviewed* atau tulisan yang dirilis institusi pemerintah.

Kajian akademis yang membahas prospek Komunitas ASEAN secara umum banyak terbit pada 2008-2010 seiring dengan mulai berlakunya Piagam ASEAN pada Desember 2008. Kajian-kajian akademis yang terbit selanjutnya cenderung berfokus pada isu spesifik dalam konteks negara tertentu. Selain itu, terdapat dua orientasi tulisan-tulisan yang membahas prospek Komunitas ASEAN, yakni kepada hasil dan proses. Kelompok yang berorientasi kepada hasil cenderung skeptis terhadap Komunitas

ASEAN. Di sisi lain, kelompok yang berorientasi pada proses cenderung tidak menjadikan pencapaian hasil sebagai tujuan utama dan lebih memperhatikan pembangunan institusi/komunitas yang terjadi di dalamnya. Pembahasan lebih lanjut terkait hal ini dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini.

Akademisi yang berorientasi kepada hasil cenderung skeptis terhadap pencapaian tujuan-tujuan ASEAN di tingkat nasional. Beberapa akademisi yang secara eksplisit menyatakan implementasi Komunitas ASEAN tidak akan optimal adalah Shaun Narine, Anja Jetschke, dan Jurgen Ruland. Narine menyatakan bahwa visi yang tertuang dalam Piagam ASEAN lebih besar dari apa yang negara anggotanya dapat tangani. Pembentukan komunitas regional membutuhkan suatu persepsi kepentingan bersama yang kuat. Akan tetapi, negara-negara ASEAN cenderung masih mengedepankan prinsip kedaulatan dibanding mengejar potensi keuntungan yang dapat diperoleh dengan mendukung ASEAN.⁷ Argumen serupa disampaikan oleh Anja Jetschke dan Jurgen Ruland. Mereka menyatakan tujuan-tujuan ASEAN hanya akan berlangsung di tataran retorik karena tidak disertai dengan perubahan praktik-praktik pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional.⁸ Mereka melihat bahwa upaya integrasi nilai-nilai ASEAN di tingkat nasional cenderung berhenti di tahap lokalisasi norma dan tidak berlanjut pada tahap implementasi menyeluruh.⁹ Berbagai kondisi ini pun membuat implementasi komunitas ASEAN tidak akan berjalan optimal.



“pembentukan komunitas regional membutuhkan suatu persepsi kepentingan bersama yang kuat”

Sudut pandang berbeda terhadap Komunitas ASEAN ditawarkan oleh akademisi seperti Mie Oba dan Michael Heng. Mereka mengakui pencapaian Visi Komunitas ASEAN sulit berjalan optimal tetapi mereka melihat bahwa terdapat dampak-dampak positif yang muncul dengan kehadiran visi tersebut. Mie Oba menyatakan bahwa upaya pencapaian

⁷ Shaun Narine, “ASEAN in the Twenty-First Century: A Sceptical Review” *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 22, No. 3 (2009): 369.

⁸ Anja Jetschke dan Jurgen Ruland, “Decoupling Rhetoric and Practice: The Cultural Limits of ASEAN Cooperation” *The Pacific Review*, Vol. 22, No. 2 (2009): 179-180.

⁹ *Ibid.*, 184

Komunitas ASEAN tidak boleh diremehkan meskipun efektivitasnya masih dipertanyakan. Interaksi dalam pencapaian Komunitas ASEAN sebenarnya telah meningkatkan rasa kebersamaan antar pihak-pihak terkait. Menurut Mie Oba proses ini penting dalam pembangunan suatu komunitas regional yang utuh.¹⁰ Kemudian, Katja Freistein melalui kajiannya menyatakan bahwa hanya sebagian kecil norma-norma ASEAN berhasil diintegrasikan dalam hukum nasional. Meskipun demikian, Freistein tidak melihat kondisi ini sebagai suatu kegagalan penuh karena kondisi ini menciptakan suatu arena pertukaran wacana berkelanjutan yang mendukung pembangunan regionalisme. Dalam persepsi Freistein, pertukaran wacana dapat mematangkan orientasi suatu institusi ke arah yang lebih baik, terutama dalam merespons dinamika sosial-politik di sekelilingnya.¹¹

Pembahasan implementasi Cetak Biru ASEAN tidak terlepas dari pilar-pilar Komunitas ASEAN, terdiri dari politik-keamanan, ekonomi serta sosial-budaya. Literatur yang mengkaji implementasi Cetak Biru ASEAN pada konteks negara tertentu umumnya fokus pelaksanaan kebijakan di salah satu pilar di atas. Selanjutnya akan dijabarkan beberapa literatur terkait pelaksanaan Cetak Biru ASEAN di Indonesia pada masing-masing pilar.

Pada literatur yang mengkaji pelaksanaan komitmen Indonesia di pilar politik-keamanan, tema dominan yang muncul adalah kepemimpinan Indonesia di kawasan. Banyak akademisi menyepakati bahwa Indonesia secara alamiah merupakan pemimpin ASEAN. Bahkan, Donald Emmerson secara tegas menyatakan tanpa inisiatif Indonesia ASEAN tidak akan bertahan dan Asia Tenggara tidak akan stabil seperti saat ini.¹² Argumen ini didukung oleh Rattanasevee yang menyatakan bahwa dalam ASEAN terdapat pola kepemimpinan tidak terlihat yang digerakkan oleh Indonesia. Secara resmi kepemimpinan ASEAN terus berganti secara periodik tetapi berbagai inisiatif yang dikeluarkan

¹⁰ Mie Oba, "ASEAN and the Creation of a Regional Community" *Asia-Pacific Review* (2014): 63

¹¹ Katja Freistein, "A Living Document: Promises of the ASEAN Charter" *The Pacific Review*, Vol. 26, No. 4 (2013): 424

¹² Donald K Emmerson, "Is Indonesia Rising? It Depends" dalam *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*, diedit oleh Anthony Reid (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies): 73-74.

Indonesia, khususnya di sektor politik, membuatnya diakui sebagai pemimpin *de facto* ASEAN.¹³ Namun, terdapat akademisi yang melihat bahwa kepemimpinan Indonesia hanya kuat di sektor politik-keamanan saja. Kepemimpinan Indonesia di sini terlihat dari keberhasilannya bertindak sebagai stabilisator konflik di kawasan, seperti isu Laut China Selatan dan konflik Thailand-Kamboja 2011. Akan tetapi, Emmers melihat bahwa di sektor ekonomi dan sosial-budaya kepemimpinan Indonesia belum kuat.¹⁴

Argumen belum kuatnya posisi di sektor ekonomi dan sosial-budaya diamini oleh beberapa akademisi yang mengkaji implementasi Cetak Biru ASEAN. Tema umum pada literatur yang membahas implementasi pilar ekonomi dan sosial-budaya di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi Pemerintah dalam perumusan kebijakan ASEAN. Pada sektor ekonomi, Jurgen Ruland menyatakan bahwa sektor bisnis Indonesia sebenarnya belum siap menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN. Perumusan kebijakan terkait Komunitas Ekonomi ASEAN sering kali tidak melibatkan kelompok UMKM. Padahal, sektor ini menerima dampak terbesar setelah Komunitas Ekonomi ASEAN terbentuk. Kondisi ini terjadi karena Indonesia belum mampu mengoordinasikan kebijakan ASEAN kepada seluruh *stakeholders* sehingga kebijakan yang terbentuk cenderung mewakili sebagian kecil golongan.¹⁵ Di sektor sosial-budaya, Quayle membahas belum mampunya pemerintah memenuhi berbagai komitmen regional. Quayle menggunakan konteks isu kabut asap dalam menjelaskan hal ini. Quayle menyatakan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi komitmen regional karena kondisi politik domestik yang tidak mendukung. Belum ada keseragaman posisi di Pemerintah dalam merespons isu kabut asap. Kondisi ini diperparah dengan adanya lobi-lobi politik dari perusahaan

¹³ Pattharapon Rattanaseeve, "Leadership in ASEAN: The Role of Indonesia Reconsidered" *Asian Journal of Political Science*, Vol. 22, No. 2 (2014): 123.

¹⁴ Ralf Emmers, "Indonesia's Role in ASEAN: A Case of Incomplete and Sectoral Leadership" *The Pacific Review*, Vol. 27, No. 4 (2014): 557-558

¹⁵ Jurgen Ruland, "Why (most) Indonesian Businesses Fear the ASEAN Economic Community: Struggling with Southeast Asia's Regional Corporatism" *Third World Quarterly*, Vol.37, No. 6 (2016): 1140

kelapa sawit yang membuat proses pemenuhan komitmen pun terhambat.¹⁶

Secara kelembagaan koordinasi seluruh kebijakan ASEAN di Indonesia dilakukan oleh Setnas ASEAN-Indonesia. Meskipun badan ini memiliki peranan penting ternyata belum ada kajian akademis *peer reviewed* yang khusus menjelaskan operasional Setnas ASEAN-Indonesia. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan menggunakan kajian yang dirilis institusi Pemerintah untuk menjelaskan hal tersebut. Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 merilis kajian mengenai Reviu Kelembagaan Kesiapan ASEAN dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015. Dalam kajian ini dinyatakan koordinasi yang dilakukan dalam menyambut Masyarakat ASEAN belum optimal. Terdapat tiga masalah yang dihadapi Setnas ASEAN dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut. *Pertama*, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki masalah garis koordinasi kelembagaan. Berdasarkan Keppres Nomor 23 Tahun 2012 koordinator Setnas adalah Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Hal ini menjadi permasalahan karena secara kelembagaan negara seharusnya posisi Kementerian Koordinator berada di atas K/L sektoral.¹⁷ *Kedua*, Setnas memiliki masalah Sumber Daya Manusia. Lembaga ini hanya dikerjakan oleh beberapa orang dan sering kali masih memiliki tanggung jawab pekerjaan di sektor lainnya.¹⁸ *Ketiga*, Setnas memiliki anggaran yang terbatas untuk menjalankan operasionalnya selama setahun. Padahal, Setnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pumpunan kegiatan ASEAN di tingkat nasional. Anggaran ini tidak cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Pada akhirnya, anggaran Setnas ASEAN pun lebih banyak terserap untuk menghadiri sidang-sidang ASEAN.¹⁹

¹⁶ Linda Quayle, "National and Regional Obligations, the Metaphor of Two-Level Games, and the ASEAN Socio-Cultural Community" *Asian Politics & Policy*, Vol. 5, No. 4: 510-511

¹⁷ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, "Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015" *Kementerian PPN/Bappenas* (2015): 14

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, 14-15



Makna Institusional dalam Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia

Tulisan ini akan menggunakan teori institusional dalam menggambarkan fungsi dan tugas Setnas ASEAN-Indonesia saat ini. Menurut William Richard Scott, belum ada definisi universal mengenai institusi. Namun Scott berpendapat bahwa institusi merupakan struktur sosial yang mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat akan perubahan, dimana elemen-elemen tersebut secara bersama-sama akan memengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial.²⁰ Scott menjelaskan bahwa teori institusional menekankan adanya *rational myths*, *isomorphism*, dan legitimasi.²¹ Perspektif lain juga dikemukakan oleh Di Maggio dan Powell yang mengatakan bahwa institusi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka, dimana ide-ide yang berpengaruh akan diinstitutionalkan dan dianggap sah, serta diterima sebagai cara berpikir

²⁰ Scott, *Institutions and organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage, (2008), hal.33

²¹ *Ibid.*

institusi tersebut.²² Di Maggio dan Powel juga menjelaskan bahwa institusi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial. Penyesuaian pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan institusi untuk memisahkan kegiatan internal dan berfokus pada pihak eksternal. Meyer dan Rowan kemudian menjelaskan bahwa banyak posisi, kebijakan, program serta prosedur internal sebuah institusi dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan melalui sistem pendidikan, prestise sosial, dan hukum.²³ Hal ini kemudian akan membuat sebuah institusi menyesuaikan diri dengan harapan eksternal untuk mempertahankan eksistensi serta legitimasinya. Meyer dan Rowan menjelaskan bahwa teori institusional dapat menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan.

Selanjutnya tulisan Amenta dan Ramsey digunakan untuk membandingkan konsep *sociological institutionalism*, *historical*

“konsep *political institutionalist* dapat menggambarkan peran penting Setnas ASEAN-Indonesia sebagai institusi negara yang bertugas untuk mengoordinasikan strategi atau kebijakan terkait ASEAN oleh Pemerintah Indonesia”

institutionalism dan *political institutionalism*. Amenta dan Ramsey menjelaskan bahwa ketiga klaim mengenai teori institusional tersebut memiliki kesamaan yakni bahwa sesuatu hal yang diidentifikasi di level tertinggi akan digunakan dalam menjelaskan proses serta hasil analisis di

tingkatan yang lebih rendah.²⁴ Namun, ketiga konsep institusionalisme tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam menentukan *higher-order*

²² Lynne G. Zucker, “Institutional Theories of Organization,” *Annual Review of Sociology*, Vol.13 (1987), hal. 444

²³ John W. Meyer and Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony,” *American Journal of Sociology*, Vol.83, No.2, (Sep, 1997), hal. 343

²⁴ Edwin Amenta and Kelly M. Ramsey, “Institutional Theory,” hal.15

determinants dan perbedaan mengenai bagaimana hal-hal tersebut berhubungan secara kausal.²⁵ Disebutkan bahwa *sociological institutionalist* lebih berfokus di level *supra-societal* atau *supra-state*, sedangkan *historical institutionalist* berfokus pada level makropolitik atau makroekonomik. Di lain sisi, *political institutionalist* biasanya menempatkan klaim mereka di level makropolitik atau negara, dan menekankan pada adanya proses pembentukan sistem di level tersebut yang dapat memengaruhi proses politik dan hasilnya. Dari ketiga konsep tersebut, tulisan ini akan menggunakan pendekatan *political institutionalist* untuk menganalisa situasi Setnas ASEAN-Indonesia.

Dijelaskan bahwa *political institutionalist* berargumen bahwa institusi politik di level nasional dapat bertindak sebagai penengah di antara aktor politik domestik dan global.²⁶ *Political institutionalism* merupakan salah satu teori institusional yang menekankan adanya *power* sebuah negara secara eksplisit dan menekankan peran kausal suatu institusi politik dalam proses serta hasil terkait isu politik.²⁷ Konsep ini lebih berfokus pada sistem dan struktur suatu negara dalam menghasilkan argumen-argumen kausal, seperti pembentukan identitas politik, kepentingan, dan strategi terkait institusi politik.²⁸ Mengenai keterkaitannya dengan Setnas ASEAN-Indonesia, dapat terlihat bahwa konsep *political institutionalist* dapat menggambarkan peran penting Setnas ASEAN-Indonesia sebagai institusi negara yang bertugas untuk mengoordinasikan strategi atau kebijakan terkait ASEAN oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, untuk melihat keefektifan fungsi tugas Setnas ASEAN-Indonesia, tulisan ini akan mengacu pada tulisan Kaewkamol Pitakdumrongkit mengenai permasalahan sistem tata kelola atau pemerintahan dalam kerangka ASEAN *Economic Community*. Pitakdumrongkit berargumen bahwa terdapat efektivitas suatu institusi merupakan hasil dari interaksi antara fungsi institusional dan prinsip tata kelola aktor tersebut. Oleh karena itu fungsi institusional dan prinsip tata kelola suatu aktor merupakan variabel yang memengaruhi satu sama

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 16

²⁷ *Ibid.*, 33

²⁸ *Ibid.*,

lain.²⁹ Dalam hal ini, yang dimaksud fungsi institusional adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh entitas atau institusi tersebut. Secara khusus, efektivitas institusional bergantung pada tingkat kompatibilitas antara fungsi institusi tersebut dan prinsip-prinsip tata kelola yang diadopsi oleh para pemangku kepentingan.³⁰ Hal ini mengindikasikan, apabila tugas dan fungsi sebuah institusi bertentangan dengan prinsip tata kelola, maka tingkat kapabilitas dan kepatuhan institusi tersebut cenderung rendah dan tidak efektif. Mengacu pada pemahaman tersebut, tulisan ini kemudian akan mencari tahu apakah tugas serta fungsi Setnas ASEAN-Indonesia sudah efektif atau belum.

²⁹ Kaewkamol Pitakdumrongkit, "Beyond the Secretariat: Addressing Governance Issues in ASEAN Economic Community," *The Singapore Economic Review*, Vol.62, No.3, (2017), hal.743

³⁰ *Ibid.*,



Selayang Pandang: Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia

*A*SEAN merupakan soko guru dan lingkaran konsentris terdekat politik luar negeri Indonesia yang sudah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN Charter).³¹ Undang-Undang ini merupakan bentuk legitimasi Indonesia dalam meratifikasi piagam ASEAN, dimana piagam ASEAN ini bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum kuat, dengan aturan jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ASEAN yang disepakati pada tahun 2007, dalam Pasal 13 mengamanatkan bahwa setiap negara anggota ASEAN wajib memiliki sebuah Sekretariat Nasional (Setnas). Setnas ASEAN-Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia. Tugas dan fungsi Setnas ASEAN-Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pempunan kegiatan pada tingkat nasional;
2. Sebagai penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;

³¹ Terlampir dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN Charter)

4. Mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan- pertemuan ASEAN;
5. Memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional;
6. Berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN.

Dalam rangka implementasi lebih lanjut, Menteri Luar Negeri kemudian menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.2 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN adalah koordinator Setnas ASEAN-Indonesia. Oleh karena itu Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga pada Setnas ASEAN-Indonesia. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia berjumlah 92 pejabat Eselon I dari 48 kementerian dan lembaga, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia pada tingkat nasional, penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional, keputusan ASEAN pada tingkat nasional, persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN, dan kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Setnas ASEAN-Indonesia dibagi ke dalam tiga pilar komunitas ASEAN, yakni Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

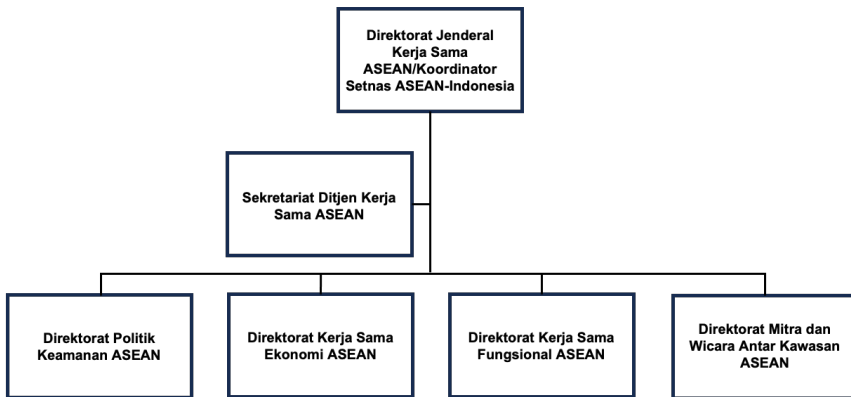
Sebagai pempunan kegiatan pada tingkat nasional, Setnas ASEAN-Indonesia bertugas melakukan pertemuan rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.³² Pertemuan ini diadakan untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN. Berdasarkan rewi kelembagaan Bappenas terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ASEAN 2015 pada tahun 2016, sebagai koordinator, Setnas ASEAN-Indonesia dapat mendelegasikan kewenangannya pada penanggung jawab pilar.³³ Setiap

³² Presiden Republik Indonesia, Keppres No.23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN- Indonesia, bagian Keenam.

³³ Bappenas, Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2016, diakses pada 19 Agustus 2018, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf)

pilar Masyarakat ASEAN memiliki penanggung jawab, wakil penanggung jawab, dan sekretaris masing-masing, yang dipilih oleh anggota Setnas ASEAN-Indonesia pada pilar terkait untuk membantu Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian masing-masing pilar.³⁴

Struktur Organisasi Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia



Penanggung Jawab Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN adalah Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Penanggung Jawab Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Deputy VI Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Sedangkan penanggung jawab Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.³⁵ Berdasarkan rewiu kelembagaan tahun 2016, tiap-tiap badan sektoral dari masing-masing pilar juga memiliki *focal point* masing-masing, seperti³⁶ :

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

No	Badan Sektoral Masyarakat Politik Keamanan	Focal Point
ASEAN Political-Security Community Council		Kemenko Polhukam
1	ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)	Kemenlu
2	ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)	Kemhan
3	ASEAN Regional Forum (ARF)	Kemenlu
4	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)	Polri dan Kemenlu
5	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)	Perwakilan negara
6	ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)	Kemenkumham
7	Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)	Kemenlu
ASEAN Economic Community Council		Kemenko Perekonomian
1	ASEAN Economic Ministers (AEM)	Kemendag
2	ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council)	Kemendag
3	ASEAN Investment Area Council (AIA Council)	BKPM dan Kemendag
4	ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)	Kemenkeu
5	ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF)	Kementan
6	ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)	KemenESDM
7	ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)	KemenESDM
8	ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST)	Kemenristekdikti
9	ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN)	Kemenkominfo
10	ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)	Kemenhub
11	ASEAN Tourism Ministers Meeting (M-ATM)	Kemenpar
12	ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC)	-
ASEAN Socio-Cultural Community Council		Kemenko PMK
1	Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD)	Kemensos
2	Senior Officials Meeting Responsible for Culture and Arts (SOMCA)	Kemendikbud
3	Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED)	Kemendikbud
4	ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)	KLH
5	ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)	BNPB
6	Senior Officials Meeting on Health (SOMHD)	Kemenkes
7	Senior Labour Officials Meeting (SLOM)	Kemenaker
8	Senior Officials Meeting Responsible for Information	Kemenkominfo

No	Badan Sektoral Masyarakat Politik Keamanan	Focal Point
	(SOMRI)	
9	<i>ASEAN Commission on the Promotion & Protection of the Rights of Women & Children (ACWC)</i>	Kemen PP & PA
10	<i>ASEAN Committee on Women (ACW)</i>	Kemen PP & PA
11	<i>Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE)</i>	Kemenko PMK
12	<i>Senior Officials Meeting on Youth (SOMY)</i>	Kemenpora
13	<i>ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS)</i>	Kemenpora
14	<i>Asean Committee on Science and Technology (COST)</i>	KemristekDikti
15	<i>ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)</i>	BKN
16	<i>ASEAN Senior Officials on Drug Matters (SODM)</i>	BNN



Tantangan dan Hambatan yang Menghadang Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setnas ASEAN-Indonesia dihadapkan dengan berbagai kendala. Tantangan dan hambatan utama yang dihadapi Setnas ASEAN-Indonesia selama ini adalah membumikan ASEAN dan permasalahan koordinasi.³⁷ Membumikan ASEAN sampai saat ini masih menjadi tantangan karena masih banyak pihak yang belum memahami berbagai manfaat yang ditawarkan ASEAN. Sedangkan permasalahan koordinasi, baik dalam tahapan penjangkaran masukan untuk penyusunan kebijakan maupun implementasi kegiatan ASEAN sering kali tidak maksimal.

Membumikan ASEAN masih menjadi permasalahan terbesar dalam Setnas ASEAN-Indonesia. Keberadaan ASEAN di Indonesia selama ini sering kali terdengar, namun kehadirannya masih belum terasa di Indonesia.³⁸ Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melakukan serangkaian diseminasi untuk membumikan ASEAN, namun pelaksanaan diseminasi ini sering kali berbenturan dengan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri. Hal ini memperlihatkan dibutuhkan koordinasi pelaksanaan

³⁷ Disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN dalam *Focus Group Discussion* Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia, 18 September 2018.

³⁸ *Ibid.*, disampaikan oleh Perwakilan Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

diseminasi informasi kegiatan terkait ASEAN. Adanya koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi ini diharapkan dapat membuat masyarakat luas semakin paham mengenai manfaat ASEAN untuk Indonesia.

Terkait koordinasi, Setnas ASEAN-Indonesia sebenarnya telah menyampaikan seluruh kesepakatan ASEAN kepada seluruh *stakeholders* terkait. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi hambatan, hal ini dikarenakan tidak ada masing-masing K/L menjalankan kegiatan ASEAN tersebut secara sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengoordinasikan seluruh kegiatan tersebut.³⁹ Diakui bahwa sedikitnya personil yang bertugas menjalankan operasional keseharian Setnas ASEAN-Indonesia telah membuat koordinasi tidak maksimal. Saat ini koordinasi Setnas ASEAN-Indonesia berada di bawah kewenangan bagian Kerja Sama Antar Lembaga Sedtitjen ASEAN yang ditangani secara khusus oleh satu Diplomat Madya dan tiga Diplomat Muda.⁴⁰

Tidak hanya masalah koordinasi, Setnas ASEAN-Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan pengawalan terhadap implementasi kegiatan K/L tersebut. Selama ini pelaksanaan kegiatan terkait ASEAN cenderung fokus pada perundingan, sedangkan aspek implementasi cenderung terabaikan.⁴¹ Saat ini, Keppres No.23 Tahun 2012 belum mengakomodasi pelaksanaan *monitoring* dan *evaluation* kegiatan ASEAN di berbagai K/L, sehingga Setnas ASEAN-Indonesia memang tidak memiliki kewenangan untuk memonitor berbagai kegiatan terkait ASEAN yang dilaksanakan seluruh K/L.

Permasalahan utama terkait Setnas ASEAN-Indonesia sebenarnya terletak pada garis koordinasi kelembagaan.⁴² Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia, menurut Keppres Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, adalah

³⁹ *Ibid.*, disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

⁴⁰ *Ibid.*, disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Bappenas, Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2016, diakses pada 19 Agustus 2018, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf)

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan Presiden. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia membawahi tiga Penanggung Jawab Pilar, yaitu Kemenko Polhukam untuk pilar politik-keamanan, Kemenko Perekonomian untuk pilar ekonomi, dan Kemenko PMK untuk pilar sosial-budaya. Secara kelembagaan negara, seharusnya posisi Kementerian Koordinator berada di atas K/L sektoral. Akan tetapi, dalam Setnas ASEAN-Indonesia posisi Kementerian Koordinator berada di bawah K/L sektoral, yaitu Kementerian Luar Negeri yang pada dasarnya berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.



Komitmen Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dalam Mengimplementasi Pilar ASEAN

*S*una mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, Setnas ASEAN-Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan revitalisasi Pusat Studi ASEAN (PSA) yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Setnas untuk mendiseminasikan berbagai informasi terkait ASEAN ke berbagai daerah.⁴³ PSA dalam hal ini juga diharapkan secara aktif memberikan masukan substantif dalam berbagai perumusan kebijakan terkait ASEAN. Keberadaan PSA ini merupakan bentuk nyata dari fungsi Setnas.

Pusat Studi ASEAN didirikan untuk mengembangkan kapasitas institusional sehingga dapat meningkatkan pengembangan institusional dan kapasitas lokal dalam memenuhi proses regionalisasi ASEAN.

“Pusat Studi ASEAN menjadi wadah pengembangan kapasitas institusional untuk memenuhi proses regionalisasi ASEAN”

Melalui riset, konferensi, konsultasi, dan publikasi, PSA mencoba untuk menggambarkan cara-cara dalam mempromosikan tujuan ASEAN, yakni solidaritas politik, integrasi ekonomi, dan

⁴³ Disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN dalam Focus Group Discussion Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia, 18 September 2018 ASEAN-Indonesia dalam memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional, Setnas ASEAN-Indonesia sudah memiliki Pusat Studi ASEAN (PSA).

kerja sama regional. PSA ini mempelajari dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide kepada negara anggota ASEAN dan sekretariat ASEAN mengenai isu-isu yang membutuhkan tindakan kolektif ASEAN, khususnya dalam membentuk Komunitas ASEAN.⁴⁴ Setnas ASEAN-Indonesia memiliki sekitar 56 PSA yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana PSA ini dijalankan oleh perguruan tinggi.

Selama ini telah terlaksana berbagai kegiatan bersama yang dilaksanakan Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN, khususnya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan advokasi publik tentang masyarakat ASEAN.⁴⁵ Dalam rangka memperkuat peranan Setnas ASEAN-Indonesia, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN juga telah mengadakan Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dengan PSA. Konferensi merupakan interaksi secara langsung antara Setnas ASEAN-Indonesia dengan PSA, dimana kedua belah pihak membahas dan bertukar pikiran mengenai kerja sama ASEAN.⁴⁶ Melalui konferensi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga dan perguruan tinggi, dalam mewujudkan Masyarakat ASEAN 2025 yang terintegrasi. Adanya konferensi juga merupakan wujud nyata dari fungsi Setnas ASEAN-Indonesia yakni berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi PSA untuk mendiseminasikan kegiatan terkait ASEAN belum dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PSA, saat ini PSA cenderung berfokus pada fungsi riset, padahal PSA memiliki fungsi yang lebih luas, seperti misalnya diberdayakan untuk melakukan pendampingan kepada *stakeholders* di daerah yang terdampak berbagai kebijakan ASEAN.

⁴⁴ http://asc.fisip.ui.ac.id/?page_id=57

⁴⁵ "Perkuat Peran Pusat Studi ASEAN sebagai Mitra Pemerintah di Era Masyarakat ASEAN, Kemlu Selenggarakan Rapat Konsolidasi," diakses pada <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/rapat-konsolidasi-pusat-studi-asean.aspx>, 19 Agustus 2018

⁴⁶ "Tingkatkan Sinergi, Sekjen Buka Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dan Pusat Studi ASEAN," diakses pada <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/SETNAS-ASEAN-INDONESIA-DAN-PUSAT-STUDI-ASEAN-TINGKATKAN-SINERGI.aspx>, 19 Agustus 2018

Selain revitalisasi PSA, pemanfaatan *website* resmi Setnas ASEAN-Indonesia juga menjadi cara lain yang diupayakan dalam mendiseminasi informasi terkait perkembangan dan peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ASEAN serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kerja sama dan manfaat ASEAN. *Website* “setnas-asean.id” merupakan sarana komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang ASEAN diantara kementerian/lembaga anggota Setnas ASEAN-Indonesia dan masyarakat umum.⁴⁷ *Website* ini memuat berbagai kabar terkini mengenai ASEAN dan Indonesia, termasuk isu-isu kerja sama ASEAN dan informasi mengenai kegiatan PSA, dimana isu-isu tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan peran aktif PSA dan seluruh K/L yang menjadi anggota Setnas untuk melaporkan berbagai kegiatannya untuk dimuat di *website*.

Berdasarkan catatan Setnas ASEAN-Indonesia mengenai statistik pengunjung *website* Setnas ASEAN-Indonesia periode September 2017 hingga Agustus 2018, terdapat 39.995 pengunjung *website*, dimana 9,41% merupakan *returning visitor* dan 90,59% merupakan *new visitor*.⁴⁸ Dari data statistik usia dan lokasi pengunjung, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengunjung *website* adalah generasi milenial (18-24 tahun) yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Medan. Selain itu, dari total seluruh individu yang mengakses *website* tersebut, disebutkan bahwa hanya 9% yang melakukan pengunduhan, hal ini kemudian perlu dicermati apakah minimnya pengunduhan dikarenakan tampilan atau kontan yang belum menarik atau bukan. Tidak hanya itu, terdapat permasalahan rendahnya kontribusi 92 K/L anggota Setnas ASEAN-Indonesia dalam penyediaan informasi pada *website* Setnas ASEAN-Indonesia, padahal selama ini Setnas ASEAN-Indonesia telah mengirimkan surat permohonan dukungan dan kontribusi materi kepada K/L terkait.⁴⁹ Selama ini masing-masing pilar memiliki situs untuk mendiseminasikan kegiatannya, sehingga sinkronisasi penting untuk dilakukan oleh seluruh pilar dalam situs Setnas ASEAN-Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Paparan Sekretaris Direktur Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri dalam FGD Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia, 18 September 2018

⁴⁹ *Ibid.*,

Selain adanya PSA dan *website* Setnas ASEAN-Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah membuat *grand strategy* serta *roadmap* yang disesuaikan dengan Visi Masyarakat ASEAN 2025 sebagai upaya dalam meningkatkan peranan Setnas ASEAN-Indonesia dalam mewujudkan visi masyarakat ASEAN 2025. Pentingnya *grand strategy* dan *roadmap* ini pernah dibahas dalam reviu kelembagaan Bappenas terkait Setnas ASEAN pada tahun 2016, dimana sebelumnya belum ada *grand strategy* yang jelas terkait upaya Indonesia dalam mendorong visi masyarakat ASEAN 2025. Secara garis besar, *grand strategy* ini berisikan panduan bagi pemangku kepentingan nasional dalam memanfaatkan keterlibatan Indonesia di ASEAN untuk kepentingan nasional, panduan bagi pemangku kepentingan nasional dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan ASEAN, serta panduan bagi pelaku diplomasi dalam mengusung kepentingan nasional di forum-forum internasional.⁵⁰ Selain itu, adanya *roadmap* implementasi *grand strategy* Indonesia di ASEAN diharapkan dapat membuat Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat ASEAN yang menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kualitas hidup yang lebih tinggi dan memperoleh manfaat dan proses pembangunan, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama, yang dipandu oleh tujuan dan prinsip piagam ASEAN.⁵¹ Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki *grand strategy* serta *roadmap* yang jelas, hal yang perlu dilakukan kemudian adalah untuk memastikan apakah *roadmap* tersebut sudah

“Roadmap implementasi *grand strategy* Indonesia di ASEAN menjadikan Indonesia berperan aktif mewujudkan masyarakat ASEAN yang menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kualitas hidup yang lebih tinggi, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama”

⁵⁰ Bappenas, Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2016, diakses pada 19 Agustus 2018, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Reviu%20ASEAN/160219.Ringkasan%20Kajian_Reviu%20ASEAN_submitted.pdf)

⁵¹ Roadmap Implementasi Grand Strategy Indonesia di ASEAN, 2017

dilaksanakan dalam kebijakan-kebijakan Indonesia terkait tiga pilar ASEAN atau belum.

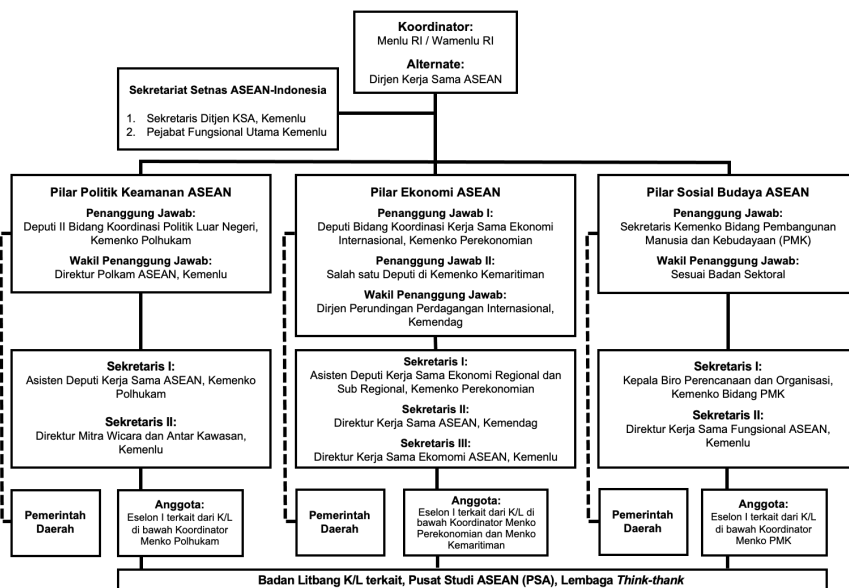


Upaya Membangun Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia yang Kuat

◊emula koordinasi Setnas ASEAN-Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden No.23 tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannya Setnas ASEAN-Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Setnas ASEAN-Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan tantangan tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan *website* Setnas ASEAN-Indonesia serta Pusat Studi ASEAN (PSA), namun hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah utama Setnas ASEAN-Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Setnas ASEAN-Indonesia adalah permasalahan kelembagaan dan koordinasi. Masih adanya permasalahan kelembagaan dan koordinasi, memperlihatkan urgensi dibutuhkan penguatan peran Setnas ASEAN-Indonesia.

Berdasarkan analisis, maka kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia telah diperkuat melalui revisi Keppres No.23 Tahun 2012 menjadi Perpres No. 53 Tahun 2020 tentang Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa kondisi di lapangan yang belum terakomodasi di dalam Keppres. Sebagai contoh, Keppres No.23 tahun 2012 belum memasukkan Kemenko PMK sebagai salah satu anggota Setnas. Selain itu, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Setnas ASEAN-Indonesia, agar koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi. Seperti halnya yang tertuang dalam Keppres No. 23 tahun 2012, maka yang menjalankan tugas sebagai ketua dari Setnas ASEAN-Indonesia adalah

Dirjen Kerja sama ASEAN. Padahal, Dirjen Kerja sama ASEAN secara struktural adalah pejabat eselon I, sedangkan anggota dari Setnas ASEAN-Indonesia adalah pejabat eselon I dari masing-masing kementerian atau lembaga, maka kedudukan Ketua Setnas ASEAN-Indonesia tidak lebih tinggi daripada anggotanya. Hal inilah yang menyebabkan Setnas ASEAN-Indonesia belum bisa menjalankan tugas dan fungsi komunikasinya dengan optimal. Terkait hal ini, maka dalam Perpres No. 53 Tahun 2020 struktur organisasi disempurnakan menjadi sebagai berikut:⁵²



Selain itu, Bappenas diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam Setnas ASEAN-Indonesia, terutama dalam koordinasi proses perencanaan dan penganggaran berbagai kegiatan K/L yang mendukung Cetak Biru ASEAN 2025. Penguatan Perpres Setnas ASEAN-Indonesia ini juga perlu ditindaklanjuti dengan mendorong penyusunan Permen dan Perdirjen untuk mempertegas operasional Setnas ASEAN-Indonesia.

⁵² Disampaikan dalam Paparan Penguatan Setnas ASEAN - Indonesia: Urgensi & Rekomendasi, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, 8 Agustus 2016

Sebagai contoh, Setnas ASEAN-Indonesia dapat mendorong Kementerian BUMN untuk menyusun Permen yang mewajibkan BUMN mengalokasikan dana CSR untuk kegiatan ASEAN. Dengan demikian manfaat berbagai kegiatan ASEAN dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia juga perlu secara spesifik dituliskan dalam RPJMN, dengan harapan dapat mempertegas mandat Setnas ASEAN-Indonesia dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait ASEAN di Indonesia. Apabila mandat yang dimiliki kuat, Setnas ASEAN-Indonesia dapat memberi beberapa tekanan agar K/L dapat melaksanakan komitmen yang mereka miliki di tingkat ASEAN. Selain itu, regulasi mengenai Setnas ASEAN-Indonesia juga perlu digunakan untuk memantau kegiatan seluruh K/L yang mendukung kegiatan ASEAN. Selain itu, dalam rangka penguatan dan pengoptimalan kinerja Setnas ASEAN-Indonesia. Saat ini, Setnas ASEAN-Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator dan Bappenas tengah memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Cetak Biru ASEAN 2025, yang diharapkan dapat memperkuat proses perencanaan dan penganggaran kegiatan K/L yang mendukung Cetak Biru ASEAN 2025. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pembentukan regulasi yang memayungi dokumen RAN agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal.

Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia juga penting dilakukan untuk memperluas cakupan diseminasi informasi. Apabila kewenangan kelembagaan sudah kuat, Setnas dapat mendelegasikan kegiatan sosialisasi kepada K/L lainnya. Dalam rangka memperluas jangkauan diseminasi, pemanfaatan *website* Setnas ASEAN-Indonesia perlu dimaksimalkan. Terkait hal ini, perlu dilakukan sinkronisasi *website* seluruh pilar dalam situs Setnas ASEAN-Indonesia. Selama ini, masing-masing pilar memiliki situs masing-masing untuk mendiseminasikan kegiatannya masing-masing. Diseminasi informasi akan lebih maksimal apabila seluruh situs tersebut disinkronisasi, sehingga konten situs Setnas ASEAN-Indonesia akan semakin kaya dan mampu menarik perhatian banyak pihak. Terlebih apabila Setnas ASEAN-Indonesia ingin menyoal kalangan muda, penggunaan sosial media perlu dimaksimalkan. Setnas ASEAN-Indonesia dapat mencantumkan tautan yang merujuk pada *website* Setnas ASEAN-Indonesia untuk meningkatkan jumlah akses. Oleh karena itu, perlu ada tim khusus yang menangani sosial media agar

pelaksanaan diseminasi informasi berjalan baik. Selain itu Setnas juga dapat mencontoh hal yang pernah dilakukan Bakorkamla (sekarang Bakamla) dalam melakukan diseminasi informasi. Bakorkamla menemui permasalahan koordinasi karena seluruh anggota badan tersebut merupakan pejabat tingkat tinggi. Saat itu Menko Polhukam bekerja sama dengan Menteri Bappenas pernah menyelenggarakan rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh anggota Bakorkamla. Setelah penyelenggaraan rapat diselenggarakan *press conference* untuk mendiseminasikan hasil kegiatan. Pelaksanaan *press conference* dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat menjadi pertimbangan Setnas untuk memperkuat pelaksanaan diseminasi informasi.

Bagian Tiga



Penguatan dan Pelindungan WNI Di Luar Negeri dari Radikalisme dan Ekstremisme

Wisnu Utomo
Astri Kusuma Mayasari
Karina Apriladhatin
Omar Farizi Wonggo
Aisha R. Kusumasomantri



Ringkasan Eksekutif

Tulisan ini disusun untuk merespons adanya perubahan dalam sistem dan karakter kelompok terorisme dari masa dekade sebelum 2019 hingga ISIS sekarang ada di dunia. Dalam waktu yang singkat, terdapat berbagai perbedaan dalam struktur organisasi dan motivasi serangan terorisme itu sendiri. Sehingga memaksa pemerintah negara berdaulat untuk melakukan proteksi ekstra terhadap warga negara dengan maksud melindungi dari ancaman terorisme. Indonesia sendiri menempati posisi yang tidak rendah dalam angka WNI dan keterkaitannya dengan kelompok terorisme. Pendirian lembaga seperti BNPT misalnya merupakan langkah yang signifikan oleh pemerintah terhadap ancaman terorisme.

Sejalan dengan maksud menangkal radikalisme, komponen pemerintah lain seperti Kementerian Luar Negeri memiliki pekerjaan tambahan dalam fungsinya melindungi WNI di luar negeri dalam ancaman radikalisme akibat terorisme. Melihat pula tingginya angka WNI yang menjadi *returnee* dan *deportee* adalah jelas bahwa ancaman terorisme ini dekat adanya. Terkait dengan hal ini isu yang mencuat adalah terkait kewarganegaraan yang dimiliki WNI yang sudah 'melepaskan' status kewarganegaraannya. Jika demikian, maka jelas bahwa ancaman terorisme dalam bentuk sebaran radikalisme ini menjadi ancaman yang nyata dan pekerjaan semua pihak terkait.

Kedepannya, diharapkan kajian dari para peneliti mampu memberikan masukan, serta menuntun langkah Kementerian/ Lembaga sehingga kinerjanya menjadi terfokus dan terintegrasi. Mengingat terorisme ini memiliki wujud yang tidak kasat mata namun demikian kerugiannya mampu menciptakan kegaduhan dan bahaya yang menelan banyak korban. Sehingga, sudah waktunya Kementerian/Lembaga lebih meningkatkan kerja samanya dalam hal mengupayakan penyelesaian kasus WNI yang tertaut dengan terorisme dan radikalisme.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana WNI yang telah terpapar radikalisme ini mendapatkan proses karantina dan mekanisme pengaturan yang baik dan layak sebelum dikembalikan ke masyarakat. Penting diingat bahwa adanya karantina dari Kementerian Sosial yang terbatas, baik waktu dan pendanaan, merupakan masalah yang harus dipecahkan bersama Kementerian/ Lembaga terkait. Pemahaman dalam hal fundamentalisme dan radikalisme merupakan kerja keras untuk dapat dikembalikan kedalam wawasan kebangsaan. Singkatnya waktu dan tidak adanya mekanisme yang menyeluruh untuk mengevaluasi pemikiran kebangsaan WNI ini bisa jadi upaya untuk melakukan manipulasi. Untuk menanggulangi ini baik bagi WNI yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar sebaiknya ada parameter pengukuran yang digunakan untuk melihat secara jelas.



ISIS: Ancaman Keamanan Bagi Pemerintah Indonesia

Tindak kejahatan terorisme bukan merupakan hal baru bagi Indonesia. Namun, kehadiran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia telah mengubah persepsi pemerintah Indonesia mengenai praktek kontra-terorisme. Berbeda dari organisasi-organisasi teror sebelumnya, seperti Al-Qaeda, ISIS tidak hanya memerangi ideologi yang bertentangan dengan kelompoknya, tetapi juga mengancam segala bentuk pemerintahan modern yang tidak sesuai dengan pandangannya. Meskipun tingkat ancaman terorisme relatif tidak berubah di Indonesia sejak tahun 2002, ancaman yang ditimbulkan ISIS dianggap lebih berbahaya bagi negara karena berpotensi mengarah kepada tindakan subversif. Dengan tujuan mendirikan negara Islam di wilayah Levant, ISIS merupakan organisasi teror pertama setelah 9/11 yang melakukan okupasi dan memiliki wilayah teritorial. ISIS beroperasi sebagai organisasi teror yang bersifat hibrid, dimana *front* perjuangannya terdiri dari pasukan milisi dan sel-sel perjuangan terorisme (*clandestine cell*) yang sama-sama menggunakan narasi agama dalam proses perekrutannya.

Sejak tahun 2014, narasi ISIS dalam membentuk kekhalifahan Islam telah menarik sejumlah WNI – baik itu di Indonesia dan di luar negeri – untuk bergabung sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan berperan

aktif dalam pendirian Negara Islam di Irak dan Suriah. Jumlah WNI yang terlibat dalam tindak kejahatan terorisme dengan ISIS hingga saat ini belum dapat dipastikan secara pasti. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan bahwa saat ini jumlah WNI yang ada di Irak dan Suriah mencapai 574 orang pada akhir September 2017. Terdapat setidaknya 97 orang yang terbunuh, 66 orang yang dihentikan di bandara sebelum masuk ke wilayah Suriah dan Irak, serta 500 orang yang dideportasi dari Irak, Suriah, serta negara lainnya karena terindikasi telah teradikalisasi dan berpotensi terlibat dalam kegiatan *violent extremism* (Sumpter, 2018; IPAC, 2017; Barrett, 2017). Sementara itu pada bulan Mei 2018, Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 500 WNI yang masih berada di Irak dan Suriah, 500 WNI yang telah kembali, dan 103 WNI tewas di dalam pertempuran (Sumpter, 2018; Hodge dan Rayda, 2018). Jumlah tertinggi diutarakan oleh penelitian Rahmanto pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa terdapat 639 simpatisan ISIS yang masih terdapat di Suriah, dan 111 orang WNI tewas sebagai FTF (Rahmanto, 2018)

Kekalahan milisi ISIS di Baghouz pada bulan Maret 2019 lalu telah memunculkan sebuah tantangan keamanan baru bagi pemerintah Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah simpatisan ISIS yang kembali ke Tanah Air. Hal ini menempatkan Pemerintah Indonesia ke dalam posisi dilematik, menimbang fakta bahwa FTF dan simpatisan ISIS masih terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak perlindungan.

Secara statistik, angka WNI yang terindikasi atau terbukti terlibat dalam kegiatan *violent extremism* di Suriah sesungguhnya lebih rendah dibandingkan angka yang ditunjukkan oleh negara-negara Eropa ataupun Timur Tengah. Akan tetapi, mempertimbangkan potensi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh isu ini, pemerintah perlu tetap waspada terhadap kemungkinan yang mengarah pada meningkatnya aktivitas terorisme di Indonesia, terlebih melihat ideologi yang melatarbelakangi ISIS di Indonesia masih hidup dan berkembang di masyarakat.

Terdapat kekhawatiran bahwa tanpa proses deradikalisasi yang baik, WNI yang terindikasi dan terbukti terlibat tindak *violent extremism* akan berkumpul kembali (*regrouping*) dan menyebarkan narasi radikalnya kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, serangkaian aksi

teror yang menarget dua gereja di Surabaya, serta permukiman warga dan kantor polisi di Sidoarjo. Meskipun sebagian besar pelaku serangan teror di tahun 2018 adalah *homegrown terrorist* yang teradikalisasi secara mandiri (*self-radicalization*), diketahui bahwa kelompok-kelompok tersebut secara aktif menjalin komunikasi dari organisasi ISIS di Suriah. Salah satu pelaku bom bunuh diri diidentifikasi sebagai keluarga yang gagal berangkat ke Suriah karena tertangkap dan dideportasi oleh pemerintah negara lain.

Di faktor penyebaran paham radikal, Pemerintah Indonesia juga memiliki ketakutan khusus mengenai kembalinya FTF yang telah memiliki pengalaman perang dan kemampuan taktis. Dikhawatirkan kepulauan FTF dengan pengalaman tempur dapat memasukkan unsur profesionalisme di dalam perencanaan aksi teror di level domestik. Kedua faktor tersebut akan menghasilkan serangan teror yang tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memiliki tingkat mortalitas dan dampak kerusakan yang tinggi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Pemerintah Indonesia memerlukan sebuah kebijakan yang tidak hanya mampu mengakomodir dimensi sosial dan kemanusiaan di dalamnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan nasional yang tepat sasaran, sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia.



Counter Violence Extremism

Counter Violence Extremism (CVE) sebagai sebuah konsep, merupakan upaya untuk meluruskan paham radikal dari terdakwa serangan teror, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap pandangan radikal yang berpotensi mengarah ke *violent extremism*. Oleh karena itu, konsep ini memiliki unsur preventif dan netralisasi di dalamnya (Clutterbuck, 2014).

CVE menggunakan beragam upaya di dalam implementasinya, seperti: 1) Melakukan delegitimasi terhadap otoritas pemimpin organisasi teror, 2) Mengekspos penderitaan Umat Muslim yang diakibatkan oleh kelompok ekstremis, 3) Mengkriminalisasi organisasi teroris, dan 4) Mengungkap kesulitan yang timbul, baik itu dari segi psikologis maupun sosial, akibat menjalani gaya hidup sebagai seorang jihadis (Jacobson, 2010). Cakupan implementasi dari CVE dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Cakupan Tindakan di dalam CVE

	Program	Indikator	Tujuan Utama	Target Utama	Kondisi Implemntasi
NETRALISASI	Deradikalisasi	Terorisme	Rehabilitasi	Memutus koneksi (<i>disintegration</i>) Reintegrasi Rehabilitasi	Pasca-penjatuhan hukuman (<i>Post-conviction</i>) Dalam masa hukuman Kelompok yang telah Teradikalisasi
	Kontra-Radikalisasi	Transisi ke arah terorisme Violent Extremism Ekstremisme	Mitigasi	Memutus Koneksi (<i>disintegration</i>) Reintegrasi Rehabilitasi	Sebelum penjatuhan hukuman (<i>Pre-Conviction</i>) Sebelum penahanan (<i>pre-detention</i>) Kelompok yang sedang dalam proses radikalisasi
PREVENTIF	Anti-Radikalisasi	Risiko rawan terhadap radikalisme dan <i>violent extremism</i>	Tindakan Preventif	Deteksi Strategi gentar (<i>deterrence</i>) <i>Soft Approach</i>	Berpotensi teradikalisasi (<i>pre-radicalization</i>) Radikalisasi tahap awal

Sumber: Lindsay Clutterbuck, 'Deradicalization Program and Counterterrorism,' 2013

Tujuan utama CVE antara lain adalah:

1. **Membantah narasi agama yang digunakan oleh kelompok teroris**
 Dalam upaya kontra terorisme, narasi radikal yang mempromosikan, merekrut, dan melatih anggota organisasi teroris menjadi hal pertama yang perlu dipatahkan (Ramakrishna, 2014; Gorka, 2014). Melalui CVE, pemerintah dapat mendiskreditkan pemahaman Islam radikal yang bersifat absolutis, eksklusif, dan supremasis dengan mengekspos narasi tersebut serta membandingkannya dengan nilai-nilai Islam yang damai.
2. **Menyeimbangkan upaya penegakan hukum yang bersifat koersif**
 Penggunaan metode koersif rawan terhadap penggunaan kekerasan berlebihan (*excessive force*) yang dapat menambah narasi kebencian dari para pelaku teror – yang pada akhirnya akan merugikan upaya kontra-terorisme pemerintah secara keseluruhan (US Department of Homeland Security, 2015). Oleh karena itu, CVE dianggap sebagai

pendekatan yang halus untuk mengurangi konsekuensi yang muncul akibat penggunaan kekerasan di dalam praktek kontra-terorisme.

3. Mendapatkan dukungan dari masyarakat

Masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan utama dari kontra-terorisme, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah bagi pemerintah apabila masyarakat menolak melakukan kerja sama terhadap upaya kontra-terorisme. CVE dapat memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan organisasi sipil terkait pemahaman mengenai bahaya terorisme (Ramakrishna, 2014).

4. Membangun ketahanan masyarakat dari narasi radikal organisasi teroris

Aspek preventif CVE (anti-radikalisme) terdiri dari berbagai macam pendekatan untuk menyediakan metode tanpa kekerasan (*non-violent methods*) kepada masyarakat yang ingin mengutarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah, mengedukasi masyarakat mengenai narasi rekrutmen yang biasa digunakan oleh kelompok teroris, serta melakukan cara-cara inovatif lainnya dalam melakukan persuasi terhadap masyarakat (US Department of Homeland Security, 2015).

Dalam beberapa tulisan berikutnya, CVE akan digunakan sebagai kerangka dalam mengidentifikasi kebijakan alternatif untuk mendampingi hukum pidana yang telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Diharapkan agar konsep CVE bisa memberikan masukan yang komprehensif, yang tidak hanya merespons kepulauan simpatisan ISIS pada dimensi keamanan, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis.



Mengenal Potensi Ancaman yang dihadapi WNI di Luar Negeri

Saat ini Pemerintah Indonesia dihadapkan pada sebuah permasalahan yang relatif baru dalam praktek kontra-terorisme pemerintah. Sebagai sebuah organisasi teror yang bersifat hibrid, ISIS tidak hanya menyebarkan ideologinya dan memunculkan sel-sel perjuangan di seluruh dunia, tetapi juga menarik warga negara lain pergi ke Irak dan Suriah untuk bergabung sebagai FTF. Oleh karena itu, kekhawatiran pemerintah Indonesia tidak hanya terbatas pada penyebaran paham radikalisme di dalam negeri, tetapi juga mencakup Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan wilayah konflik Timur Tengah.

Setelah kekalahan ISIS di awal tahun 2019, pemerintah Indonesia juga dihadapkan dengan peningkatan jumlah *returnee* dan *deportant* WNI yang kembali ke Indonesia. Pemulangan *returnee* dan *deportant* ISIS ke tanah air pada dasarnya dilakukan dengan melibatkan serangkaian proses yang panjang, mulai dari identifikasi, *assessment* dan proses rehabilitasi sebelum akhirnya *returnee* dan *deportant* dapat direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Hal ini membuat pemulangan *returnee* dan *deportant* ISIS menjadi sebuah isu yang bersifat multidimensional, sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara lintas-sektoral dan melibatkan berbagai *stakeholders* baik itu dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.

- **Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Ekstremisme pada WNI di Luar Negeri**

Radikalisme dan ekstremisme tidak muncul dalam waktu yang singkat. Sebenarnya, sejarah munculnya gerakan ini sudah dimulai jauh sebelum 2001 ketika terorisme menjadi ancaman yang global. Dalam skala yang lebih kecil, radikalisme dan ekstremisme menjadi hal yang berkembang dalam sel perkembangan ancaman terorisme secara umum. Di dalam negeri, radikalisme dan ekstremisme menjadi ancaman domestik yang sulit ditangani, melihat ragam dan perbedaan budaya di dalam Indonesia. Berbagai jenis kelompok masyarakat memiliki sumbangsih dalam berkembangnya radikalisme dan ekstremisme. Tidak lupa pula bagaimana luasnya Indonesia, menjadikan ancaman ini semakin berkembang dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksi.

Tidak menjadi semakin mudah melihat luasnya Indonesia jika ditambah dengan fakta bahwa WNI yang berada di luar batas wilayah geografis Indonesia juga mengalami ancaman yang sama besarnya. Pada kasus radikalisme dan ekstremisme, WNI memiliki kesempatan menjadi *pion* dalam aksi pelaku terorisme. Aliran dana teroris sangat mungkin berasal dari WNI yang ada di luar negeri, hal ini beberapa kali tertangkap oleh PPATK. Di luar negeri, WNI memiliki kanal informasi lewat perwakilan negara. Dalam persiapannya berangkat ke luar negeri, WNI yang juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan pembekalan tentang bahaya radikalisme dan ekstremisme ini. Namun tentunya hal ini tidak dapat menjadi jaminan dalam menjadikan PMI/WNI ini selalu siap dalam menanggulangi bahaya terorisme.

Dalam argumentasinya terhadap radikalisme dan ancaman terorisme, BNPT memberikan kategorisasi yang dapat membedakan elemen dalam teroris. Beberapa kategorisasi tersebut antara lain membantu membedakan antara teroris yang ada di dalam organisasi. Kategorisasi teroris berdasarkan BNPT adalah 1) **simpatisan**, yakni masyarakat yang intoleran serta tidak memiliki loyalitas, 2) **pendukung** adalah masyarakat yang memberikan dukungan dalam aktivitas terorisme bisa dalam bentuk dana, sarana, dan prasarana, 3) **militan**, merupakan kelompok yang melakukan aktivitas kekerasan, mampu

melakukan aksi yang ofensif, 4) **inti** adalah pemimpin dengan pemahaman ideologis dan memiliki kharisma yang mampu memberikan pengaruh kepada pengikutnya.

Singapore Terrorism Threat Assessment Report 2019 menyatakan bahwa sejak 2015, terdapat 14 Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena terpapar radikalisme. Dalam laporan tersebut juga dipaparkan bahwa ISIS merupakan gerakan yang menunjukkan pengaruhnya secara signifikan terhadap

meningkatnya radikalisme dalam segala jenis kelompok termasuk pekerja migran yang mendapatkan pengetahuan lewat internet. Sikap preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi adanya PMI yang terpapar

ISIS merupakan gerakan yang menunjukkan pengaruhnya secara signifikan terhadap meningkatnya radikalisme dalam segala jenis kelompok termasuk pekerja migran

radikalisme dimulai dengan pembekalan sebelum pengiriman PMI. Tentu saja hal ini merupakan proses yang berlaku secara sepihak dan belum memiliki mekanisme evaluatif. Sehingga ketika PMI sudah berada di luar negeri, belum ada mekanisme evaluatif sebagai lanjutan dari upaya preventif yang belum signifikan. Bukti bahwa terdapat PMI yang terpapar radikalisme merupakan bentuk masukan yang besar dalam melihat sistem pendampingan PMI terhadap ancaman paparan radikalisme. Bukan hanya terpapar radikalisme, namun kemudian juga melihat adanya PMI yang menjadi penyalur dana yang dilakukan bertahun-tahun adalah bukti lain bahwa terdapat kelemahan dalam pengawasan PMI.

- **Ancaman Penyebaran Paham Radikal terhadap WNI**

Munculnya ancaman dan maraknya pemikiran paham radikal merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa dalam terorisme, penyebaran ketakutan menjadi sumber utama aksi. Pengeboman, menjadi upaya dalam penyebaran ketakutan yang paling signifikan. Di dalamnya, korban jiwa berjatuh dan upaya untuk

kembali memunculkan kesiapsiagaan pada masyarakat muncul kembali. Radikalisme yang berawal dari tertumpuknya paham fundamentalisme dalam individu bukanlah kerja statis. Secara signifikan individu yang terpapar radikalisme memiliki sumber paparan yang dapat tersebar di mana saja dan dalam berbagai media.

- **Potensi Dukungan Finansial WNI di Luar Negeri terhadap Organisasi Teror**

Banyak cara dan upaya yang dilakukan kelompok teroris dalam melaksanakan operasinya. Dukungan finansial salah satunya. Beberapa WNI yang terlibat dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks adanya hubungan pernikahan dan manipulasi hubungan yang membuat pihak yang terlibat semakin sulit untuk keluar dari permasalahan. Mendanai kegiatan terorisme tentu saja tidak secara langsung memberikan dampak korban jiwa, namun juga memiliki peran dalam memperkuat jaringan terorisme itu sendiri.

IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict), dalam laporan nomor 35 yang terbit pada Januari 2017 'Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists' menjelaskan tentang bagaimana aliran dana dan dukungan perempuan bagi aksi terorisme. Melalui grup dalam *Facebook*, *Telegram*, dan berbagai bentuk komunitas daring lainnya perihal perekrutan perempuan dalam jaringan terorisme ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam menyumbang perempuan dalam jaringan ISIS. Selain itu, perempuan-perempuan ini memiliki fungsi besar lain dan mengalami eskalasi peran. Jika dalam masa terdahulu, terorisme dan perempuan berada dalam konteks sebagai ibu dan agen yang melahirkan para *jihadi* baru, maka dalam perkembangannya sekarang semakin kompleks. Perempuan dalam jaringan ISIS kemudian menjadi lebih besar perannya hingga menjadi martir. Eskalasi peran perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa dalam fenomena kebangkitan ISIS, peran perempuan bukan hanya sebagai calon ibu dan 'pabrik' penghasil keturunan, melainkan juga sebagai pendana dan penyalur tenaga. Dalam laporan IPAC tersebut, seorang perempuan bahkan mampu mengkoordinir grup daring yang mampu memberangkatkan perempuan untuk sampai di Suriah.

- **Potensi Penggunaan Jalur Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia untuk Berangkat ke Wilayah Konflik**

Indonesia merupakan negara penyuplai PMI/TKI dalam angka yang besar. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa jalur PMI/TKI yang ada di Indonesia itu sendiri erat dengan wilayah konflik di Timur Tengah. Jalur ini memiliki bahaya yang sama besarnya dengan PMI/TKI yang berada bukan di jalur wilayah konflik. Namun demikian, dengan adanya kepengurusan administratif yang kolektif dalam sistem perekrutan PMI/TKI ke luar negeri, maka potensi keterlibatan PMI dalam penyaluran dalam wilayah konflik menjadi lebih luas.



Meningkatnya Gelombang Kepulangan Simpatisan ISIS ke Tanah Air

Setelah kekalahan ISIS di Suriah, saat ini terdapat ratusan simpatisan ISIS berkewarganegaraan Indonesia yang terjebak di Suriah. Mayoritas dari WNI tersebut hidup dalam keadaan rawan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyak dari WNI tersebut menyatakan menyesal telah pergi ke Suriah, dan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk bisa mengembalikan mereka ke daerah asalnya (Rininta, 2019). Gagasan mengenai kembalinya simpatisan ISIS ke Indonesia ditentang oleh sebagian besar masyarakat yang merasa khawatir akan potensi ancaman yang dapat muncul dari repatriasi. Banyak elemen masyarakat bahkan menuntut pencabutan kewarganegaraan simpatisan ISIS yang ada di Suriah (Rininta, 2019).

Di sisi lain, bergabungnya WNI ke dalam sebuah organisasi teroris tidak otomatis menghilangkan status kewarganegaraan mereka. Pemerintah terikat oleh UU No. 12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi WNI dari status *stateless* (tidak berkewarganegaraan). Selain itu, pemerintah juga berkewajiban melindungi segenap Warga Negara Indonesia, baik itu di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan pernyataan yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (lihat lampiran 1). Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menangani kepulangan simpatisan

ISIS dari Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan multi-dimensi, yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan.

Bagaimana kepulangan simpatisan ISIS ke tanah air – baik itu *returnee* maupun *deportant* – dapat menimbulkan potensi ancaman bagi keamanan negara Indonesia? Beberapa ancaman yang dapat ditimbulkan sebagaimana berikut ini.

- **Potensi Penyebaran Paham Radikal Selama Masa Penahanan dan Pasca Penahanan**

Penyebaran paham radikal memang tidak bisa dilihat dari satu saluran saja. Dalam perkembangannya radikalisme telah berkembang jauh dari sekedar fundamentalisme. Paham yang berkembang juga telah mengalami transformasi dan sebaran dalam persebarannya. Proses dalam penahanan terduga teroris berasal dari penangkapan langsung, deportasi, dan pengembalian dari wilayah konflik. Dalam proses deportasi misalnya, individu atau kelompok yang terduga terpapar radikalisme akan dikembalikan dalam proses yang panjang sebelum diputuskan akan menghadapi konsekuensi hukum atau dilepaskan kembali ke masyarakat.

Dalam proses kepulangan, WNI yang terduga terpapar radikalisme akan ditampung oleh Kementerian Sosial RI. Pada masa ini WNI kemudian akan menjalani beberapa program wajib yang dilakukan, antara lain bernuansa kebangsaan dan memiliki tujuan untuk meretas segala paham radikal yang ada dalam pemikiran WNI. Masa ini dilakukan selama satu bulan. Problematika yang menjadi ganjalan dalam proses ini adalah bentuk pinglepasan WNI yang diduga sudah bisa dilepaskan/diproses dan selanjutnya dalam konsekuensi tertentu tergantung pemahaman radikalismenya. Kemudian WNI akan menandatangani surat yang menunjukkan bahwa dirinya telah menyelesaikan proses oleh Kemensos. Tentu saja masih terlalu dangkal cara yang dilakukan ini mengingat radikalisme tidak bisa begitu saja dihapuskan. Pemikiran dan motivasi individu dalam memilih radikalisme kemudian mengambil langkah konkrit dengan berangkat ke wilayah konflik tidak bisa dihapuskan dalam proses satu bulan saja.

Sehingga langkah pendampingan menjadi salah satu alasan penting mengapa proses deradikalisasi berhasil.

Penglepasan WNI yang terduga terpapar radikalisme kembali ke masyarakat juga bukan kerja semalam. Tentu saja WNI ini memiliki kerentanan lebih besar karena berhadapan dengan masyarakat dan asosiasi sosial lain. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang besar dengan menghadirkan unit-unit kerja mikro. Salah satu WNI yang mengalami deportasi menyatakan, bahwa sekembalinya dalam masyarakat, tantangan yang dialaminya bukan hanya dari masyarakat sekitar tempat tinggal. Namun juga adanya gerakan dari kelompok radikal yang secara perlahan masih menunjukkan intensi untuk mengenalkan kembali dan mengajak untuk bergabung dalam kelompok mereka.

• Munculnya Residivis

Jaringan teroris yang memanfaatkan ruang publik sebagai perekrutan semakin abu-abu. Ruang publik kini bisa menjadi salah satu aspek yang

“pemahaman radikal merupakan sesuatu yang bersifat ideologis dan tidak dapat dilihat melalui kasat mata”

harus diwaspadai dalam hal penyebaran kajian. Pemahaman radikal merupakan sesuatu yang bersifat ideologis dan tidak dapat dilihat melalui kasat mata. Stigmatisasi masyarakat dengan

menggunakan indikator fisik – seperti atribut agama – merupakan metode yang telah usang dan perlu dipertimbangkan kembali. Keterkaitan teroris dengan kemiskinan juga terpatahkan dengan adanya pelaku bom gereja di Surabaya; mengingat bahwa pelaku serangan bom tersebut berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke atas dan berasal dari kalangan terpelajar.

Sejak tahun 2017, terdapat 652 WNI yang terindikasi sebagai simpatisan ISIS kembali ke Indonesia sebagai *returnee* dan *deportant* (Rasyid et. al., 2019). Banyak di antara WNI yang terbukti tidak melakukan tindak kejahatan terorisme secara langsung telah melakukan proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Meski berada di dalam pengawasan pemerintah, banyak dari simpatisan ISIS tersebut terus

berjejaring satu sama lain dan melakukan kegiatan yang mendukung aksi teror. Data dari Deteksi Indonesia mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, Polri telah melakukan sebanyak 210 kali penangkapan terhadap 554 terduga teroris. Di antara penangkapan tersebut, 59 orang merupakan anggota ISIS dan 108 orang merupakan anggota organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (JAD dan MIT) (Rasyid, et. al, 2019). Dari data tersebut, terdapat tiga orang *deportant* yang dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2017 dalam upayanya bergabung dengan ISIS di Suriah (Sumandoyo, 2017; Rasyid et. al. 2019).

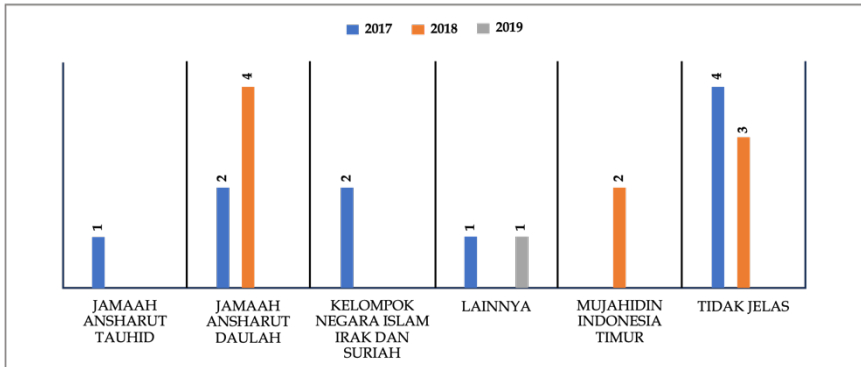
Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi WNI yang sudah dideportasi dan dikembalikan ke masyarakat adalah proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terorisme ke dalam masyarakat. Ancaman adanya keterkaitan baik dari dalam diri WNI ini maupun dari lingkungan di sekitarnya merupakan hal yang mengintai WNI rentan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa adanya pendampingan yang intensif dari pemerintah lewat kehadiran aparat merupakan pekerjaan tambahan yang perlu dilihat urgensinya.

- **Potensi Transfer Teknologi terhadap Ancaman Aksi Teror Lokal**

Terdapat kekhawatiran dari aspek keamanan bahwa WNI yang kembali dari Suriah akan meningkatkan kapasitas organisasi teror lokal untuk melakukan aksi terornya. Alasan ini merupakan hal yang valid, mengingat bahwa sejak dideklarasikannya kekhalifahan ISIS dari tahun 2014 hingga tahun 2017, anggota dan simpatisan ISIS telah melancarkan kurang lebih 140 serangan di 29 negara berbeda (Rasyid, et. al, 2019). Indonesia sendiri telah mengalami kurang lebih sepuluh kali serangan teror yang direncanakan dalam rentang waktu dua tahun (2017-2019).

Sejak tertangkapnya beberapa teroris pada beberapa tahun lalu (anggota dari jaringan Baasyir) yang mempelajari persenjataan hingga ke Perang Afghanistan, jaringan terorisme di Indonesia kemudian berkembang hingga ke pemahaman persenjataan dalam konteks lebih sederhana. Fenomena yang menunjukkan bahwa dalam hal perakitan

Grafik Serangan Terorisme di Indonesia (Januari 2017-Juli 2019)



Sumber: Rasyid, et.al, kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, 2019

bom dapat dipelajari di rumah dengan menggunakan barang-barang yang sederhana dengan bahan baku kimia yang pada masa itu mudah didapat. Tertangkapnya teroris yang melakukan serangan dengan bom panci menunjukkan ancaman radikalisme dan berorientasi tindakan ini memerlukan kontrol yang lebih dari pemerintah untuk menghadapi ancaman terorisme.

Beberapa kasus dalam penangkapan teroris dengan menggunakan bom panci, ditelaah mendapatkan referensi merakit bom dari sosial media. Selain itu juga perlu dipahami bahwa adanya grup percakapan seperti aplikasi Telegram menjadi sumber diskusi dalam hal pemanfaatan pemahaman perakitan senjata/peledak. Selain itu juga dalam jaringan terorisme tertentu, mereka memiliki beberapa anggota yang memiliki kemampuan sebagai perakit dalam organisasinya. Penangkapan teroris di Beji, Depok misalnya melakukan perakitan di rumah kontrakan dan menggunakan kamufase sebagai penjual kaki lima dalam aksinya untuk menyelundupkan bahan baku peledak. Namun kenyataan bahwa bom tersebut kemudian meledak sebelum sempat diletakkan di tujuan peledakan merupakan fenomena yang bisa menjadi bahan evaluasi.

Jaringan terorisme memang menggunakan kemampuan sosial media sebagai cara melakukan perekrutan. Namun untuk mempraktekkan pada hasil riil seperti bom tentunya dibutuhkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Pengawasan dalam distribusi bahan kimia yang ketat bisa menjadi cara untuk menangkal adanya perakitan bom di rumah. Selain itu juga perlu memberikan edukasi terhadap pemasok bahan kimia untuk melakukan fungsi kewaspadaan terhadap pembeli.



Mendalami Permasalahan Terorisme di Indonesia

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman kontemporer di bidang terorisme dapat dipilah menjadi dua aspek. *Pertama*, kekhawatiran terjadinya penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme terhadap WNI yang berada di luar negeri, dan *kedua*, meningkatnya jumlah *returnee* dan *deportant* ISIS yang kembali ke tanah air selepas wilayah teritorial ISIS di Bhagouz dilumpuhkan pada awal 2019 lalu. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan Indonesia dalam menghadapi kedua aspek tersebut.

Dalam melihat permasalahan terorisme, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, *Pertama*, terkait *identifikasi aktor yang terlibat*. Beberapa aktor yang perlu diperhatikan adalah subjek utama dalam permasalahan tersebut, serta *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penanganannya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam upaya pencegahan radikalisme dan rehabilitasi pelaku kejahatan terorisme adalah kurangnya identifikasi aktor yang menjadi sasaran penanganan. Dalam upaya pencegahan, hal ini dapat dilakukan dengan mencari tahu kelompok-kelompok yang rentan teradikalisasi dan terpengaruh paham ekstremisme. Sementara itu, dari segi rehabilitasi,

identifikasi dapat berjalan lebih kompleks dengan melibatkan variabel-variabel khusus seperti 1) tingkat ancaman, 2) usia, 3) gender, 4) latar belakang ekonomi, dan 5) latar belakang sosial.

Kedua, aspek kerangka hukum dan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi isu terorisme ditinjau dari sisi peraturan dan standar prosedural yang ada. Bagi lembaga-lembaga yang terlibat untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur kerangka hukum terbaru tentang terorisme, UU No. 5 tahun 2018, sejauh ini masih didominasi oleh penanganan isu terorisme yang bersifat domestik. Bagian ini akan melihat sejauh mana peraturan yang ada saat ini dapat mencakupi permasalahan terorisme kontemporer, baik menyangkut perlindungan WNI di luar negeri ataupun pemulangan *returnee* dan *deportant* ke Indonesia.

Ketiga, fasilitas dan perangkat kebijakan. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan proses pemulangan *returnee* dan *deportant*, serta rehabilitasi narapidana terorisme, pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung program-program yang dicanangkan. Sarana tersebut dapat berbentuk fisik, seperti infrastruktur, sarana transportasi, dan perangkat keamanan; maupun yang berbentuk non-fisik, seperti standard operasi dan prosedur (SOP), kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk mencegah paham radikal, materi rehabilitasi bagi narapidana terorisme, serta masih banyak lagi.

Dengan menganalisa ketiga aspek tersebut, diharapkan pemerintah dapat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terkait permasalahan terorisme, khususnya dalam bidang pencegahan penyebaran paham radikal terhadap WNI di luar negeri dan kepulangan *returnee* dan *deportant* dari wilayah konflik ke tanah air.

1. Analisis Ancaman: Pelindungan WNI dari Bahaya Radikalisme dan Ekstremisme

Meskipun ancaman penyebaran radikalisme dan ekstremisme terhadap WNI di luar negeri bukan merupakan hal baru, organisasi teroris yang bersifat hibrid seperti ISIS telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah mengenai keterlibatan WNI dalam aksi terorisme atau kegiatan yang

mendukung organisasi teroris. Oleh karenanya, muncul kebutuhan pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dalam mencegah persebaran narasi radikal di antara WNI yang ada di luar negeri. Berdasarkan konsep *counter violent extremism* (CVE), upaya preventif untuk melindungi WNI di luar negeri jatuh di ranah anti-radikalisasi dapat dilakukan baik sejak WNI masih berada di dalam negeri maupun setelah di luar negeri. Adapun penjelasan singkat mengenai bagian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Rangkuman Analisis Masalah dalam Pencegahan Radikalisasi WNI di Luar Negeri

Permasalahan	Subjek	Ancaman	Upaya	Cara
Potensi radikalisme dan <i>violent extremism</i>	WNI di luar negeri yang rawan teradikalisasi WNI kelompok rawan yang akan berangkat ke luar negeri	Radikalisasi Potensi <i>violent extremism</i>	Anti-Radikalisasi	Deteksi Pengarahan Strategi gentar (<i>deterrence</i>)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Di dalam negeri, upaya perlindungan WNI fokus kepada persiapan keberangkatan PMI/TKI yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah BNP2TKI. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan terhadap PMI/TKI hanya merupakan sebagian kecil dari presentasi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, fungsi pengawasan WNI non-PMI/TKI dapat dilakukan dengan melibatkan pihak imigrasi dan Kementerian Luar Negeri. Di sisi lain, perlindungan WNI di luar negeri dari ancaman radikalisme menjadi sebuah permasalahan yang lebih kompleks karena penanganannya tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia, tetapi juga pemerintah negara lain. Hal ini disebabkan terbatasnya otoritas pemerintah Indonesia di luar batas wilayah teritorialnya, sehingga menghasilkan kebutuhan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan negara penerima WNI – baik itu melalui jalur bilateral maupun multilateral – dalam upaya preventif dan mitigatif.

Penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme terhadap WNI di luar negeri dapat ditinjau dari tiga aspek.

• Fokus Sasaran

Kekhawatiran mengenai penyebaran paham radikal terhadap WNI di luar negeri berfokus kepada masyarakat Indonesia yang menetap maupun bepergian ke luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu panjang. Bagi WNI dalam kategori umum, permasalahan utama yang dijumpai dalam mencegah penyebaran paham radikal di antara WNI adalah belum tersedianya fungsi pendataan dan pengawasan yang komprehensif terhadap WNI di luar negeri sehingga pemerintah masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauannya (Interview, Kementerian Luar Negeri 2019). Proses pendataan WNI sesungguhnya terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Digitalisasi telah mempermudah pendataan WNI yang melakukan perjalanan atau menetap di luar negeri melalui metode *e-pasport* dan laporan daring. Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri meluncurkan sebuah aplikasi telepon genggam “Safe Journey” yang ditujukan untuk mempermudah proses pelaporan WNI yang hendak bepergian ke luar negeri (Interview, Kementerian Luar Negeri 2019). Akan tetapi, karena proses pelaporan dilakukan secara mandiri oleh pengguna (*users base*), sulit untuk mengetahui jumlah WNI yang tidak melakukan laporan ataupun tidak memiliki *e-paspor*.

Oleh karena itu, pengawasan WNI yang berada di luar negeri selama ini dilakukan dengan mengandalkan koordinasi antar-lembaga, khususnya Kementerian Luar Negeri, BNPT, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi perjalanan WNI yang teradikalisasi (Interview, Kementerian Luar Negeri, 2019; interview, BNPT, 2019). Koordinasi antar-lembaga memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi WNI yang teradikalisasi, sehingga mereka dapat ditahan sebelum mencapai wilayah konflik (*deportant*). Akan tetapi, WNI yang pada awalnya belum terindikasi terlibat dalam kegiatan yang bersifat radikal akan sulit untuk dideteksi dan memerlukan kerja sama lebih lanjut dengan pihak berwenang di negara lain untuk melakukan proses pengawasan.

Selain itu, salah satu kategori WNI di luar negeri dengan jumlah terbesar berasal dari kelompok PMI/TKI – baik itu dari jalur resmi maupun jalur tidak resmi (Interview, BNPT 2019). Meski PMI/TKI diberangkatkan melalui jalur resmi, namun hingga saat ini pemerintah belum memiliki mekanisme khusus yang mengintegrasikan aspek anti-

radikalisme di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. **Pertama**, dari proses seleksi calon PMI/TKI, belum terdapat indikator khusus yang bisa menjaring pendaftar dengan tendensi pemahaman radikal. Hal ini memungkinkan orang-orang yang telah teradikalisasi memanfaatkan jalur PMI/TKI digunakan sebagai sarana untuk mendukung aksi terorisme atau berangkat ke wilayah konflik. Selain itu, calon PMI/TKI dengan pemahaman radikal juga dapat menjadi agen yang menyebarkan narasi radikal terhadap PMI/TKI lainnya di dalam lembaga pelatihan maupun di luar negeri.

Kedua, pemerintah belum memiliki program khusus yang ditujukan untuk membangun ketahanan (*resilience*) PMI/TKI di luar negeri. Persiapan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan agensi penyalur PMI/TKI hanya terbatas pada aspek keterampilan, sehingga belum banyak memperhatikan faktor-faktor lain yang membekali PMI/TKI dengan pengetahuan mengenai narasi rekrutmen yang banyak digunakan oleh organisasi teroris (Interview, Wahid Foundation, 2019). Pada saat PMI/TKI sampai di negara tujuan, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pun belum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek potensi bahaya radikalisme dan ekstremisme di antara PMI/TKI.

Ketiga, tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap kompetensi agen, pendamping, dan fasilitator yang memberangkatkan PMI/TKI ke luar negeri. Terdapat kekhawatiran bahwa calon PMI/TKI dapat teradikalisasi semenjak mereka masih mendapatkan pendidikan dan pelatihan di BLK melalui proses interaksi dengan pihak-pihak yang memberikan pelatihan. Untuk itu dibutuhkan standardisasi bahwa seluruh Lembaga yang terlibat dalam proses pemberangkatan PMI/TKI terbebas dari pengaruh radikal (Interview, Wahid Foundation, 2019).

Keempat, pemerintah juga belum memiliki mekanisme khusus dalam menangani PMI/TKI yang teradikalisasi ataupun tersangkut dalam isu terorisme (FGD, BAPPENAS, 2019). PMI/TKI yang terindikasi teradikalisasi akan dimasukkan ke dalam kategori PMI/TKI bermasalah. Penanganan terhadap PMI/TKI yang teradikalisasi dilakukan melalui jalur yang sama dengan PMI/TKI yang mengalami permasalahan lainnya – seperti masalah administratif dan kasus kriminal – sehingga penanganan yang diberikan terhadap PMI/TKI tersebut tidak tepat guna. Di sisi lain, proses penanganan yang dilakukan bersamaan dengan

PMI/TKI lainnya akan memungkinkan PMI/TKI yang teradikalisasi untuk menyebarkan pemikirannya terhadap PMI/TKI yang belum teradikalisasi.

Faktor risiko di atas dapat bertambah berkali-kali lipat terhadap PMI/TKI yang berangkat melalui jalur ilegal. Absennya proses pengawasan terhadap PMI/TKI yang masuk tanpa agen resmi dapat menimbulkan permasalahan di dua arah; baik itu dari sisi keamanan maupun dari sisi perlindungan ketenagakerjaan (Interview, Wahid Foundation, 2019).

• Kerangka Hukum dan Kebijakan

Kepentingan negara untuk melindungi WNI dari bahaya radikalisme dan ekstremisme merupakan momentum yang tepat untuk meninjau kembali peraturan dan kebijakan yang berlaku. Saat ini, perlindungan WNI di luar negeri dibahas oleh beberapa dasar hukum, yaitu (Haryono, 2014):

1. **UU Dasar 1945** yang berbunyi “[...] Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia [...]”
2. **Konvensi Wina 1961** mengenai hubungan diplomatik antar negara yang mencakup perlindungan Warga Negara di luar negeri
3. **Bab V UU No. 29 tahun 1999** mengenai hubungan luar negeri dan perlindungan WNI oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri
4. **UU No. 29 tahun 2004** mengenai perlindungan PMI/TKI di luar negeri
5. **Peraturan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2008** tentang pelayanan WNI pada perwakilan RI di luar negeri.

Pelindungan WNI di luar negeri memiliki cakupan isu yang cukup luas. Meski begitu, topik mengenai perlindungan WNI dari kegiatan yang mengarah ke tindak kejahatan terorisme masih belum banyak dibahas di dalam kelima kerangka hukum yang ada di Indonesia. Penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan BNPT terhadap kasus radikalisme masih banyak dilakukan secara *ad-hoc* dan belum memiliki dasar hukum yang spesifik membahas mengenai bahaya radikalisme. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan prosedural dalam penanganan kasus di bidang penyebaran radikalisme pada WNI di luar negeri.

• Instrumen dan Fasilitas

Selain kerangka hukum, pemerintah juga memerlukan aspek yang dapat mendukung pelaksanaan agenda perlindungan WNI di luar negeri. Sebagaimana yang telah dibahas pada tulisan sebelumnya, radikalisme merupakan sesuatu yang tidak dapat terlihat secara kasat mata, sehingga pemerintah memerlukan instrumen khusus untuk dapat mengukurnya. Test dengan menggunakan instrumen khusus pada umumnya dilakukan berkala untuk melihat perkembangan pemahaman seseorang terhadap ideologi tertentu (wawancara, BNPT, 2019). Pemerintah Indonesia belum memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman radikal WNI yang berada di luar negeri.

Wacana untuk melakukan hal tersebut telah dipikirkan oleh BNPT, namun penerapannya belum terlaksana hingga sekarang. Padahal, idealnya instrumen tersebut dapat diimplementasikan oleh institusi yang menaungi pengiriman PMI/TKI ke negara asing dan mengintegrasikan penggunaannya di dalam proses perekrutan dan pengawasan selama waktu kontrak.

Selain itu, program-program anti-radikalisasi untuk mencegah penyebaran paham radikal terhadap WNI di luar negeri yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah, seperti BNPT, masih bersifat *ad hoc*. Belum ada program anti-radikalisasi di luar negeri yang bersifat berkesinambungan. Idealnya upaya untuk melindungi WNI dari ideologi radikal perlu dilakukan dengan berkesinambungan sehingga tidak hanya berhenti sebagai sebuah program tunggal saja.

Peran Stakeholder

Dalam upaya perlindungan WNI dari bahaya radikalisme dan ekstremisme, terdapat beberapa *stakeholder* dari pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat berperan di dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Masalah koordinasi antarlembaga pemerintah masih menjadi suatu tugas yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Potensi penyebaran paham radikal terhadap WNI merupakan isu yang perlu ditangani secara lintas sektoral. Isu ini melibatkan lembaga

dengan kewenangan dan keahlian yang berbeda-beda, termasuk bidang hubungan internasional, keamanan, sosial, serta ekonomi, sehingga menimbulkan tantangan institusional dalam mewujudkan koordinasi yang efektif (FGD Bappenas, 2019; Interview BNPT, 2019). Lemahnya koordinasi instansi di tingkat kebijakan berakibat pada munculnya sejumlah kendala pada tatanan operasional, seperti pembagian tugas yang tumpang tindih dalam melakukan pengawasan WNI di luar negeri, *burden sharing* yang tidak seimbang di antara institusi, serta penugasan institusi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Aspek kerja sama dengan pihak eksternal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi WNI dari paham-paham yang bersifat ekstrem. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani isu terorisme selama ini sangat berfokus pada bidang kontra-terorisme dan masih mengedepankan dimensi keamanan di dalamnya. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pihak eksternal sampai saat ini telah banyak menghasilkan berbagai perangkat kontra-terorisme yang efektif di tingkat domestik; termasuk di antaranya Detasemen 88 (kerja sama POLRI dengan Australia Federal Police), Counter-Terrorism Task Force (CTTF) dan Counter Terrorism Action Plans (CTAP) (di bawah APEC). Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum memprioritaskan kerja sama di dalam isu anti-terorisme dengan pihak eksternal, sehingga belum banyak upaya antar-negara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan radikalisme di luar negeri.

Institusi yang menjadi *stakeholder* dalam isu perlindungan WNI di luar negeri dari bahaya radikalisme dan ekstremisme, antara lain sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Stakeholders yang Terlibat dalam Upaya Pelindungan WNI di Luar Negeri

No.	Nama Institusi	Jenis Institusi	Peran
1.	Kedutaan dan Konsulat RI di Luar Negeri (di bawah Kementerian Luar Negeri RI)	Pemerintah	Melakukan pendataan terhadap eksistensi WNI di Luar Negeri Menjalin hubungan dengan pemerintah setempat terkait adanya permasalahan WNI di Luar Negeri.
2.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Pemerintah	Memberikan pembekalan terhadap PMI di luar negeri lewat kementerian terkait sebelum keberangkatan PMI
3.	Badan Intelijen Negara (BIN)	Pemerintah	Mengantisipasi adanya gangguan keamanan dengan melakukan <i>profiling</i> WNI
4.	Kementerian Agama (Kemenag)	Pemerintah	Membantu persiapan materi pelatihan yang akan disampaikan pada PMI maupun masyarakat yang hendak ke LN
5.	Kementerian Sosial (Kemensos)	Pemerintah	Memberikan pengetahuan pada publik terkait peran Kemensos dalam hal fundamentalisme dan radikalisme
6.	Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Pemerintah	Terkait PMI, BNP2TKI mewajibkan PMI melapor sesampainya di Luar Negeri. Selain itu terkait pembekalan sebelum keberangkatan BNP2TKI melakukan pembinaan dan pembekalan pada PMI dengan mengkhhususkan PMI yang ditujukan ke negara timur tengah. Tidak ada pembekalan khusus tentang radikalisme. Tahun 2020 akan diadakan pembekalan bela negara dengan kerja sama bersama Kemhan
7.	Balai Latihan Kerja (BLK) TKI	Pemerintah/ Swasta	Melakukan persiapan kesiapan PMI sebelum keberangkatan
8.	Organisasi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Perkumpulan pelajar, perserikatan buruh, dll.)	Organisasi Sipil	Peran dari organisasi ini dapat dilihat dengan adanya keaktifan WNI di Luar Negeri dalam menumbuhkan solidaritas antara WNI

2. Analisis Ancaman: Kepulangan Simpatisan ISIS ke Indonesia (*Returnee* dan *Deportant*)

UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan kriminal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam penanganannya, pemerintah Indonesia perlu menggunakan pendekatan yang berbeda dari pendekatan perang maupun tindak kejahatan kriminal biasa, sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan juga UU No. 15 Tahun 2003. Oleh karena itu, penerimaan WNI yang sempat terlibat dalam tindak kejahatan terorisme di luar negeri menjadi isu yang diperdebatkan baik itu di ranah akademik maupun pemerintahan.

Di satu sisi, terdapat perspektif kosmopolitan menyatakan bahwa apabila seorang warga negara yang menyerahkan diri kepada organisasi terorisme internasional, maka secara otomatis orang tersebut telah kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*). Organisasi teror seperti ISIS telah mengubah konsepsi terorisme sebagai salah satu bentuk dari kejahatan transnasional, sehingga pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya bertindak sebagai *transnational person/actor* (Wawancara, akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019). Dalam sebuah wawancara dengan Nasir Abbas, mantan petinggi dari Jamaah Islamiyah, diungkapkan bahwa seseorang yang telah bergabung dengan organisasi teror telah kehilangan ikatan batin dengan negara asalnya, sehingga status kewarganegaraannya perlu dipertanyakan (Wawancara, akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019).

Argumen ini juga diperkuat dengan Pasal 23, UU No. 12 Tahun 2006 tentang keimigrasian, yang menyatakan bahwa WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan beberapa hal, termasuk di antaranya memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri (terdapat beberapa pendapat yang melihat ISIS sebagai sebuah entitas semi-negara), dan/atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Sementara itu, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, saat ini masih tetap melakukan upaya perlindungan terhadap WNI yang pernah terlibat dalam tindak kejahatan terorisme internasional, merujuk kepada dasar hukum UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006. Pemerintah Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut

terkait permasalahan ini, berhubung pengalaman Indonesia dalam pemulangan 200 WNI dari perbatasan Pakistan-Afghanistan pada tahun 1980 hingga awal tahun 1990-an dilakukan tanpa meninggalkan kerangka kebijakan yang dapat digunakan dalam kasus-kasus serupa (Sumpter, 2018). Bentuk terorisme yang kini muncul pun telah bertransformasi, karena jaringan teroris yang perlu diwaspadai bukan hanya kekuatan militer ISIS yang telah lumpuh, tetapi juga *clandestine cells* terorisme yang masih terus hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Amaranya Nasir, pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia bukanlah hal yang sederhana dan memakan proses yang cukup panjang. Berbagai institusi yang terlibat dalam proses pemulangan ini telah menyatakan kesediaannya untuk turut memfasilitasi kepulangan simpatisan ISIS ke Indonesia. Pernyataan ini juga senada dengan Polri, yang menyatakan bahwa repatriasi simpatisan ISIS memerlukan penilaian dan evaluasi yang ketat. Sementara itu, pihak BNPT telah menyatakan bersedia untuk memimpin upaya koordinasi pemulangan mantan anggota ISIS dan keluarganya dari Suriah (Rasyid, et. al. 2019).

Karenanya pemerintah Indonesia juga perlu meninjau dengan penuh kehati-hatian mengenai manfaat dan risiko atas dampak dari pemulangan mantan simpatisan ISIS ke Indonesia. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa pemulangan *deportant* dan *returnee* ke Indonesia juga dapat menjadi sarana negara untuk mematahkan narasi negatif yang disebarkan kelompok teroris mengenai pemerintah. Ditambah lagi, pemerintah juga dapat melakukan pemulangan dengan fasilitas keamanan yang terpercaya sehingga mantan simpatisan ISIS dapat terdata dan terawasi di Indonesia (Wawancara, Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Terdapat beberapa analisis masalah yang dapat dimunculkan dari isu meningkatnya gelombang kepulangan *returnee* dan *deportant* ISIS ke Indonesia.

Sasaran Kebijakan

Pemetaan sasaran kebijakan merupakan hal yang penting dalam isu pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia, sebab pemerintah perlu melakukan serangkaian prosedur yang tepat sasaran dalam menghadapi beragam kasus yang berbeda-beda pada tiap individu WNI. Tugas

pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti pada proses identifikasi dan pemulangan saja, tetapi juga berlanjut pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan simpatisan ISIS ke tengah masyarakat Indonesia.

Terdapat dua terminologi yang umum digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengkategorisasikan kembalinya *violent extremists* yang pernah menjadi simpatisan organisasi teroris: *returnee* dan *deportant*. Sejak tahun 2017, penggunaan label tersebut menjadi umum digunakan dalam membedakan *violent extremists* yang kembali secara sukarela (*returnee*) dan secara paksa (*deportant*) (Sumpter, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, tercatat bahwa jumlah warga negara Indonesia yang dideportasi sebelum mencapai Suriah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah WNI yang memutuskan untuk kembali secara sukarela setelah bergabung dengan ISIS (Rahmanto, 2018 dalam Rasyid et. al, 2018).

Tabel WNI yang terafiliasi konflik Suriah dan Irak

No.	WNI berhubungan dengan FTF di Suriah dan Irak	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Masih di Suriah dan Irak	451	188	639
2.	Tewas di Suriah dan Irak	107	4	111
3.	Telah Kembali ke Indonesia sebagai <i>returnee</i>	76	21	97
4.	Telah dideportasi ke Indonesia	315	238	555
5.	Berencana pergi ke Suriah dan Irak	116	62	178
Total		1.067	513	1.580

Sumber: Rahmanto 2018, dalam Rasyid et.al, 2018

Meski pembagian kategori WNI simpatisan ISIS ke dalam *returnee* dan *deportant* bertujuan untuk membedakan tingkat determinasi WNI kembali terlibat dalam aksi terorisme, namun penggunaan kategori tersebut secara mandiri tidaklah cukup untuk memetakan persebaran simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia. Terdapat beberapa indikator lain yang perlu dipertimbangkan dalam melihat sasaran dari kebijakan pemulangan.

Dari segi potensi ancaman, pemerintah meyakini bahwa sejauh ini *deportant* merupakan kelompok yang lebih berpotensi melakukan serangan teror di dalam negeri dibandingkan dengan *returnee* (Wawancara, BNPT, 2019). Hal ini dikarenakan mayoritas simpatisan ISIS yang dideportasi ke Indonesia belum terpapar dengan keadaan di

wilayah konflik, sehingga gagasan mengenai ISIS di benak mereka belum dapat dibandingkan dengan kondisi empiris yang ada di medan tempur (FGD, FISIP UI, 2019). Ketika *deportant* kembali ke Indonesia, narasi radikal yang mereka percayai mengenai ISIS masih belum terpatahkan dan keinginan mereka untuk “berjihad” masih belum tersalurkan. Berbeda halnya dengan *returnee* yang rata-rata secara sukarela kembali ke Indonesia karena merasa bahwa keadaan yang mereka dijumpai di wilayah konflik berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh ISIS (FGD, FISIP UI, 2019).

Dari tahun 2015, sejak pertama kali Indonesia menerima *deportant*, terdapat setidaknya tiga kasus yang dilakukan oleh simpatisan ISIS yang dipulangkan secara paksa dari luar negeri. Kasus tersebut adalah Anggi Indah Kusuma (terdakwa atas kasus perencanaan bom bunuh diri di Istana Negara), Young Farmer (terdakwa atas kasus perencanaan bom bunuh diri di Istana Negara), dan Tomi Gunawan (terdakwa aksi rencana serangan teror Bandung) (Sumamdoyo, 2018; dikutip juga dalam Rasyid et al, 2019)

Sementara itu, jumlah yang ditimbulkan oleh *returnee* sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan *deportant*. Tercatat bahwa sejak pertama kali berdirinya ISIS hingga sekarang, hanya satu serangan yang ditimbulkan oleh *returnee* di Indonesia. Syawaludin Pakpahan melakukan pegeboman di Medan pada tahun 2017, setelah sebelumnya mendapatkan program rehabilitasi dari pemerintah selama satu bulan di tahun 2016. Setelah direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, Syawaludin Pakpahan kembali teradikalisasi dan melakukan aksi serangan teror (Rininta, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dari 97 orang *returnee* (Rahmanto, 2019) yang telah kembali ke Indonesia sejak tahun 2014, hanya satu orang saja yang kembali sebagai residivis dan melakukan serangan teror.

Dihitung dari persentase keseluruhan jumlah *returnee* dan *deportant*, risiko munculnya residivis di antara simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia sesungguhnya sangat kecil, yaitu 1,03% untuk *returnee* dan 0,54% untuk *deportant*. Persentase ini menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia sangatlah minim. Dengan kata lain, upaya repatriasi dan rehabilitasi pemerintah Indonesia telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Data di atas juga secara empirik mematahkan asumsi bahwa *deportant* memiliki faktor ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan *returnee*. Kategorisasi *returnee* dan *deportant*, meskipun sedikit banyak memberikan perbedaan gambaran mengenai bentuk ancaman yang muncul dari WNI yang kembali ke Indonesia, namun tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat ancaman yang dibawa oleh simpatisan ISIS. Hal tersebut berpotensi menyebabkan proses rehabilitasi yang tidak efektif, serta memunculkan kemungkinan penyebaran paham radikal dari satu narapidana terorisme kepada narapidana terorisme lainnya (wawancara, BNPT, 2019).

Hal lain yang masih sering luput dari perhatian pembuat kebijakan adalah pendekatan khusus terhadap narapidana terorisme perempuan dan anak di bawah umur. Pemerintah melihat terorisme sebagai sebuah tindak kejahatan yang bersifat maskulin, sehingga metode yang dipergunakan dalam proses hukum, rehabilitasi, maupun reintegrasi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh narapidana terorisme. Padahal, jumlah simpatisan ISIS perempuan yang berangkat ke Suriah memiliki persentase yang cukup besar. Penelitian Allard pada tahun 2017 mencatat bahwa terdapat setidaknya 113 WNI perempuan simpatisan ISIS yang berada di Irak dan Suriah (Allard, 2017). Banyak diantara WNI tersebut yang pergi membawa keluarga mereka, termasuk anak-anak. Kini diperkirakan terdapat lebih dari seratus orang WNI di bawah umur yang berada di Irak dan Suriah (Chan dalam Rasyid et. al., 2019).

Terdapat juga perkembangan dari bentuk terorisme kontemporer yang terdeteksi setelah ISIS terbentuk di tahun 2014. Apabila sebelumnya terorisme cenderung diidentikkan dengan suatu gerakan yang maskulin, kini organisasi-organisasi teroris telah mengembangkan strateginya dengan melibatkan perempuan dan anak-anak (Rasyid, et. al., 2019). Perempuan dan anak-anak tidak hanya terlibat dalam penyebaran narasi ideologi radikal, tetapi juga dalam aksi teror seperti penembakan dan bom bunuh diri. Penelitian yang dilakukan oleh INSEP setelah melakukan *profiling* terhadap kategori umur dan etnis tersangka terorisme dari Indonesia, ditemukan bahwa 40% dari tersangka merupakan anak di tingkat SMA umum yang berlatar belakang SMA sekuler, bukan madrasah. Kenyataan ini menjadi bertolak belakang apabila pendekatan yang dilakukan adalah pengawasan hanya semata-

mata terhadap madrasah (Wawancara, akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019).

Selain itu, salah satu asumsi yang paling sering dipergunakan oleh pemerintah dalam melihat simpatisan ISIS yang berangkat ke wilayah konflik adalah permasalahan ekonomi (wawancara, BNPT, 2019). ISIS dianggap sebagai salah satu alternatif yang menawarkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sehingga banyak masyarakat yang bergabung dengan ISIS untuk menjamin kehidupan mereka. Akan tetapi, kasus Bom Gereja Surabaya yang terjadi pada tahun 2018 mematahkan asumsi tersebut, mengingat pelaku merupakan sebuah keluarga yang cukup berada dari kelas ekonomi menengah-atas.

Latar belakang sosial juga memegang peranan penting untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme. Hal ini menyangkut dua hal: *pertama*, banyak di antara simpatisan ISIS yang telah melewati proses rehabilitasi dan reintegrasi kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk anggota keluarga lain yang telah teradikalisasi (wawancara, BNPT, 2019). Tanpa pengawasan dan pendampingan yang baik dari pemerintah – saat ini fungsi tersebut dilaksanakan oleh BNPT – interaksi eks-narapidana terorisme dengan lingkungan sosial lamanya dapat memunculkan potensi residivis. *Kedua*, masyarakat tempat di mana eks-narapidana terorisme dire-integrasikan perlu mendapatkan pengarahan dan pelatihan mengenai bagaimana mereka memperlakukan eks-narapidana terorisme yang kembali ke tengah-tengah masyarakat (wawancara, Wahid Foundation, 2019). Seringkali, pemerintah melakukan proses rehabilitasi dan re-integrasi dengan tujuan mempersiapkan eks-narapidana terorisme untuk bisa kembali hidup di masyarakat, tetapi tidak mempersiapkan masyarakat di sekelilingnya untuk dapat menerima eks-narapidana terorisme. Hal tersebut menyebabkan banyak eks-narapidana terorisme hidup terkucil tanpa kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (wawancara, Wahid Foundation, 2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah klasifikasi ancaman yang lebih lengkap dan berlapis, baik itu dari segi 1) tingkat ancaman, 2) gender, 3) usia, 3) ekonomi dan tingkat pendidikan, 4) latar belakang sosial, sehingga proses pasca pemulihan simpatisan ISIS ke Indonesia –

khususnya rehabilitasi dan reintegrasi simpatisan ISIS ke dalam masyarakat – dapat berjalan secara efektif.

Kerangka Hukum dan Kebijakan

Dalam proses pemulangan WNI simpatisan ISIS ke Indonesia, pemerintah perlu melakukan serangkaian proses untuk meminimalisir faktor ancaman yang muncul. Proses tersebut melibatkan berbagai macam institusi pemerintah dengan latar belakang yang berbeda. Adapun proses tersebut terdiri dari:

1. Identifikasi WNI simpatisan ISIS
2. Proses pemulangan WNI simpatisan ISIS
3. Proses hukum sesuai dengan perundang-undangan
4. Rehabilitasi simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia
5. Reintegrasi simpatisan ISIS ke dalam masyarakat
6. Pendampingan oleh petugas pemerintah

Proses tersebut hakikatnya perlu dilakukan dengan mengacu kepada peraturan serta standard operasional yang berlaku. Sayangnya, hingga kini belum terdapat payung hukum dan kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk menanggulangi kepulangan simpatisan ISIS ke Indonesia. Sejauh ini, pemulangan simpatisan ISIS, baik itu *returnee* maupun *deportant*, dilakukan secara *ad-hoc* dan belum diatur dalam kebijakan dan hukum yang diatur secara resmi oleh pemerintah.

Penanganan kepulangan simpatisan ISIS ke Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada perundang-undangan terkait terorisme yang dilakukan di tingkat domestik, khususnya UU No. 5 Tahun 2018 (Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU) dan KUHP (Pasal 106-110 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara). Sementara itu, ketika menyangkut teknis dalam proses identifikasi dan pemulangan, pemerintah mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, tahapan deradikalisasi dan reintegrasi memegang peranan kunci dari pemulangan simpatisan ISIS ke tanah air, dikarenakan kedua tahapan tersebut menjadi indikator yang menentukan penurunan faktor ancaman dari *returnee* dan *deportant* yang kembali ke Indonesia.

Proses rehabilitasi untuk *deportant* dan *returnee* dilaksanakan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43D mengenai deradikalisasi. Akan tetapi, berdasarkan pasal tersebut, proses rehabilitasi simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia dilakukan dengan metode dan kurikulum serupa dengan yang dilakukan terhadap narapidana terorisme secara umum. Menurut poin ke-5 pasal 43D, proses deradikalisasi dilakukan dapat dilaksanakan melalui 1) pembinaan wawasan kebangsaan; 2) pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau 3) kewirausahaan.

Akan tetapi, setiap narapidana terorisme memiliki latar belakang beragam, dan hampir setiap individu memiliki kasus yang berbeda dengan lainnya. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia memerlukan sebuah pemetaan target kebijakan yang lebih spesifik menyangkut simpatisan ISIS dari luar negeri. Proses rehabilitasi dan reintegrasi yang tidak diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan individu narapidana teroris dikhawatirkan akan meningkatkan munculnya residivis dari *deportant* dan *returnee* yang telah berhasil di reintegrasikan ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kajian lebih lanjut mengenai pentingnya kerangka hukum dan kebijakan yang menyangkut proses pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat guna.

Instrumen dan Fasilitas

Sehubungan dengan pemulangan simpatisan ISIS, kiranya memerlukan beberapa proses tahapan yang berbeda. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemulangan simpatisan ISIS dari wilayah konflik diantaranya adalah infrastruktur, sumber daya manusia, serta materi (termasuk indikator psikologis, kurikulum deradikalisasi, dan pelatihan keterampilan pasca-deradikalisasi).

Dikarenakan belum ada mekanisme serta kerangka hukum yang spesifik membahas mengenai kembalinya simpatisan ISIS ke tanah air, saat ini hampir semua fasilitas yang dipergunakan untuk menangani *returnee* dan *deportant* yang kembali ke Indonesia merupakan fasilitas yang sama dengan yang digunakan dalam menangani isu terorisme

domestik, termasuk dalam pelaksanaan proses penahanan dan rehabilitasi. Sekalipun penggunaan fasilitas yang sama tidak memiliki faktor risiko khusus, namun keterbatasan fasilitas membuat banyak narapidana terorisme dikumpulkan dalam satu ruang tahanan dan pusat rehabilitasi. Terdapat kekhawatiran bahwa penahanan dan rehabilitasi *returnee* dan *deportant* dengan pelaku kejahatan terorisme lainnya akan menimbulkan penyebaran narasi radikal di antara mereka (wawancara, BNPT, 2019; FGD, FISIP UI 2019).

Dari segi sumber daya manusia, proses pemulangan simpatisan ISIS memerlukan sumber daya manusia yang memadai, baik itu secara jumlah maupun kompetensi. Dalam proses rehabilitasi, misalnya, fasilitator yang memberikan materi terhadap narapidana terorisme haruslah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Kebanyakan dari narapidana terorisme, khususnya *deportant* yang belum memiliki pengalaman empirik mengenai kondisi di wilayah konflik, merupakan individu yang merasa bahwa dirinya memiliki pemahaman agama yang komprehensif (Wawancara, BNPT, 2019; Wawancara, Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Pada kasus terburuk, narapidana terorisme bahkan dapat meradikalisasi aparat yang bertugas di pusat rehabilitasi dan rumah tahanan. Untuk itu, pemerintah, khususnya BNPT dan Densus 88, perlu mencari narasumber dan fasilitator yang memiliki kompetensi di bidang deradikalisasi (Wawancara, BNPT, 2019).

Terlepas dari proses deradikalisasi dalam rehabilitasi simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia, proses pendampingan jangka panjang setelah eks-narapidana terorisme diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat juga merupakan hal yang tidak bisa disepelekan (wawancara, BNPT, 2019). Saat ini pendampingan tersebut dilaksanakan oleh BNPT, bekerja sama dengan kementerian sosial untuk memastikan aspek keamanan, sosial, dan ekonomi dari eks-narapidana terorisme (FGD, BAPPENAS, 2019). Akan tetapi, saat ini BNPT mengalami kesulitan untuk mendapatkan SDM yang cukup dalam melakukan pendampingan terhadap eks-narapidana terorisme. Di sisi lain, banyak di antara eks-narapidana terorisme yang kembali menjalin komunikasi dengan jaringan lamanya. Jaringan tersebut secara konsisten berupaya memberikan dukungan terhadap eks-narapidana terorisme dengan menawarkan bantuan berupa tunjangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan kesempatan ekonomi, menjamin pendidikan

anak, dan masih banyak lagi (Wawancara, BNPT, 2019; Wawancara Wahid Foundation 2019). Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan oleh BNPT harus dapat bersaing dengan proses “perekrutan kedua” yang dilakukan oleh jaringan radikal.

Terakhir, dari segi materi, proses pemulangan simpatisan ISIS, khususnya di bagian rehabilitasi, perlu dilakukan dengan baik. Selama ini, muncul pertanyaan: Seberapa efektifnya metode deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap narapidana terorisme? Pemerintah melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme dengan mengacu kepada nilai-nilai agama dan kewarganegaraan. Akan tetapi, pemerintah seringkali melupakan bahwa setiap narapidana menerima narasi radikal yang berbeda (FGD, FISIP UI, 2019). Proses rehabilitasi yang dilakukan dalam jangka waktu singkat (30 hari), dengan materi umum bagi semua kategori tahanan tanpa memedulikan latar belakang serta konteks radikalisasi tahanan tersebut, akan berpotensi menghasilkan deradikalisasi yang tidak menyeluruh.

Focus Group Discussion yang dilakukan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI (2019), salah satu narasumber *returnee* ISIS (seorang remaja perempuan) menyatakan bahwa selama ini proses rehabilitasi yang diterimanya tidak dibedakan dengan narapidana lainnya sehingga ia tidak mendapatkan materi yang sesuai dengan konteksnya. Salah satu pendekatan yang dinilai cukup berhasil, menurutnya, adalah pendekatan yang dilakukan secara tidak langsung oleh kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memberlakukan metode sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang lebih akrab, seperti membuat kerajinan ataupun memasak. Hal ini menunjukkan bahwa selain pendekatan keamanan, keagamaan, dan kewarganegaraan, pemerintah khususnya BNPT, perlu menerapkan pendekatan yang sifatnya *soft approach*.

Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya mampu bergerak melampaui pola pikir “tingkat penyerapan anggaran” (Wawancara, Akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019). Selain materi dan kurikulum deradikalisasi masih bersifat umum, banyak juga program jangka pendek yang masih bersifat *ad-hoc*. Salah satu contoh dari kegiatan tersebut adalah inisiatif forum deradikalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia (Wawancara, Akademisi Hub. Internasional UNPAD, 2019).

Sepatutnya keputusan untuk menerima kembali simpatisan ISIS disertai dengan kebijakan *total deradicalization* yang komprehensif dan efektif sehingga meminimalisir munculnya risiko ancaman. Salah satu cara untuk melakukannya adalah mengadakan program deradikalisasi dengan menggunakan materi yang tepat sasaran, bersentral pada *soft-approach*, dan bersifat berkesinambungan.

***Stakeholders* yang terlibat di dalam repatriasi simpatisan ISIS ke Indonesia**

Salah satu permasalahan klasik yang muncul dalam pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia, baik itu sebagai *returnee* maupun *deportant*, adalah koordinasi antar-lembaga pemerintah. Mengingat proses pemulangan memerlukan prosedur dan waktu cukup panjang serta kompleks, maka koordinasi dapat menjadi suatu hal sulit, khususnya ketika belum ada kerangka hukum dan kebijakan yang membahas mengenai hal tersebut.

Kementerian Luar Negeri RI selama ini berada di garis depan dalam upaya repatriasi simpatisan ISIS yang berada di wilayah konflik. Salah satu upaya paling awal dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam memulangkan simpatisan ISIS adalah melakukan identifikasi WNI. Banyak dari simpatisan ISIS dengan sengaja memusnahkan dokumen identitas dirinya ketika mereka bergabung dengan ISIS. Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini bertugas melakukan verifikasi data terkait apakah individu yang menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia memang benar merupakan seorang WNI (Wawancara, Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Di beberapa kasus, dimana WNI yang ada di wilayah konflik merupakan PMI/TKI, Kementerian Luar Negeri RI juga melibatkan BNP2TKI dalam proses identifikasinya. Dalam rangka melakukan pemulangan, Kementerian Luar Negeri RI juga berperan dalam melakukan kontak dengan pihak perantara, penjemputan di lokasi konflik, serta memfasilitasi hubungan

antara WNI di wilayah konflik dengan pemerintah Indonesia (Wawancara, Kementerian Luar Negeri RI, 2019; FGD, FISIP UI, 2019).

Tantangan lebih besar bagi pemerintah Indonesia justru muncul setelah simpatisan ISIS kembali ke Indonesia. Di bawah koordinasi BNPT, Polri dan lembaga hukum negara perlu mengidentifikasi penanganan yang perlu dilakukan terhadap simpatisan ISIS tersebut (Wawancara, BNPT, 2019). Bagi WNI yang telah terbukti bergabung dengan ISIS sebagai FTF, WNI tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tertera pada pasal 12 UU No. 5 Tahun 2018. Baru setelah menjalani hukumannya, para FTF akan menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sementara itu, bagi *deportant* dan *returnee* yang teradikalisasi namun tidak terlibat langsung dalam tindak kejahatan terorisme, pada umumnya pemerintah akan mengarahkan individu-individu tersebut pada program rehabilitasi, dan selanjutnya direintegrasikan ke dalam masyarakat (Wawancara, BNPT 2019).

Program rehabilitasi yang dilakukan bertujuan agar simpatisan ISIS dapat terbebas dari paham-paham radikal yang dianutnya. Pada tahapan ini, BNPT melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Sosial, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Akan tetapi, selama ini dirasakan bahwa program rehabilitasi yang dilakukan oleh negara cenderung tidak terkoordinasi secara baik (Wawancara, akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019). Sementara itu, pelibatan pihak ketiga dari aktor non-negara dalam proses rehabilitasi masih sangat minim. Padahal aktor non-negara seperti LSM dan Organisasi Sipil seringkali memiliki pemahaman yang mendalam mengenai proses rehabilitasi narapidana terorisme karena mereka bekerja langsung di lapisan akar masyarakat. Selain itu, pelibatan aktor non-negara juga berperan signifikan dalam menghadirkan proses *check and balance process* dalam mengantisipasi kecenderungan pemerintahan yang sering berganti-ganti program ketika terjadi perubahan kepemimpinan (Wawancara, akademisi Hubungan Internasional UNPAD, 2019).

Dalam tabel di bawah ini, dapat dilihat pembagian peran yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Stakeholders yang berperan dalam Pemulangan WNI Simpatisan ISIS

No.	Nama Institusi	Jenis Institusi	Peran
1.	Kementerian Luar Negeri RI	Pemerintah	Melakukan kontak dengan pihak perantara dalam rangka pemulangan, melakukan penjemputan di lokasi konflik, memfasilitasi hubungan antara WNI dengan kontak di lokasi konflik dan pemerintah di dalam negeri, membangun kerja sama jangka panjang dalam rangka pemulangan <i>returnee</i> dan <i>deportant</i> dengan negara ain.
2.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Pemerintah	Melakukan fasilitasi dalam hubungan kedutaan/konsulat terhadap pemetaan wilayah konflik. Mengawal koordinasi proses rehabilitasi dan reintegrasi pasca <i>returnee</i> dan <i>deportant</i> tiba di tanah air.
3.	Badan Intelijen Negara (BIN)	Pemerintah	Membantu dalam profiling dan memberikan informasi terhadap pemulangan WNI.
4.	Kementerian Agama (Kemenag)	Pemerintah	Memberikan pendekatan religius yang moderat terhadap <i>returnee</i> dan <i>deportant</i> .
5.	Kementerian Sosial (Kemensos)	Pemerintah	Memberikan karantina selama satu bulan terhadap <i>returnee</i> dan <i>deportant</i> dalam rangka memberikan wawasan kebangsaan.
6.	Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Pemerintah	Melakukan pemeriksaan terkait jaringan PMI yang ada dalam data BNP2TKI terhadap kemungkinan keterkaitan penggunaan jalur PMI untuk simpatisan ISIS
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Organisasi Sipil	Memberikan pendampingan dalam kegiatan harian pasca karantina di Kemensos.
8.	Badan Usaha Milik Swasta	Swasta	Memberikan bantuan dalam kapabilitas sesuai kemampuan ruang isu yang dimiliki masing-masing, seperti memberdayakan eks-simpatisan ISIS dalam kegiatan ekonomi kreatif.



Memagari WNI di Luar Negeri dari Ancaman Ekstremisme dan Radikalisme

*P*ada tulisan sebelumnya telah dibahas dan dianalisa potensi ancaman yang muncul dalam isu perlindungan WNI di luar negeri dari bahaya radikalisme dan isu pemulangan WNI simpatisan ISIS ke Indonesia. Nampak adanya beberapa benang merah yang dapat ditarik dari tulisan tersebut. **Pertama**, meskipun isu penyebaran radikalisme terhadap WNI di luar negeri dan repatriasi simpatisan organisasi teror bukan merupakan permasalahan yang baru, kondisi ancaman dari organisasi teroris modern seperti ISIS membuat pemerintah Indonesia perlu memperbaharui perspektifnya mengenai potensi ancaman yang muncul. Sayangnya, saat ini belum terdapat kerangka hukum yang mendasari kedua permasalahan tersebut, sehingga penanganan pemerintah masih bersifat sporadik dan *ad-hoc* serta masih terikat dengan pola pikir ‘penyerapan anggaran’. Dengan kata lain, kebanyakan lembaga-lembaga pemerintah telah memiliki pengamanan terdahulu dalam menghadapi kedua permasalahan ini, tetapi secara legal formal masih dianggap sebagai sesuatu yang “baru.”

Kedua, sehubungan dengan isu yang bersifat multi-dimensi dan multi-sektoral, terdapat banyak institusi negara dan non-negara yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentu menyebabkan beberapa tantangan, khususnya terkait masalah koordinasi. Spesifikasi peran, tugas, dan fungsi yang jelas dibutuhkan untuk membuat sebuah tata kelola yang efektif bagi pencegahan bahaya radikalisme bagi WNI di luar negeri serta penanganan kepulangan simpatisan ISIS ke Indonesia. Tumpang tindih tanggungjawab akan berdampak buruk bagi efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga negara di kedua isu ini, khususnya jika diikuti dengan ego sektoral masing-masing instansi.

Ketiga, kedua isu memerlukan penanganan berjangka panjang melalui upaya CVE yang komprehensif. Pada isu pencegahan penyebaran paham radikal pada WNI di luar negeri, khususnya PMI/TKI, pemerintah seyogyanya melaksanakan upaya anti-radikalisasi melalui program-program yang berkesinambungan. Upaya tersebut perlu disertai dengan proses pengawasan dan pemantauan secara berkala melalui instrumen yang terukur – sebagai contoh, tes psikologi berkala – untuk melihat tingkat radikalisme seseorang. Di sisi lain, upaya yang bersifat kesinambungan juga diperlukan dalam masalah repatriasi WNI simpatisan ISIS, khususnya pada proses deradikalisasi dan reintegrasi.

Rekomendasi kebijakan dirumuskan dengan mengacu kepada landasan teoritis serta *best practices* dalam menghadapi kedua isu tersebut. Tulisan ini berupaya untuk memasukkan aspek-aspek yang dinilai dapat menambah efektivitas upaya pemerintah di kedua isu secara spesifik, sesuai dengan analisis yang terdapat pada tulisan terdahulu. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan merupakan masukan dari perspektif akademik, sehingga bahasannya dilakukan dengan sudut pandang yang mungkin berbeda dengan pemerintah. Oleh karena itu, pada tulisan ini terkandung rekomendasi yang ideal secara teoretik, namun sulit diimplementasikan ketika melihat keadaan empirik. Pada akhirnya, pemerintah tetap menjadi pihak yang menentukan kebijakan terbaik sesuai dengan arah kepentingan Indonesia di masa depan.

1. Melindungi WNI di Luar Negeri dari Bahaya Radikalisme

Membuat Program Anti-Radikalisasi Berkelanjutan untuk WNI di Luar Negeri

Upaya anti-radikalisasi telah dilakukan melalui program-program pemerintah di berbagai kalangan masyarakat. Hanya saja, sejauh ini, belum terdapat program jangka panjang yang menasar WNI di luar negeri. Untuk itu, pemerintah sebaiknya mulai memikirkan sebuah program anti-radikalisasi bagi WNI di luar negeri sebagai tindakan preventif untuk mencegah radikalisme, khususnya bagi WNI yang menetap di luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu panjang. Program anti-radikalisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya adalah 1) deteksi, 2) strategi gentar (*deterrence*) dan 3) menggunakan *soft approach*. Ketiga aspek tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk metode deteksi, hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan mengandalkan informasi intelijen (*human intelligence* dan *open source intelligence*), *profiling*, dan pengukuran ideologi melalui tes psikologi berkala. Sementara itu, strategi gentar dalam upaya anti-radikalisme dilaksanakan dengan melakukan peringatan terkait risiko dan bahaya radikalisme. Terakhir, pendekatan *soft approach* dapat dilakukan untuk memberikan narasi ideologi yang moderat terhadap WNI di luar negeri melalui jalur-jalur yang tidak langsung (*indirect*), sehingga lebih dapat diterima oleh audiens yang dituju.

Membentuk Badan Koordinasi Pencegahan Radikalisme untuk WNI di Luar Negeri

Mempertimbangkan latar belakang isu yang multi-dimensi dan multi-sektoral, pemerintah memerlukan komunikasi antar-lembaga yang baik dalam merealisasikan upaya anti-radikalisasi terhadap WNI di luar negeri. Untuk itu, disarankan pemerintah Indonesia membentuk sebuah

badan koordinasi khusus yang menangani upaya anti-radikalisasi bagi WNI di luar negeri.

Di bagian sebelumnya telah terdapat identifikasi *stakeholders* yang masing-masing memegang peran penting di dalam isu ini. Diperlukan demarkasi peran, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing institusi dalam melakukan upaya di bidang ini. Pada tingkat domestik, selama ini upaya melalui program anti-radikalisasi berada di bawah koordinasi BNPT. Akan tetapi, mengingat bahwa sasaran kebijakan kali ini merupakan WNI yang berada di luar negeri, BNPT juga memerlukan koordinasi dengan lembaga dan institusi pemerintah lainnya seperti Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, Kementerian Sosial, dan Balai Latihan Kerja bagi PMI/TKI. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan aktor non-negara dalam proses ini, khususnya untuk merangkul komunitas WNI yang ada di luar negeri seperti Persatuan Pelajar Indonesia dan Perserikatan Buruh Indonesia.

Meningkatkan Kerja Sama dengan Negara Lain dalam Bidang Anti-Radikalisme

Hingga saat ini, kerja sama yang dilakukan Indonesia dalam isu terorisme masih terpusat pada upaya kontraterorisme saja, sementara jumlah kerja sama di bidang anti-radikalisme masih sangat terbatas. Selain melakukan koordinasi di dalam negeri, pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan untuk melakukan kerja sama dengan aktor negara lain dalam mencegah penyebaran radikalisasi di antara WNI di negara tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar keterbatasan otoritas pemerintah Indonesia dalam melaksanakan fungsi keamanan di luar wilayah teritorialnya, sekalipun pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya.

Kerja sama yang dilakukan dengan negara lain dapat mengacu pada tiga metode anti-radikalisasi yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu deteksi, strategi gentar, dan *soft approach*. Pemerintah Indonesia dapat menjalin kerja sama dalam berbagai dimensi anti-radikalisasi, termasuk di antaranya dimensi keamanan (intelijen dan penegakan hukum), sosial (khususnya agama), ekonomi (pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama terkait peraturan ketenagakerjaan).

Memperbaiki Proses Perekrutan PMI/TKI

Mengingat prosentase terbesar WNI di luar negeri berasal dari kelompok PMI/TKI, disampaikan rekomendasi khusus yang berkaitan dengan proses pengiriman PMI/TKI dalam rangka pencegahan radikalisme. Pengiriman PMI/TKI ke luar negeri dilakukan melalui proses yang panjang, dimulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, hingga PMI/TKI bekerja di luar negeri. Dalam upaya mencegah radikalisme di antara PMI/TKI di luar negeri, upaya pemerintah harus dimulai dari proses paling awal yaitu perekrutan.

Pemerintah, khususnya BNP2TKI, disarankan untuk mengadakan proses perekrutan dengan mengintegrasikan deteksi dini terhadap paham radikal yang dimiliki oleh pelamar. Salah satu contoh metode yang sering digunakan untuk melakukan deteksi dini adalah menggunakan pengisian *boring* psikologi untuk mengukur indikasi pemahaman seseorang tentang suatu ideologi. Hal ini dilakukan dengan maksud mencegah potensi penyalahgunaan jalur pekerja migran untuk kepentingan organisasi teroris ataupun penyebaran ideologi radikal oleh WNI di luar negeri.

Selain itu, pelatihan yang diterima oleh calon PMI/TKI selama di BLK juga perlu mengandung materi wawasan kebangsaan, sehingga terjadi proses anti-radikalisasi terhadap PMI/TKI sebelum mereka pergi ke luar negeri. Dibutuhkan sebuah kurikulum yang terstandard guna memberikan efek gentar kepada calon PMI/TKI, sehingga di masa depan mereka dapat terhindar dari potensi radikalisasi. Fasilitator dan pelatih yang memiliki kompetensi juga menjadi faktor penting dalam proses pelatihan kerja calon PMI/TKI. Perlu dipastikan bahwa fasilitator dan pelatih yang mempersiapkan calon PMI/TKI memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik sehingga fasilitator dan pelatih tidak menjadi agen penyebaran paham radikal kepada para calon pekerja migran.

Rekomendasi kebijakan terkait buruh migran juga tidak berhenti hanya sampai pada proses persiapan keberangkatan, tetapi berlanjut hingga keberangkatan dan selama PMI/TKI berada dalam masa dinas di luar negeri. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam

implementasi fungsi deteksi adalah membuat sebuah instrumen pengukuran ideologi untuk mengukur tingkat radikalisme seseorang. PMI/TKI akan mengisi instrumen tersebut secara berkala, dimulai ketika PMI/TKI berangkat ke negara tujuan.

Instrumen pengukuran ideologi tersebut telah disusun oleh BNPT dan tengah menunggu *assessment* untuk proses implementasinya (wawancara, BNPT, 2019). Seyogyanya pemerintah terus mengawal dan mendorong proses pembuatan instrumen pengukuran ideologi untuk PMI/TKI sehingga potensi radikalisasi WNI di luar negeri dapat diminimalisir. Tentu saja, upaya untuk memonitor pergeseran ideologi PMI/TKI juga perlu disertai dengan metode anti-radikalisasi lainnya, termasuk melakukan program-program kewarganegaraan dan sosialisasi jangka panjang.

Dalam melakukan upaya anti-radikalisasi di antara PMI/TKI, baik itu di dalam negeri (sebelum berangkat) maupun di luar negeri, sebaiknya BLK, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri RI turut melibatkan BNPT sehingga program-program yang dilakukan bisa terarah di bawah payung CVE BNPT.

2. Upaya Pemulangan WNI Simpatisan ISIS ke Indonesia

Melanjutkan Upaya Pelindungan WNI di Wilayah Konflik

Berdasarkan data riil mengenai presentase jumlah Simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia dengan jumlah serangan teror yang dilakukan baik oleh *returnee* maupun *deportant* yang masih berkisar di angka yang kurang dari satu persen (1%), naskah kebijakan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan upaya repatriasi WNI di wilayah konflik, sekalipun WNI tersebut terlibat dalam kegiatan terorisme. Hal ini, tentunya perlu dilakukan seiring dengan komitmen untuk terus meningkatkan proses pemulangan simpatisan ISIS ke Indonesia, khususnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pemerintah perlu sadar bahwa menghilangkan risiko dari upaya repatriasi simpatisan ISIS merupakan hal yang mustahil untuk

dilakukan, akan tetapi pemerintah dapat terus berupaya untuk meminimalisir ancaman yang muncul dari isu tersebut.

Memperkuat Koordinasi dalam Isu Repatriasi Simpatisan ISIS

Serupa dengan isu perlindungan WNI di luar negeri, isu pemulangan WNI simpatisan ISIS ke Indonesia juga merupakan isu yang multi-dimensi dan multi-sektoral sehingga perlu melibatkan berbagai macam institusi negara maupun non-negara. Rekomendasi yang bisa disarankan adalah memperkuat koordinasi antar lembaga dalam repatriasi WNI ISIS ke Indonesia dengan memanfaatkan kelompok kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah yang telah ada.

Penguatan koordinasi diperlukan untuk memperlancar komunikasi antar instansi, terlebih mengingat bahwa pemulangan simpatisan ISIS bukan merupakan upaya jangka pendek, tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Komunikasi lebih lanjut antar K/L terkait juga diperlukan untuk memperjelas pembagian wewenang, tugas, dan fungsi instansi yang terlibat dalam proses identifikasi, pemulangan, penindakan hukum, rehabilitasi serta reintegrasi simpatisan ISIS ke tengah-tengah masyarakat.

Mempertajam Kategorisasi WNI Simpatisan ISIS dari Luar Negeri

Salah satu rekomendasi utama yang diajukan adalah menelaah ulang kategorisasi WNI simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia. Kategorisasi yang selama ini digunakan oleh pemerintah, *returnee* dan *deportant*, sampai batas tertentu memang berfungsi untuk membedakan faktor ancaman yang muncul. Akan tetapi, kategori tersebut cenderung umum dan tidak dapat menggambarkan konteks yang dialami oleh simpatisan ISIS secara jelas. Untuk itu, pemerintah dan penegak hukum perlu mengidentifikasi kategorisasi yang tepat untuk melakukan penanganan terhadap simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia.

Aspek yang dicermati adalah melihat faktor risiko dan ancaman yang muncul dari berbagai kelompok simpatisan ISIS yang direpatriasi.

Tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana *returnee* dan *deportant* dapat dibagi kembali menjadi beberapa kategori berdasarkan dengan tingkatan bahaya atau faktor risikonya.

Dari tabel tersebut, terdapat beberapa tingkat ancaman yang dapat muncul, baik itu dari *returnee* maupun *deportant*. Ancaman tersebut di antaranya adalah a) aksi kejahatan teror, b) transisi ke arah terorisme dan *violent extremism*, serta c) penyebaran radikalisme dan ekstremisme. Risiko tertinggi tetap muncul dari kelompok FTF, mengingat terdapat kemungkinan bahwa pengalaman tempur FTF dapat meningkatkan daya destruktif dari serangan teror yang ada di tingkat domestik ke level yang profesional.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kategorisasi tingkat ancaman ini tidak terlepas dari status *returnee* dan *deportant* yang disandang oleh simpatisan ISIS, tetapi lebih berdasarkan dari pengalaman lapangan (*experience*), tingkat radikalisasi (*degree of radicalization*) dan tingkat keterlibatan (*degree of involvement*) seorang individu di dalam organisasi teror. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dapat mendobrak asumsi yang didasari oleh kategorisasi *returnee* dan *deportant*, dan meninjau faktor risikonya berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan tersebut.

Tabel Tingkat Ancaman yang Muncul pada Simpatisan ISIS

Tipe Ancaman	Identifikasi Sumber	Bentuk Ancaman	Metode	Target
Terorisme	<i>Foreign Terrorist Fighters ISIS (returnee)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme Aksi Teror • Perencanaan aksi teror • Kemungkinan Residivis • Penyebaran paham radikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan penegakan hukum (pendekatan koersif) • Deradikalisasi • Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Efek gentar (<i>deterrence</i>) • Menjauhkan pengaruh (<i>disintegration</i>) • Reintegrasi • Rehabilitasi
Transisi ke arah terorisme <i>Violent Extrimism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supporting member of ISIS</i> (tergabung dalam organisasi namun tidak terlibat langsung dengan kontak senjata) (<i>returnee</i>) • WNI yang dideportasi sebelum bergabung dengan ISIS (<i>deportant</i>) • Keluarga dari <i>ISIS</i> yang kembali dari wilayah konflik (<i>returnee</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan Re-radikalisasi • Perencanaan aksi teror • Penyebaran paham radikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontra-Radikalisasi • Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjauhkan pengaruh (<i>disintegration</i>) • Reintegrasi • Rehabilitasi
Radikalisme dan Ekstremisme	WNI yang mendukung gerakan terorisme di luar negeri (<i>deportant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung perencanaan aksi teror • Penyebaran paham radikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontra-Radikalisasi • Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjauhkan pengaruh (<i>disintegration</i>) • Rehabilitasi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Diversifikasi Pendekatan dalam Proses Rehabilitasi

Rekomendasi ini berkaitan erat dengan penajaman kategorisasi simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia. Sampai saat ini, BNPT masih melakukan upaya deradikalisasi dalam rehabilitasi ekstremis dengan menggunakan metode yang umum. Mempertimbangkan pentingnya

“eks-narapidana terorisme membutuhkan kesempatan dan kesetaraan ekonomi tanpa diskriminasi untuk dapat kembali berfungsi dan menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat”

konteks individual dalam setiap kasus, maka rekomendasi kebijakan yang disampaikan adalah melakukan diversifikasi pendekatan dalam proses rehabilitasi simpatisan ISIS.

Kategorisasi simpatisan ISIS

yang kembali dapat dilakukan berdasarkan latar belakang individu yang bersifat empiris, atau sesuatu yang bisa diukur. Beberapa aspek yang menjadi acuan adalah:

a) **Gender.** Dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Kategori ini menjadi sesuatu yang penting dalam mencari tahu *soft approach* jenis apa yang bisa digunakan untuk mendekati individu tertentu. *Soft approach* berdasarkan gender dibedakan ke dalam kategori-kategori kegiatan bersifat maskulin maupun feminin. Meskipun secara umum pendekatan yang dilakukan oleh BNPT saat ini dapat diterapkan pada kedua gender, namun dalam pelaksanaannya, terdapat satu metode yang mungkin lebih dapat diterapkan pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain.

b) **Usia.** Pendekatan yang dilakukan akan mempertimbangkan aspek hukum bagi anak di bawah umur, serta mengkolaborasikan pendampingan/ konseling dan pendidikan (formal dan agama) bagi anak dan remaja. Hal tersebut dikarenakan, pendekatan hukum dan keamanan yang bersifat koersif kemungkinan tidak akan efektif dalam proses rehabilitasi anak dan remaja yang secara mental masih dalam pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang spesifik dengan didampingi pakar psikologi anak, sehingga proses rehabilitasi tidak menceraabut mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang.

c) **Kelas ekonomi.** Hal ini dapat menentukan pendekatan apa yang perlu diambil, khususnya dalam proses re-integrasi setelah eks-simpatisan

organisasi teroris menyelesaikan proses rehabilitasi. Selama ini pemerintah memberlakukan pelatihan keterampilan dan ekonomi sebagai salah satu aspek wajib dalam proses deradikalisasi. Tetapi sesungguhnya, tidak semua motivasi individu untuk bergabung dan menjadi simpatisan ISIS didasari oleh faktor ekonomi. Eks-simpatisan organisasi teror yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan didorong oleh motif ekonomi (ketika memutuskan untuk berangkat ke wilayah konflik) kemungkinan akan membutuhkan bantuan yang lebih besar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi satu hal yang memiliki persamaan di antara kedua kategori, semua eks-narapidana terorisme akan membutuhkan kesempatan dan kesetaraan ekonomi tanpa diskriminasi untuk dapat kembali berfungsi dan menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat.

d) **Aspek sosial** menjadi hal lain yang menjadi rekomendasi untuk melihat kategori simpatisan ISIS. Aspek sosial bersifat sangat dinamis dan kontekstual dari individu ke individu sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara berbeda di setiap kasus. Aspek sosial yang diperhatikan menyangkut diantaranya: Apakah eks-simpatisan ISIS akan kembali berinteraksi dengan pihak-pihak yang meradikalisasi mereka (keluarga, kolega, teman)? Apakah kerabat dan keluarga mereka bisa menopang dan memberikan dukungan setelah eks-simpatisan ISIS terlepas dari pengawasan negara? Apakah lingkungan masyarakat tempat mereka direintegrasikan dapat menerima mereka? Apakah masyarakat tempat mereka direintegrasikan dapat melakukan persuasi dan membentengi narasi radikal yang mungkin dapat disebar oleh eks-simpatisan ISIS?

Rangkuman dari keempat aspek tersebut dalam menangani simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut (d disesuaikan dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan).

Tabel Penanganan Simpatisan ISIS Sesuai dengan Kategorinya

Tipe Ancaman	Gender	Usia	Kelas Ekonomi	Aspek Sosial
<p>Terorisme</p>	<p>Laki-Laki: Pendekatan yang diiringi dengan upaya <i>soft approach</i> maskulin</p> <p>Perempuan: Pendekatan yang diiringi dengan upaya <i>soft approach</i> feminin</p>	<p>Anak-Anak: Upaya pendekatan psikologis yang diintegrasikan dengan pendidikan agama dan pendidikan formal dasar</p> <p>Remaja: Upaya pendekatan jalur hukum (<i>juvenile</i>), beserta pendekatan psikologis yang diintegrasikan dengan pendidikan agama dan pendidikan formal</p> <p>Dewasa: Penanganan di jalur hukum formal yang diiringi pendekatan <i>soft approach</i>, serta psikologis melalui agama dan kewarganegaraan</p>	<p>Menengah-Ke Bawah: Disertai dengan upaya untuk pemberdayaan ekonomi (pasca-rehabilitasi), dan kesempatan ekonomi untuk mencari penghidupan.</p> <p>Menengah Ke Atas: Kesempatan ekonomi untuk kembali bergabung ke tengah masyarakat.</p>	<p>Disesuaikan dengan konteks keluarga, jaringan, serta masyarakat tempat re-integrasi. Bertujuan untuk mempersiapkan eks-simpatian ISIS, serta membangun ketahanan (<i>resilience</i>) dari masyarakat sekitar.</p>

Tipe Ancaman	Gender	Usia	Kelas Ekonomi	Aspek Sosial
<p>Transisi ke arah terorisme</p> <p><i>Violent Extrimism</i></p> <p>Ekstremisme</p>	<p>Laki-Laki: Fokus kepada paya <i>soft approach</i> maskulin</p> <p>Perempuan: focus pada upaya <i>soft approach</i> feminin</p>	<p>Anak-Anak: Upaya pendekatan psikologis yang diintegrasikan dengan pendidikan agama dan pendidikan formal dasar</p> <p>Remaja: Upaya pendekatan psikologis yang diintegrasikan dengan pendidikan agama dan pendidikan formal</p> <p>Dewasa: Penanganan di jalur hukum (apabila diperlukan) yang diiringi pendekatan <i>soft approach</i>, psikologis melalui agama dan kewarganegaraan</p>	<p>Menengah-Ke Bawah: Disertai dengan upaya untuk pemberdayaan ekonomi (pasca-rehabilitasi), dan kesempatan ekonomi untuk mencari penghidupan.</p> <p>Menengah Ke Atas: Menghindari stigmatisasi masyarakat, dan memastikan penghidupannya tidak tercerabut.</p>	

Meningkatkan Partisipasi Aktor Non-Negara

Salah satu aspek paling penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi pada rangkaian proses pemulangan simpatisan ISIS adalah aktor non-negara, yang dapat terdiri dari organisasi sipil maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Dari perspektif simpatisan ISIS. Selama ini keterlibatan aktor non-negara dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi masih bersifat *ad-hoc* dan tidak berkesinambungan. Koordinasi di antara instansi pemerintah dan aktor non-negara pun selama ini belum berjalan dengan lancar sehingga banyak upaya yang dilakukan kedua belah pihak secara sendiri-sendiri. Padahal, aktor non-negara dapat turut berperan dalam upaya pemerintah guna meluruhkan ideologi radikal dan mengembalikan fungsi kemasyarakatan para simpatisan ISIS yang kembali dari wilayah konflik. Pemerintah agaknya meningkatkan partisipasi aktor non-negara yang telah ada saat ini, seperti keterlibatan LSM dalam melakukan *soft approach* pada para ekstremis, atau pemberian materi deradikalisasi oleh tokoh agama dari organisasi masa yang moderat, serta pelatihan kewirausahaan atau keterampilan oleh BUMS. Mempertimbangkan bahwa aktor non-negara dapat memiliki metode-metode yang lebih persuasif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, pemerintah disarankan untuk meningkatkan koordinasi dalam merancang program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif dan efisien.

Mempersiapkan Komunitas Setempat Untuk Menerima Eks-Simpatisan ISIS

Perspektif masyarakat sipil, khususnya pada komunitas yang menjadi lokasi reintegrasi dari mantan simpatisan ISIS harus diperhatikan. Proses reintegrasi yang dikepalai oleh BNPT selama ini lebih banyak terfokus kepada bagaimana mantan narapidana terorisme dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, sangat sedikit kebijakan yang mengangkat isu pentingnya mempersiapkan

masyarakat sekitarnya untuk dapat menciptakan lingkungan yang kuat (*resilient*) dan inklusif bagi mantan narapidana terorisme.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pihak swasta untuk membangun ketahanan masyarakat setempat. Sebagai contoh, organisasi sipil dapat berperan memberikan pelatihan respons pertama apabila terdapat indikasi kegiatan yang mengarah pada *violent extremism* di lingkungan mereka. Sebagai tambahan, organisasi sipil juga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya inklusifitas terhadap mantan narapidana terorisme, sehingga kontra-naratif dari pihak ekstrimis – bahwa negara merupakan musuh yang melakukan operasi pada kelompok mereka – dapat diminimalisir.

BUMS juga menjadi salah satu aktor kunci dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi simpatisan ISIS yang direintegrasikan ke masyarakat. Pada banyak kasus, simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia memiliki kesulitan dalam mendapatkan akses ekonomi karena stigmatisasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan opsi untuk merangkul BUMS dalam menyediakan lapangan kerja bagi mantan simpatisan ISIS yang telah melalui proses rehabilitasi. Peran BUMS terfokus kepada bagaimana simpatisan ISIS dapat memiliki kesempatan ekonomi sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak dan menghilangkan kemiskinan sebagai salah satu faktor pendorong individu untuk bergabung dengan ISIS.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPT website, 'About BNPT,' <http://www.bnpt.go.id/profil.php> [Accessed 16 April 2016]
- Clutterbuck, L. (2013). Deradicalization Program and Counterterrorism. *Scientific Approach to Finding Indicators and Response to Radicalizationn (SAFIRE)*.
- Focus Group Discussion (2019). "Women and Children in ISIS Foreign Terrorist Fighters," 13 September 2019, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.
- Gindarsih, I. (2014). 'Indonesia's Struggle Against Terrorism,' Council of Foreign Relations, http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p32772 [Accessed 17 April 2016]
- Gorka, K. (2014) 'The Flawed Sciene Behind American Counter-Terrorism Strategy,' *The Council on Global Security White Paper*.
- Haryono, W. (2014). 5 Payung Hukum Pelindungan WNI di Luar Negeri, <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxBnBqk-5-payung-hukum-perlindungan-wni-di-luar-negeri> [Diakses pada 20 September 2019]
- Hasan et. all, (2012), 'Counterterrorism Strategies in Indoensia, Algeria, and Saudi Arabia,' Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Institutes for Policy Analysis of Conflict, (2014). 'Countering Violent Extremism in Indonesia: Need for a Rethink,' *IPAC Report*, No. 11.
- Jacobson, M. (2010). Countering Violent Extremists Narratives,' Coordinator for Counterterrorism.
- Marguerite Afra Sapiie, (2016). 'Indonesia Needs Stronger Deradicalization Program,' The Jakarta Post, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/16/indonesia-needs-stronger-deradicalization-program.html> [Accessed in 16 April 2016].
- Rahmanto, D. N. (2019). "Indonesian Foreign Terrorist, Fighters: History, Progress, and Challenges," paparan pada Seminar "Nasib WNI Simpatisan ISIS di Suriah dan Irak", 10 Juli 2019, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.

- Ramakrishna, K. (2014). 'The Role of Civil Society in Countering Violent Extremism in Indonesia, *Middle East Institute*, <http://www.mei.edu/content/map/role-civil-society-countering-violent-extremism-efforts-indonesia> [Accessed 14 April 2015]
- Rasyid, I., et. al. (2019). Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS. *The Habibie Center*.
- Rininta, C (2019). Should Indonesia Accept Islamic States Returnees? East Asian Forum, https://www.eastasiaforum.org/2019/07/16/should-indonesia-accept-islamic-state-returnees/?fbclid=IwAR3bfGRbqFcFvxanulY01sVb9_DcmhoIecIXwt5Vj4pdrom5rKA1K7ZSbjE[Accessed 25 June, 2019]
- Sukabdi, Z. (2015). 'Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization,' *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2[14 April 2016]
- Sumandoyo, A. (2018) "Mengantisipasi Kebengisan Simpatisan ISIS Di Indonesia." *tirto.id*, <https://tirto.id/mengantisipasi-kebengisan-simpatisan-isis-di-indonesia-cLnQ>.
- Sumpter, C (2018). Returning Indonesia's Extremists: Unclear Intentions and Unclear Response. *International Centre for Counterterrorism (Reprort)*. The Hague.
- US Department of Homeland Security, 'Countering Violent Extremism,' <https://www.dhs.gov/countering-violent-extremism> [Accessed 14 April 2015]
- Zammit, A. and Iqbal, M. (2015). 'Indonesia's New Counter-Terrorism Challenges,' *Terrorism Monitor*, Jamestown Foundation, http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44335&cHash=038007fa4782a42107b34d12ec7f975d#.VxAyZZMrJE5

Bagian Empat



Economic Intelligence

Pemanfaatan Data Economic Intelligence
Kementerian Luar Negeri



Wisnu Utomo
Nourma Nusanti
Vallisa Aulia Rahmi
Dizar Ramadhan Sabana
Annisa Dina Amalia

Ringkasan Eksekutif

Economic intelligence dan/atau *market intelligence* merupakan basis data yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan ekspansi produk ke luar negeri. Secara umum, *economic intelligence* dapat dipahami sebagai informasi mengenai produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, maupun aspek-aspek lain dari ekonomi suatu negara atau dalam sistem internasional, seperti tenaga kerja, keuangan, dan perpajakan. Dokumen tersebut disusun oleh masing-masing perwakilan RI di luar negeri di kawasan Amerop (Amerika dan Eropa) dan kawasan Aspasaf (Asia Pasifik dan Afrika), baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal. Adapun isi informasi dokumen tersebut meliputi antara lain: profil umum negara, kondisi perekonomian, kebijakan dan kerja sama perdagangan.

Namun demikian, terdapat tiga aspek utama yang perlu dikaji dan dievaluasi lebih lanjut. Tiga aspek tersebut adalah: (1) karakter informasi, (2) proses penyusunan informasi, serta (3) diseminasi dan pemanfaatan informasi. Di lain sisi, terdapat sejumlah masalah yang perlu ditangani dalam menyusun dokumen *economic intelligence* antara lain: 1) Strategi perencanaan; 2) Negosiasi dan keamanan perdagangan; dan 3) Alur koordinasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan dari dokumen *economic intelligence*, maka tulisan ini membagi setidaknya dua jenis rekomendasi, yakni perbaikan penyusunan dokumen *Economic Intelligence* dan penguatan komponen diplomasi ekonomi. Pada perbaikan penyusunan dokumen *Economic Intelligence* terdapat tiga hal perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu 1) Memproduksi informasi yang komprehensif, akurat, dan tepat sasaran; 2) Melakukan dan menulis hasil riset yang mudah dipahami; dan 3) Diseminasi hasil riset melalui kanal-kanal yang efektif menjangkau audiens. Sementara itu, untuk penguatan komponen diplomasi ekonomi perlu berfokus di tiga aspek, yakni 1) Penguatan Manajemen Data Potensi Ekonomi Indonesia; 2) Penajaman dan Pematangan Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia; dan 3) Penguatan Kerja sama Multipihak untuk Mendorong Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dan Penyusunan *Economic Intelligence*.



Memahami *Economic Intelligence*: (Sebuah Kajian)

*D*alam literatur akademik, istilah *economic intelligence* lebih umum dikenal dengan nama *market intelligence* yang biasanya dibahas dalam berbagai studi terkait strategi pemasaran dari suatu perusahaan. Dalam studi pemasaran, konsep *market intelligence* terkait erat dengan konsep *market orientation* (MO) dan *entrepreneurial orientation* (EO). Kedua konsep ini mengacu pada strategi pemasaran untuk meningkatkan performa bisnis suatu perusahaan. MO adalah strategi bisnis yang berfokus pada kebutuhan atau permintaan pasar, sehingga kegiatan utamanya adalah memonitor karakter dan tren dari perilaku konsumen dan kompetitor. Sementara itu, EO mengacu pada strategi perusahaan untuk mempengaruhi pasar dan perilaku konsumsi melalui penawaran produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan laten dari konsumen di pasar

ekspor.⁵³ Dalam menjalankan strategi MO dan EO, proses *marketing intelligence* menjadi penting untuk dilakukan. Jaworski dan Kohli mendefinisikan MO sebagai suatu proses mengorganisasi mekanisme pencarian, diseminasi dan responsivitas dari *market intelligence*.⁵⁴

Istilah *market intelligence* sendiri memiliki makna serupa dengan beberapa istilah lain, misalnya *competitive intelligence, knowledge networks, opportunity identification, market research, market knowledge, news gathering, dan lain sebagainya*. *Market intelligence* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai pasar

“*Market intelligence* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai pasar dari suatu bisnis tertentu, misalnya terkait lokasi geografis bisnis, basis konsumen dan informasi relevan lainnya”

dari suatu bisnis tertentu, misalnya terkait lokasi geografis bisnis, basis konsumen dan informasi-informasi relevan lainnya. Sementara itu, *competitive intelligence* mengacu pada informasi mengenai kompetitor dan strategi kompetisi untuk memenangkan pasar.⁵⁵ Hal ini dipengaruhi kondisi pasar yang dinamis dan memaksa perusahaan untuk meningkatkan *competitive advantage* yang dimilikinya. Tujuan ini dicapai melalui proses pemantauan dan penilaian dari hasil aktivitas pemasaran dan keuangan mereka secara ekonomis dan efektif. Proses penilaian tersebut akan memberikan informasi berharga (*market knowledge*) untuk meningkatkan daya saing perusahaan.⁵⁶

⁵³ Gruber-Muecke Tina and Katharina Maria Hofer, “Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Performance in Emerging Markets,” *International Journal of Emerging Markets* 10, no. 3 (January 1, 2015): 560–71.

⁵⁴ Jaworski dan Kohli 1993 dalam Tina and Hofer.

⁵⁵ Steve Olenski, “The Importance of Market Intelligence For CMOs,” *Business Insider*, 2014, <https://www.businessinsider.com/the-importance-of-market-intelligence-for-cmos-2014-10?IR=T>.

⁵⁶ Hou and Chien 2010 dalam Kayabasi Aydin and Thandiwe Mtetwa, “Impact of Marketing Effectiveness and Capabilities, and Export Market Orientation on Export Performance: Evidence from Turkey,” *European Business Review* 28, no. 5 (January 1, 2016): 532–59.

Riset pasar dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber datanya, yaitu riset primer dan sekunder. Riset primer merujuk

“Competitive intelligence mengacu pada informasi mengenai kompetitor dan strategi kompetisi untuk memenangkan pasar”

pada proses pengumpulan data dari analisis penjualan dan efektivitas praktik yang sedang dijalankan. Datanya bersumber dari wawancara, survei, kuesioner, dan diskusi kelompok. Sementara itu, riset sekunder merujuk pada proses analisis data yang sudah

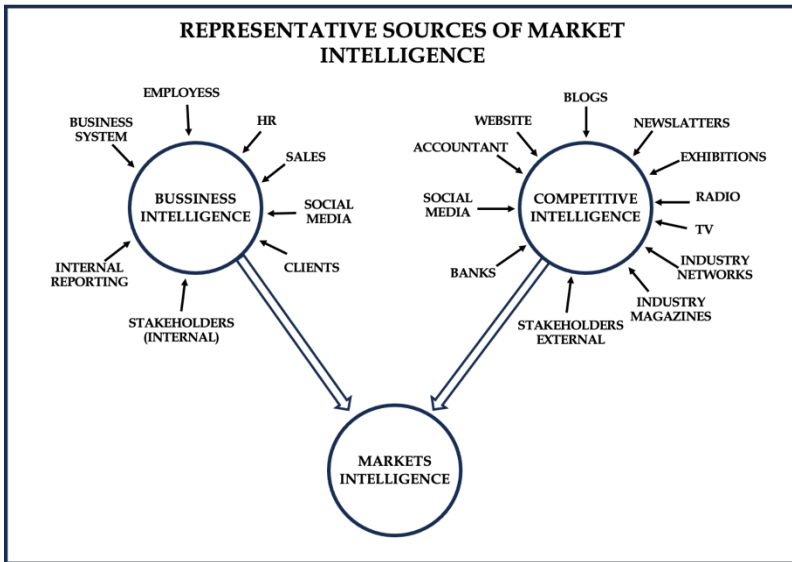
terpublikasi, misalnya untuk mengidentifikasi kompetitor, membangun *benchmark* dan mengidentifikasi segmentasi target pasar. Jenis data yang dikumpulkan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Meskipun kedua jenis riset pasar ini umum dilakukan oleh perusahaan, terdapat tiga masalah yang sering ditemui: perusahaan hanya memanfaatkan riset sekunder, mengandalkan bahan dari internet, dan memperoleh keterangan hanya dari orang-orang yang sudah dikenal.⁵⁷

Riset pasar juga dapat dibedakan berdasarkan data yang diperoleh dari internal (*business intelligence*) maupun eksternal (*competitive intelligence*) perusahaan.⁵⁸ Aspek internal yang dimaksud adalah sistem bisnis dan *stakeholders* internal, misalnya data mengenai penjualan, sumber daya manusia, klien, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari sumber internal biasanya terkait dengan tren bisnis, performa kompetitor, aktivitas pasar finansial dan tren sosial. Sementara itu, aspek eksternal serupa dengan riset sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber eksternal atau sekunder, seperti majalah, koran, bank, media sosial, akuntan, dan lain-lain. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan kedua aspek tersebut.

Gambar Sumber Data Market Intelligence (Ross, McGowan, and Styger, 2012)

⁵⁷ Lesley Spencer Pyle, “How to Do Market Research--The Basics,” Entrepreneur.com, 2010, <https://www.entrepreneur.com/article/217345>.

⁵⁸ Pauline Ross, Carol McGowan, and Lee Styger, “A Comparison of Theory and Practice in Market Intelligence Gathering for Australian Micro-Businesses and SMEs,” *Proceedings of 19th International Business Research Conference 2012*, 2013, 1–17.



Meskipun istilah *market intelligence* dan istilah-istilah serupa lainnya telah dikaji secara ekstensif dalam literatur akademik, sebuah penelitian menemukan bahwa teori dan praktik *market intelligence* dapat berbeda jauh. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa UMKM di Australia tidak memiliki proses formal dalam memperoleh data *market intelligence*. Istilah inipun tidak secara umum diketahui. Biasanya proses ini dilakukan hanya sebagai bentuk reaksi atas krisis atau perubahan yang terjadi pada pasar, misalnya penurunan penjualan, resesi, adanya kompetitor baru, atau adanya perubahan pada aturan hukum. Umumnya, UMKM hanya menjalankan proses informal, yakni menanyakan pendapat dan saran setelah acara atau kegiatan perdagangan/forum bisnis, riset internet mengenai tren pasar, membaca majalah dan lain-lain.⁵⁹

Seiring dengan meningkatnya tren internasionalisasi perdagangan, kajian mengenai MO kemudian dikembangkan menjadi kajian *export market orientation (EMO)*, yang pada intinya merupakan pandangan bahwa performa bisnis suatu perusahaan dapat ditingkatkan melalui strategi bisnis yang berorientasi pada pasar ekspor atau pasar global.

⁵⁹ Ross, McGowan, and Styger.

EMO kemudian menjadi faktor yang menentukan performa perkembangan ekspor. Kayabasi dan Mtetwa mendefinisikan EMO sebagai proses yang mencakup pencarian data *market intelligence* yang relevan dengan agenda ekspor suatu perusahaan; diseminasi informasi tersebut kepada pemangku kepentingan; dan mendesain respons yang diarahkan kepada konsumen, kompetitor dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan nilai tambah untuk konsumennya.⁶⁰ Dalam studi mereka, EMO memiliki keterkaitan dengan performa ekspor melalui peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemasaran. Menurut Olavarrieta dan Friedmann⁶¹, perilaku bisnis yang berorientasi pada pasar mengapresiasi proses *marketing intelligence* yang dilakukan dengan saksama. Informasi pasar yang diperoleh sebagai hasil dari EMO kemudian akan membantu perusahaan dalam membangun strategi kompetisinya. Penelitian serupa menemukan bahwa EMO mempengaruhi strategi ekspansi ekspor yang berimbas positif terhadap peningkatan performa ekspor suatu perusahaan.⁶² Berdasarkan sebuah penelitian di Austria, MO dan EO berkontribusi positif terhadap performa perusahaan di pasar Eropa Tengah dan Timur melalui proses internasionalisasi pasar atau ekspor.

Berdasarkan definisi EMO di atas, terdapat 3 elemen penting terkait pencarian informasi pasar⁶³, yaitu:

1. *Export intelligence gathering* (EIG): seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pasar ekspor (riset pasar ekspor, bantuan untuk ekspor);

⁶⁰ Aydin and Mtetwa, "Impact of Marketing Effectiveness and Capabilities, and Export Market Orientation on Export Performance: Evidence from Turkey."

⁶¹ 2008 dalam Aydin and Mtetwa.

⁶² B Peter Hoang, "Relationship of Export Market Orientation, Selected Export Strategy, and Export Performance: An Empirical Study," *Global Journal of Management And Business Research* 15, no. 6E (2015): 25–32, <https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1778>.

⁶³ Federica Pascucci, Sara Bartoloni, and Gian Luca Gregori, "Export Market Orientation and International Performance in the Context of SMEs," *Journal of Small Business & Entrepreneurship* 28, no. 5 (2016): 361–75.

2. *Export intelligence dissemination* (EID): proses diseminasi informasi pasar kepada individu-individu dan departemen-departemen terkait dalam perusahaan;
3. *Export intelligence responsivity* (EIR): seluruh aktivitas yang ditujukan untuk mendesain dan mengimplementasikan respons terhadap perubahan dari lingkungan perusahaan dan pasar ekspor (standardisasi produk, kebijakan harga, dan layanan konsumen ekspor).

Ketiga elemen di atas saling mendukung satu sama lain. Hasil penelitian Kayabasi dan Mtetwa menunjukkan bahwa EIG dan EID berkontribusi positif terhadap performa ekspor melalui EIR. Temuan ini menegaskan bahwa informasi pasar ekspor harus dimanfaatkan dan diolah sedemikian rupa sebagai basis untuk mengambil tindakan-tindakan yang paling tepat dalam situasi tertentu. Responsivitas kemudian menjadi elemen kunci dari EMO.

Selain informasi yang secara langsung terkait dengan pasar, kondisi sosial dan politik juga menjadi informasi penting yang perlu diketahui perusahaan untuk dapat mempertahankan performa bisnisnya. Ketika krisis Eurozone tahun 2012, misalnya, perusahaan-perusahaan berskala kecil mencari dan mempertimbangkan informasi terkait kondisi politik kawasan Eropa untuk memutuskan strategi ekspor yang tepat. Berdasarkan studi terhadap 440 UMKM di Inggris, Perancis dan Swedia, perusahaan yang mengandalkan Eurozone untuk ekspornya sangat terpengaruh oleh krisis sehingga harus menerapkan proses *political monitoring* secara regular. Proses ini kemudian menjadi rutinitas formal untuk mengeksplorasi informasi politik yang kemudian menjadi basis terciptanya kesempatan ekspor baru di luar Eurozone.⁶⁴

Kajian mengenai *market intelligence* dalam studi pemasaran sebenarnya menitikberatkan perusahaan sebagai aktor kunci yang melakukan riset informasi pasar. Meskipun begitu, studi ini juga melihat peran penting pemerintah dalam memberikan informasi mengenai produk, pasar dan inovasi dan bantuan teknis. Hal ini untuk

⁶⁴ Andrew Barron, Peter Hultén, and Vladimir Vanyushyn, "The Role of Political Intelligence in Firms' Export Decisions During the Euro Crisis," *Journal of Small Business Management* 54, no. 4 (2016): 1126-46.

memudahkan proses peminjaman dana, terutama untuk perusahaan swasta berskala kecil yang memiliki keterbatasan akses dan pengetahuan mengenai keuangan, produk, dan pasar. Mayoritas literatur akademik yang melihat peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi biasanya membahas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada level nasional. Namun, pemerintah lokal/daerah sebenarnya juga memegang peranan yang krusial dalam dua peran di atas, yaitu memberikan informasi dan bantuan keuangan.

Penilaian terhadap performa ekspor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perusahaan, salah satunya peran pemerintah. Menurut Chen, Sousa dan He, ada dua jenis variabel yang mempengaruhi performa ekspor, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal mengacu pada faktor-faktor di level perusahaan, yakni terkait strategi pemasaran ekspor, kapabilitas perusahaan dan karakteristik manajemen. Sementara itu, faktor-faktor eksternal mengacu pada karakteristik pada level industri dan negara. Faktor negara meliputi faktor-faktor institusional yang memainkan peran strategis dalam merumuskan suatu kebijakan yang kemudian mempengaruhi performa ekspor.⁶⁵

⁶⁵ Jieke Chen, Carlos M P Sousa, and Xinming He, "The Determinants of Export Performance: A Review of the Literature 2006-2014," *International Marketing Review* 33, no. 5 (2016): 626-70.



Economic Intelligence **Sebagai Basis Data**

*M*emasuki era revolusi industri 4.0 dan kondisi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang mempengaruhi situasi perekonomian global saat ini, Indonesia perlu mengevaluasi dan merumuskan inovasi-inovasi baru dalam kebijakan ekonominya. Saat ini, kondisi ekonomi nasional cenderung stagnan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5%⁶⁶. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018 defisit sebesar US\$7,52 miliar – yang

⁶⁶ Mutia Fauzia, “Turun, Ekonomi Indonesia Kuartal II-2019 Hanya Tumbuh 5,05 Persen,” Kompas.com, 2019.

dibebani sektor migas.⁶⁷ Namun, potensi peningkatan ekspor dapat dilakukan melalui penambahan volume perdagangan pada sektor non-migas yang secara kontinyu mengalami surplus, terutama pada empat sektor usaha: industri, pertanian, pertambangan dan konstruksi.

Melalui berbagai kementerian dan unit kerja, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor, salah satunya melalui perluasan pasar non-tradisional. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan signifikansi ekspor ke pasar-pasar non-tradisional yang mencakup kawasan Afrika, Eurasia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Selatan bagi perekonomian negara, misalnya potensi ekspor di kawasan Afrika yang mencapai US\$550 miliar pada tahun 2016.⁶⁸ Untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia telah menjalin banyak hubungan perdagangan, salah satunya melalui mekanisme perdagangan bebas, dengan banyak negara dan kawasan. Pada tahun 2018, beberapa perjanjian yang ditindaklanjuti adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, Asia Tenggara, dan yang masih menunggu proses ratifikasi adalah perjanjian dengan Australia. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian-perjanjian ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia secara khusus mengemban peran strategis untuk menilai potensi perdagangan dan mengetahui karakter pasar di negara-negara tujuan ekspor melalui penyusunan data *economic intelligence*. Kegiatan ini menjadi strategis untuk dilakukan Kementerian Luar Negeri mengingat RI memiliki 127 perwakilan di luar negeri. Kementerian Luar Negeri RI secara rutin melakukan kegiatan penyusunan data *economic intelligence* sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat. Menurut Data Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2018, tercatat sebanyak 93 dokumen terkait penyusunan data *economic intelligence* yaitu sebanyak

⁶⁷ Hadijah Alaydrus, "Neraca Dagang Kumulatif 2018 Defisit US\$7,52 Miliar, Minyak Jadi Pemicu," *Bisnis.com*, 2018, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181217/9/870260/neraca-dagang-kumulatif-2018-defisit-us752-miliar-minyak-jadi-pemicu>.

⁶⁸ Kurnia Sari Aziza, "Jokowi Wanti-wanti Ekspor Ke Pasar Non-Tradisional," *Kompas.com*, 2017, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/133756226/jokowi-wanti-wanti-ekspor-ke-pasar-non-tradisional>.

39 dari perwakilan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) serta sebanyak 54 dari kawasan Amerika dan Eropa (Amerop). Kegiatan penyusunan data meliputi data profil umum negara tujuan ekspor (kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat di negara tersebut), informasi hubungan bilateral dan neraca perdagangan dengan Indonesia, serta peluang impor produk dan penetrasi terhadap pasar di negara tujuan. Komponen-komponen ini membedakan data *economic intelligence* yang disusun Kementerian Luar Negeri dengan data *market intelligence* yang dilakukan oleh K/L atau riset pasar lainnya. Kementerian Perdagangan, misalnya, melalui fungsi atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri secara mandiri juga rutin melakukan dan mendiseminasikan data *economic intelligence* yang sifatnya lebih spesifik terkait produk dan segmentasi pasar tertentu.

Economic intelligence dan/atau *market intelligence* merupakan basis data yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan ekspansi produk ke luar negeri. Secara umum, *economic intelligence* dapat dipahami sebagai informasi mengenai produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, maupun aspek-aspek lain dari ekonomi suatu negara atau dalam sistem internasional, seperti tenaga kerja, keuangan, dan perpajakan.⁶⁹ Dalam *South-South Cooperation Handbook* disebutkan bahwa potensi kerja sama ekonomi Selatan-Selatan – yang mencakup Indonesia – harus direalisasikan dan didukung dengan adanya institusi '*economic intelligence*' yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan



economic intelligence
dan/atau *market*
intelligence merupakan basis
data yang dapat menjadi
pedoman bagi pelaku
usaha di Indonesia dalam
melakukan ekspansi produk
ke luar negeri



⁶⁹ Britannica, "Economic Intelligence," Britannica.com, 2019, <https://www.britannica.com/topic/economic-intelligence>.

memberikan gambaran kesempatan investasi di negara mitra.⁷⁰ Pemanfaatan dokumen *economic intelligence* dapat berkontribusi bagi *stakeholders*, terutama para eksportir dan pelaku usaha, untuk mengetahui potensi ekspor yang dapat dikembangkan di negara tujuan ekspor.

Melihat potensi dan signifikansi dari data *economic intelligence*, kegiatan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri menjadi penting untuk dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya. Terkait anggaran yang digunakan, pada tahun 2018, anggaran untuk menyusun data *economic intelligence* hanya berada di kisaran 4–7% dari total anggaran terkait komponen ekonomi di seluruh perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, terkait pemanfaatan data, selama ini Kementerian Luar Negeri menyusun dan mendiseminasikan data *economic intelligence* dalam bentuk *raw data*, majalah dan laman *website* yang dapat diakses secara umum. Namun, tindak lanjut dari diseminasi dokumen ini kepada *stakeholders*, yang secara langsung membutuhkan data terkait, kiranya perlu diketahui.

⁷⁰ Makmun Syadullah, "The Importance of Economic Intelligence in South-South Cooperation," *The Jakarta Post*, 2019, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/the-importance-of-economic-intelligence-in-south-south-cooperation.html>.



***Economic Intelligence:* Peluang dan Tantangan**

*S*elama ini, Kementerian Luar Negeri menjalankan tugas menyusun informasi pasar guna membantu pelaku usaha di Indonesia untuk mengeksport produknya ke luar negeri. Masing-masing perwakilan RI di luar negeri di kawasan Amerop (Amerika dan Eropa) dan kawasan Aspasaf (Asia Pasifik dan Afrika), baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal, bertugas untuk menyusun informasi pasar di negara perwakilan tersebut. Kementerian Luar Negeri menugaskan 1 orang fungsional ekonomi untuk mencari informasi pasar secara reguler (setiap tahun) yang secara umum meliputi: (1) profil umum negara, (2) kondisi perekonomian, (3) neraca perdagangan secara umum, (4) hubungan perdagangan dengan Indonesia, (5) kebijakan dan kerja sama perdagangan yang dimiliki, (6) investasi masuk dan keluar, (7) pertumbuhan sektor pariwisata, (8) daftar pameran yang akan diselenggarakan dan (9) daftar *contact person* dari perwakilan RI atau asosiasi pengusaha/importir di negara tersebut. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan bersama perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Amerop dan Ditjen Aspasaf, informasi yang disusun setiap perwakilan tersebut dikirimkan ke pusat melalui *Bravaks* untuk kemudian diolah

lebih lanjut dan didiseminasikan kepada berbagai pemangku kepentingan, yakni k/l terkait, asosiasi bisnis, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Khusus untuk kawasan Amerop, informasi tersebut juga diunggah ke situs web www.pasaramerop.kemlu.go.id sehingga pelaku usaha dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara langsung.

Selain bentuk informasi di atas, dokumen *economic intelligence* yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri juga berbentuk majalah dan buku. Majalah yang diterbitkan ada dua jenis, reguler dan tematik. Untuk majalah reguler, Ditjen Amerop memiliki majalah *Invites* (berbahasa Inggris) dan majalah Peluang (berbahasa Indonesia), sementara Ditjen Aspasaf menerbitkan majalah Akses. Ketiganya diterbitkan satu kali dalam satu tahun. Sementara itu, majalah tematik biasanya disusun berdasarkan isu atau komoditas potensial di negara atau kawasan tertentu. Ditjen Amerop, misalnya, pernah menerbitkan beberapa majalah berisi informasi potensi pasar Amerop untuk komoditas kopi. Dibandingkan dengan dokumen *economic intelligence* yang sifatnya *raw data*, majalah memuat data dan informasi komprehensif dan mendalam yang sudah diolah dan dianalisis sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami informasinya. Pada tahun 2018, Ditjen Aspasaf dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pernah menerbitkan buku *Road to Africa* yang secara komprehensif membahas potensi pasar di kawasan Afrika dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh para pelaku usaha untuk menembus pasar tersebut.⁷¹ Berdasarkan keterangan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, informasi yang disampaikan dalam buku tersebut bermanfaat bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar Afrika namun belum mengetahui peta persaingan dan analisis risiko bisnis terkait instabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.⁷²

⁷¹ Direktorat Diplomasi Publik Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri RI, "Pertemuan Bilateral Dan Langkah Konkret Kerja sama Ekonomi," Tabloid Diplomasi, 2018, <http://www.tabloiddiplomasi.org/pertemuan-bilateral-dan-langkah-konkret-kerjasama-ekonomi/>.

⁷² Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

Meskipun dokumen *economic intelligence* yang disusun dan didiseminasikan oleh Kementerian Luar Negeri potensial untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan ekspor nasional, namun terdapat tiga aspek utama yang perlu dikaji dan dievaluasi lebih lanjut. Tiga aspek tersebut adalah: (1) karakter informasi, (2) proses penyusunan informasi, dan (3) diseminasi dan pemanfaatan informasi.

1. Karakter Informasi

Karakter informasi dalam dokumen *economic intelligence* yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri mencakup tiga hal, yakni: (1) komprehensivitas dan kedalaman informasi, (2) informasi yang menjawab kebutuhan pelaku usaha, dan (3) akurasi informasi.

Komprehensivitas dan Kedalaman Informasi

Dokumen *economic intelligence*, baik yang berbentuk *raw data* maupun majalah/buku, pada dasarnya telah memuat informasi-informasi mendasar terkait kondisi perekonomian di suatu negara yang secara umum perlu diketahui oleh pelaku usaha sebelum memulai proses perdagangan dengan negara tertentu. Selain itu, keunggulan dokumen *economic intelligence* oleh Kementerian Luar Negeri ini adalah muatan informasi terkait potensi investasi dan pariwisata, dimana tidak disediakan oleh instansi lain yang melakukan riset pasar serupa. Akan tetapi, melihat beberapa contoh dokumen *economic intelligence* yang dapat diakses dari situs *web* Kementerian Luar Negeri, muatan informasinya terlalu umum sehingga perlu dilengkapi dengan informasi tambahan dan analisis lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran utuh dan lebih mudah dipahami oleh para pelaku usaha. Beberapa narasumber yang kami wawancarai menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait potensi pasar di suatu negara, yakni terkait komoditas yang banyak dikonsumsi, tren harga dan konsumsinya, analisis keunggulan komparatif untuk produk-

produk Indonesia, dan peta persaingan di pasar tersebut.⁷³ Konsultan di FTA Center Surabaya mengungkapkan bahwa informasi yang diberikan haruslah mendalam, khususnya untuk satu komoditas tertentu harus dilihat bagaimana tren dan budaya di negara setempat, terkait konsumsi komoditas tersebut.⁷⁴ Sementara itu, menurut konsultan FTA Center Bandung, permintaan pasar dunia yang sedang tinggi untuk sektor manufaktur harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain itu, informasi yang ada harus dilengkapi dengan analisis, dengan harapan dapat memudahkan pelaku usaha untuk membaca informasi tersebut. Untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam tersebut, proses risetnya harus ditingkatkan kematangannya dan menggunakan sumber-sumber primer, tidak hanya bergantung pada sumber-sumber sekunder yang dapat diakses secara bebas melalui situs web tertentu.

Selain itu, akar masalah ini juga terkait dengan belum adanya pemetaan terkait komoditas unggulan yang perlu dipasarkan oleh Indonesia dan pasar-pasar potensial di luar negeri untuk komoditas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Smesco Indonesia, pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mereka merasa kesulitan untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang mereka jual dan kebutuhan pasar di negara tersebut, terutama untuk produk kerajinan tangan yang banyak diproduksi oleh UMKM di Indonesia.⁷⁵ Pada acara forum bisnis di *Trade Expo Indonesia (TEI) 2019*, banyak UMKM yang menanyakan potensi pasar untuk komoditas yang mereka produksi. Ketidaktahuan UMKM mengenai tren dan pola konsumsi di negara tujuan ekspor membuat mereka enggan untuk mengirim produk karena khawatir minimnya keuntungan yang didapat. Mereka merasa perlu mengetahui negara-negara mana saja yang potensial untuk menjadi tujuan ekspor karena setiap jenis produk memiliki pasar berbeda-beda.

⁷³ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019; Agus Suhartanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 23 Oktober, 2019; Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019; Fernanda Reza, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

⁷⁴ Fernanda Reza, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

⁷⁵ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

Selama ini Smesco Indonesia menggali informasi dari *event organizer* yang mengadakan kegiatan pameran di luar negeri. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan Ditjen Amerop dan Ditjen Aspasaf, selama ini Kementerian Luar Negeri tidak melakukan diversifikasi pasar ekspor karena dianggap strategi tersebut hanya akan mempersempit peluang pasar yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Meskipun telah beberapa kali menerbitkan majalah yang memuat isu tematis tentang komoditas tertentu, misalnya komoditas kopi dan hasil perikanan, Kementerian Luar Negeri perlu menentukan pemetaan terhadap komoditas unggulan, pasar potensialnya dan keunggulan komparatif Indonesia agar riset pasar yang dilakukan dapat secara spesifik menyoal kebutuhan dalam negeri.⁷⁶

Informasi yang Menjawab Kebutuhan Pelaku Usaha

Untuk dapat masuk dan bertahan di pasar suatu negara, pelaku usaha membutuhkan informasi strategis yang secara spesifik terkait dengan komoditas ekspor mereka. Jenis informasi ini berbeda-beda bergantung pada skala dan sektor usaha yang digeluti. *Start-up* yang bergerak di sektor perikanan, seperti Growpal dan PT Perkebunan Nusantara XII yang bergerak di sektor perkebunan, memerlukan informasi terkait fluktuasi harga dan tren persaingan di pasar tujuan ekspor.⁷⁷ Informasi ini biasanya mereka dapatkan dari pihak swasta, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, usaha yang berskala kecil seperti UMKM, memerlukan informasi mengenai: 1) kategori produk yang dibutuhkan pasar; 2) kontak *buyers*; 3) persyaratan/perizinan ekspor – komoditas yang berbeda mungkin memiliki persyaratan yang berbeda pula.⁷⁸ Selain itu, mereka membutuhkan informasi mengenai kesesuaian antara apa yang UMKM jual dan mitra bisnis butuhkan, serta bagaimana kualitas produk mereka dapat bersaing dengan produk-produk luar. Tidak jauh

⁷⁶ Rossanto Dwi Handoyo, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

⁷⁷ Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

⁷⁸ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

berbeda, untuk industri besar seperti PT Siantar Top, ada setidaknya 4 komponen informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan ekspansi pasar: (1) regulasi di negara tujuan, (2) peta kompetisi di negara tujuan (industri apa saja yang mendominasi pasar, bagaimana *marketshare*-nya), (3) daftar calon pembeli potensial, dan (4) daftar pameran yang potensial untuk diikuti industri dalam negeri. Selain itu, informasi mengenai regulasi dan hambatan tarif/non-tarif di negara tujuan ekspor juga perlu diketahui oleh pelaku usaha agar tidak menghadapi masalah ketika produk mereka sudah sampai di negara tujuan.⁷⁹ Hal serupa disampaikan pula oleh perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, Kementerian Luar Negeri memainkan peran strategis untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diakses oleh instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat di Indonesia. Kementerian Luar Negeri dapat memberikan informasi mengenai tren perubahan kebijakan dan kondisi politik di suatu negara yang berpengaruh pada hubungan perdagangan dengan Indonesia. Salah satu kasus yang disampaikan adalah masuknya produk kelapa sawit dari Malaysia dalam daftar hitam produk ekspor di India.⁸⁰ Contoh lainnya adalah mekanisme *tax rebate* yang diberlakukan China.⁸¹ Apabila informasi ini dapat diketahui Kementerian Luar Negeri lebih awal, pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri dapat mengantisipasi hal tersebut dan mengambil langkah strategis untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Informasi lainnya yang perlu disediakan oleh Kementerian Luar Negeri adalah kebijakan khusus terkait isu teknis, misalnya standardisasi dan sertifikasi produk, yang harus diketahui dan dipatuhi oleh pelaku usaha sebelum mengekspor produknya. Informasi ini akan 'memaksa' pelaku usaha agar melakukan persiapan yang matang sebelum mengirim produknya dan menghindari kemungkinan produk tertahan di imigrasi karena tidak mengikuti aturan-aturan domestik yang berlaku di negara tersebut.

⁷⁹ Hindra Soeparjanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

⁸⁰ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

⁸¹ Drajat Irawan, wawancara oleh penulis, Surabaya, 23 Oktober, 2019

Akurasi Informasi

Permasalahan lain yang juga dapat berimbas pada performa ekspor nasional adalah akurasi atau ketepatan informasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. Hal ini terkait dengan pembaruan informasi. Informasi umum yang disediakan Kementerian Luar Negeri, baik melalui situs web ataupun majalah dan buku, memang sifatnya cenderung stabil – tidak fluktuatif. Akan tetapi, informasi-informasi yang sifatnya spesifik terkait komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, memerlukan pembaruan terus menerus agar informasi yang diberikan akurat dan relevan dengan kondisi di saat informasi tersebut dibutuhkan. Growpal, misalnya, selama ini mengandalkan informasi yang dapat diperoleh dari lembaga swasta karena informasi yang diberikan selalu diperbarui setiap bulan. Mereka memerlukan informasi fluktuasi harga ikan yang memang perubahannya cukup cepat. Konsultan *Free Trade Agreement* (FTA) Center Surabaya dan Bandung juga selalu memantau informasi yang dikeluarkan oleh *International Trade Center* (ITC) karena informasi selalu diperbarui setiap bulan. Permasalahan serupa diungkapkan oleh perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur pada kegiatan diskusi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur. Menurutnya, dokumen *economic intelligence* yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri perlu disebarluaskan secara rutin dan berkala agar pemangku kepentingan yang memanfaatkan dapat mengetahui perubahan informasi secara cepat. Akurasi informasi menjadi aspek yang penting sebab Indonesia perlu membekali diri dengan pengetahuan yang tepat sehingga mampu bersaing di pasar global.⁸²

2. Proses Penyusunan Informasi

Selain isu substansi, isu lainnya yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dokumen *economic intelligence* Kementerian Luar Negeri adalah isu teknis terkait proses penyusunan informasi pasar. Terdapat

⁸²Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

dua permasalahan utama yang dapat dibahas lebih lanjut, yaitu proses riset yang dilakukan dan standardisasi format laporan *economic intelligence*.

Proses Riset

Strategi riset yang dilakukan pada dasarnya berkaitan dengan karakter informasi yang dihasilkan dari proses riset pasar. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Kementerian Luar Negeri selama ini menggunakan sumber-sumber sekunder yang dapat diakses secara bebas untuk menyusun dokumen *economic intelligence*. Hal ini diakui oleh perwakilan Ditjen Amerop yang mengatakan bahwa keterbatasan anggaran membatasi penggunaan sumber-sumber data oleh fungsional ekonomi di perwakilan luar negeri. Konsulat Jenderal RI di Shanghai pernah berlangganan data berbayar untuk kepentingan riset pasar akan tetapi tidak dilanjutkan karena biaya yang diperlukan cukup besar. Dengan mengandalkan sumber-sumber data sekunder ini, jenis informasi yang didapat menjadi terbatas. Biasanya, hanya data-data statistik umum yang dapat diakses. Ini tidak berarti informasi tersebut tidak penting, akan tetapi pada dasarnya informasi yang dapat diakses secara bebas berarti dapat pula diakses secara langsung oleh pelaku usaha. Konsultan-konsultan FTA Center ataupun industri berskala besar, misalnya, melakukan riset mandiri dengan mengandalkan data-data yang dapat mereka peroleh dari situs-situs *web* penyedia informasi pasar. Peran yang diambil Kementerian Luar Negeri pada dasarnya dapat ditingkatkan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh secara bebas. Untuk menghasilkan informasi dan analisis pasar yang komprehensif dan mendalam, diperlukan strategi riset khusus, yaitu riset secara langsung dengan menggunakan sumber-sumber primer. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok maupun studi lapangan kepada pelaku usaha, asosiasi bisnis, importir, konsumen, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat menggali informasi yang spesifik dan akurat mengenai pasar di suatu negara untuk komoditas tertentu. Strategi riset primer ini sudah dijalankan oleh pihak Kementerian Perdagangan, baik melalui atase perdagangan, ITPC,

maupun perwakilan pusat yang mengunjungi negara tujuan ekspor tertentu untuk menggali informasi.⁸³

Selain penggunaan strategi riset langsung dan sumber data primer, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dari peneliti atau fungsional ekonomi yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun dokumen *economic intelligence*. Untuk melakukan riset sebagaimana dicanangkan di atas, fungsional perlu mengetahui langkah-langkah dan metode riset secara umum dan isu-isu dan kajian mengenai perdagangan internasional secara khusus. Hal ini diakui oleh Kementerian Luar Negeri sebagai isu yang mereka hadapi dalam proses penyusunan dokumen *economic intelligence* di perwakilan. Fungsional ekonomi yang mengemban tugas tersebut adalah *country expert*, dalam artian mereka mengetahui dengan baik kondisi dan karakter negara di mana ia bertugas, namun belum memiliki kapasitas yang secara spesifik memadai untuk melakukan riset khusus di bidang perdagangan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas fungsional ekonomi melalui pelatihan, baik yang diadakan di pusat maupun perwakilan, untuk mendorong peningkatan kualitas riset.

Standardisasi Format Laporan *Economic Intelligence*

Format laporan *economic intelligence* merupakan permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dokumen oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Direktorat Jenderal yang bertugas menyusun dokumen tersebut belum memiliki standar format laporan. Hal ini berdampak pada adanya perbedaan jenis informasi yang didapat dari negara atau kawasan yang satu dan yang lainnya. Padahal, kesamaan dan kelengkapan jenis informasi dari setiap negara diperlukan untuk membandingkan potensi pasar. Sebagai contoh, untuk menentukan pasar ekspor komoditas tekstil, pelaku usaha perlu mengetahui perbandingan neraca perdagangan dan peta persaingan pasar tekstil di Rwanda dan Saudi Arabia. Informasi ini akan membantu pelaku usaha menimbang dan menentukan pasar mana yang lebih potensial untuk dipenetrasi. Dengan demikian, adanya

⁸³ Kementerian Perdagangan, wawancara oleh penulis, Jakarta, 21 November, 2019

standardisasi format laporan akan meningkatkan komprehensivitas dan kedalaman informasi yang diberikan.

3. Diseminasi dan Pemanfaatan Informasi

Aspek ketiga yang penting untuk diperhatikan adalah terkait diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar yang telah disusun. Dari proses wawancara dan diskusi yang telah dilakukan, kami mendapat informasi bahwa tidak semua pemangku kepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi pasar yang telah disusun Kementerian Luar Negeri selama ini. Padahal, kanal-kanal diseminasi yang dibuka oleh Kementerian Luar Negeri sudah cukup banyak dan beragam, yakni melalui situs *web*, majalah dan buku. Adapun terkait pemanfaatan informasi pasar oleh pemangku kepentingan, pada dasarnya diperlukan suatu mekanisme evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Selama ini Kementerian Luar Negeri melakukan mekanisme-mekanisme informal untuk menindaklanjuti informasi yang sudah didiseminasikan, misalnya melalui metode jemput bola, yakni menanyakan pemanfaatan informasi pasar dan forum bisnis kepada pelaku usaha ketika bertemu dalam acara-acara di kementerian maupun di kedutaan. Secara lebih rinci, permasalahan terkait diseminasi dan pemanfaatan informasi ini dapat dibahas dalam dua pembahasan, yakni target penerima informasi dan kanal diseminasi.

Target Penerima Informasi

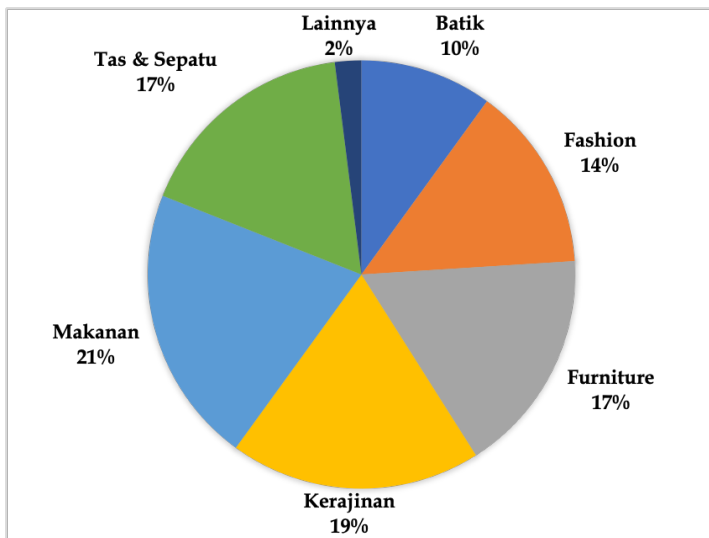
Pada pembahasan mengenai karakter informasi, telah dibahas bahwasanya pelaku usaha membutuhkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai potensi pasar di suatu negara tertentu. Akan tetapi, perlu digarisbawahi pula bahwa jenis informasi yang dibutuhkan pelaku usaha dapat berbeda-beda bergantung pada sektor dan skala usahanya. Informasi yang dibutuhkan industri tentu berbeda dengan UMKM. Informasi yang dibutuhkan oleh UMKM yang sudah pernah melakukan ekspor tentunya berbeda dengan UMKM yang

belum pernah masuk ke pasar global. Selama ini, informasi pasar yang didiseminasikan Kementerian Luar Negeri secara publik sifatnya umum untuk semua kategori pelaku usaha. Strategi diversifikasi informasi sebenarnya sudah pernah dilakukan Kementerian Luar Negeri, yakni ketika industri berskala besar meminta informasi spesifik mengenai suatu negara sebelum mengirim produknya (sifatnya *by request*) dalam jumlah besar. Dua industri yang disebutkan Kementerian Luar Negeri adalah PT Kalbe Farma dan PT Mayora Indah Tbk. Informasi ini tidak didapatkan dari dokumen *economic intelligence* yang secara reguler sudah didiseminasikan oleh Kementerian Luar Negeri karena industri-industri tersebut membutuhkan informasi yang lebih mendalam secara spesifik terkait dengan sektor usaha masing-masing – sektor farmasi dan makanan serta minuman. Keterangan yang disampaikan oleh Growpal, PTPN XII, dan PT Siantar Top juga mendukung argumen ini. Masing-masing industri tersebut membutuhkan informasi mengenai fluktuasi harga, peta persaingan, dan regulasi di negara bersangkutan yang terkait dengan komoditas ekspor mereka secara spesifik. PT Siantar Top, misalnya, membutuhkan informasi mengenai tren dan pola konsumsi makanan ringan di suatu negara dan siapa saja industri makanan ringan yang mendominasi pasar tersebut untuk dapat menentukan strategi penentuan harga dan jenis produk. Informasi yang dibutuhkan Growpal untuk sektor perikanan dan PTPN XII untuk sektor perkebunan tentunya berbeda. Hal ini tentu menyulitkan Kementerian Luar Negeri untuk mengakomodasi semua kebutuhan jika harus menyediakan informasi secara reguler, sehingga mekanisme penyediaan informasi yang sifatnya *by request* dapat membantu.

Kelemahan dari sistem *by request* ini adalah pemanfaatannya oleh usaha berskala kecil. Sistem ini belum dapat dimanfaatkan oleh UMKM karena belum banyak UMKM yang berinisiatif – atau mengetahui adanya fasilitas tersebut – untuk meminta informasi langsung kepada Kementerian Luar Negeri. Menurut perwakilan Kadin, bantuan kepada UMKM, terlebih di daerah, harus diprioritaskan karena biasanya perusahaan besar sudah lebih mengetahui dan memahami karakter pasar global dan dapat mencari informasi sendiri. Selama ini Kementerian Luar Negeri, baik Ditjen Amerop maupun Ditjen Aspasaf, sudah melakukan kegiatan kunjungan ke daerah untuk mengetahui kebutuhan UMKM dan

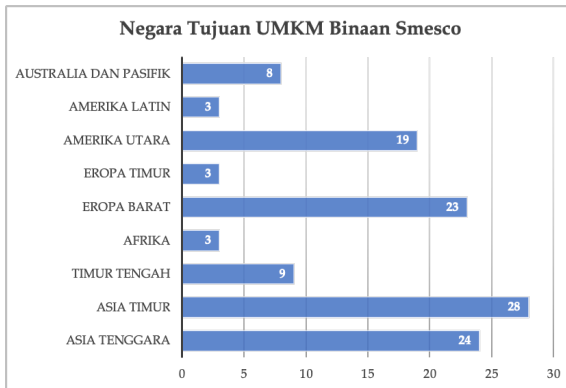
mempertemukan mereka dengan calon pembeli melalui forum-forum bisnis dan pameran dagang. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil yang optimal. Berdasarkan keterangan perwakilan Smesco Indonesia, dari sekitar 2.000 UMKM yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKUKM), hanya 48 UMKM yang sudah terdata melakukan ekspor. Grafik berikut ini menggambarkan pemetaan UMKM binaan Smesco Indonesia yang sudah melakukan ekspor berdasarkan komoditas dan negara tujuannya.

Grafik Pemetaan UMKM berdasarkan Komoditas



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Grafik Pemetaan UMKM berdasarkan Negara Tujuan Ekspor



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Kebutuhan dari UMKM untuk dapat menembus pasar ekspor, khususnya dengan mendapatkan informasi pasar yang relevan dengan komoditas unggulan mereka, menjadi perhatian penting untuk Kementerian Luar Negeri ke depannya. Potensi UMKM untuk meningkatkan performa perdagangan dan perekonomian Indonesia secara umum cukup besar sebab UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, target ekspor secara khusus dan pembangunan nasional secara umum yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM. Kementerian Luar Negeri kemudian memegang peranan yang penting dalam upaya-upaya afirmasi untuk memperkuat dan membantu UMKM masuk ke pasar global.

Kanal Diseminasi

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri memiliki berbagai kanal diseminasi untuk dokumen *economic intelligence*-nya. Kanal-kanal ini dapat dikategorisasi menjadi dua jenis: kanal digital dan kanal cetak. Namun, selain kanal-

kanal resmi, Kementerian Luar Negeri juga memanfaatkan forum-forum tatap muka (misi dagang, forum *business matchings*, pameran dagang, dan sebagainya) untuk mendiseminasikan informasi pasar yang telah disusun. Terkait situs *web*, pada dasarnya kanal ini cukup potensial untuk dikembangkan mengingat situs *web* dengan mudah dapat diakses oleh para pelaku usaha di seluruh Nusantara. Beberapa negara lain, misalnya Belanda dan Kanada, juga memanfaatkan situs *web* untuk memberikan informasi pasar.⁸⁴ Organisasi-organisasi internasional, baik yang bersifat *profit-oriented* maupun non-profit, biasanya juga mengandalkan situs *web*, misalnya *International Trade Center (ITC)*.⁸⁵ Namun, situs *web* baru dapat dikelola oleh perwakilan-perwakilan RI di kawasan Amerop, sedangkan yang berada di kawasan Aspasaf sering terkendala dengan fasilitas internet di beberapa negara. Terkait dengan efektivitas kanal digital, beberapa narasumber menyarankan agar informasi yang ditampilkan tidak sekadar *raw data* atau tautan ke situs *web* lainnya, tetapi dalam bentuk narasi atau hasil analisis dari tim penyusun agar lebih memudahkan pembaca.⁸⁶ Saran lainnya adalah agar informasi yang diberikan selalu diperbarui secara rutin.⁸⁷

⁸⁴ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, "Centre of the Promotion of Imports," CBI, 2019, <https://www.cbi.eu>; TFO Canada, "Trade Facilitation Office (TFO) Canada," TFO, 2019, <https://www.tfocanada.ca/home.php>.

⁸⁵ ITC, "International Trade Center," ITC, 2019, <http://www.intracen.org>.

⁸⁶ Arief Bustaman dan Ponirin Sugito, wawancara oleh penulis, Bandung, 9 Agustus, 2019; Fernanda Reza, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019; Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

⁸⁷ Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019; Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019



Menyelidik Permasalahan Sistemik dan Pengaruhnya Terhadap *Economic Intelligence*

*D*alam memahami seluruh aspek permasalahan terkait dokumen *economic intelligence* terdapat berbagai faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen. Faktor-faktor ini berada di level sistem atau struktur yang perlu mendapat perhatian agar dokumen *economic intelligence* dapat dimanfaatkan secara optimal. Sistem yang dimaksud adalah keseluruhan strategi dan perencanaan, pelaksanaan dan alur koordinasi.

Strategi dan Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan yang optimal tidak dapat terlepas dari perencanaan yang efektif dan efisien serta pengelolaan strategi tepat dan akurat.

Apabila jika perencanaan tidak dilakukan secara efektif dan efisien maka pengalokasian sumber daya tidak akan berada di lokasi yang tepat dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, penyusunan rencana perlu terintegrasi dan berjalan sinergis dengan berbasis atas fakta dan data.

a. Strategi dan Perencanaan yang Terintegrasi

Permasalahan strategi dan perencanaan pada dasarnya terkait dengan bagaimana pemerintah, secara khusus Kementerian Luar Negeri, menentukan perencanaan strategi mengenai *economic intelligence* secara khusus dan kebijakan perdagangan/diplomasi ekonomi secara umum. Secara khusus, program penyusunan dokumen *economic intelligence* dianggap belum terencana dengan baik. Apa yang dimaksud dengan *economic intelligence*, siapa yang bertugas melaksanakan, dan bagaimana perbedaannya dengan riset pasar serupa yang dilakukan instansi-instansi lain?⁸⁸ Istilah '*economic intelligence*' sendiri sebenarnya mengandung pengertian yang rancu karena menurut Badan Intelijen Negara, istilah *intelligence* tidak begitu tepat dipakai untuk merujuk pada informasi-informasi yang sifatnya umum. *Intelligence* memuat bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan yang strategis, mencakup deteksi dini terhadap potensi bahaya dan kompetitor dari suatu negara, sehingga karakter informasinya lebih mendalam daripada data, informasi dan pengetahuan.⁸⁹ Sementara itu, dalam dokumen Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2017, *economic intelligence* adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi.⁹⁰ Namun, kajian serupa

⁸⁸ Fernanda Reza, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019; Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

⁸⁹ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

⁹⁰ Kementerian Luar Negeri RI, "Laporan Kinerja 2017" (Jakarta, 2018).

juga dilakukan oleh instansi lain, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Perlu dilihat perbedaan mendasar dari kajian-kajian tersebut. Selama ini, Kemendag menyusun informasi pasar – kemudian disebut analisis pengembangan pasar tujuan ekspor – yang sifatnya spesifik untuk satu komoditas tertentu.⁹¹ Akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh Kemendag adalah terbatasnya jumlah atase perdagangan dan ITPC di negara-negara mitra sehingga informasi pasar yang dilakukan belum mencakup banyak negara. Sementara itu, kajian yang dilakukan LPEI melihat aspek-aspek finansial dari suatu hubungan perdagangan. Kajian ini merupakan bentuk kerja sama dengan Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Ekspor Indonesia (JP2EI) yang terdiri dari 11 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

Dengan sekian banyak dokumen *economic intelligence* atau riset pasar yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah di Indonesia, maka diperlukan suatu perencanaan yang secara komprehensif mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi terkait agar penyusunan dokumen *economic intelligence* tidak berjalan sendiri-sendiri dan efektivitas pemanfaatannya dapat ditingkatkan. Lebih jauh lagi, perencanaan penyusunan dokumen *economic intelligence* juga harus terintegrasi dengan perencanaan ekspor nasional, kebijakan perdagangan, diplomasi ekonomi dan target pembangunan secara umum. Selama ini, pemerintah belum sepakat mengenai agenda ekspor nasional, sehingga instansi-instansi terkait mempunyai perspektif yang berbeda-beda.⁹² Perencanaan agenda ekspor nasional dan target pembangunan pada dasarnya telah ditetapkan oleh Bappenas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Akan tetapi, bagaimana perencanaan ini diintegrasikan dengan target capaian-capaian ekonomi lainnya, yang menjadi tupoksi kementerian/lembaga terkait, masih menjadi tugas bersama. Menurut konsultan FTA Center Bandung dan perwakilan Smesco Indonesia, target ekspor seharusnya direncanakan dengan matang dari hulu ke hilirnya

⁹¹ Kementerian Perdagangan, wawancara oleh penulis, Jakarta, 21 November, 2019

⁹² Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

dan dijadikan komitmen nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha.⁹³

b. Perencanaan Berbasis Data

Pada pembahasan mengenai permasalahan substantif sebelumnya, disinggung bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri tidak membuat pemetaan pasar di luar negeri berdasarkan komoditas unggulan, sehingga strategi penetrasi pasar yang digunakan adalah generalisasi.⁹⁴ Pada dasarnya, permasalahan ini terkait erat dengan minimnya pemetaan data potensi ekspor dari dalam negeri. Persoalan penghimpunan dan integrasi data masih menjadi persoalan krusial bagi Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.⁹⁵ Menurut BIN, data terkait ekspor, terutama dari instansi yang secara langsung menangani data keluar masuknya barang ke Indonesia, perlu dioptimalisasi lagi validitasnya. Tidak hanya data terkait transaksi ekspor, data mengenai potensi ekonomi di dalam negeri juga perlu diperhatikan. Pada level UMKM, misalnya, pemetaan jenis dan skala usaha sulit dilakukan karena belum ada kriteria dan definisi yang jelas dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan mengenai perbedaan industri dan usaha berskala mikro, kecil dan menengah.⁹⁶ Pada level industri, daftar industri strategis yang siap untuk ekspor juga perlu didata. Akibatnya, pemerintah belum mengetahui dimana kantong-kantong eksportir, komoditas apa yang menjadi keunggulan Indonesia, dan bagaimana keunggulan komparatif dari setiap komoditas. Pemetaan ini penting agar kita dapat menghitung nilai tambah (*value added*) dan kapitalisasi dari setiap sektor.⁹⁷ Setelah data di dalam negeri didapatkan, pemerintah kemudian perlu bergerak untuk melakukan pemetaan dan analisis pasar/negara/kawasan yang potensial

⁹³ Ponirin dan Arief Bustaman, wawancara oleh penulis, Bandung, 9 Agustus 2019

⁹⁴ Membuka akses dan memberikan informasi pasar untuk semua komoditas dan pasar tanpa melihat keunggulan komparatif dari komoditas atau pasar tertentu

⁹⁵ Rossanto Dwi Handoyo, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

⁹⁶ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

⁹⁷ Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

untuk tujuan ekspor produk-produk Indonesia. Di Karibia, misalnya, produk-produk kosmetik sedang digemari. Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki *export champion* yang memiliki otoritas untuk membuat pemetaan tersebut.

Pemetaan terhadap potensi ekonomi di dalam negeri dan peluang pasar di luar negeri penting untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan perdagangan Indonesia: diversifikasi atau generalisasi.⁹⁸ Kebijakan ekspor yang bertumpu pada komoditas unggulan Indonesia ini dapat menekan biaya dan waktu karena pada dasarnya pemerintah hanya perlu mengembangkan komoditas unggulan tersebut dan fokus pada pasar potensialnya. Adapun untuk komoditas yang belum memiliki pasar besar di luar negeri, pemerintah dapat berperan untuk menciptakan permintaan pasar – tidak lagi menggunakan pendekatan *demand-driven*. Kembali ke pembahasan mengenai perencanaan, untuk menciptakan pasar diperlukan strategi khusus pada fungsi diplomasi ekonomi. Selama ini Kementerian Luar Negeri aktif melakukan kegiatan promosi dan pameran dagang. Perlu dikaji efektivitas dari kegiatan ini dan dibuat perencanaan untuk pameran strategis yang perlu diikuti di tahun-tahun berikutnya⁹⁹ – sesuai dengan pemetaan komoditas unggulan dan pasar potensial yang telah dibahas sebelumnya. Selama ini, informasi mengenai kegiatan pameran ataupun promosi lainnya yang sampai kepada pelaku UMKM sifatnya umum, tidak diinformasikan komoditas spesifik apa yang menjadi fokus dari pameran yang bersangkutan. Selain itu, tindak lanjut dari kegiatan ini juga masih minim.¹⁰⁰ Dengan demikian, keseluruhan perencanaan ekspor tidak dapat dipisahkan dari perencanaan ekonomi lainnya.

Untuk membuat strategi perencanaan ekspor yang baik, pemerintah harus memperhatikan data terkait impor. Di bidang pertanian, misalnya, Indonesia sudah masuk ke dalam *food import trap*, dimana kenaikan volume impor setiap tahunnya menunjukkan ketergantungan Indonesia

⁹⁸ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

⁹⁹ Suwanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 23 Oktober, 2019; PTPN XII, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 Oktober, 2019

¹⁰⁰ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

terhadap impor pangan. Provinsi Jawa Timur mengalami defisit perdagangan dimana jumlah impor, khususnya untuk barang baku, masih tinggi.¹⁰¹ Akan tetapi, nilai impor yang tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan pasar, namun juga ekosistem bisnis yang memudahkan proses impor. Ketimpangan regulasi antara Indonesia dan negara-negara lain, dimana proses ekspor dari Indonesia ke luar negeri biasanya dipersulit oleh regulasi dan proses birokrasi yang rumit, sementara proses masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia lebih mudah.¹⁰² Namun, bukan berarti impor harus dihilangkan sama sekali. Menurut Kadin, impor juga perlu digunakan sebagai strategi *bargaining position* bagi Indonesia untuk menekan bea masuk produk ekspor olahan ke negara lain, terutama negara-negara yang memasok bahan baku.¹⁰³ Dengan demikian, data dan pemahaman terhadap kondisi ini diperlukan untuk membangun strategi penyeimbangan ekspor dan impor, yang kemudian juga terkait dengan strategi negosiasi perdagangan.¹⁰⁴

Selain data ekspor dan impor, data terkait potensi ekonomi lainnya – terutama yang menjadi fokus Kementerian Luar Negeri – yakni investasi dan pariwisata. Saat ini, pendataan investasi keluar (*outbond*) dan masuk (*inbond*) belum disusun dengan baik. Belum ada kesamaan definisi yang dipakai oleh instansi-instansi terkait. Terutama untuk industri-industri yang membawa nama Indonesia untuk investasi di luar negeri, perlu dilihat kembali apakah mereka masuk sebagai perusahaan Indonesia sehingga berkontribusi pada pendapatan nasional melalui pajak.¹⁰⁵ Data ini harus dimiliki agar pemerintah dapat mengukur sejauh mana investasi menguntungkan bagi Indonesia dan membangun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan keuntungannya.¹⁰⁶ Untuk investasi keluar, harus dipertimbangkan risiko bisnis di negara tersebut. Di Afrika, misalnya, Kadin menyarankan Indonesia lebih berfokus pada ekspor

¹⁰¹ Drajat Irawan, wawancara oleh penulis, Surabaya, 23 Oktober, 2019

¹⁰² Suwanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 23 Oktober, 2019

¹⁰³ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

¹⁰⁴ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹⁰⁵ Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

¹⁰⁶ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

dibandingkan investasi karena risiko keamanannya masih tinggi.¹⁰⁷ Namun, menurut LPEL, investasi tetap harus dijalankan agar akses dan jalur perdagangan ke negara tersebut terbuka.¹⁰⁸

Dengan demikian, untuk membuat perencanaan yang baik, pemerintah harus memahami dengan baik kondisi dan capaian pembangunan ekonomi dalam negeri, mulai dari aspek mikro sampai makro. Kemudian, analisis kondisi dan potensi ekonomi global – baik per negara, kawasan maupun secara global – menjadi penting untuk dilakukan agar perencanaan ekspor nasional, perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi tepat sasaran. Peran Kementerian Luar Negeri menjadi strategis untuk membaca kondisi dan menganalisis isu-isu geopolitik dan ekonomi yang berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat, misalnya, harus dianalisis pengaruhnya terhadap Indonesia dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat yang bisa diperoleh di tengah situasi tersebut.¹⁰⁹

Negosiasi dan Keamanan Perdagangan

Permasalahan lain adalah terkait isu teknis dalam melakukan ekspor. Selain perumusan rencana atau kebijakan dan adanya informasi pasar yang komprehensif untuk memfasilitasi aktivitas ekspor dari para pelaku usaha, diperlukan adanya bantuan atau ‘intervensi’ dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran dan peningkatan aktivitas ekspor. Intervensi tersebut dapat berupa negosiasi perdagangan yang baik dengan pihak negara mitra agar manfaat yang didapat Indonesia dapat dioptimalisasi, dan bantuan teknis dalam hal menjamin keamanan produk ekspor atau investasi di negara mitra.

Negosiasi perdagangan mencakup perjanjian dagang yang belum dan sudah disepakati. Untuk perjanjian dagang yang belum dilakukan, perlu dibuat perencanaan yang matang mengenai negara-negara mana

¹⁰⁷ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

¹⁰⁸ Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

¹⁰⁹ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

saja yang potensial untuk dijajaki hubungan kerja sama sesuai pemetaan pasar dan komoditas potensial yang telah dibuat sebelumnya. Dapat dipertimbangkan juga kondisi sosial dan geopolitik di wilayah tersebut untuk menentukan bentuk dan strategi kerja sama yang menguntungkan. Perjanjian-perjanjian dagang yang meliputi satu kawasan harus diprioritaskan dibanding perjanjian bilateral karena biayanya lebih sedikit dan manfaatnya lebih tinggi.¹¹⁰ Sementara itu, bentuk perjanjian juga harus disesuaikan dengan karakter negara/kawasan mitra. Di Afrika, misalnya, bentuk *preferential trade agreement* (PTA) dianggap lebih menguntungkan daripada FTA.¹¹¹ Kadin sendiri menyayangkan negosiasi PTA dengan negara-negara di kawasan Afrika belum berjalan optimal. Pada kawasan yang belum banyak bekerja sama dengan Indonesia, seperti Afrika, pemerintah perlu memprioritaskan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi *hub* di kawasan tertentu. Di Afrika, yang menjadi *hub* adalah Rwanda karena komoditas dari luar negeri biasanya akan masuk ke Rwanda terlebih dahulu. Namun, adanya persoalan politik dan keamanan di Afrika juga harus dijadikan bahan pertimbangan sebelum menjajaki hubungan kerja sama.

Pada negara-negara atau kawasan yang sudah memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia, perlu dilakukan dua hal, yaitu mengevaluasi manfaat dari kerja sama tersebut bagi Indonesia dan memastikan aspek-aspek kerja sama tersebut benar-benar berjalan dengan baik. Dari dua hal ini, pemerintah dapat menentukan apakah suatu kerja sama perdagangan perlu dipertahankan atau tidak. Apabila dipertahankan, perlu ada strategi khusus untuk mengamankan kepentingan nasional di dalamnya. Dalam *Indonesia and Australia-New Zealand FTA*, misalnya, Indonesia mengalami defisit.¹¹² BIN menyebutkan bahwa perjanjian dagang dengan Australia sebenarnya berbahaya sekali untuk sektor pangan Indonesia, karena produk pangan Australia dapat dengan mudah masuk Indonesia.¹¹³ Ada pula kasus-kasus dimana FTA tidak termanfaatkan dengan baik, seperti yang dialami PT Siantar Top

¹¹⁰ Hindra Soeparjanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

¹¹¹ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

¹¹² Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹¹³ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

ketika ingin mengekspor produknya ke India. Produknya masih dikenai bea masuk yang tinggi meskipun Indonesia tergabung dalam ASEAN-India FTA. Untuk itu, perundingan FTA harus selalu dilihat proses dan efektivitasnya.¹¹⁴ Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan sengketa-sengketa dagang yang berpotensi merugikan Indonesia. Indonesia sering kali kalah dalam berbagai sengketa dagang di World Trade Organization (WTO). Persoalan impor, misalnya, tidak hanya menyangkut tingginya permintaan, tetapi juga negosiasi perdagangan yang lemah. Ada pula kasus kampanye negatif terhadap produk-produk Indonesia, misalnya produk sawit, sehingga volume ekspor menurun.¹¹⁵ Selain penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai regulasi sebelum proses ekspor dilakukan, proses negosiasi antara perwakilan resmi Indonesia di luar negeri dan pemerintah di negara bersangkutan dapat menjadi opsi penyelesaian masalah yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, untuk memenangkan negosiasi perdagangan, kemampuan diplomasi harus dioptimalisasi.¹¹⁶

Perihal bantuan teknis, perwakilan Indonesia di luar negeri sangat dibutuhkan perannya untuk mempertemukan mereka dengan calon pembeli potensial atau membantu memasarkan sampel produk mereka.¹¹⁷ Selain itu, jaminan keamanan terhadap komoditas ekspor ataupun bisnis mereka di luar negeri juga diharapkan dari perwakilan resmi pemerintah. Smesco Indonesia, misalnya, pernah mengalami masalah terkait ditahannya produk UMKM Indonesia oleh perwakilan imigrasi di Rusia.¹¹⁸ Menurut BIN, beberapa industri lokal Indonesia juga pernah menemui masalah terkait ditahannya kontainer mereka karena belum memenuhi persyaratan ekspor di negara tujuan ekspor. Jaminan keamanan bisnis seperti ini yang membuat pelaku usaha ragu-ragu untuk mengekspor. PTPN XII, misalnya, lebih memilih bertransaksi dengan *trader/importir* dibandingkan *end-users* karena risikonya lebih minim,

¹¹⁴ Rossanto Dwi Handoyo, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

¹¹⁵ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹¹⁶ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹¹⁷ PTPN XII, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 Oktober, 2019

¹¹⁸ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

meskipun biaya transaksi menjadi lebih mahal. *Trader* biasanya membayar di depan.¹¹⁹ Kekhawatiran serupa dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha yang ingin menjajaki hubungan dagang dengan negara-negara di kawasan Afrika. Pelaku usaha tidak bisa dengan mudah menjanjikan transaksi karena ada ketidakpastian dan risiko bisnis yang tinggi sehingga dibutuhkan perwakilan-perwakilan yang bisa dipercaya.¹²⁰ Untuk mengatasi isu-isu ini, selain melalui negosiasi, diperlukan juga diseminasi informasi mengenai regulasi dan hambatan tarif/non-tarif di negara tujuan ekspor juga perlu diketahui oleh pelaku usaha agar tidak menghadapi masalah-masalah ketika produk mereka sudah sampai di negara tujuan.¹²¹ Di sini fungsi diplomasi Kementerian Luar Negeri memainkan peran strategis.¹²² Sementara itu, selain persoalan ekspor dan impor, ditemukan pula persoalan terkait investor dari luar negeri yang tidak memenuhi kewajibannya.¹²³

Masalah teknis lainnya adalah terkait dengan alur perdagangan internasional. Banyak produk ekspor Indonesia yang hanya 'transit' di suatu negara, sebelum dipasarkan lagi ke negara-negara lain – namun tidak atas nama Indonesia.¹²⁴ Alhasil, potensi keuntungan yang didapat Indonesia menjadi turun. Ditemukan fakta bahwa produk-produk perhiasan dari Jawa Timur biasanya diekspor dahulu ke Singapura sebelum didistribusikan kembali ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Proses ini menjadi lebih mudah dan murah karena Singapura telah memiliki perjanjian dagang dengan negara-negara di kawasan tersebut. Se jauh ini, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perdagangan belum dapat menelusuri alur perdagangan internasional tersebut.¹²⁵ Penelusuran ini menjadi penting sebab dapat membantu proses pendataan terhadap pasar mana yang sebenarnya menjadi

¹¹⁹ PTPN XII, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 Oktober, 2019

¹²⁰ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

¹²¹ Hindra Soeparjanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

¹²² Hindra Soeparjanto, wawancara oleh penulis, Surabaya, 22 Oktober, 2019

¹²³ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹²⁴ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹²⁵ Kementerian Perdagangan, wawancara oleh penulis, Jakarta, 21 November, 2019

konsumen produk-produk Indonesia, sehingga kemudian dapat mengarahkan potensi perjanjian atau kerja sama perdagangan yang lebih tepat sasaran.

Selain membantu menciptakan lingkungan bisnis yang aman di luar negeri, lingkungan yang serupa perlu diciptakan di dalam negeri. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang secara positif mendorong aktivitas ekonomi – seperti menjamin ketersediaan bahan baku, sistem logistik yang baik¹²⁶, penurunan pajak untuk UMKM dan *start-up*¹²⁷, serta fasilitas permodalan yang memadai¹²⁸. Di dalam negeri, ekosistem yang baik dibangun dari proses peningkatan kapasitas, sosialisasi, vokasional, manajemen SDM, sistem keuangan, logistik, rantai pasokan, dan lain-lain.¹²⁹

Alur Koordinasi

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, salah satu aspek kunci yang dapat menentukan keberlangsungan perdagangan Indonesia, baik dari sisi perencanaan secara umum maupun dari sisi penyusunan dokumen *economic intelligence* secara khusus, adalah alur koordinasi. Miskoordinasi, khususnya antarinstansi pemerintah, adalah masalah yang disoroti oleh berbagai pihak. Terkait dengan *economic intelligence*, adanya beragam informasi melalui beragam kanal dari masing-masing kementerian cukup membingungkan para pemangku kepentingan. Growpal, sebagai *start-up* baru yang bergerak di sektor perikanan, berharap ada mekanisme satu pintu dimana semua informasi pasar dan informasi mengenai proses ekspor-impor dari seluruh kementerian dapat diintegrasikan melalui suatu mekanisme satu pintu. Selama ini pihaknya harus mencari informasi melalui laman *web* masing-masing kementerian terkait, misalnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta

¹²⁶ Ponirin dan Arief Bustaman, wawancara oleh penulis, Bandung, 9 Agustus, 2019

¹²⁷ Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019; Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

¹²⁸ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

¹²⁹ Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

Kementerian Perdagangan. Ini terkait juga dengan penyederhanaan prosedur/perizinan yang menjadi faktor kunci keberhasilan agenda ekspor nasional.¹³⁰

Para pelaku usaha bingung terkait instansi mana yang harus dihubungi ketika menghadapi masalah terkait ekspor. Mereka juga mengeluhkan minimnya koordinasi antarperwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya antara pihak kedutaan besar/konsulat jenderal dengan atase perdagangan dan ITPC terkait akses data yang didapat dari langganan berbayar. Di sisi lain, Indonesia juga mempunyai Visit Indonesia Tourism Officer (VITO), Wonderful Indonesia Tourism Office (WITO), Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), yang tupoksinya dapat dikoordinasikan dengan baik.

Dalam hal pendataan, alur koordinasi yang jelas juga seharusnya menjadi perhatian khusus. Masing-masing instansi, baik yang di luar negeri, pusat dan daerah memiliki data tetapi tidak diintegrasikan satu sama lain. Atase perdagangan dan kedutaan besar, misalnya, memiliki informasi dan pemetaan mengenai kondisi perdagangan (capaian dan sengketa yang dihadapi), begitu pula BIN memetakan potensi ekonomi di kawasan Pasifik Selatan. Namun, data-data ini belum saling dikomunikasikan untuk membuat perencanaan. Data ini biasanya diminta apabila instansi lain memerlukan.¹³¹

Dalam membuat kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi, pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara satu instansi dengan yang lainnya harus dilakukan. Selama ini, antarinstansi belum berkomunikasi satu sama lain.¹³² Menurut Smesco Indonesia, pihaknya biasanya diundang untuk mengikuti rapat dan pelatihan, akan tetapi tidak dilibatkan dalam diskusi untuk membahas kebijakan yang sifatnya lebih strategis.¹³³ Selain perencanaan yang baik terhadap alur koordinasi ini, prosesnya juga harus berjalan dengan baik. Seringkali persoalan koordinasi dibenturkan dengan adanya ego sektoral dari masing-masing

¹³⁰ Ponirin dan Arief Bustaman, wawancara oleh penulis, Bandung, 9 Agustus 2019; Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

¹³¹ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹³² Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

¹³³ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

instansi, baik di pusat, daerah maupun di luar negeri. Sebagaimana yang telah disinggung di atas mengenai persoalan impor dan sengketa dagang, intel yang beroperasi di luar dan Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan resmi perlu berkoordinasi dengan pusat untuk memberikan gambaran kondisi di luar negeri, sehingga peraturan-peraturan Menteri dapat selaras dengan kondisi tersebut. Menurut perwakilan BIN, pernah terjadi miskordinasi ketika investor dari Australia ingin masuk ke pasar Indonesia tetapi kemudian ia mendengar informasi bahwa pemerintah pusat membatasi investasi dan impor.¹³⁴ Selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha juga memegang peranan yang penting untuk mendorong kinerja ekspor nasional. Smesco Indonesia mengaku menghadapi kesulitan dalam melakukan pemetaan UMKM karena dinas di daerah kurang responsif. Begitupun pelaku UMKM yang belum tertib dalam melaporkan transaksi ekspornya.¹³⁵

Selain aktor pemerintah, aktor swasta juga harus dilibatkan dalam perencanaan ekspor nasional. Para pelaku usaha juga mengharapkan adanya ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha yang memungkinkan mereka saling bertukar pikiran dan pengalaman terkait pengembangan pasar ekspor untuk masing-masing sektor usaha. Growpal mengharapkan adanya diskusi dan kesempatan *networking* dengan para pemangku kepentingan.¹³⁶ Selama ini, perwakilan Kadin mengaku dilibatkan dalam berbagai proses koordinasi dengan pemerintah, akan tetapi hanya sebatas jika ada kunjungan atau misi dagang, bukan dalam diskusi kebijakan.¹³⁷ Bahkan, pihak LPEI menilai bahwa aktor swasta harus dilibatkan dalam proses negosiasi perdagangan.¹³⁸ Selain itu, aktor swasta yang berada di luar negeri juga perlu dirangkul. Di Sydney, Australia, komunitas diaspora Indonesia membentuk House of Indonesia (HoI), yang menurut Growpal, *trade center* ini memudahkan proses ekspor produk-produk dari Indonesia.¹³⁹

¹³⁴ Badan Intelijen Negara, wawancara oleh penulis, Jakarta, 24 Oktober, 2019

¹³⁵ Armel Arifin, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

¹³⁶ Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019

¹³⁷ Mintardjo Halim, wawancara oleh penulis, Jakarta, 13 September, 2019

¹³⁸ Sinthya Roesly, wawancara oleh penulis, Jakarta, 22 November, 2019

¹³⁹ Noorbaskoro Paundra, wawancara oleh penulis, Jakarta, 25 September, 2019



Analisis Kebijakan Pemanfaatan *Economic Intelligence*

*D*alam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan analisis serta rekomendasi implementatif. Tulisan ini akan menyampaikan analisis/rekomendasi yang sifatnya khusus dan umum. Rekomendasi khusus ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik pada penyusunan dokumen *economic intelligence* oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun rekomendasi umum merujuk pada solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sistemik yang menyangkut kebijakan ekspor, perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi secara umum.

Penyusunan Dokumen *Economic Intelligence*

Berkaca terhadap kondisi dan permasalahan saat ini, pelaksanaan perumusan data perlu ditingkatkan kualitas penyusunannya. Dengan demikian, para *stakeholders* dapat memanfaatkan lebih baik data-data *economic intelligence* sehingga menghasilkan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, utamanya pada kapasitas ekspor nasional.

Memproduksi Informasi yang Komprehensif, Akurat, dan Tepat Sasaran

Guna mendukung agenda penyusunan dokumen *economic intelligence* yang efektif dan tepat sasaran, dapat ditempuh melalui strategi: (1) menggunakan sumber data primer, (2) melakukan pemetaan terhadap komoditas unggulan Indonesia dan potensi pasarnya, (3) menyediakan layanan *hotline/customer service call/e-mail* untuk penyediaan informasi pasar yang sifatnya lebih mendalam, (4) memantau dan mencari informasi pasar secara reguler.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup penggunaan strategi riset pasar secara langsung melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Strategi ini sejalan dengan hasil kajian literatur yang menunjukkan bahwa sumber-sumber sekunder--seperti yang selama ini digunakan oleh Kementerian Luar Negeri -- belum dapat dijadikan referensi utama dalam riset pasar karena tidak dapat memberikan informasi yang sifatnya komprehensif dan mendalam. Sumber-sumber primer, sebaliknya, dapat memberikan informasi mengenai perspektif dan keinginan konsumen atau pasar, tren dan peta kompetisi untuk komoditas tertentu dan hambatan-hambatan bisnis yang perlu diwaspadai oleh calon eksportir di Indonesia. Strategi ini sudah dimulai oleh Kementerian Perdagangan sejak 2018. Setiap tahunnya perwakilan Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan ke negara-negara -- dimana pemerintah tidak menempatkan atase perdagangan dan ITPC di salah satu kotanya -- dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, seperti asosiasi bisnis, kamar dagang dan industri, dan perwakilan pemerintah untuk mengetahui secara langsung kondisi pasar di suatu negara. Strategi serupa perlu dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri, mengingat keberadaan fungsional ekonomi yang ada di seluruh perwakilan RI di luar negeri merupakan aset untuk mendapatkan informasi pasar yang mencakup banyak negara dan kawasan.

Strategi kedua adalah proses pengumpulan data potensi ekonomi di dalam dan luar negeri. Potensi ekonomi di dalam negeri mencakup pendataan dan analisis sektor dan komoditas unggulan Indonesia. Data dan analisis tersebut mencakup nilai tambah, volume perdagangan saat

ini, potensi perdagangan ke depan dan strategi peningkatan daya saing sektor/komoditas untuk mengoptimalkan perdagangan internasional. Sementara itu, potensi pasar di luar negeri perlu dipetakan, baik per negara/kawasan maupun per komoditas, untuk menentukan strategi perdagangan Indonesia. Potensi pasar ini meliputi data dan analisis hubungan dan neraca perdagangan dengan Indonesia, neraca perdagangan dengan negara kompetitor, peta kompetisi, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan perdagangan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya meliputi komponen ekonomi seperti neraca perdagangan, kompetisi pasar, neraca pembiayaan, dan transaksi berjalan, melainkan juga faktor non-ekonomi seperti kondisi politik, regulasi negara tujuan, dan sosial budaya.

Pelaksanaan strategi kedua ini tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat antara Kementerian Luar Negeri dan instansi-instansi pemerintah lainnya di dalam negeri. Kementerian Perdagangan, misalnya, melakukan riset pasar serupa (komponen informasinya meliputi kondisi pasar secara umum, tren produk, saluran distribusi produk, regulasi domestik, metode transaksi, sistem pembayaran dan ketentuan harga). Fungsi Kementerian Luar Negeri tidak perlu menggantikan riset-riset serupa yang dilakukan kementerian lain. Namun sifatnya melengkapi, sebab riset yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dapat meningkatkan cakupan dan kedalaman informasi dalam dokumen *economic intelligence* yang dihasilkan. Hal ini mengingat bahwa jumlah perwakilan RI yang mencapai 132 dan kemampuan diplomat Kementerian Luar Negeri untuk menggali informasi-informasi terkait situasi geopolitik dan keamanan secara langsung di suatu negara. Selain itu, kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan kementerian lain dapat menjawab tantangan yang dihadapi kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan, saat melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menggali informasi dari aktor bisnis di luar negeri, yakni waktu yang terbatas dan biaya yang besar.

Strategi ketiga dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait komprehensivitas dan kekhususan informasi riset pasar. Strategi penggunaan sumber-sumber data primer akan membantu meningkatkan penyediaan informasi pasar yang komprehensif dan mendalam. Namun Kementerian Luar Negeri tentunya tidak dapat menyediakan informasi

komprehensif bagi seluruh komoditas dan pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan demikian, dibutuhkan mekanisme tambahan untuk penyediaan informasi pasar yang sifatnya *by request* melalui layanan *hotline*. Layanan ini juga dapat menjalankan fungsi EIR, yaitu respons terhadap perubahan dari lingkungan pasar ekspor. Mengacu pada literatur akademik mengenai EMO, Kementerian Luar Negeri selama ini hanya berfokus pada fungsi EIG dan EID dari proses riset pasar yang dijalankan secara reguler, sehingga fungsi EIR belum terlalu dimanfaatkan. Mengingat kondisi pasar global yang dinamis, dimana perubahan harga, peta kompetisi dan regulasi dapat terjadi secara tiba-tiba, Kementerian Luar Negeri perlu melengkapi informasi pasar yang didiseminasikan secara reguler dengan informasi-informasi tambahan yang dapat membantu pelaku usaha merespons perubahan pasar.

Layanan *hotline*, dengan demikian, memudahkan Kementerian Luar Negeri karena informasi yang diberikan hanya yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengajukan permintaan informasi pasar untuk komoditas atau bantuan teknis tertentu agar aktivitas ekspor menjadi lebih mudah dijalankan. Mekanisme ini juga menjawab permasalahan terkait penyalahgunaan informasi pasar yang dapat diakses secara bebas oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai referensi, mekanisme ini dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, namun fungsinya perlu diintegrasikan dengan Kementerian Luar Negeri agar informasi yang diberikan sifatnya menyeluruh dan memudahkan pelaku usaha. Beberapa negara lain, seperti Australia dan Inggris, juga menerapkan mekanisme serupa untuk membantu pelaku usaha mengeksport produknya ke luar negeri. *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Australia, misalnya, menyediakan layanan *customer service* melalui *e-mail* untuk memberikan informasi pasar yang dibutuhkan eksportir dalam waktu 24 jam sejak permintaan diterima.

Strategi keempat mencakup proses riset pasar yang dilakukan secara reguler setiap bulannya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, karakter pasar yang dinamis perlu dipahami dan diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan riset.

Melakukan dan Menulis Hasil Riset yang Mudah Dipahami

Strategi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil riset pasar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha adalah: (1) menempatkan staf khusus di perwakilan RI untuk secara khusus melaksanakan riset pasar, (2) menyeragamkan format laporan hasil riset pasar, dan (3) melengkapi data riset pasar dengan analisis agar memudahkan proses pembacaan dan pemanfaatan data.

Strategi pertama dilakukan dengan menugaskan seorang staf khusus yang memiliki keahlian riset di bidang ekonomi dan perdagangan. Staf tersebut dapat merupakan staf dari kementerian di pusat, akademisi di dalam atau luar negeri, ataupun staf internal Kementerian Luar Negeri yang telah melalui serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas. Sebelum ditugaskan di perwakilan RI, staf khusus tersebut perlu dibekali informasi mengenai tugas dan strategi khusus yang perlu dilakukan saat melakukan riset pasar. Hal ini perlu dilakukan agar semua staf khusus memiliki perspektif dan tujuan yang sama sesuai arahan agenda peningkatan ekspor nasional dari pusat. Strategi serupa sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang menempatkan ahli perdagangan (akademisi dan staf dinas daerah) di FTA Center untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan LPEI yang bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan riset pasar. Hanya saja, strategi ini perlu dilengkapi dengan penugasan staf khusus di luar negeri mengingat mereka dapat mencari informasi pasar secara langsung di negara tersebut yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri. Strategi ini kemudian terkait dengan strategi kedua, di mana semua staf khusus dibekali format laporan hasil riset pasar yang sama untuk semua negara. Strategi ketiga mencakup kapasitas para staf khusus untuk tidak berhenti pada pengumpulan data-data mentah, tetapi juga menganalisis data tersebut agar pelaku usaha yang membaca dan memanfaatkannya dapat dengan mudah mengetahui dan mengambil langkah-langkah strategis dalam melakukan ekspor ke suatu negara.

Diseminasi Hasil Riset melalui Kanal-kanal yang Efektif Menjangkau Audiens

Agar hasil riset pasar dapat dimanfaatkan dengan efektif oleh para pelaku usaha, proses diseminasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal: target penerima informasi dan kanal diseminasi. Target penerima informasi perlu difokuskan kepada pelaku UMKM yang secara khusus membutuhkan 'intervensi' atau bantuan dari pemerintah, mengingatkan pelaku usaha pada level industri melakukan riset pasarnya secara mandiri. Oleh sebab itu, riset pasar yang dilakukan dan didiseminasikan melalui kanal-kanal publik secara reguler perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan UMKM. Akan tetapi, pelaku usaha pada level industri dapat mengajukan permintaan informasi pasar secara spesifik melalui layanan *hotline*. Terkait dengan kanal diseminasi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup: (1) membuat *platform* laman *web* bersama untuk penyediaan informasi yang diperbaharui secara berkala, (2) menyediakan layanan *hotline/customer service call/e-mail* untuk penyediaan informasi pasar yang sifatnya lebih mendalam, dan (3) melakukan riset tematik dan komprehensif untuk satu komoditas/negara tertentu dan dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah.

Pelaksanaan dari strategi pertama adalah pembuatan laman *web* yang mengintegrasikan data dan informasi riset pasar dari berbagai kementerian. Selama ini, masing-masing kementerian ataupun instansi mempublikasikan hasil risetnya secara mandiri, baik melalui laman *web* ataupun majalah. Keberadaan laman *web* yang terintegrasi memungkinkan staf kementerian terkait untuk menjadi administrator dan mengunggah data-data terbaru mengenai kondisi pasar di luar negeri. Mekanisme satu pintu seperti ini akan menekan durasi waktu diseminasi data antar kementerian dan memudahkan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi komprehensif dan terbaru. Namun, tetap dibutuhkan staf khusus yang bertugas memantau, mengelola, dan mengolah informasi yang diunggah pada laman *web* tersebut agar pelaku usaha dapat membaca dan memanfaatkannya dengan praktis. Adapun untuk informasi yang sifatnya sangat spesifik dan/atau tidak dapat didiseminasikan secara terbuka akan dikirimkan melalui Bravaks dan dikumpulkan oleh kesekretariatan yang mengelola data perdagangan

nasional. Diseminasinya kepada pelaku usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan akan menggunakan layanan *hotline*.

Selain kanal laman *web* dan *hotline*, media buku/majalah juga perlu dimanfaatkan. Strategi ketiga ini pada dasarnya telah diterapkan oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri. Mengingat potensi pemanfaatannya yang cukup besar, kanal ini perlu ditingkatkan pengelolaannya melalui pemilihan topik/komoditas/negara/kawasan tertentu setiap tahunnya berdasar pada strategi ekspor nasional. Buku/majalah yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri dapat diarahkan untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM Indonesia ke pasar global atau memberikan kondisi dan analisis pasar non-tradisional sebagai target pasar baru bagi produk-produk ekspor Indonesia. Untuk digarisbawahi, laman *web*, layanan *hotline* dan buku/majalah perlu disosialisasikan dengan baik kepada instansi pemerintah di pusat dan daerah, asosiasi bisnis, kamar dagang dan industri, media, dan kelompok-kelompok masyarakat.

Poin-poin rekomendasi dan strateginya secara rinci dan keterkaitan antar strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rekomendasi Penyusunan Dokumen *Economic Intelligence* Kementerian Luar Negeri

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
Karakter Informasi	Komprehensi vitas dan kedalaman informasi	Menggunakan sumber data primer	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan strategi riset - Merumuskan informan/partisipan riset 		Pendek	Kemenu Kemendag
	Informasi yang menjawab kebutuhan pelaku usaha	Menyusun informasi yang relevan terkait komoditas unggulan Indonesia dan potensi pasarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata dan memetakan sektor/komoditas unggulan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tambah - Volume perdagangan saat ini - Potensi volume perdagangan 	Pendek	Kemen KUKM
			<ul style="list-style-type: none"> - Mendata dan memetakan pasar non-tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan dan neraca perdagangan dengan Indonesia - Neraca perdagangan dengan negara kompetitor - Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan perdagangan 	Pendek	Kemenu

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga - Peta kompetisi - Standardisasi produk 	Pendek	Kemendag
			- Mendata dan memetakan pasar tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan dan neraca perdagangan dengan Indonesia - Neraca perdagangan dengan negara kompetitor - Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan perdagangan 	Menengah	Kemenlu
				<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga - Peta kompetisi - Standardisasi produk 	Menengah	Kemendag
		Menyediakan layanan <i>hotline/customer service call/e-mail</i> untuk penyediaan informasi yang sifatnya spesifik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat jaringan/forum ekspor nasional - Menentukan <i>export champion</i> yang bertugas 		Pendek	Kemendag sebagai <i>export champion</i> Kemenlu

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
			<p>mengelola informasi pasar dari kementerian terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan tim dan alur komunikasi untuk melakukan riset pasar yang sifatnya spesifik 			sebagai anggota tim riset yang bertugas mencari informasi yang tidak dapat diketahui dari dalam negeri
	Akurasi informasi	Memantau dan mencari informasi pasar (yang sifatnya umum) setiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Staf khusus di Kemenlu dan Kemendag melakukan dan memperbaharui informasi riset pasar setiap bulan 		Pendek	Kemenlu dan Kemendag
Proses Penyusunan Informasi	Proses riset	Menggunakan sumber data primer				
		Menempatkan staf khusus di perwakilan RI untuk melaksanakan riset pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan staf kementerian terkait di pusat <u>Atau</u> - Menugaskan akademisi di dalam dan/atau luar negeri <u>Atau</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Staf kementerian terkait komoditas unggulan yang ingin dipasarkan di suatu negara (misal: staf kementerian pertanian di Amerika Latin) - Akademisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi 	Menengah	Kemenlu

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
			- Menugaskan staf internal Kemenlu	dan perdagangan, terutama untuk komoditas unggulan yang ingin dipasarkan - Staf internal Kemenlu yang telah dibekali peningkatan kapasitas untuk melakukan riset pasar		
			- Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan <i>pre-departure briefing</i> sebelum ditugaskan ke luar negeri	- Metode penelitian - Isu-isu ekonomi dan perdagangan - Penulisan dan analisis hasil penelitian	Menengah	Kementerian dan/atau instansi terkait
	Standardisasi format laporan <i>economic intelligence</i>	Menyeragamkan format laporan hasil riset pasar	- Membuat format laporan hasil riset sebagai standard referensi semua staf khusus yang melakukan riset		Pendek	Kemenlu dan Kemendag
		Melengkapi data riset pasar dengan analisis agar memudahkan proses	- Mengolah data mentah menjadi poin-poin atau narasi berisi analisis		Pendek	Staf khusus yang ditugaskan di luar negeri

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		pembacaan dan pemanfaatan data	mengenai kondisi pasar tertentu			
Diseminasi dan Pemanfaatan Informasi	Target penerima informasi	Membuat dokumen <i>economic intelligence</i> yang membantu pelaku UMKM	- Mendata dan mengkaji kebutuhan informasi oleh UMKM		Menengah	KemenKUKM
	Kanal diseminasi	Membuat <i>platform</i> laman <i>web</i> bersama untuk menyediakan informasi yang diperbaharui secara berkala	- Membuat satu laman <i>web</i> baru yang dapat diakses oleh administrator dari berbagai kementerian dan/atau instansi terkait - Menunjuk satu koordinator administrator untuk mengelola data dan informasi yang diunggah		Pendek	Kementerian terkait
		Menyediakan layanan <i>hotline/customer service call/e-mail</i> untuk penyediaan informasi yang tidak	- Mengirim informasi dari luar negeri melalui Bravaks		Pendek	Kementerian terkait

Jenis Masalah	Masalah	Rekomendasi	Langkah Strategis	Keterangan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		dapat/diperkenankan untuk diakses oleh publik				
		Melakukan riset tematik dan komprehensif untuk satu komoditas/negara tertentu dan dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah	- Menentukan daftar topik/komoditas/negara/kawasan prioritas untuk dilakukan kajian secara khusus		Menengah	Kementerian terkait
			- Mempublikasikannya secara reguler setiap tahun		Menengah	Kemenlu

Penguatan Komponen Diplomasi Ekonomi

Dalam mengelola dokumen *economic intelligence* perlu perhatian yang seksama terkait dengan komponen diplomasi ekonomi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Hal ini kiranya dapat menjawab permasalahan sistemik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Alternatif kebijakannya merujuk pada *gap* yang terjadi antara realita pelaksanaan kebijakan perdagangan dan ekonomi internasional Indonesia dengan kerangka pemikiran yang sudah disampaikan.

Secara garis besar terdapat tiga hal utama yang ingin dibahas dalam rekomendasi ini. *Pertama*, penguatan manajemen data potensi ekonomi Indonesia, baik dari perspektif domestik ataupun internasional. *Kedua*, penajaman dan pematangan strategi diplomasi ekonomi Indonesia. *Ketiga*, penguatan kerja sama multipihak untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi dalam diplomasi ekonomi dan *economic intelligence*. Rekomendasi ini tentunya tidak hanya ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri melainkan juga pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam diplomasi ekonomi Indonesia seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor.

Penguatan Manajemen Data Potensi Ekonomi Indonesia

Dalam upaya meningkatkan volume ekspor Indonesia dengan mengoptimalkan penggunaan *economic intelligence* yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri, maka perlu menjadi perhatian semua pihak untuk menyelaraskan potensi pasar global dalam EI dengan potensi ekonomi domestik Indonesia. Kementerian/lembaga terkait harus dapat memetakan potensi produksi barang dan jasa dari dalam negeri dengan kebutuhan dan permintaan komunitas global melalui penguatan manajemen data potensi ekonomi nasional.

Data potensi ekonomi seperti nilai produksi, nilai tambah, perkembangan harga, dan area sebaran produksi sangat bermanfaat bagi

pelaku usaha dalam menentukan strategi ekspor-investasi, menentukan target pasar, dan fokus sektor usaha/produksi. Data potensi pengembangan sektor tersebut perlu mempertimbangkan keunggulan sumber daya yang dimiliki Indonesia di area tertentu, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Lebih detail, rekomendasi tersebut harus didukung oleh tahapan-tahapan berikut; 1) pengumpulan informasi yang akurat dan komprehensif terkait potensi ekonomi Indonesia dari segi domestik dengan wawancara dan survei oleh lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), 2) pengolahan data menjadi pemetaan potensi ekonomi dan relasinya dengan data-data EI, dan 3) diseminasi pada publik. Tahapan ini hampir serupa dengan rekomendasi khusus, namun bertitik pada data-data dalam negeri. Proses ini perlu melibatkan masukan banyak pihak, yaitu kementerian/ lembaga teknis, surveyor, akademisi, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil.

Pemetaan yang dibuat dapat didukung oleh analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT) pada tiga hal; 1) sektor atau komoditas yang menjadi unggulan Indonesia, 2) ukuran usaha berupa skala industri atau UMKM, 3) kawasan/daerah. Kategorisasi tersebut lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha dan publik yang ingin memanfaatkan data-data yang disediakan pemerintah. Dengan begitu, secara garis besar rekomendasi penguatan manajemen data ini berusaha menyelaraskan ketersediaan (*supply*) produksi dalam negeri dengan permintaan (*demand*) pasar global.

Penajaman dan Pematangan Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Selain kebijakan yang terkait dengan pengelolaan data potensi ekonomi, tidak kalah penting adalah perumusan kebijakan pendukung diplomasi ekonomi. Sejauh ini belum terdapat *grand strategy* kebijakan perdagangan maupun diplomasi ekonomi Indonesia mengingat upaya ini baru benar-

benar difokuskan di bawah pemerintahan Joko Widodo.¹⁴⁰ Transformasi fokus diplomasi Indonesia yang awalnya bertitik pada pencitraan politik dan sosial di kancah internasional menjadi lebih pragmatis dan bernilai materiil sejalan dengan penguatan ekonomi Indonesia menjadi *emerging economy* dunia. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung peningkatan ekspor ataupun kegiatan investasi ke depannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis untuk merumuskan kebijakan ekonomi dalam kegiatan internasional, mulai dari ekspor, investasi, bantuan, dan negosiasi dagang.

Langkah strategis pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah **memperkuat kebijakan perdagangan yang berorientasi ekspor terhadap produk dengan nilai tambah tinggi**. Berkaitan dengan rekomendasi sebelumnya mengenai pemetaan potensi, bagian ini akan menjadikan hasil analisis potensi sebagai acuan membuat peraturan atau kebijakan yang dapat mendukung ekspor produk dalam negeri. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari berbagai komoditas produksi di Indonesia seperti produk perikanan, pertanian, tekstil, dan manufaktur lainnya perlu dituangkan secara lebih rinci dalam strategi dan kebijakan ekspor unggulan. Kebijakan ini sekaligus menjadi acuan untuk memberikan kemudahan ataupun insentif bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Lebih lanjut terdapat beberapa aspek penting dalam pembuatan kebijakan ekspor: 1) berfokus pada ekspor produk olahan dengan nilai tambah tinggi, 2) mencegah ekspor produk mentah atau bibit yang masih bernilai jual rendah dan dapat diolah di dalam negeri, dan 3) menyeleksi impor – terbatas pada produk yang esensial dalam kegiatan ekonomi nasional seperti teknologi produksi massal, atau teknologi mutakhir lainnya untuk proyek pembangunan (Wibowo & Kusrianto, 2010).¹⁴¹

Seperti yang dilakukan oleh Inggris, strategi ekspor harus berangkat dari/dan mendukung agenda kebijakan luar negeri, perdagangan dan pembangunan nasional. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris mengembangkan strategi ekspornya sendiri yang berdasarkan 4 pilar: (1)

¹⁴⁰ Chandra Gian Asmara, "Jokowi Ke Menlu Retno: Perkuat Diplomasi Ekonomi," CNBC Indonesia, Oktober 23, 2019.

¹⁴¹ Budhi Wibowo dan Adi Kusrianto, *Menembus Pasar Ekspor* (Jakarta: Gramedia, 2010).

Encourage – mendorong dan menginspirasi pelaku usaha yang dapat mengeksport namun baru memulai, (2) *Inform* - menginformasikan pelaku usaha cara-cara mengeksport melalui diseminasi informasi, saran dan bantuan praktis dari sektor publik dan privat, (3) *Connect* – menghubungkan pelaku usaha di Inggris dengan pembeli di luar negeri, pasar internasional, dan satu sama lain, dan (4) *Finance* – menjadikan bantuan keuangan sebagai program utama.

Kebijakan perdagangan di atas harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kementerian yang spesifik membahas isu perdagangan dan diplomasi, melainkan juga semua kementerian/lembaga teknis terkait. Sebagai contoh, kebijakan pelarangan ekspor biji nikel, yang mewajibkan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM, serta Kementerian Perindustrian.¹⁴² Tanpa koordinasi yang baik dan komitmen yang sama, maka akan sulit untuk mencapai tujuan rekomendasi kebijakan perdagangan di atas.

Strategi kedua dalam payung rekomendasi kebijakan diplomasi ekonomi berkaitan dengan kebijakan investasi *inbound* dan *outbound*. **Pemerintah perlu selektif dalam menerima investasi asing ke dalam negeri dan proaktif mendorong ekspansi unit usaha di luar negeri** sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Dalam konteks investasi ke dalam negeri, *foreign direct investment* (FDI) perlu diarahkan kepada sektor yang dapat meningkatkan produksi barang ekspor. Investasi asing yang hanya bertujuan untuk mengeksploitasi konsumen di dalam negeri dapat diminimalisasi. Kebijakan serupa telah sukses dilakukan oleh Tiongkok ataupun Vietnam dalam beberapa tahun belakang, dimana perusahaan dari Eropa dan Amerika Serikat melakukan relokasi tempat produksi untuk produk-produk yang akan dipasarkan di wilayah Asia.¹⁴³ Investasi tipe ini tidak hanya membuka lapangan kerja di dalam negeri, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor. Selain

¹⁴² Yanita Petriella, "Ekspor Biji Nikel: Investigasi Soal Pelanggaran Selesai Pekan Depan," *Bisnis.Com*, November 1, 2019.

¹⁴³ Steven Clarke, Mohammadreza Akbari, and Shagheyegh Maleki Far, "Vietnam's Trade Policy: A Developing Nation Assessment," *International Journal Community Development and Management Studies* 1 (2017): 13–37.

investasi untuk barang ekspor, kebijakan investasi ke dalam juga dapat difokuskan pada sektor riset pengembangan teknologi yang sekaligus bermanfaat sebagai media alih teknologi dan pengetahuan dari perusahaan asing di Indonesia.

Lebih detail untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan; 1) memetakan kebutuhan investasi nasional yang strategis untuk pembangunan nasional, 2) membuat daftar calon investor potensial berdasarkan data-data EI yang sudah ada, dan 3) membuat kerangka insentif dan administratif yang disesuaikan dengan sektor dan profil calon investor.

Untuk investasi ke luar, pemerintah Indonesia dapat memulai dengan pemetaan investor lokal baik dari segi kapasitas dan area usaha yang kemudian dicocokkan dengan kebutuhan investasi di luar negeri. *Outbound investment* dapat diutamakan bagi perusahaan yang sudah mapan di Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Negara berkembang di pasar-pasar non-tradisional pada umumnya dapat menjadi sasaran utama karena kebutuhan mereka tinggi untuk kegiatan produksi dalam negeri. Akan tetapi, tetap perlu ditekankan analisis risiko dari kegiatan investasi terutama yang berkaitan keamanan, jaminan politik, dan sistem sosial-budaya masyarakat negara tujuan sebagaimana telah direkomendasikan dalam data *economic intelligence* yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Secara ringkas, rekomendasi ini memiliki tahap sebagai berikut: 1) pemetaan usaha unggulan dan pemain yang siap *go international*, 2) pemetaan target investasi di luar negeri, 3) membuat kerangka insentif dan administratif yang sesuai.

Kebijakan berikutnya berkaitan dengan sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap devisa negara. **Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pariwisata yang fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.** Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor jasa dalam perdagangan yang diandalkan oleh Indonesia. Akan tetapi, dibandingkan beberapa negara Kawasan, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia masih terhitung rendah. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengambil beberapa strategi untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Pendekatan pariwisata berkelanjutan yang baru mulai

berkembang dapat bermanfaat untuk melestarikan alam dan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal tetapi juga menjaga minat kunjungan wisatawan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, perlu juga dilakukan pemetaan minat dan tren wisatawan mancanegara. Faktor kedekatan geografis dan penerimaan kondisi sosial budaya setempat perlu menjadi pertimbangan. Sebagai contoh, Indonesia Timur dapat menjadi fokus utama wisatawan dari kawasan Australia ataupun yang memiliki minat khusus pada kegiatan alam ekstrim.

Selain memetakan pangsa pasar dan karakter wisata lokal, hal lain yang penting dilakukan adalah rencana promosi pariwisata daerah. Promosi pariwisata harus disesuaikan dengan strategi pemetaan sebelumnya. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial seperti *vlog*, *web*, dan *youtube* untuk mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki. Selain juga terlibat pada kegiatan pameran/*event* promosi konvensional di luar negeri. Akan, tetapi penting ditegaskan bahwa promosi yang dilakukan harus sesuai target pemetaan yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya. Kegiatan promosi ini yang kemudian harus diselaraskan dengan tupoksi dari perwakilan RI di luar negeri.

Terakhir, kebijakan pariwisata juga perlu menekankan aspek nilai transaksi wisatawan mancanegara, tidak sekadar jumlah kunjungan. Pengeluaran wisatawan asing selama berkunjung di Indonesia perlu ditingkatkan agar benar-benar dapat berdampak pada pembangunan daerah yang dikunjungi. Beberapa komponen seperti perluasan dan kemudahan akses *tax refund*, media transaksi yang mudah bagi wisman, dan target wisman kelas atas (*luxury tour*).

Lebih lanjut, kebijakan lain yang perlu dikembangkan pemerintah dan masih jarang dibahas sebagai instrumen diplomasi ekonomi adalah pemberian bantuan pembangunan. Indonesia sejak tahun 2010 melalui eksistensi Tim Kornas KSS Indonesia telah berupaya meningkatkan kontribusi bantuan luar negeri Indonesia terhadap negara berkembang dalam kerangka kerja sama pembangunan global. Bantuan yang diberikan Indonesia beragam, mulai dari bantuan teknis untuk peningkatan kualitas kapasitas sumber daya manusia di negara penerima manfaat sampai dengan beasiswa. Akan tetapi, mekanisme ini masih sangat jarang diselaraskan dengan kepentingan ekonomi yang bersifat

materiil. Oleh sebab itu, **pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pemberian bantuan pembangunan terhadap negara mitra dengan kepentingan komersial; ekspor dan investasi.**

Negara seperti Jepang merupakan salah satu contoh sukses dari kebijakan pemberian bantuan yang diselaraskan dengan kepentingan komersial. Bantuan Jepang pada umumnya mengkondisikan adanya penggunaan barang atau jasa Jepang dalam proses implementasi program bantuan sehingga selain dapat membantu negara mitra juga dapat melakukan ekspansi pasar (Takamine, 2006).¹⁴⁴ Walaupun hal ini dianggap kurang sejalan dengan prinsip bantuan KSS Indonesia yang berasaskan solidaritas dan kesetaraan, akan tetapi pada realitanya bantuan tidak ada yang gratis “*no free lunch*,” dan pada nyatanya KSS juga memiliki prinsip saling menguntungkan antara pemberi dan penerima manfaat bantuan.¹⁴⁵ Prinsip tersebut dapat menjadi landasan turunan kepentingan ekonomi Indonesia dalam sinkronisasi kebijakan bantuan dan ekspansi pasar/investasi Indonesia di luar negeri.

Mendukung kebijakan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang penting untuk dilakukan; dimulai dari 1) pemetaan ulang negara prioritas penerima bantuan yang sejalan dengan potensi relasi ekonomi, 2) pemetaan sektor bantuan yang potensial dengan kepentingan komersial, dan 3) merumuskan mekanisme keterlibatan aktor bisnis dalam bantuan pembangunan. Pada saat sekarang ini Kementerian Luar Negeri selalu mengeluarkan daftar negara prioritas penerima bantuan dengan pertimbangan utama nilai politik dan kedekatan historis. Hal ini tentunya perlu diperbaharui agar lebih kompatibel dengan kepentingan komersial yang sedang dikembangkan.

Sebagai contoh, ketika pemerintah Indonesia memberikan bantuan teknis di bidang pertanian kepada negara Afrika, pemanfaatan mesin atau alat pertanian dari Indonesia dapat digunakan. Proses pelatihan yang diberikan melalui instrumen buatan Indonesia dapat mendorong negara penerima manfaat memilih produk Indonesia agar lebih sesuai

¹⁴⁴ Tsukasa Takamine, “The Political Economy of Japanese Foreign Aid,” *Pacific Affairs* 79, no. 1 (2006): 29–48.

¹⁴⁵ Nilima Gulrajani and Rachael Calleja, “Understanding Donor Motivations: Developing the Principled Aid Index,” ODI UK, no. 548 (2019): 1–44.

diaplikasikan di negara sendiri. Hal ini sangat potensial, sehubungan Indonesia sebagai negara *emerging economy* memiliki kedekatan dinamika pembangunan dengan negara berkembang lainnya, yang tentunya sangat jauh jarak perkembangan teknologi dan inovasinya dengan beberapa negara maju.

Terakhir, pemerintah perlu **merumuskan ulang kebijakan strategi negosiasi perdagangan Indonesia dengan mitra luar negeri**. Secara umum, terdapat dua tahapan penting dalam merumuskan ulang strategi tersebut, pertama dengan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan perdagangan yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, seperti CEPA Indonesia-Jepang dan ASEAN FTA. Kemudian, memetakan analisis potensi negosiasi perdagangan di masa depan dengan menilai efektivitas perjanjian dagang dan trennya beberapa tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menggandeng pihak yang kompeten untuk menganalisis efektivitas perjanjian dagang yang sudah dilaksanakan serta memetakan potensi ke depannya.

Dari segi evaluasi FTA ataupun PTA yang sudah ada, terhadap beberapa komponen penting dan harus menjadi pertimbangan pihak-pihak yang terlibat, (1) kontribusi perjanjian perdagangan terhadap peningkatan ekspor dan volume perdagangan, (2) analisis peningkatan perdagangan per sektor, dan (3) analisis kepabeanaan. Ketiga indikator ini penting dan umum digunakan dalam *trade impact assessment*.¹⁴⁶ Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat memulai formulasi perjanjian dagang lainnya. Pembelajaran (*lessons learned*) dari pelaksanaan perjanjian dagang dan sengketa dagang di WTO sebelumnya penting menjadi pertimbangan penentuan negara target, sektor yang dilibatkan, tipe perjanjian, lama berlaku, dan komponen lainnya. Berbeda negara, maka kecenderungan perjanjian dagang yang dibuat juga akan berbeda. Perjanjian yang sederhana, seperti *Preferential Trade Agreement* (PTA), Adapun perjanjian yang lebih kompleks berupa *Free Trade Agreement* (FTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Lebih lanjut, dalam menginisiasi perjanjian dagang atau ekonomi, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai media utama

¹⁴⁶ Johanna Ferretti et al., "Trade and the Environment: Framework and Methods for Impact Assessment" (Berlin, n.d.).

untuk memulai FTA dengan beberapa negara kawasan, terutama Asia Timur dan Pasifik. Konsep ASEAN Centrality dapat memberikan daya tawar yang lebih besar. Akan tetapi, untuk daerah yang belum berelasi kuat seperti di Afrika dan Timur-Tengah, PTA dapat menjadi opsi bagi kedua belah pihak yang masih membangun, banyak hambatan domestik.¹⁴⁷

Penguatan Kerja sama Multipihak untuk Mendorong Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dan Penyusunan *Economic Intelligence*

Kerja sama Multipihak atau yang lebih umum dikenal sebagai *multi-stakeholder partnership* merupakan salah satu model kerja sama yang sedang didorong pemanfaatannya di level global. PBB sebagai promotor kerja sama global untuk pembangunan, mendukung kerja sama multipihak dikembangkan di setiap negara, seperti pada kasus pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini dikarenakan kerja sama multipihak mensyaratkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok bisnis, organisasi sosial, akademisi/institusi riset dalam program pemerintah. Keterlibatan tersebut tidak sekedar menghadiri acara melainkan ikut serta dalam memberikan pandangan atau masukan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, pendekatan ini dapat memberikan rasa kepemilikan yang lebih tinggi dan legitimasi bagi publik secara umum.¹⁴⁸ Pada kasus pembentukan EI dan korelasi dengan ED, pendekatan multipihak penting untuk dikembangkan. Setidaknya, terdapat dua poin utama dari usaha tersebut, 1) mendorong koordinasi

¹⁴⁷ Tracy Murray, "Trade Preferences for Developing Countries," in *Problem Economic Integration* (London: The Macmillan Press, 1997).

¹⁴⁸ The Partnering Initiative, "An Introduction to Multi-Stakeholder Partnership: Briefing Document for the Global Partnership for Effective Development Cooperation High Level Meeting 2016," The Partnering Initiative, 2016, <https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2017/03/Introduction-to-MSPs-Briefing-paper.pdf>.

dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, 2) peningkatan keterlibatan aktor non-negara.

Dalam mendorong kerja sama antar lembaga pemerintah dan partisipasi aktor non negara untuk menyukseskan EI dan ED, dibutuhkan jaringan/kelompok kerja bersama. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerja sama multipihak yang bisa diinisiasi oleh pemerintah. Adanya jaringan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi seringnya tumpang tindih cakupan kerja antar instansi pemerintah dan mempermudah koordinasi untuk perencanaan dan pelaksanaan program terkait baik sesama lembaga atau pihak di luar pemerintahan. Berkaitan dengan dua strategi di atas, jaringan ini akan memainkan peran yang sentral untuk: (1) menjadi pusat pengelolaan *bank data* dari data potensi ekonomi domestik dan luar negeri (manajemen data), (2) menjadi koordinator dari perencanaan, penyusunan, dan diseminasi riset pasar oleh kementerian-kementerian, (3) memberikan usulan atau rekomendasi mengenai strategi ekspor nasional, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya (perencanaan), dan (4) menjadi koordinator dari pelaksanaan strategi ekspor nasional atau diplomasi ekonomi secara umum (implementasi).

Terkait peran sebagai *bank data*, jaringan ini akan menjadi penerima data dan informasi dari berbagai kementerian terkait mengenai potensi dan tantangan dari perekonomian Indonesia dan situasi perekonomian global. Setelah diolah dan dianalisis, data ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan ekspor, investasi dan pariwisata yang juga akan disesuaikan dengan strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Jaringan ini juga menerima dan mengkoordinasikan data yang dikumpulkan Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian terkait lainnya mengenai informasi peluang dan tantangan pasar di luar negeri yang kemudian akan didiseminasikan ke pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya melalui sebuah kanal *web* bersama.

Diseminasi informasi pasar dari jaringan ini kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi ekspor nasional. Selain itu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan sistemik lainnya, jaringan ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi berbagai program lainnya untuk memastikan agenda ekspor, investasi dan pariwisata berjalan baik.

Berdasarkan masukan dari para narasumber dan studi pustaka yang penulis lakukan, beberapa program yang dapat dijalankan oleh jaringan ini mencakup:

1. Mengelola data potensi ekonomi di dalam negeri dan potensi pasar global
2. Membentuk forum komunikasi dan koordinasi antar-kementerian
3. Membentuk forum konsultasi dengan pelaku usaha dan elemen masyarakat
4. Mengkoordinasikan dan mengelola proses ekspor nasional dari hulu ke hilir
5. Membentuk forum pengembangan ekspor (forum komunikasi, percontohan *export champion*, pelatihan peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk)

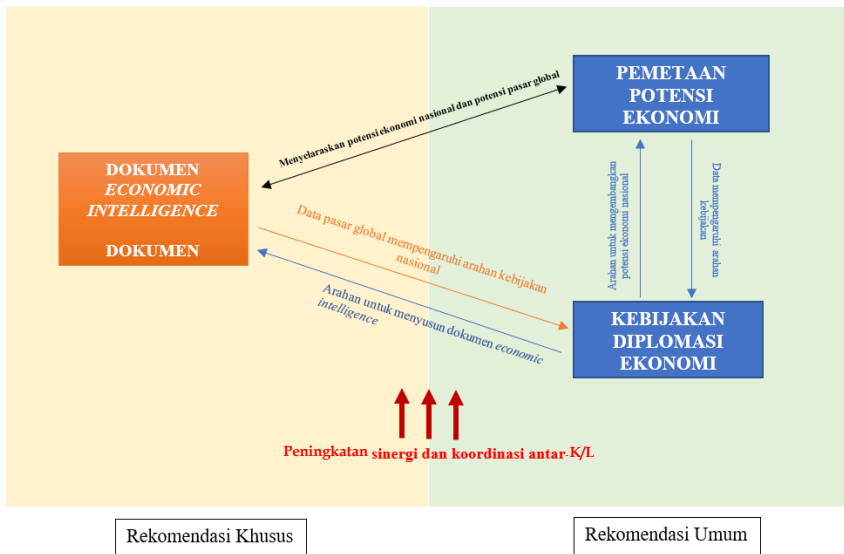
Selain membuat jaringan pendukung ekspor dan investasi (kegiatan ekonomi Indonesia ke luar negeri), langkah strategis lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam kerangka kerja sama multipihak adalah memberikan pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin terlibat. Setidaknya ada tiga pelatihan yang penting untuk digalakkan pemerintah yaitu pertama, pelatihan memanfaatkan data EI yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri. Upaya ini sejalan dengan upaya diseminasi data EI agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kedua, pelatihan untuk melakukan ekspor, investasi, ataupun mengikuti promosi dagang di luar negeri. Ketiga, pelatihan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan ekspor potensial.

Terakhir, dalam mencapai target rekomendasi yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, kerja sama multipihak diharapkan dapat menjadi media dalam langkah strategis menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan ekonomi internasional Indonesia. Kondisi yang kondusif menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk percaya melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah perlu 1) melakukan rekomendasi kebijakan ekonomi sebelumnya bersama dengan semua pihak terkait baik pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, 2) meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan non fisik seperti transportasi, media komunikasi, dan birokrasi, 3) menjaga kepentingan

ekonomi dan politik nasional di level internasional, termasuk dalam melindungi produk/usaha Indonesia di luar negeri.

Keterkaitan antara rekomendasi umum dan khusus dapat dilihat pada gambar berikut:

Diagram Relasi *Economic Intelligence*, Diplomasi Ekonomi, dan Potensi Ekonomi Nasional



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa dokumen *economic intelligence* memegang peranan yang penting untuk mendukung kegiatan perekonomian Indonesia. Perencanaan dokumen *economic intelligence* yang baik didukung oleh pemetaan potensi domestik, sehingga permintaan dan penawaran dapat diselaraskan. Sebaliknya, pemetaan potensi pasar global juga dapat mempengaruhi proses pemetaan potensi domestik. Di sisi lain, kebijakan perdagangan maupun diplomasi Indonesia, selain dipengaruhi oleh potensi ekonomi domestik juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar global agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Sebaliknya, kebijakan diplomasi ekonomi yang telah

dirumuskan dapat mendikte pengembangan potensi ekonomi di dalam negeri dan strategi riset pasar yang lebih efektif.



Rekomendasi Pemanfaatan Dokumen *Economic Intelligence*

Pada tulisan sebelumnya telah dipaparkan potensi pemanfaatan dokumen *economic intelligence* yang disusun Kementerian Luar Negeri, masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaiannya di susun berdasarkan studi pustaka dan keterangan dari berbagai pemangku kepentingan, baik Pemerintah (pusat dan daerah), swasta (pelaku usaha, BUMN, dan asosiasi) serta akademisi. Dari hasil pengamatan awal, ditemukan informasi bahwa dokumen *economic intelligence* merupakan salah satu indikator kerja Kementerian Luar Negeri untuk menyokong pencapaian diplomasi ekonomi. Dokumen ini cukup strategis untuk menyukseskan agenda diplomasi ekonomi Indonesia. Pada tahun 2018, dokumen *economic intelligence* berhasil disusun berjumlah 92 yang mewakili negara-negara di kawasan Aspasaf dan Amerop. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan

lapangan ke beberapa pemangku kepentingan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab Kementerian Luar Negeri agar dokumen *economic intelligence* yang disusun dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut meliputi tantangan dalam penyusunan hingga diseminasi, seperti karakter informasi yang umum dan belum menjawab kebutuhan pelaku usaha, proses penyusunan informasi yang mengandalkan sumber-sumber data sekunder, dan diseminasi informasi yang belum berjalan maksimal. Selain itu, tantangan pada level sistem/struktur juga turut mempengaruhi belum optimalnya pemanfaatan *economic intelligence* Kementerian Luar Negeri, seperti belum adanya strategi dan perencanaan yang terpusat terkait diplomasi ekonomi, khususnya agenda perdagangan nasional, isu-isu teknis pada dinamika perdagangan global yang berpotensi merugikan Indonesia, serta masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pemanfaatan dokumen *economic intelligence* Kementerian Luar Negeri, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dirumuskan. Rekomendasi yang dirumuskan pada tulisan ini merujuk pada kajian literatur, contoh kebijakan yang sukses dilakukan negara-negara lain, serta masukan dari para narasumber yang diwawancarai. Secara garis besar, rekomendasi yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Tantangan		Rekomendasi Khusus	Rekomendasi Umum
1	Kebijakan dan Koordinasi	Belum jelasnya strategi dan/atau arah kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia	Merumuskan pemetaan negara yang menjadi pasar prioritas sebagai referensi untuk arah kebijakan penetrasi pasar Indonesia	Menajamkan dan mematangkan strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Diplomasi Ekonomi
			Menyelaraskan potensi ekonomi nasional dengan kebutuhan global melalui penyusunan daftar sektor/komoditas unggulan domestik yang akan dipasarkan secara intensif di luar negeri	
		Belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan, khususnya antar K/L dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri	Membentuk satgas/tim koordinasi diplomasi ekonomi, khususnya perdagangan luar negeri, yang memuat mekanisme koordinasi serta pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan	
2	Penyusunan Informasi	Dokumen <i>Economic Intelligence</i> belum menjawab kebutuhan pelaku usaha	Memperkuat kolaborasi atau kerja sama multipihak dalam penyusunan <i>economic intelligence</i> melalui: (1) institusionalisasi forum konsultasi publik, khususnya Kemenlu, dengan swasta dan (2) penguatan mekanisme <i>sharing data</i> antar instansi.	Menyepakati dan menyeragamkan format, cakupan isu, mekanisme kerja, serta indikator keberhasilan atas penyusunan dokumen <i>economic intelligence</i> Kemenlu
			Memberi nilai tambah terhadap dokumen <i>economic intelligence</i> melalui <i>refocussing</i> kajian terhadap cakupan isu yang menjadi spesialisasi atau domain Kemenlu, seperti regulasi serta tren perubahan kebijakan, kondisi politik, keamanan perdagangan, dan lainnya.	

No	Tantangan		Rekomendasi Khusus	Rekomendasi Umum
			<p>Menetapkan secara jelas linimasa penyusunan dan diseminasi <i>economic intelligence</i> agar data yang disajikan lebih bersifat aktual.</p> <p>Menggunakan data primer sebagai sumber data utama dalam penyusunan dokumen <i>economic intelligence</i></p> <p>Menempatkan staf khusus dengan latar belakang ekonomi untuk menyusun <i>economic intelligence</i> di perwakilan yang menjadi prioritas dalam perdagangan luar negeri RI.</p> <p>Menyusun dan menuliskan hasil riset yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha</p>	
3	Diseminasi/ Pemanfaatan	Penyebaran informasi dan pemanfaatan dokumen <i>Economic Intelligence</i> belum optimal	<p>Mempublikasikan data <i>economic intelligence</i> secara berkala melalui kanal informasi integratif yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat.</p> <p>Memetakan target dan sasaran penerima manfaat atas <i>economic intelligence</i> yang disusun (UKM, Industri, BUMN)</p>	Membentuk <i>platform</i> lintas instansi terkait diplomasi ekonomi sebagai kanal diseminasi informasi dan sarana konsultasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Hadijah. "Neraca Dagang Kumulatif 2018 Defisit US\$7,52 Miliar, Minyak Jadi Pemicu." *Bisnis.com*, 2018. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181217/9/870260/neraca-dagang-kumulatif-2018-defisit-us752-miliar-minyak-jadi-pemicu>.
- Asmara, Chandra Gian. "Jokowi Ke Menlu Retno: Perkuat Diplomasi Ekonomi." *CNBC Indonesia*, October 23, 2019.
- Aydin, Kayabasi, and Thandiwe Mtetwa. "Impact of Marketing Effectiveness and Capabilities, and Export Market Orientation on Export Performance: Evidence from Turkey." *European Business Review* 28, no. 5 (January 1, 2016): 532–59.
- Aziza, Kurnia Sari. "Jokowi Wanti-Wanti Ekspor Ke Pasar Non-Tradisional." *Kompas.com*, 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/133756226/jokowi-wanti-wanti-ekspor-ke-pasar-non-tradisional>.
- Barron, Andrew, Peter Hultén, and Vladimir Vanyushyn. "The Role of Political Intelligence in Firms' Export Decisions During the Euro Crisis." *Journal of Small Business Management* 54, no. 4 (2016): 1126–46.
- Britannica. "Economic Intelligence." *Britannica.com*, 2019. <https://www.britannica.com/topic/economic-intelligence>.
- Chen, Jieke, Carlos M P Sousa, and Xinming He. "The Determinants of Export Performance: A Review of the Literature 2006-2014." *International Marketing Review* 33, no. 5 (2016): 626–70.
- Clarke, Steven, Mohammadreza Akbari, and Shagheyegh Maleki Far. "Vietnam's Trade Policy: A Developing Nation Assessment." *International Journal Community Development and Management Studies* 1 (2017): 13–37.
- Direktorat Diplomasi Publik Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri RI. "Pertemuan Bilateral Dan Langkah Konkret Kerja sama Ekonomi." *Tabloid Diplomasi*, 2018. <http://www.tabloiddiplomasi.org/pertemuan-bilateral-dan-langkah-konkret-kerjasama-ekonomi/>.
- Fauzia, Mutia. "Turun, Ekonomi Indonesia Kuartal II-2019 Hanya Tumbuh 5,05 Persen." *Kompas.com*, 2019.

- Ferretti, Johanna, Anna-Lena Guske, Klaus Jacob, and Rainer Quitzow. "Trade and the Environment: Framework and Methods for Impact Assessment." Berlin, n.d.
- Gulrajani, Nilima, and Rachael Calleja. "Understanding Donor Motivations: Developing the Principled Aid Index." ODI UK, no. 548 (2019): 1-44.
- ITC. "International Trade Center." ITC, 2019. <http://www.intracen.org>.
- Kementerian Luar Negeri RI. "Laporan Kinerja 2017." Jakarta, 2018.
- Murray, Tracy. "Trade Preferences for Developing Countries." In *Problem Economic Integration*. London: The Macmillan Press, 1997.
- Netherlands Ministry of Foreign Affairs. "Centre of the Promotion of Imports." CBI, 2019. <https://www.cbi.eu>.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Pearson New International Edition: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Ed. Harlow, Essex: Pearson, 2014.
- Olenski, Steve. "The Importance of Market Intelligence For CMOs." *Business Insider*, 2014. <https://www.businessinsider.com/the-importance-of-market-intelligence-for-cmos-2014-10?IR=T>.
- Pascucci, Federica, Sara Bartoloni, and Gian Luca Gregori. "Export Market Orientation and International Performance in the Context of SMEs." *Journal of Small Business & Entrepreneurship* 28, no. 5 (2016): 361-75.
- Peter Hoang, B. "Relationship of Export Market Orientation, Selected Export Strategy, and Export Performance: An Empirical Study." *Global Journal of Management And Business Research* 15, no. 6E (2015):25-32. <https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1778>.
- Petriella, Yanita. "Ekspor Biji Nikel: Investigasi Soal Pelanggaran Selesai Pekan Depan." *Bisnis.Com*. November 1, 2019.
- Pyle, Lesley Spencer. "How to Do Market Research--The Basics." *Entrepreneur.com*, 2010. <https://www.entrepreneur.com/article/217345>.
- Ross, Pauline, Carol McGowan, and Lee Styger. "A Comparison of Theory and Practice in Market Intelligence Gathering for Australian Micro-Businesses and SMEs." *Proceedings of 19th International Business Research Conference 2012, 2013*, 1-17.

- Syadullah, Makmun. "The Importance of Economic Intelligence in South-South Cooperation." *The Jakarta Post*, 2019. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/the-importance-of-economic-intelligence-in-south-south-cooperation.html>.
- Takamine, Tsukasa. "The Political Economy of Japanese Foreign Aid." *Pacific Affairs* 79, no. 1 (2006): 29–48.
- TFO Canada. "Trade Facilitation Office (TFO) Canada." TFO, 2019. <https://www.tfocanada.ca/home.php>.
- The Partnering Initiative. "An Introduction to Multi-Stakeholder Partnership: Briefing Document for the Global Partnership for Effective Development Cooperation High Level Meeting 2016." *The Partnering Initiative*, 2016. <https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2017/03/Introduction-to-MSPs-Briefing-paper.pdf>.
- Tina, Gruber-Muecke, and Katharina Maria Hofer. "Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Performance in Emerging Markets." *International Journal of Emerging Markets* 10, no. 3 (January 1, 2015): 560–71.
- Wibowo, Budhi, dan Adi Kusrianto. *Menembus Pasar Ekspor*. Jakarta: Gramedia, 2010.

LAMPIRAN

No.	Jenis Komponen	Tipe Data	Nama Komponen	Pelaksana
1	Ekonomi (Perdagangan)	<i>Factsheet</i> /Statistik dan Informasi Singkat	Profil Ekonomi Negara X (data-data ekonomi makro seperti PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, APBN, neraca perdagangan, dan lainnya), disesuaikan dengan kebutuhan PEMRI.	Kemendag dan Kemenlu (sinergi Atdag dan Kedutaan)*
2		Statistik dan Analisis	Analisis Sektor dan Komoditas Unggulan (Data hasil pemetaan sektor dan komoditas unggulan yang dibutuhkan (impor) dan yang diproduksi oleh negara X dan daftar mitra dagang potensial). Terdapat beragam sektor dan komoditas, perlu disesuaikan.	Kemendag dan Kemenlu (sinergi Atdag dan Kedutaan)
3		Statistik dan Analisis	Tren Pasar (laju dan prediksi perkembangan pasar dari sektor dan komoditas unggulan, baik berupa barang ataupun jasa, perbandingan dan fluktuasi harga)	Kemendag dan Kemenlu (sinergi Atdag dan Kedutaan)
4		Statistik dan Analisis	Analisis Marketshare/Peta Kompetensi (pesaing untuk produk berupa barang dan jasa Indonesia di sektor unggulan yang telah ditentukan di bagian sebelumnya)	Kemendag dan Kemenlu (sinergi Atdag dan Kedutaan)
5		Statistik dan Analisis	Relasi Perdagangan dengan Indonesia (data berkaitan dengan volume perdagangan, sektor, hambatan perdagangan berupa tarif ataupun non tarif, riwayat sengketa dagang, dan analisis peluang dan potensi lainnya).	Kemendag dan Kemenlu (sinergi Atdag dan Kedutaan)
6	Ekonomi (Jasa Pariwisata)	Statistik dan Analisis	Profil Wisatawan Negara X (data berkaitan dengan jumlah penduduk yang melancong ke luar negeri, kemudian yang berkunjung ke Indonesia, minat dan tren wisatawan, opini terkait Indonesia, jaringan agen travel, konektivitas wisata kedua negara).	Kemenpar, Kemendag dan Kemenlu

No.	Jenis Komponen	Tipe Data	Nama Komponen	Pelaksana
7		<i>Factsheet</i> dan Informasi Singkat	Riwayat Travel Warning/Issues	Kemenlu
8	Ekonomi (investasi)	<i>Factsheet/ Analisis Statistik dan Informasi Singkat</i>	Profil Investasi di Negara X - Umum (pemetaan nilai dan komposisi investasi asing, negara asal investasi, kebutuhan dan sektor unggulan investasi berdasarkan rencana pembangunan, mitra utama untuk berinvestasi, dll) disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah RI	Kemenlu dan BKPM
9		Statistik dan Analisis	Investasi Indonesia di Negara X (data investasi Indonesia di negara X, masa lampau, fokus investasi ke depan, peluang dan tantangan).	Kemenlu dan BKPM
10	Geopolitik dan Sosial-Budaya	<i>Factsheet</i> dan Informasi Singkat	Profil Negara (luas negara, populasi-jumlah/komposisi umur, ibukota, mata uang, kalender fiskal, libur nasional, kota-kota besar, zona waktu, iklim, dan peta).	KBRI/KJRI - Kemenlu
11		<i>Factsheet</i> dan Informasi Singkat	Profil Pemerintahan (presiden/raja/PM-hirarki eksekutif, parlemen/DPR-struktur legislatif, partai politik utama, pemilu, dan struktur yudikatif-pengadilan, ringkasan konstitusi- <i>state of norm</i>).	KBRI/KJRI - Kemenlu
12		<i>Factsheet</i> dan Analisis	Profil Sosial-Budaya Masyarakat / <i>internal relations</i> (etnisitas-mayoritas/minoritas, keagamaan-mayoritas/minoritas, konflik sosial-budaya, permasalahan sosial yang umum: seperti kemiskinan, kekerasan seksual, ketimpangan, narkoba, kerusakan lingkungan-dll, dan <i>pop-culture</i>) yang berimbas pada hubungan perdagangan.	KBRI/KJRI - Kemenlu
13		<i>Factsheet</i> dan Analisis	Profil Geopolitik / <i>external relations</i> (posisi di kawasan, konflik dengan negara kawasan (<i>transnational issues</i>), dinamika politik	KBRI/KJRI - Kemenlu

No.	Jenis Komponen	Tipe Data	Nama Komponen	Pelaksana
			domestik dan kawasan, kesertaan organisasi regional/ internasional, dan kerja sama internasional lainnya).	
14		<i>Factsheet</i> dan Analisis	Relasi dengan Indonesia (informasi KBRI/KJRI/ atase atau pos diplomatik lainnya, ringkasan/pemetaan MoU, konflik masa lampau, isu terkini kedua negara, prediksi relasi kedepan).	KBRI/KJRI - Kemenlu
15	Regulasi/ Peraturan Hukum	<i>Summary</i> dan <i>Flow Chart</i>	Regulasi perdagangan Negara X (ekspor/impor barang dan jasa) - telaah hukum yang termasuk dengan pajak, tarif, insentif, standarisasi produk, HAKI, dan <i>e-commerce</i>).	KBRI/KJRI - Kemenlu
16		<i>Summary</i> dan <i>Flow Chart</i>	Regulasi Investasi Negara X (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>) - telaah hukum termasuk dengan perihal pajak usaha, insentif, HAKI, AMDAL dan regulasi terkait lainnya dalam memulai usaha).	KBRI/KJRI - Kemenlu

* Pada negara-negara yang tidak memiliki atase perdagangan atau ITPC, Kementerian Luar Negeri perlu menugaskan staf khusus untuk menyusun informasi yang terkait komponen ekonomi

Bagian Lima



Penguatan Diplomasi Perwakilan

Dyah Widiastuti
Astri Kusuma Mayasari
Ghifari Athallah Ramadhan
Omar Farizi Wonggo



Ringkasan Eksekutif

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan ujung tombak dari pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dengan adanya 132 perwakilan Indonesia di luar negeri, berbagai macam kepentingan nasional Indonesia yang sangat beragam mulai dari perlindungan WNI hingga diplomasi ekonomi dapat dilaksanakan. Banyaknya jumlah kantor Perwakilan kiranya belum sepadan dengan kontribusi Perwakilan Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan masih dihadapinya berbagai masalah yang menghambat kinerjanya.

Tulisan ini membahas upaya-upaya penguatan Perwakilan Indonesia di luar negeri. *Pertama*, dilakukan telaah literatur (*literature review*) untuk mengetahui kajian akademis mengenai perwakilan itu sendiri. Setidaknya terdapat tiga tema utama dalam telaah literatur ini, yaitu 1) prinsip-prinsip dasar dari diplomasi, 2) perkembangan diplomasi, dan 3) perkembangan diplomasi Indonesia. *Kedua*, bergerak dari telaah literatur tersebut, kemudian dibahas mengenai permasalahan perwakilan Indonesia yang ada. Permasalahan yang dihadapi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan teknis seperti struktur perwakilan dan juga permasalahan substantif seperti ketiadaan dokumen perencanaan dari pemerintah.

Ketiga, dibahas juga *best practices* dari negara-negara lain dalam memperkuat perwakilannya. Penulis menggunakan data dari perwakilan Inggris, Amerika Serikat, dan juga Denmark. Dari ketiga negara tersebut, didapat banyak data yang bisa dijadikan pelajaran untuk memperkuat perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pada akhirnya, tulisan ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perwakilan Indonesia di luar negeri melalui beberapa cara. *Pertama* adalah menata kembali struktur perwakilan Indonesia di luar negeri melalui pembenahan struktur anggaran sehingga duta besar memegang peran terpenting dalam mengambil keputusan di negara akreditasi. *Kedua* adalah melakukan penyusunan *strategic review* terhadap negara dimana perwakilan tersebut ditempatkan. *Ketiga* adalah mempertimbangkan untuk membuka konsulat alih-alih kedutaan.



Perwakilan Sebagai Alat Dalam Memastikan Kehadiran Pemerintah di Luar Negeri (Sebuah Tinjauan Pustaka)

*P*erwakilan Republik Indonesia merupakan salah satu modal utama Indonesia dalam menjalankan diplomasi dan agenda kebijakan luar negerinya. Saat ini, Indonesia memiliki 132 perwakilan, terdiri dari: 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB (New York dan Jenewa) dan untuk ASEAN (di Jakarta), serta 31 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat RI.¹⁴⁹ Dalam perkembangannya, Perwakilan RI merupakan salah satu infrastruktur diplomasi menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat diperkuat. Struktur perwakilan RI di luar negeri meliputi jumlah dan struktur organisasi Perwakilan RI.

¹⁴⁹ Kementerian Luar Negeri, "Perwakilan RI", <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/perwakilan-RI/default.aspx>, di akses 12 Oktober 2018

Agenda Politik Luar Negeri Indonesia mendatang antara lain diarahkan untuk menjadi salah satu negara paling berpengaruh di Asia Pasifik, menjadi Poros Maritim Dunia, membantu mewujudkan

Perwakilan Republik Indonesia merupakan salah satu modal utama Indonesia dalam menjalankan diplomasi dan agenda kebijakan luar negeri

kemandirian nasional dalam konstelasi global dengan cara menciptakan akses pasar; menentukan posisi yang tepat dalam rivalitas internasional serta membantu meningkatkan investasi perusahaan-perusahaan

Indonesia di luar negeri.¹⁵⁰ Dengan demikian, Perwakilan RI diharapkan berperan banyak dengan memainkan fungsinya secara komprehensif, baik *representing*, *reporting*, *protecting* maupun *negotiating*, untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Perwakilan RI diharapkan menjadi ujung tombak diplomasi perdagangan Indonesia di manca negara.

Setidaknya ada beberapa tema besar yang muncul ketika membahas penguatan perwakilan. Tema-tema besar tersebut adalah 1) prinsip-prinsip dasar dari diplomasi, 2) perkembangan diplomasi, dan 3) kondisi perkembangan diplomasi Indonesia. Tema pertama membahas mengenai bagaimana hal-hal mendasar yang perlu dilakukan oleh diplomat dan juga perwakilan suatu negara di negara lain. Tema kedua membahas mengenai upaya diplomasi dalam menghadapi perkembangan dunia internasional, seperti masuknya aktor non-negara dan meluasnya aspek diplomasi seperti yang diperlihatkan pada diplomasi ekonomi. Tema ketiga membahas spesifik terhadap perwakilan, yaitu diplomasi perwakilan Indonesia. Ketiga tema ini sangat penting untuk dibahas agar dapat mengetahui bagaimana perwakilan Indonesia di luar negeri dapat diperkuat.

¹⁵⁰ Kementerian PPN/Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Panjang", hlm. 44

Prinsip-prinsip Dasar Diplomasi

Secara luas, diplomasi adalah proses komunikasi, negosiasi, dan berbagi informasi antarnegara berdaulat. Secara sempit, diplomasi diartikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang dimiliki secara eksklusif oleh negara dalam menghadapi sistem internasional yang bersifat anarkis. Secara sifat, diplomasi bersifat konstitutif atau menyusun tatanan internasional. Dengan menyusun tatanan internasional, diplomasi berarti bersifat penting dalam hubungan antar negara dikarenakan diplomasi merupakan batas antara konflik dan peperangan, serta merupakan pelindung terhadap kekacauan (*chaos*) di sistem internasional.

Untuk memastikan bahwa suatu negara memiliki komitmen diplomatik dengan negara lain, masing-masing negara akan mengirimkan perwakilannya untuk tinggal di negara akreditasi. Perwakilan diplomatik inilah yang merupakan ujung tombak dari upaya diplomasi suatu negara. Perwakilan diplomatik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu 1) mempromosikan kepentingan politik dan ekonomi dari negara asal, 2) melakukan negosiasi, koordinasi, dan menyelesaikan permasalahan yang ada, 3) mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh negara asal, dan 4) sebagai perwujudan dari hadirnya suatu negara di negara lain dalam melaksanakan fungsi diplomatik.

Bergerak dari pembahasan perwakilan, perlu dibahas mengenai apa peran dari perwakilan itu sendiri di negara akreditasi. Perwakilan tersebut setidaknya memiliki tiga peran, yaitu 1) memproduksi laporan untuk negara asal, 2) bertugas sebagai representatif dari negara asal, dan 3) menjadi birokrat. Tugas pertama sangat berkaitan dengan kapasitas analisis diplomatik dari perwakilan untuk memahami kondisi dari negara di mana perwakilan tersebut ditempatkan. Untuk dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, seorang diplomat harus bisa memahami bahasa dari negara dimana diplomat tersebut ditempatkan, memiliki pengalaman dengan masyarakat di negara tersebut, dan mengumpulkan informasi dari beragam sumber (bukan hanya dari sumber resmi namun juga informasi dari tingkatan akar rumput). Peran pertama yaitu memproduksi laporan untuk negara asal sangatlah berkaitan dengan fungsi kedua yaitu bertugas sebagai representatif dari

suatu negara. Status sebagai representatif dari negara asal inilah yang sangat mempengaruhi kualitas dari laporan yang dihasilkan. Diplomat dianggap sebagai pihak yang hidup di tempat yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan di negara akreditasinya. Hal inilah, seperti yang sudah disebutkan, menyebabkan gagalnya penangkapan informasi penting dari masyarakat. Peran ketiga mengenai diplomat yang berperan sebagai birokrat juga sangat menentukan kinerja dari diplomat tersebut, terutama dalam relasinya dengan peran pertama untuk memproduksi laporan dan juga bertugas sebagai seorang representatif dari negara asal. Sebagai seorang birokrat, seorang diplomat merupakan bagian dari struktur birokrasi dari negara asalnya. Sebagai sebuah birokrat di negara asal, seorang diplomat mengumpulkan informasi serta menghasilkan laporan yang dianggap akan menguntungkan baik bagi dirinya maupun bagi negaranya.

Ketiga peran tersebut saling berkaitan dalam diri seorang diplomat. Adanya peran yang beragam (*multitude of roles*) dari diplomat menyebabkan beragam konsekuensi. Peran untuk menghasilkan laporan secara objektif sering kali terhambat dengan peran kedua sebagai representatif dari negara asal (dimana diplomat lebih melihat kepada sumber resmi dalam menghasilkan laporan dan gagal untuk menangkap informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi) dan juga terhambat dengan peran ketiga yaitu sebagai birokrat (dimana diplomat menghasilkan laporan yang dianggap bermanfaat bagi sistem birokasinya atau hanya untuk menyenangkan atasan dari diplomat tersebut).

Dengan demikian, dalam tema pertama ini dengan jelas diperlihatkan mengenai dasar-dasar dari diplomasi itu sendiri, bagaimana diterjemahkan menjadi perwakilan suatu negara di negara lain dan faktor apa yang mempengaruhi ada atau tidaknya suatu perwakilan, dan juga bagaimana peran dari para diplomat yang menjadi perwakilan di suatu negara ke negara lain. Pembahasan ini perlu dikembangkan menjadi tema kedua, yaitu mengenai perkembangan dari peran misi diplomatik.

Perkembangan Diplomasi

Perkembangan pada era kontemporer mengenai diplomasi dengan munculnya aktor non-negara ataupun diplomasi ekonomi menyebabkan maraknya analisis mengenai peran perwakilan dan juga diplomat pada era kontemporer.

Secara ringkas, peran dari suatu perwakilan tidaklah berkurang dengan beragam tantangan yang muncul pada era kontemporer. Sebaliknya, faktor seperti kemajuan teknologi transportasi justru membuat perwakilan mendapat tugas tambahan, seperti menyiapkan bahan untuk kehadiran pejabat dari negara asalnya. Tantangan lain seperti mahalnya biaya untuk memiliki perwakilan (suatu permasalahan yang lebih sering dihadapi oleh negara kecil) dapat diselesaikan dengan melakukan diplomasi dengan menggunakan jalur multilateral (melalui organisasi internasional) alih-alih bilateral semata. Jumlah dari perwakilan suatu negara pun, alih-alih berkurang, justru bertambah. Hal ini dikarenakan adanya negara yang mengirimkan perwakilannya tidak hanya ke negara lain namun juga ke beragam institusi internasional. Tindakan seperti ini sering kali berujung pada tumpang tindihnya beragam perwakilan seperti yang ditunjukkan dengan perwakilan suatu negara untuk Uni Eropa di Brussels, ketika suatu negara tersebut sudah mengirimkan perwakilannya untuk Belgia.

Dalam menghadapi dinamika kontemporer ini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dihadapi dan dimiliki baik oleh seorang diplomat ataupun oleh perwakilan. *Pertama*, harus memiliki pengetahuan mengenai negara akreditasi di mana diplomat tersebut ditempatkan. Dengan memiliki pengetahuan ini, diplomat tersebut akan mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami isu yang relevan dengan kepentingan negaranya. *Kedua*, berfokus kepada isu paling penting. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada diplomat adalah tidak fokus kepada isu penting dikarenakan beragamnya isu yang ada. Harusnya, seorang diplomat dan juga perwakilan berfokus kepada isu apa yang menjadi prioritas bagi negaranya, apakah isu perlindungan warga negaranya atau isu ekonomi semata. *Ketiga*, seorang diplomat dan juga perwakilan harus melakukan diplomasi publik yang efektif untuk

menghilangkan prasangka negatif antara negaranya dengan negara akreditasi.

Perkembangan Diplomasi Indonesia

Untuk memahami lebih lanjut upaya penguatan perwakilan Indonesia, pada tema ini akan dibahas mengenai perkembangan politik luar negeri Indonesia dari era Orde Baru hingga era kontemporer dimana politik luar negeri kembali menjadi ranah dari Kementerian Luar Negeri secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Pada era Orde Lama, Kementerian Luar Negeri merupakan tempat dimana berbagai macam ide revolusioner berkumpul dalam menghadapi dinamika Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Ketika tampuk kekuasaan berganti ke Presiden Soeharto dan memasuki era Orde Baru, diplomat-diplomat yang dianggap memiliki kecondongan ke arah Kiri “dibersihkan” dan diganti dengan angkatan bersenjata. Sepanjang era Orde Baru, presensi angkatan bersenjata merupakan suatu hal yang sangat mencolok dari Kementerian Luar Negeri. Presensi angkatan bersenjata dalam menduduki beberapa jabatan strategis dianggap penting dalam mencegah isu Komunisme dan juga mengurus isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan wilayah dan juga kedaulatan. Dominasi angkatan bersenjata juga diperlihatkan dengan adanya jalur komunikasi langsung dari Kementerian Luar Negeri ke Markas Besar Angkatan Bersenjata. Lebih lanjut, dominasi tersebut juga diperlihatkan dengan angkatan bersenjata yang menduduki posisi-posisi penting dalam Kementerian Luar Negeri seperti Inspektur Jenderal dan juga Sekretaris Jenderal, dua posisi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Luar Negeri. Pun demikian, sering terjadi ketidaksetujuan antara Menteri Luar Negeri yang diduduki oleh sipil dengan para angkatan bersenjata, seperti ketika Adam Malik tidak setuju dengan angkatan bersenjata dalam mengambil kebijakan menghadapi Tiongkok. Menjelang berakhirnya Orde Baru, kritik publik terhadap angkatan bersenjata membuat reputasi dari Kementerian Luar Negeri yang didominasi oleh angkatan bersenjata menjadi kurang baik. Pada masa Presiden BJ Habibie, kebijakan luar negeri Indonesia

dilakukan untuk memperbaiki citra tersebut, dengan memulai pembicaraan mengenai pemberhentian Dwi Fungsi angkatan bersenjata dan juga memulai perdamaian dengan Timor-Timur. Dapat dikatakan, pada periode ini kebijakan luar negeri bertujuan untuk melakukan *damage control* terhadap sisa-sisa kebijakan Orde Baru. Pada era Presiden Megawati, undang-undang mengenai Hubungan Luar Negeri diterbitkan melalui UU No. 37 Tahun 1999 yang mengodifikasikan peraturan-peraturan terkait dengan hubungan luar negeri Indonesia. Perubahan terbesar dalam reformasi Kementerian Luar Negeri adalah ketika kepemimpinan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ditambah dengan Perpres No. 119 Tahun 2001 mengenai pembenahan diri. Melalui perpres ini, dilaksanakan restrukturisasi dari departemen di Kementerian Luar Negeri, misi diplomatik di luar negeri, dan peningkatan kualitas para diplomat. Di sisi lain, dilaksanakan juga peningkatan (*improvement*) dari Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti melalui peningkatan komunikasi antar perwakilan dengan Kementerian Luar Negeri Pusat, dan juga transparansi. Upaya pembenahan diri ini juga ditingkatkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, dimana hak untuk menunjuk atase di perwakilan ada di Menteri Luar Negeri.

Tantangan pada Perwakilan RI

Perwakilan menjadi salah satu alat dalam memastikan kehadiran pemerintah di luar negeri untuk melayani dan menjalankan tugas dan fungsi negara. Kehadiran Pemerintah Indonesia di luar negeri direfleksikan dengan berdirinya 132 Perwakilan RI di 97 negara. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Perwakilan RI berfungsi mewakili Pemerintah Pusat, melaporkan informasi di negara akreditasi kepada Pemerintah Pusat, melindungi Warga Negara Indonesia di negeri akreditasi, serta bernegosiasi dan mempromosikan kepentingan nasional dengan negara akreditasi. Namun demikian, Perwakilan menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam menjalankan tugas. Terdapat dua

tantangan utama yang dihadapi oleh Perwakilan, yaitu Teknis dan Substantif.


Salah satu tantangan teknis yang dihadapi oleh Perwakilan RI adalah struktur dari Perwakilan. Struktur Perwakilan yang terbagi antar fungsi, dianggap kurang efektif dan efisien untuk menjalankan tugasnya. Pembagian antar fungsi membuat pergeseran antar pegawai menjadi sulit dan tidak fleksibel. Selain struktur, tantangan yang dihadapi oleh Perwakilan adalah kurangnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Perwakilan. Beragamnya sumber dokumen acuan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat membuat perencanaan yang dilakukan Perwakilan tidak terarah dan tidak sejalan antara tujuan, agenda, program dengan *output*. Perwakilan juga kesulitan dalam berkoordinasi secara langsung dengan Pemerintah Pusat dalam meminta arahan kebijakan dimana respons yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kerap kali terlambat atau tidak direspons sama sekali.

Sedangkan pada sisi anggaran, masalah utama yang dihadapi di Perwakilan adalah sistem penganggaran yang berjalan tidak satu pintu. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang tidak sejalan dalam mengatur anggaran di Perwakilan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 mengenai Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Keppres 108/2003) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (UU 17/2003) mengenai Keuangan Negara. Benturan antar aturan hukum terjadi karena berdasarkan Keppres 108/2003 diatur bahwa belanja pegawai di Perwakilan merupakan tugas Kementerian Luar Negeri, sedangkan berdasarkan UU 17/2003 diatur bahwa pertanggungjawaban atase teknis adalah kepada masing-masing K/L. Skema tersebut menimbulkan adanya ketimpangan antara anggaran yang diperuntukkan kepada Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan anggaran yang diperuntukkan kepada atase di Perwakilan dari masing-masing K/L teknis. Hal tersebut mengakibatkan Duta Besar di Perwakilan kesulitan dalam mengkoordinir kegiatan atase-atase yang berada di Perwakilan.

Di lain sisi, struktur distribusi anggaran di Perwakilan dengan skema pembagian 70% untuk belanja mengikat, 20% untuk belanja barang non operasional dan 10% untuk belanja pemeliharaan, menambah permasalahan anggaran di Perwakilan. Dengan alokasi 20% dari

anggaran keseluruhan yang kemudian didistribusikan kepada tiga fungsi di Perwakilan - Politik, Ekonomi, dan Sosial dan Budaya, membuat Perwakilan tidak dapat melakukan inovasi dari kegiatan reguler yang mereka jalankan. Di lain sisi, belanja pemeliharaan yang juga tergolong kecil membuat beberapa fasilitas di Perwakilan harus ditutup karena tidak layak untuk beroperasi. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan antara alokasi yang dianggarkan terhadap besaran kebutuhan pemeliharaan di lapangan.

Pada aspek substantif, tantangan utama yang dihadapi oleh Perwakilan adalah tidak adanya narasi tunggal atau *strategic review* yang memuat agenda politik luar negeri/kepentingan nasional Indonesia secara komprehensif. Ketiadaan dokumen tersebut membuat Perwakilan bekerja sporadis, kompetitif dan tidak koheren sehingga kinerja Perwakilan RI kurang efektif dan efisien. Selain itu, kontradiksi antara konteks negara akreditasi dan prioritas kegiatan Perwakilan juga menjadi tantangan lain yang dihadapi Perwakilan. Perwakilan mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI untuk memprioritaskan diplomasi ekonomi di negara akreditasi. Namun demikian, tidak semua negara akreditasi yang ditempati oleh Perwakilan memiliki iklim yang kondusif untuk melakukan diplomasi ekonomi. Dari 97 negara akreditasi, 60% diantaranya memiliki situasi domestik yang kurang stabil. Kondisi domestik yang tidak stabil mendorong pemerintah negara akreditasi untuk berfokus menangani konflik internal terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan negara mitranya.



Mengenal Perwakilan Negara Lain

Sangatlah penting memahami bagaimana cara memperkuat perwakilan di luar negeri. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana Kedutaan Inggris, Kedutaan Amerika Serikat, dan Kedutaan Denmark berupaya memperkuat perwakilannya.

Mengacu terhadap Kepentingan: Perwakilan Inggris

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah perwakilan terbanyak, terdapat beberapa hal yang bisa dipelajari dari Inggris. Berkaitan dengan sifat dari perwakilan Inggris, perlu diingat bahwa Inggris tidak membuka perwakilan secara serampangan dan berujung kepada perwakilan yang tidak memberikan manfaat bagi Inggris. Untuk menghindari hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Inggris melakukan analisis menyeluruh terhadap isu di suatu negara yang sesuai dengan kepentingan dari Inggris. Contohnya adalah apabila Inggris memiliki kepentingan ekonomi di suatu negara, perwakilan Inggris di negara tersebut akan berfokus pada bidang ekonomi. Fokus ini kemudian dikembangkan melalui berbagai cara seperti melalui usaha di bidang *trade and investment*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara akreditasi, dan membuat masyarakat di negara akreditasi sadar mengenai presensi Inggris dalam bidang ekonomi. Selain itu, Inggris juga sangat aktif melaksanakan diplomasi publiknya melalui eksistensi dari British

Council yang merupakan pusat kebudayaan Inggris di berbagai macam negara.¹⁵¹

Terkait dengan arah ke depan dari kebijakan luar negerinya, Inggris menyusun tiga kelompok yang akan menjadi tujuan utama dari kebijakan luar negerinya. Ketiga kelompok tersebut adalah masyarakat Inggris, pemerintah Inggris, dan juga kelompok bisnis. Setiap kebijakan luar negeri Inggris, termasuk yang dilakukan melalui perwakilan, harus menguntungkan ketiga kelompok ini. Untuk mencapai tujuannya, nilai yang dikedepankan oleh perwakilan Inggris adalah inovasi dan juga kreativitas. Kedua nilai ini didorong oleh fakta bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris sendiri merupakan sebuah institusi yang *robust* dengan *institutional memory* yang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada rotasi jabatan secara bersamaan sehingga jumlah jabatan yang kosong dapat diminimalisir. Lebih lanjut, apabila terjadi kekosongan jabatan pun bukanlah suatu hal yang bermasalah dikarenakan banyaknya pegawai Kementerian Luar Negeri Inggris yang bersifat generalis sehingga bisa mencakup berbagai macam isu. Hal ini akan sangat membantu ketika terjadi rotasi jabatan dimana pihak yang menggantikan tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama untuk mempelajari tanggung jawab barunya. *Institutional memory* yang baik juga dicapai melalui prosedur dari penempatan perwakilan Inggris di luar negeri. Sistem yang berlaku bagi perwakilan Inggris adalah dua kali penempatan di luar secara berturut-turut dan kemudian kembali ke Inggris, agar memahami bagaimana perkembangan dan arah kebijakan pemerintah.¹⁵²

Untuk mengukur kinerja dari perwakilan, Inggris menggunakan pengukuran bisa atau tidaknya program prioritas Inggris dijalankan oleh perwakilan di suatu negara. Selain itu, kinerja dari Inggris juga diukur dengan bisa atau tidaknya perwakilan Inggris memprediksi dinamika politik di negara akreditasinya. Contohnya adalah apabila perwakilan Inggris secara tepat mampu memprediksi dengan tepat bahwa pemerintahan di negara akreditasinya akan kolaps, dapat dikatakan

¹⁵¹ Theresa O' Mahony-Heer, Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Negara Mitra, 24 Agustus 2018.

¹⁵² *Ibid.*,

kinerja perwakilan Inggris di negara tersebut baik. Terakhir, Kementerian Luar Negeri Inggris secara luas dan perwakilan Inggris secara sempit mengatakan bahwa salah satu indikator kinerja mereka adalah bagaimana hal yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat Inggris itu sendiri.

Duta Besar sebagai Otoritas Tertinggi: Perwakilan Amerika Serikat

Setidaknya ada empat hal penting yang dapat dipelajari dari Amerika Serikat mengenai perwakilannya. *Pertama*, adanya *strategic planning* yang didasarkan pada prioritas nasional dan dievaluasi per empat tahun. *Strategic planning* yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini kemudian akan diadaptasikan ke beberapa tingkatan mulai dari tingkatan per area hingga tingkatan fungsional. *Kedua*, adanya *country strategy* yang membahas prioritas per negara. Hal ini dicontohkan bahwa apabila membicarakan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Kolombia, isu yang akan dibahas adalah isu penyelundupan narkoba dan juga penegakan hukum. *Ketiga*, adanya prinsip bahwa duta besar di perwakilan merupakan Chief of Mission Authority dimana duta besar merupakan otoritas tertinggi di perwakilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar staf dengan atase di perwakilan dimana atase sering kali ditunjuk oleh kementerian yang bersangkutan alih-alih oleh kementerian luar negeri. *Keempat*, dilaksanakannya pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dari para perwakilan.

Untuk menjaga *institutional memory*, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membagi pegawainya, dimana ada pegawainya yang tetap tinggal di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri.¹⁵³ Adanya perbedaan antar pegawai ini memungkinkan perwakilan yang ada di luar negeri untuk tidak kembali ke dalam negeri dan terus berfokus dengan isu yang ada di perwakilan. Sama seperti Inggris, kinerja dari

¹⁵³ *Ibid.*,

perwakilan Amerika Serikat dinilai dari opini publik Amerika Serikat mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara umum atau kepada perwakilan secara khusus. Opini publik merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan bagi Amerika Serikat karena publiklah yang menjadi sumber perpajakan dan kemudian mendanai program dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan juga para perwakilan.¹⁵⁴

Menutup Kantor Perwakilan di Negara Akreditasi: Perwakilan Denmark

Hal yang unik dari Kementerian Luar Negeri Denmark adalah merupakan kementerian yang terdiri dari beragam badan dan mengurus isu yang sangat luas baik dari segi ekonomi, bisnis, konsuler, maupun kebijakan luar negeri, atau secara ringkas segala hal yang bersifat internasional.¹⁵⁵ Terdapat tiga menteri yang berada di dalam Kementerian Luar Negeri Denmark, yaitu 1) Menteri Luar Negeri, 2) Menteri Koordinasi Pembangunan (Minister for Development Cooperation), dan 3) Menteri Perikanan, Keadilan, dan Kerja Sama Nordik (Ministry of Fisheries and Equal Opportunities and Nordic Co-Operation). Meskipun ketiga menteri ini membahas mengenai isu yang sangat berbeda, namun isu-isu ini dibahas dengan menggunakan kerangka Kementerian Luar Negeri Denmark. Contohnya adalah proyek dari Kementerian Luar Negeri Denmark yang dinamakan dengan *strategic sector cooperation*. Proyek ini mengerjakan kerja sama pembangunan internasional seperti *sustainable development*, *urban planning*, dan *Public-Private Partnership*. Contoh lainnya adalah *trade council* di dalam Kementerian Luar Negeri yang membantu perusahaan

¹⁵⁴ Steven Weston, Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Negara Mitra, 24 Agustus 2018.

¹⁵⁵ Elsebeth Sondergaard Krone, Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Negara Mitra, 24 Agustus 2018.

Denmark untuk menghubungkan kegiatan bisnisnya dengan negara akreditasi. Terobosan lain dari luasnya isu yang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri Denmark adalah adanya duta besar dari Denmark untuk perusahaan teknologi (disebut sebagai *techplomacy*) oleh Denmark. Duta besar ini merupakan duta besar dari Denmark untuk beberapa perusahaan teknologi yang berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat. Tujuan dari *techplomacy* adalah mendorong masuknya teknologi maupun investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut ke Denmark.

Terkait dengan pelaksanaan Diplomasi Publik, Denmark memiliki beragam program seperti Ambassador for One Day dimana mahasiswa Indonesia terlibat dalam kegiatan Duta Besar Denmark di Indonesia selama satu hari. Kegiatan ini berperan penting untuk memahami bagaimana dinamika dari perwakilan Denmark dalam satu hari dan juga memperkenalkan apa saja program dari perwakilan Denmark.

Terkait dengan institusi perwakilan, sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas, Denmark bersikap rasional dengan menutup beberapa perwakilan di negara yang dipandang tidak memiliki kepentingan langsung dengan Denmark. Penutupan kedutaan di beberapa negara seperti Bolivia, Nepal, Zimbabwe, dan Mozambik merupakan contoh dari rasionalisasi Kementerian Luar Negeri Denmark terhadap beragam perwakilannya yang ada.

Pembelajaran

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari masing-masing perwakilan. Dari perwakilan **Inggris**, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran oleh Indonesia. *Pertama*, diperlukannya fokus kepada isu-isu yang menjadi prioritas, hal ini untuk menghindari terbuangnya sumber daya yang ada di perwakilan. *Kedua*, penyusunan dan menentukan pihak-pihak yang akan menjadi target, sehingga dapat memastikan kebijakan luar negeri yang diambil adalah tepat sasaran dan menguntungkan. *Ketiga*, pegawai di Kementerian Luar Negeri lebih bersifat generalis agar dapat mengatasi permasalahan *institutional memory* apabila terjadi rotasi jabatan. *Keempat*, diperlukan mekanisme

pengukuran kinerja perwakilan, misalnya dinilai kemampuan analisisnya atas negara dimana perwakilan negara tersebut ditempatkan.

Dari perwakilan **Amerika Serikat**, terdapat beberapa hal penting. *Pertama*, diperlukannya *strategic planning* gambaran luas mengenai kebijakan dari Kementerian Luar Negeri. *Kedua*, adanya *country strategy* untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh perwakilan terhadap negara dimana keberadaan perwakilan tersebut. *Ketiga*, prinsip bahwa duta besar merupakan *chief of mission* atau otoritas tertinggi dari suatu perwakilan. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada tumpang tindih dari otoritas di suatu perwakilan. Terakhir adalah pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas perwakilan.

Dari perwakilan **Denmark**, hal yang bisa dipelajari adalah beragamnya isu yang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan pengalaman Denmark, Kementerian Luar Negeri harus mencakup isu-isu internasional secara luas namun tetap menggunakan kerangka Kementerian Luar Negeri. Luasnya isu yang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri Denmark juga diperlihatkan dengan diplomasi Denmark ke perusahaan teknologi (*techplomacy*). Luasnya isu ini harus diikuti oleh negara-negara lain yang sudah seharusnya melibatkan beragam aktor dalam kebijakan luar negerinya, bukan hanya aktor negara namun juga aktor non-negara.



Memperkuat Diplomasi Perwakilan RI

*D*alam melaksanakan tugasnya, perwakilan Indonesia di luar Negeri menghadapi dua aspek permasalahan, yaitu aspek teknis dan aspek substantif. Aspek teknis menghambat perwakilan Indonesia untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia dengan sulitnya pengambilan keputusan dikarenakan adanya difusi tanggung jawab dan rantai birokrasi. Di sisi lain, aspek substantif menghambat perwakilan dengan tidak adanya informasi mengenai potensi negara di mana perwakilan tersebut bertugas sehingga tugas yang diekspektasikan oleh pemerintah dan kenyataan di lapangan sangatlah berbeda. Kedua permasalahan ini haruslah diselesaikan lebih awal, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat terhadap perwakilan Indonesia di luar negeri.

Di sisi lain, *best practices* dari negara-negara mitra Indonesia juga harus dilakukan untuk lebih mengefektifkan perwakilan Indonesia. *Best practices* dari negara-negara mitra bertujuan untuk mengembangkan perwakilan Indonesia agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Belajar dari perwakilan Denmark misalnya, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meninjau kembali posisi/status perwakilan di negara-negara tertentu apabila negara tersebut dipandang kurang penting bagi Indonesia. Dari perwakilan Inggris dan Amerika Serikat

dapat dipelajari bagaimana cara menjaga *institutional memory* dari Kementerian Luar Negeri yang menghadapi rotasi pegawai sangat sering.

Menghadapi dinamika internasional kontemporer, peran perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi semakin penting, bahwa perwakilan Indonesia di luar negeri seyogyanya memiliki hasil yang kuantitatif. Untuk mencapai hal tersebut, perwakilan Indonesia yang kuat di luar negeri menjadi prasyarat mutlak.

Membangun Diplomasi yang Kuat

Dalam melakukan perbaikan dan penguatan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan Penataan kelembagaan sejak tahun 2017 di tiga aspek, yakni organisasi dan tata kerja; manajemen kinerja; dan anggaran. Penyesuaian organisasi dan penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui mekanisme evaluasi indeks yang dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat peningkatan bobot misi. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa usulan perusahaan yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri diantaranya,¹⁵⁶

- Penambahan Pejabat Penata Kanselerai, Staf Teknis/ Administrasi, dan Pegawai Setempat menggantikan Bendaharawan dan Penatakerumahtangaan (BPKRT) pada unsur pendukung di Susunan Organisasi Perwakilan;
- Pada penentuan jumlah formasi analisis beban kerja (ABK) akan menjadi faktor pengaruh dalam menambah atau mengurangi distribusi sumber daya manusia selain ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Luar Negeri nomor 06 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI;
- Komposisi Pejabat Fungsional Diplomat Perwakilan setidaknya terdiri dari Diplomat Pertama, Muda, dan Madya sebagai unsur pelaksana, dan mana kala dibutuhkan dapat pula dibentuk formasi Diplomat Utama di beberapa Perwakilan sesuai dengan

¹⁵⁶ Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri, "Laporan Evaluasi Indeksasi dan Analisis Beban Kerja Perwakilan RI 2017", Kementerian Luar Negeri, hlm. 20

arah kebijakan polugri dan bobot misi serta derajat hubungan yang diamanatkan pada Perwakilan tersebut.

- Terkait Wakil Kepala Perwakilan terdapat usulan untuk mengalihkan menjadi Dewatapri dengan memformalkan status KBRI Wina menjadi KBRI/PTRI Wina.
- Penentuan Atase Teknis dan pejabat teknis lainnya disesuaikan dengan hasil evaluasi indeks. Apabila nilai indeks sebesar 3.5 pada fungsi tertentu maka dapat direkomendasikan untuk ditempatkan Atase/pejabat teknis terkait.
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja diusulkan dalam dua jenis perubahan. *Pertama*, Struktur Organisasi Perwakilan (hipotesis formasi lengkap, Perwakilan Diplomatik Bilateral merangkap Multilateral dengan Indeks 3,50 - 5,00) terdiri atas Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Pranata Informasi/Sandiman Madya/Muda, Penata Kanselerai Madya/Muda, Pranata Informasi/Sandiman Muda/Pertama, dan Diplomat Madya-Muda-Pertama serta Atase Teknis di lima fungsi Perwakilan (Politik, Ekonomi, Penerangan dan Sosial Budaya, Protokol-Konsuler, Fungsi Multilateral). *Kedua*, Struktur organisasi Perwakilan (hipotesis formasi minimum, Perwakilan Diplomatik Bilateral dengan Indeks 1,00 - 2,50, tanpa keberadaan Atase) terdiri atas Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Penata Kanselerai Madya/Muda, Pranata Informasi/Sandiman Muda/Pertama, dan Diplomat Madya/Muda/Pertama di lima fungsi Perwakilan (Politik, Ekonomi, Penerangan dan Sosial Budaya, Protokol-Konsuler, Fungsi Multilateral).

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka penguatan perwakilan. Pertama adalah pemetaan perwakilan Indonesia berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional. Pemetaan perwakilan berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional diperlukan agar perwakilan Indonesia dapat mengedepankan kepentingan Indonesia spesifik di suatu negara. Apabila Indonesia ingin lebih fokus kepada isu ekonomi di suatu negara, Indonesia dapat membuka konsulat alih-alih kedutaan besar. Terdapat dua manfaat dari hal ini. *Pertama* adalah dengan konsulat, kepentingan Indonesia akan

menjadi semakin terfokus dalam bidang ekonomi. Segala macam kegiatan yang akan dibahas dalam konsulat merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, sering kali konsulat terletak di pusat finansial suatu negara sehingga dinamika perekonomian di suatu negara dapat tersampaikan langsung kepada konsulat Indonesia.¹⁵⁷ Keuntungan kedua dari konsulat adalah konsulat memiliki biaya operasional yang tidak semahal dari kedutaan besar sehingga menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.¹⁵⁸ Sudah seharusnya Indonesia tidak memaksakan membuka kedutaan besar di suatu negara yang tidak memiliki keuntungan langsung dengan Indonesia karena hanya akan menghabiskan biaya. Operasional dari perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri harus dievaluasi agar dapat ditentukan apakah bentuk perwakilan yang lebih tepat di suatu negara adalah kedutaan besar atau konsulat semata. Pada bagian sebelum telah dijelaskan bagaimana Denmark melakukan rasionalisasi terhadap perwakilannya yang ada di luar negeri.

Kedua adalah perlunya memetakan potensi negara akreditasi/wilayah kerja berdasarkan bidang kerja sama dan prioritas. Hal ini masih berkaitan dengan tindak lanjut pertama, di mana pemetaan perwakilan RI yang berdasarkan pada prioritas dan kepentingan nasional disusun berdasarkan potensi negara akreditasi/wilayah kerja. Sesuai dengan tindak lanjut pertama, Indonesia seharusnya memetakan negara mana yang prioritas dan kemudian dapat menyesuaikan perwakilannya di negara tersebut meskipun terbatas dengan mendirikan konsulat.

Keempat adalah mengintegrasikan alokasi anggaran para Pejabat Perbantuan (atase) di Perwakilan RI dengan merevisi. Integrasi dari anggaran akan menyelesaikan permasalahan adanya beragam atase dengan sumber pendanaan yang berbeda-beda. Alokasi anggaran, baik untuk gaji maupun operasional haruslah ditempatkan di perwakilan dan merupakan kewajiban dari perwakilan untuk mendistribusikannya sesuai dengan kepentingan dari perwakilan. Untuk mencapai hal

¹⁵⁷ David M Malone, "The Evolving Nature and Role of the Diplomatic Mission", Canadian Foreign Policy Journal, Vol.18, No.2 (2012), Hlm.226.

¹⁵⁸ Ibid., hlm.226-227.

tersebut, perlu adanya paradigma baik dari anggota perwakilan maupun dari para Pejabat Perbantuan (atase) bahwa perwakilan yang direpresentasikan oleh Duta Besar merupakan otoritas tertinggi.¹⁵⁹ Dengan kondisi sekarang di mana terdapat perbedaan anggaran antara Pejabat Perbantuan (atase) dengan perwakilan, kesulitan koordinasi akan terus terjadi karena konflik antara Kementerian Luar Negeri dan juga kementerian-kementerian yang mengirimkan Pejabat Perbantuan (atase/staf teknis). Berbagai tindak lanjut dari pemerintah Indonesia ini haruslah menjadi dasar dalam menguatkan perwakilan. Skeptisisme mungkin muncul apakah tindak lanjut ini akan membuahkan hasil atau tidak.

¹⁵⁹ Steven Weston, Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Negara Mitra, 24 Agustus 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Andylala Waluyo, "Presiden Jokowi Minta Para Dubes Indonesia Kedepankan Diplomasi Ekonomi" di akses pada 24 Oktober 2018.
- Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri, "Laporan Evaluasi Indeksasi dan Analisis Beban Kerja Perwakilan RI 2017", Kementerian Luar Negeri, hlm. 20
- Cornut, Jeremie, "To be a Diplomat Abroad: Diplomatic Practice at Embassies", *Cooperation and Conflict*, Vol.50, No.3, (2015). Hlm.385-401.
- Kementerian Luar Negeri, "Perwakilan RI", <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/perwakilan-RI/default.aspx>, di akses 12 Oktober 2018
- Kementerian PPN/Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Panjang", Hlm. 44
- Lee, Donna, David Hudson. "The Old and New Significance of Political Economy in Diplomacy". *Review of International Studies*. Vol.30, No.3 (2004). Hlm.343-360.
- M Malone, David. "The Evolving Nature and Role of the Diplomatic Mission". *Canadian Foreign Policy Journal*. Vol.18, No.2 (2012). hlm.225-241.
- Nabbs-Keller, Greta. "Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.35, No.1, (2013), hlm.56-82.
- Neumayer, Eric. "Distance, Power and Ideology: Diplomatic Representation in a World on Nation-States". *Area*, Vol.40, No.2, (2008), Hlm.228-236.
- O' Mahony-Heer, Theresa. Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Negara Mitra, 24 Agustus 2018.
- Rizal Sukma dalam Diskusi Kelompok Terfokus Kementerian PPN/Bappenas, 17 April 2017

Weston, Steven. Focused Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 mengenai Penguatan Diplomasi Perwakilan Indonesia antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Negara Mitra. 24 Agustus 2018.

Bagian Enam



Komitmen Indonesia Di Forum G20

Priyanto Rohmatullah
Tri Azmi Khairunnisa
Fika Annisa Nurtrisyanti
M. Singgih Pangestu



Ringkasan Eksekutif

G20 adalah forum kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan 1 organisasi regional, berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi. Forum tersebut merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dan kemudian diperluas ke sektor lainnya yang relevan terhadap penyelesaian krisis ekonomi dan finansial global. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, lebih-lebih terlepas dari jeratan krisis dan *middle income trap*. Hal tersebut dikarenakan sektor pendidikan mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan kualitas SDMnya jika dibandingkan dengan negara mitra G20 lainnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut salah satunya melalui perbaikan kualitas pendidikan vokasi. Sehubungan dengan itu, kerja sama pembangunan global dapat menjadi pemacu bagi Indonesia dalam mempercepat perbaikan kualitas pertumbuhan SDM serta mengembangkan kualitas pendidikan vokasi nasional.

Namun demikian, pengimplementasian Indonesia terhadap komitmennya di bidang pendidikan vokasi pada G20 masih belum dilakukan secara optimal. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa terdapat *gap* (kesenjangan) antara komitmen dan implementasi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan beragam faktor, diantaranya: 1) Keterbatasan akses; 2) Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan; dan 3) Koordinasi lintas K/L yang belum optimal.

Untuk meningkatkan pengimplementasian komitmen Indonesia dalam bidang pendidikan vokasi terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Pertama meningkatkan peran dan akses mutu pelatihan dan pendidikan vokasi. Kedua, pemahaman antar K/L terkait pemagangan dan kebijakan perlu disinkronisasikan. Ketiga, pengarusutamaan program-program pendidikan/pelatihan teknologi digital bagi kaum perempuan guna meningkatkan pelibatan perempuan sebagai angkatan kerja aktif.



Tinjau Ulang Proses Pelaksanaan Komitmen Indonesia di Forum G20

Salah satu arah kebijakan politik luar negeri dalam RPJMN 2015-2019 adalah menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia di forum bilateral, multilateral, regional dan global, termasuk salah satunya dalam forum *Group of Twenty* (G20). G20 merupakan salah satu forum utama kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan 1 organisasi regional.¹⁶⁰ Pada awalnya, G20 merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sebagai upaya untuk memperluas diskusi tentang kebijakan bagi penyelesaian krisis ekonomi dan finansial global. Indonesia menjadi anggota G20 sejak 2009.

Sasaran RPJMN 2015-2019 bidang politik luar negeri adalah “Terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional”. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, strategi yang ditempuh terkait G20 antara lain pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G20, perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20, dan peningkatan peran Indonesia di G20. Sejak terbentuknya G20, Pemerintah Indonesia aktif memberi masukan, posisi, dan intervensi dalam pertemuan-pertemuan di tingkat *Leaders’*

¹⁶⁰ Sherpa G20 Indonesia. 2019. “Sejarah Singkat G20”. Diakses pada 8 Oktober 2019 (<http://sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=sejarah>).

Summit, Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/MGM, Finance Deputies, Sherpa, Ministers Meeting, Agriculture Deputies, Working Group, Scientist, Taskforce maupun Study Group.

Indonesia dapat berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu global yang sejalan dengan agenda nasional dan mengakomodasikan

kepentingan *Low Income Developing Countries* (LIDCs) di G20.¹⁶¹

Sebagai *emerging economies*, salah satu isu pembangunan yang dihadapi Indonesia adalah pembangunan *human capital*, di mana Indonesia masih perlu mengejar

ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara G20 lainnya (Boks 1.1).

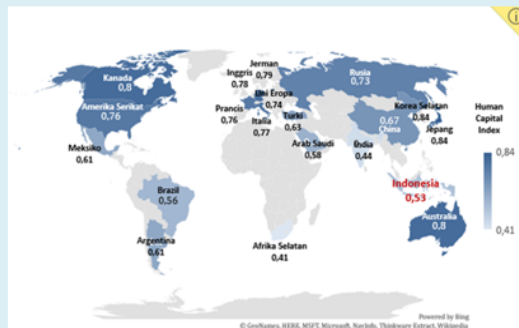
Pembangunan *human capital* yang merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan ini dapat

ditingkatkan salah satunya melalui perbaikan kualitas pendidikan vokasi. Sehubungan dengan itu, kerja sama pembangunan global dapat menjadi kunci bagi Indonesia dalam mengejar pertumbuhan *human capital* dan mengembangkan kualitas pendidikan vokasi nasional.

Informasi Human Capital di Indonesia

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 di bawah, modal manusia Indonesia masih berada pada urutan ke dua terendah setelah Afrika Selatan. Dengan modal manusia yang termasuk kategori menengah kebawah (Indeks Modal Manusia sebesar 0.53 dari 1 pada 2018),³ maka penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam mendorong peningkatan *human capital* nasional.

Gambar 1.1 Human Capital Index Negara Anggota G20 - 2018



Sumber: World Bank, 2018.

Dari segi pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Indonesia, lulusan SMK hanya mendominasi sebesar 11,77% dari total angkatan kerja, sementara lulusan akademi/diploma hanya mendominasi sebesar 2,80% dari total angkatan kerja.⁴ Pendidikan vokasi yang diharapkan dapat membekali keterampilan lebih baik kepada para lulusannya dibandingkan lulusan SMA/Universitas nyatanya tidak terlihat di lapangan. Hal ini dibuktikan dari persentase lulusan SMA yang 3,29% lebih banyak diserap oleh lapangan kerja daripada lulusan SMK dan persentase lulusan universitas yang 0,13% lebih banyak diserap oleh lapangan kerja daripada lulusan Akademi/Diploma.⁵ Artinya, persentase tingkat pengangguran untuk lulusan SMK juga 3,29% lebih banyak daripada lulusan SMA dan persentase tingkat pengangguran untuk lulusan Akademi/Diploma juga 0,13% lebih banyak daripada lulusan Universitas.⁶ Sebagai aksi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Jalan (*Road Map*) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tahun 2017-2025.

¹⁶¹ Kementerian PPN/Bappenas. 2016. "Buku Saku (Handbook) Agenda Pembangunan Global di Forum G20: "Memperjuangkan Kerja sama yang Berimbang dan Relevan di G20".

Usaha di tingkat internasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dapat dilihat dari komitmen Indonesia untuk memasukkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas di forum G20. Komitmen Indonesia di forum G20 tersebut dapat diarahkan untuk memberikan manfaat terhadap kepentingan domestik. Untuk mengidentifikasi strategi, kebijakan, dan langkah implementasi yang tepat terhadap komitmen Presiden RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, maka disusun dokumen Implementasi Komitmen Indonesia (IKI). IKI ditangani oleh beberapa Kementerian/Lembaga di mana Bappenas bertugas sebagai *focal point* dalam *Working Group* Isu Pembangunan.¹⁶² Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat *gap* antara komitmen Indonesia dalam forum G20 bidang pendidikan vokasi dengan implementasinya.

Pada tahun 2016, terdapat tiga komitmen isu ketenagakerjaan yang terkait dengan pendidikan vokasi. Berdasarkan Presidensi Hangzhou, komitmen yang ingin dicapai pada 2017 antara lain “*Generating quality employment*”, “*Improve access for under-represented groups to TVET*”, dan “*Increase the number, quality, and diversity of apprenticeship with full engagement of social partners, businesses and workers*”. Salah satu rencana untuk mencapai komitmen tersebut adalah peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja, khususnya di era digital, belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah lembaga pelatihan yang berhasil memenuhi standar mutu LPK untuk memperoleh akreditasi pada 2017 (lihat Tabel). Artinya, terdapat *gap* antara komitmen Indonesia dalam forum G20 bidang pendidikan vokasi dengan implementasinya.

¹⁶²Sherpa G20 Indonesia. 2019. “Development Working Group”. Diakses pada 16 Agustus 2019. (<http://sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=dwg>).

Tabel Target dan Realisasi Lembaga Pelatihan Kerja Terakreditasi

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Target	415	180	100	450
Realisasi	408	278	108	450

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2019

Contoh lain dari *gap* antara komitmen dan implementasi pada 2018 adalah terkait rencana perbaikan manajemen politeknik pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian. Komitmen pada Presidensi Hamburg *“To create 1,1 million new jobs by 2022 and to providing innovative skills development programmes for at least 5 million young people over the next five years through Rural Youth Employment initiative”* belum diimplementasikan dengan maksimal. Sejauh ini belum ada inovasi perbaikan manajemen yang diterapkan pada politeknik pertanian. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha yang melibatkan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian juga belum dibarengi dengan perbaikan manajemen politeknik pertanian.

Penjelasan di atas merupakan contoh *gap* antara implementasi dan komitmen Indonesia di forum G20 bidang pendidikan vokasi. Oleh karena itu tulisan ini akan meninjau kembali proses pelaksanaan komitmen Indonesia di dalam forum G20 bidang pendidikan vokasi, sekaligus mencari solusi kerja sama luar negeri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.



Kerjasama Internasional

(Sebuah Kajian Pustaka)

1. Konsep Kepentingan Nasional

Morgenthau (1951) dalam *self interest theory* menjelaskan bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional untuk mengejar kekuasaan dalam hal membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara ke negara lain. Hubungan kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) tersebut bisa diciptakan salah satunya melalui kerja sama. Hans. J. Morgenthau mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan merupakan sarana sekaligus tujuan dari politik luar negeri. Pada dasarnya, menurut Hans. J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas nasional, baik identitas fisik (wilayah, tanah, dan teritorial), identitas politik (rezim ekonomi politik), maupun identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, dan sejarah) dari intervensi negara lain melalui modalitas kerja sama atau konflik.¹⁶³

Menurut Papp (1997), beberapa aspek kepentingan nasional (*national interest*) antara lain ekonomi, ideologi, dan militer. Dalam aspek ekonomi,

¹⁶³ Morgenthau, Hans J. 1951. "In Defense of the National Interest". New York: University Press of America.

setiap kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat perekonomian suatu negara dapat dianggap sebagai kepentingan nasional.¹⁶⁴ Salah satunya kebijakan bidang kerja sama internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sama halnya dengan Papp (1997), Jack C Plano dan Roy Olton (1999) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang paling vital dari suatu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lainnya. Kebutuhan dan keinginan yang paling vital tersebut antara lain kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer, dan ekonomi.¹⁶⁵ Begitu pun Donald Nuechterlein (1976), kepentingan ekonomi yang termasuk ke dalam empat dimensi kepentingan nasional (pertahanan, ideologi, keterlibatan dunia, dan ketertiban regional/dunia) merupakan kepentingan untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain.¹⁶⁶

2. Konsep Kerja sama Internasional

Menurut Holsti (1992), kerja sama merupakan interaksi antarnegara di dalam sistem politik luar negeri di mana pemerintah suatu negara saling berhubungan dengan pemerintah negara lain untuk mengajukan alternatif pemecahan masalah dalam perundingan yang menghasilkan perjanjian atau saling pengertian.¹⁶⁷ Holsti (1995) membagi kerja sama internasional ke dalam lima definisi:

¹⁶⁴ Papp, Daniel S. 1997. "Contemporary International Relations: Framework for Understanding 5e.d". New York: Allyn and Bacon.

¹⁶⁵ Plano, Jack C., dan Roy Olton. 1999. "Kamus Hubungan Internasional dan Globalisasi Ekonomi". Jakarta: Ghalia.

¹⁶⁶ Nuechterlein, Donald E. 1976. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Anlysis and Decision-Making". British Journal od International Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 246-266.

¹⁶⁷ Holsti, Ole R.. 1992. "Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann Consensus Mershon Series: Research Programs Debates". International Studies Quarterly, Vol. 36, No. 4. pp. 439-466.

1. Dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya;
3. Persetujuan antarnegara dalam memanfaatkan kepentingan yang sama;
4. Aturan mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
5. Transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.¹⁶⁸

Beberapa alasan bagi suatu negara untuk melakukan kerja sama dengan negara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya produksi akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
2. Meningkatkan efisiensi biaya;
3. Menyelesaikan masalah yang mengancam keamanan bersama;
4. Mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan individual suatu negara yang berdampak pada negara lain.¹⁶⁹

Kerja sama internasional dapat dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral (Coplin, 1974).¹⁷⁰ Kerja sama bilateral merupakan pola kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua negara, sementara kerja sama multilateral merupakan pola kerja sama internasional yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Perkembangan pola kerja sama internasional di dalam politik luar negeri tersebut akan menjelaskan apakah kerja sama akan mengarah pada kerja sama politik, ekonomi,

¹⁶⁸ Holsti, K.J. 1995. "International Politics: A Framework for Analysis". London: Prentice-Hall International.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Coplin, William D. 1974. "Introduction to International Politics: The Theoretical Overview". Markham.

sosial, budaya, atau pertahanan dan keamanan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997).¹⁷¹

Kerja sama pembangunan internasional terdiri dari kerja sama global, bantuan luar negeri (*foreign aid*), bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*), kerja sama teknis, kerja sama selatan-selatan (KSS) dan kerja sama triangular (KST), kerja sama *Reverse Linkage*:

1. Kerja sama global adalah kerja sama yang diinisiasi oleh institusi/organisasi internasional dan melibatkan banyak negara untuk mengatasi isu pembangunan global, misal GPEDC, OECD, G20, dan G77;
2. Kerja sama teknis adalah bantuan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik lainnya;
3. Kerja sama selatan-selatan (KSS) adalah kerja sama antara Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik, dan alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama;
4. Kerja sama triangular adalah kerja sama selatan-selatan yang melibatkan mitra pembangunan. Mitra pembangunan adalah negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerja sama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia;
5. Skema kerja sama lain, seperti *Reverse Linkage* yang merupakan kerja sama pembangunan antarnegara anggota IsDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (*know-how*), teknologi, dan *best practices* yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial;
6. Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan/atau memiliki kepentingan bersama untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing;
7. Bantuan luar negeri adalah jumlah kegiatan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah dan pinjaman;

¹⁷¹ Dougherty, James E., dan Robert L. Pfaltzgraff. 1977. "Contending Theoris". New York: Happer and Row Publisher.

8. Bantuan kemanusiaan adalah jumlah kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan untuk tujuan kemanusiaan, misal bantuan dana rehabilitasi pasca bencana.

3. Keikutsertaan Indonesia dalam Forum G20

G20 merupakan salah satu forum kerja sama ekonomi internasional di mana bertemunya para pemimpin pemerintahan dan perekonomian dari 19 negara maju dan berkembang ditambah dengan 1 organisasi regional yaitu Uni Eropa.¹⁷² Sejumlah 19 negara dan 1 organisasi regional tersebut menjadi bagian penting dari perekonomian dunia, dengan mewakili sekitar $\frac{2}{3}$ penduduk dunia, 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan 80 persen perdagangan internasional.¹⁷³ Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.¹⁷⁴

G20 berawal dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/ MGM*) untuk membahas isu-isu ekonomi global dan keuangan internasional pasca krisis yang melanda Asia pada 25 September 1999. Forum G20 dibentuk atas inisiatif dari 7 negara industri utama di dunia “G-7” untuk mendorong konsultasi dan koordinasi dengan melibatkan negara-negara berkembang lainnya. Selanjutnya, pertemuan MGM ini berkembang menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan melibatkan negara-negara berkembang (*G20 Leaders' Summit*) yang diadakan pertama kali di

¹⁷² Sherpa G20 Indonesia. 2019. “Sejarah Singkat G20”. Diakses pada 13 November 2019. (<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=sejarah>).

¹⁷³ Kementerian PPN/Bappenas. 2016. “Buku Saku (Handbook) Agenda Pembangunan Global di Forum G20: “Memperjuangkan Kerjasama yang Berimbang dan Relevan di G20”.

¹⁷⁴ Sherpa G20 Indonesia. 2019. “Anggota G20”. Diakses pada 16 Agustus 2019. (<http://sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/anggota&content=anggota>)

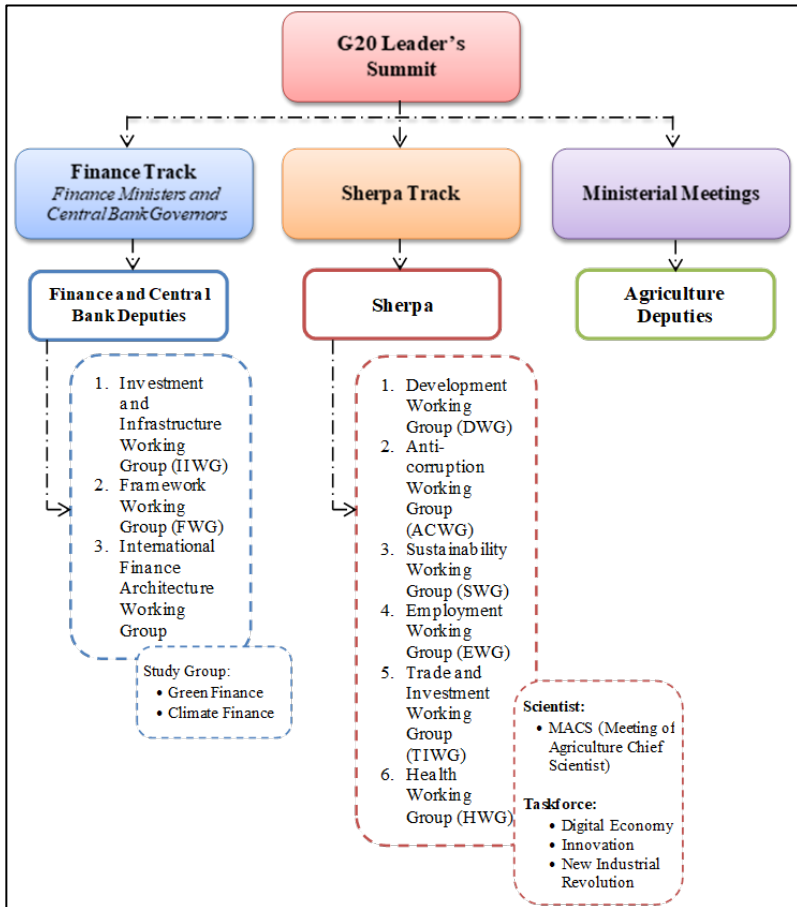
Washington D.C. dalam rangka merespons krisis finansial global tahun 2008.¹⁷⁵

Dalam perkembangannya, G20 tidak hanya fokus membahas isu finansial (*Finance Track*) namun juga berorientasi pada agenda non-finansial seperti isu perdagangan, investasi infrastruktur, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, dan pembangunan (*Sherpa Track*) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (*strong, sustainable, balanced, and inclusive growth/SSBIG*). Selanjutnya, *Sherpa Track* dipimpin oleh seorang *Sherpa* yang didukung beberapa kelompok kerja, diantaranya: *Development Working Group (DWG)*, *Anti Corruption Working Group (ACWG)*, *Sustainability Working Group (SWG)*, *Employment Working Group (EWG)*, *Trade and Investment Working Group (TIWG)*, *Health Working Group (HWG)*, dan juga dengan *Agriculture Deputies* dalam isu pertanian, ketahanan pangan dan gizi.

G20 Development Working Group (DWG) dibentuk sebagai upaya dan komitmen G20 dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang merupakan salah satu bagian dari kerangka kerja *SSBIG*. Prinsip-prinsip Agenda Pembangunan G20 antara lain: 1) Fokus pada pertumbuhan ekonomi; 2) Kerja sama pembangunan global; 3) Fokus pada isu sistemik global atau regional; 4) Melibatkan partisipasi sektor swasta; 5) Bersifat melengkapi (*complementary*); dan 6) Berorientasi pada hasil. Agenda Pembangunan telah menjadi agenda yang *cross-cutting* dengan berbagai *work streams* G20 lainnya baik di *Finance Track* maupun *Sherpa Track*. G20 mendorong upaya perkuatan koordinasi dan koherensi kebijakan pembangunan diantara *DWG* dengan seluruh *workstreams*, termasuk dalam bidang infrastruktur, tenaga kerja, energi, pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pajak, inklusi keuangan, remitansi, perdagangan dan anti-korupsi (lihat Gambar berikut).

¹⁷⁵ Kementerian PPN/Bappenas. 2016. "Buku Saku (Handbook) Agenda Pembangunan Global di Forum G20: "Memperjuangkan Kerjasama yang Berimbang dan Relevan di G20".

Pembagian Work Streams di G20



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2016

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, DWG fokus pada isu *internationally comparable skill indicators* dan *national employable skills strategies*. Beberapa inisiatif yang dihasilkan diantaranya: 1) *Knowledge Sharing Platform (KSP)*; 2) *World Indicators of Skills for Employment (WISE)*; dan 3) *Multi-year Framework for Policy Coherence and Coordination on HRD between DWG & EWG*. *Key outcomes* agenda pembangunan G20 bidang *human resource development* adalah untuk mendukung LIDCs dalam mengembangkan keterampilan yang berkaitan

dengan ketenagakerjaan, disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha dan pasar dalam rangka menarik investasi dan pekerjaan yang layak.

Knowledge Sharing Platform (KSP) bermanfaat dalam menyediakan *best practices* dalam pengembangan *robust training systems*. Sementara *World Indicators of Skills for Employment (WISE)* bermanfaat dalam memberi dukungan pada LIDCs untuk mengembangkan *skills strategies* dan pelatihan sesuai permintaan pasar tenaga kerja. WISE menyediakan 64 indikator di 5 area, yaitu: *contextual factors; skill acquisition; skill requirements; skill mismatch; dan economic & social outcomes*. *Multi-year Framework for Policy Coherence and Coordination on HRD between DWG & EWG* bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dan kerja sama terintegrasi pada: *developing skills for the modern economy; improving job quality; building more inclusive labour markets; reducing job inequalities of youth and women; improving capacities of aid agencies to enhance capabilities of skills, training, and employment policies; dan improving social dialogue in skills development*.

Sejak KTT G20 yang pertama pada 2008, seluruh pemimpin negara G20 bertemu secara rutin setiap tahun dalam pertemuan *G20 Leaders' Summit* dan menyampaikan *final outcome* yang disebut dengan "*G20 Leaders' Communiqué*". *Communiqué* tersebut berisi perkembangan dan aksi yang telah dilakukan G20, termasuk rencana aksi dan strategi G20 pada tahun berikutnya. *Communiqué* ini disusun berdasarkan masukan dan dokumen laporan berisi rekomendasi-rekomendasi yang telah dipersiapkan dan disusun sebelumnya oleh *Finance Track, Sherpa Track, dan Ministerial Meetings* di G20 selama 1 tahun.

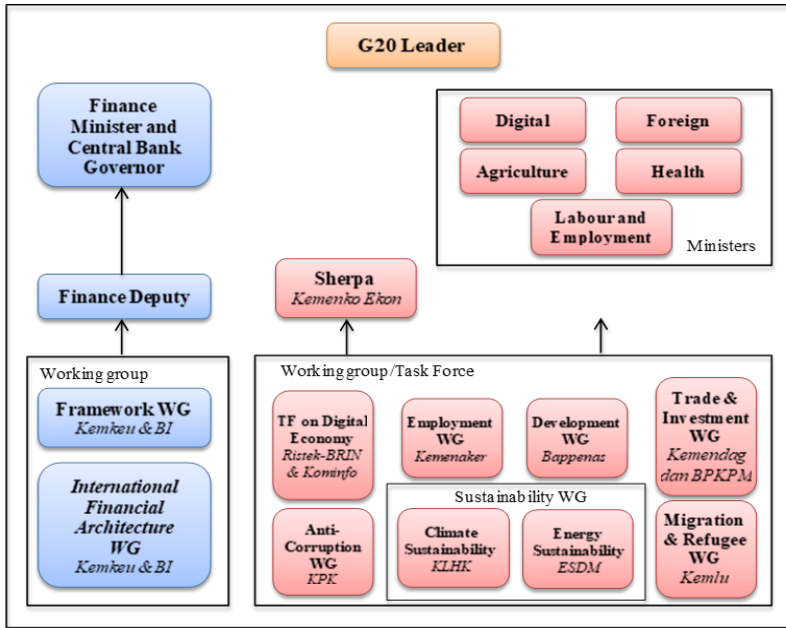
Pada tahun 2009, Deklarasi G20 di Pittsburg mengakui pentingnya keterlibatan negara-negara berkembang dengan perekonomian yang sedang menguat dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong kerja sama ekonomi global.¹⁷⁶ Pada tahun yang sama, Indonesia bergabung menjadi anggota G20 dan pemerintah mengakui pentingnya keterlibatan dalam forum G20. Hal ini mendorong Indonesia untuk memainkan peran dalam mempromosikan kepentingan ekonomi nasional sekaligus berkontribusi dalam pembentukan tata kelola ekonomi global. Sejak

¹⁷⁶ G20. Leader's Statement - The Pittsburg Summit September 24 - 25 2009.

terbentuknya G20, Pemerintah Republik Indonesia (RI) aktif mengikuti dan memberi masukan, posisi, dan intervensi dalam pertemuan-pertemuan baik tingkat *Leaders' Summit*, *MGM*, *Finance Deputies*, *Sherpa*, *Ministers Meeting*, *Agriculture Deputies*, *Working Group*, *Scientist*, *Taskforce* maupun *Study Group*. Indonesia berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu global yang sejalan dengan agenda nasional dan mengakomodasikan kepentingan LIDCs di G20.

Pada awal pembentukan *G20 Development Working Group (DWG)* di Seoul, Korea tahun 2010, Kementerian PPN/ Bappenas ditunjuk menjadi *focal point* Pemerintah RI. Kegiatan Koordinasi Strategis G20 DWG diinisiasi pada tahun 2011 untuk mendukung partisipasi pemerintah RI di DWG, serta memfasilitasi koordinasi dan koherensi kebijakan lintas K/L yang menjadi *focal point* pemerintah RI. K/L tersebut terlibat dalam substansi, isu teknis, maupun agenda yang dibahas di DWG dan *workstreams* G20 baik *Sherpa* maupun *Finance Track*. Selain itu, G20 DWG Indonesia menyadari pentingnya membangun kemitraan dengan *stakeholders* terkait, baik dari pemerintah, universitas, *think-tank*, organisasi masyarakat setempat, serikat kerja, maupun pemuda. Hal ini bertujuan memberikan informasi tentang keterlibatan Indonesia di G20 dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan, serta mendorong proses *knowledge sharing* antara pemerintah dengan *stakeholders* terkait.

Gambar Alur Koordinasi Antar K/L



Sumber: Kemenko Perekonomian

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), salah satu arah kebijakan bidang politik luar negeri adalah menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia di forum bilateral, multilateral, regional dan global, termasuk salah satunya dalam forum G20. Untuk mencapai sasaran pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional di forum G20, maka beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) Perumusan cetak biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerja sama yang berimbang dan relevan; 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara anggota G20 menuju pemulihan ekonomi dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan dan seimbang; dan 3) Peningkatan peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang.

Pemerintah RI telah menyusun “Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 Tahun 2015-2019” sesuai amanat RPJMN yang bertujuan menyusun

pedoman bagi Pemerintah RI dalam pembuatan kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia pada G20. Cetak biru tersebut berisi prioritas, target, dan kepentingan nasional Pemerintah Indonesia di G20, serta untuk menentukan arah kebijakan dan strategi partisipasi Indonesia di G20 dalam lima tahun ke depan. Tujuan cetak biru ini adalah untuk meningkatkan koordinasi internal di dalam negeri dan memastikan komitmen Indonesia di G20 sejalan dengan kebijakan nasional. Mulai tahun 2015, pemerintah telah menyusun dokumen Implementasi Komitmen Indonesia di KTT G20 beserta matriks yang memberikan informasi secara komprehensif. Penyusunan kedua dokumen berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kemenko Perekonomian.

Indonesia memiliki serangkaian prioritas di G20 antara lain pertumbuhan ekonomi, energi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global, digitalisasi, perdagangan dan investasi pembangunan, anti korupsi, dan ketengakerjaan. Prioritas Indonesia di G20 bidang ketenagakerjaan dan pembangunan diantaranya adalah implementasi Agenda 2030, *rural youth employment*, peningkatan akses ke Lembaga Pelatihan Vokasi bagi tenaga kerja muda dalam menghadapi ekonomi digital, dan pengembangan pasar kerja melalui integrasi sistem IPK online (IPK-OL) yang mudah dan cepat diakses oleh pencari dan penyedia kerja untuk semua lapisan masyarakat.



Kesenjangan Implementasi – Komitmen Indonesia di Forum G20 Bidang Pendidikan Vokasi

*K*omitmen Indonesia di forum G20 bidang pendidikan vokasi mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia bidang pendidikan dan industri. Di bidang pendidikan, arah dan strategi pembangunan Indonesia salah satunya diprioritaskan untuk “melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja”. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan beberapa strategi, diantaranya melalui: 1) Peningkatan ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif; serta 2) Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

Di bidang industri, arah dan strategi pembangunan Indonesia salah satunya diprioritaskan untuk “peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)”. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan beberapa strategi, diantaranya melalui: 1) Pengembangan

faktor input dengan meningkatkan SDM industri, kapasitas, dan kualitas sekolah yang targetnya meningkat dua kali lipat pada 2015-2019; dan 2) Perintisan pendidikan tinggi vokasi yang baru di bidang elektronika dan instrumentasi.

KTT G20 pertama kali diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London dan Pittsburgh (2009), Toronto dan Seoul (Nopember 2010), Cannes (2011), Los Cabos (2012), St. Petersburg (2013), Brisbane (2014), Antalya (2015), Hangzhou (2016), Hamburg (2017), Buenos Aires (2018), dan Osaka (2019). Dari tahun ke tahun, pembangunan ketenagakerjaan melalui pendidikan vokasi masih menjadi komitmen Indonesia di forum G20.

Implementasi Komitmen Indonesia di Forum G20 Bidang Pendidikan Vokasi Tahun 2017

Berdasarkan Presidensi G20 Hangzhou 2016, komitmen Indonesia di bidang pendidikan vokasi mencakup: 1) *“Generating quality employment is indispensable for sustainable development and is at the center of the G20’s domestic and global agenda; 2) Improve access for under-represented groups to Technical and Vocational Education and Training (TVET); dan 3) Increase the number, quality, and diversity of apprenticeship with full engagement of social partners, businesses and workers.*

Komitmen tersebut kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Implementasi Komitmen Indonesia pada G20 Tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk rencana tahun 2017. Secara garis besar, terdapat empat rencana untuk mencapai komitmen, antara lain:

1. Meningkatkan peran dan akses mutu pelatihan dan pendidikan vokasi, serta pemagangan dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital, melalui: a) Peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi; b) Peningkatan lembaga sertifikasi profesi berlisensi; c) Sertifikasi kompetensi; dan d) Peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional, sektoral, dan daerah;

2. Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pendidikan/pelatihan berbasis standar kompetensi, program pemagangan, dan program sertifikasi kompetensi;
3. Pengembangan keahlian tenaga kerja dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas melalui peningkatan sarana dan prasarana pelatihan; b) Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi melalui pelatihan berbasis kompetensi; c) Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bagi calon wirausaha;
4. Program Pemagangan Nasional Kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang Indonesia.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, beberapa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Penghapusan ketentuan peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya minimal lulusan SMK, saat ini dapat diikuti siapapun yang sudah berusia kerja (khususnya bagi kaum muda);
2. Sosialisasi dan promosi ke daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat tentang TVET;
3. Program *Mobile Training Unit* (MTU) ke daerah – daerah;
4. Pengembangan kios 3in1 (pelatihan, sertifikasi, penempatan) di BLK pusat dan daerah.;
5. Integrasi kios 3in1 BLK dengan Informasi Pencarian Kerja online (IPK-OL);
6. Pengembangan IPK-OL yang lebih *simple* dan mudah diakses oleh masyarakat luas dalam mendapatkan informasi pekerjaan dan pelatihan (sistem, aplikasi *mobile*, dan menjalin *networking* serta integrasi dengan *stakeholders* termasuk dunia pendidikan dan industri);
7. Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan *Technical and Vocational Education and Training* (TVET).

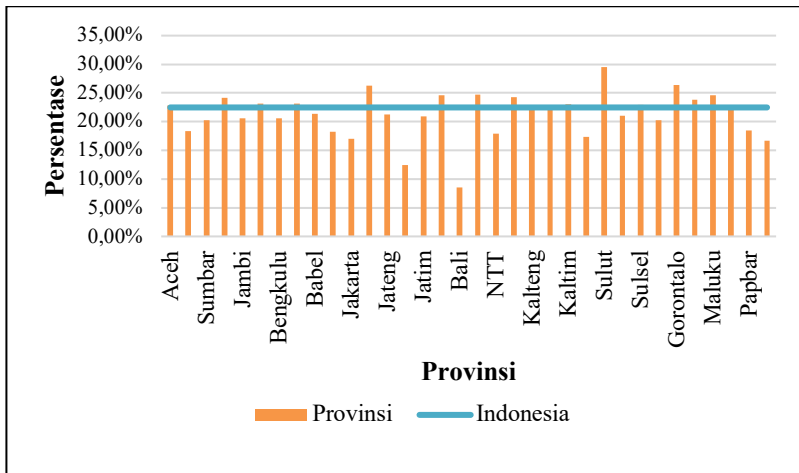
- TVET dilaksanakan melalui penyusunan standar kompetensi, diklat dan magang berbasis kompetensi, serta sertifikasi kompetensi;
8. Pelaksanaan *rapid assesment* penyusunan standar okupasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 9. *Assesment pilot project* Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center/SDC*). *Assesment* telah dilakukan di 8 kabupaten/kota, yaitu: Medan, Makassar, Singosari, Samarinda, Surakarta, Denpasar, Cilacap, dan Karawang;
 10. Program dan kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan *future of work*;
 11. Penciptaan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja di masa depan;
 12. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan keahlian SDM;
 13. Memberikan intensif sektor industri untuk menyerap tenaga kerja hasil vokasi;
 14. Program 3R (Re-orientasi, Re-vitalisasi, *Re-branding*) BLK *Pilot Project* Tahun 2017 di lima Balai Besar Latihan Kerja (BLK) di Indonesia, yaitu: BBPLK Bandung, BBPLK Serang, BBPLK Bekasi, BBPLK Semarang, BBPLK Medan;
 15. Pelaksanaan Program Pemagangan (*Apprenticeship*) baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Keempat rencana tahun 2017 tersebut dijabarkan menjadi 26 poin yang tiap-tiap rencana dicocokkan dengan 12 poin implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga diperoleh *gap* atau *discrepancy* sebesar 14 poin antara komitmen dan implementasi (Lampiran 2). Artinya, terdapat 14 poin rencana yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Dalam komitmen yang dituangkan ke dalam rencana tahun 2017 tersebut, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan angkatan kerja dalam memperoleh pelatihan yang menyebabkan rendahnya kualitas pekerja. Pada 2018, persentase usia 15-24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 22,48

persen. Hal ini mengindikasikan masih tingginya keterbatasan akses baik ke pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan bagi angkatan kerja usia muda. Terlebih terdapat beberapa provinsi seperti Aceh (22,77%), Riau (24,19%), Sumsel (23,19%), Lampung (23,16%), Jabar (26,25%), Banten (24,61%), NTB (24,68%), Kalbar (24,27%), Kalsel (22,87%), Kaltim (23,06%), Sulut (29,56%), Sumsel (22,93%), Gorontalo (26,38%), Sulbar (23,82%), dan Maluku (24,60%), yang memiliki persentase keterbatasan akses baik ke pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan lebih tinggi daripada rata-rata persentase nasional;

Grafik Persentase Usia 15-24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Tidak Bekerja, atau Tidak Mengikuti Pelatihan Per Provinsi - 2018

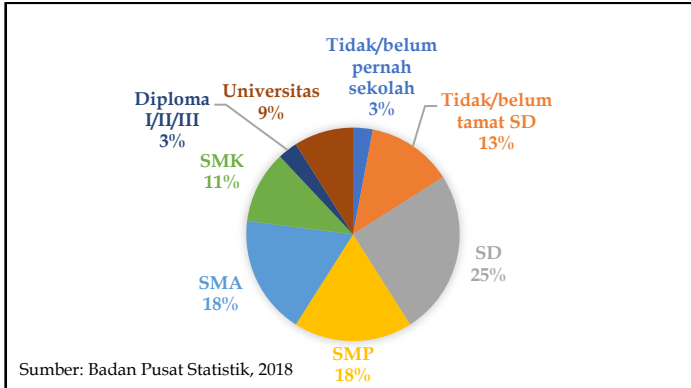


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

2. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja menyebabkan terjadinya *skill mismatch*. Sebagian besar pekerjaan di Indonesia masih diisi oleh tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan lebih rendah daripada kebutuhan (*under-qualified*). Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase pekerja dengan lulusan SMP atau lebih rendah yang mendominasi sebesar 59 persen dari total pekerja, sementara lulusan SMA hanya mendominasi sebesar 18 persen, SMK sebesar 11

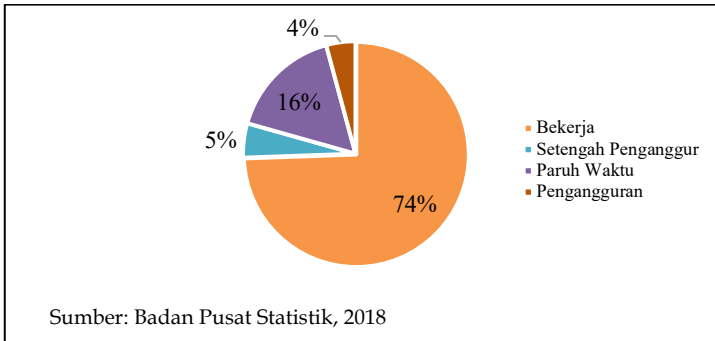
persen, Diploma I/II/III sebesar 3 persen, dan universitas sebesar 9 persen;

Grafik Persentase Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 2018



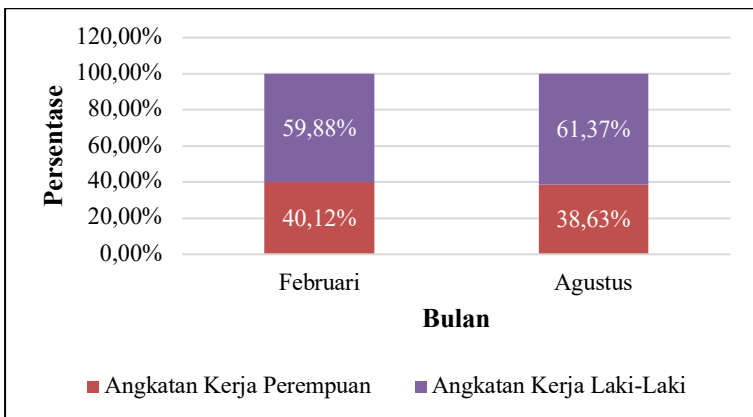
3. Tingginya tingkat pekerja rentan dan tingkat pengangguran yang menyebabkan produktivitas rendah. Pekerja rentan atau pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pada 2018, pekerja rentan mendominasi sebesar 21 persen dari total angkatan kerja dan pekerja tidak penuh. Rendahnya produktivitas terutama disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 4 persen dan tingginya tingkat pekerja rentan yang terdiri dari 5 persen setengah penganggur dan 16 persen pekerja paruh waktu;

Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan - 2018



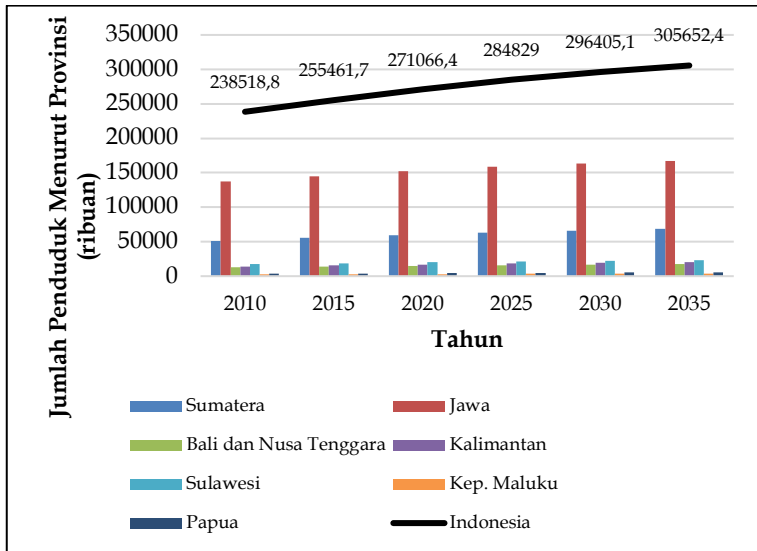
4. Inefisiensi pasar tenaga kerja Indonesia dalam pilar daya saing yang disebabkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Pada 2017, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya sebesar 40,12 persen pada Februari dan menurun menjadi 38,63 persen pada Agustus, dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang semakin meningkat dari 59,88 persen menjadi 61,37 persen dari Februari ke Agustus;

Prosentase Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin - 2018



5. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing dalam memanfaatkan bonus demografi. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan penduduk yaitu dari 271 juta pada 2020 menjadi 306 juta pada 2035. Pertumbuhan penduduk yang tinggi diprediksi akan menyebabkan Indonesia mengalami bonus demografi mulai tahun 2030, yaitu jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 296 juta jiwa, sehingga menjadi tantangan untuk mempersiapkan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing;

Proyeksi Penduduk menurut Provinsi 2010 - 2035



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

6. Koordinasi lintas K/L masih belum terstruktur baku/terorganisir dengan baik. Koordinasi lintas K/L perlu menjadi perhatian khususnya untuk mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi

SMK. Program Revitalisasi SMK terdiri dari: 1) Renovasi Bangunan dan Fasilitas Pendukung; 2) Pengadaan dan Revitalisasi Peralatan Praktek; 3) Pemutakhiran Sistem Pembelajaran berbasis Industri 4.0 dan Sertifikasi Kompetensi Siswa; 4) Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Guru Kejuruan dan Tenaga Kependidikan; 5) Kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan 5) Penguatan Karakter Kerja. Detail kegiatan dari program adalah sebagai Tabel berikut.

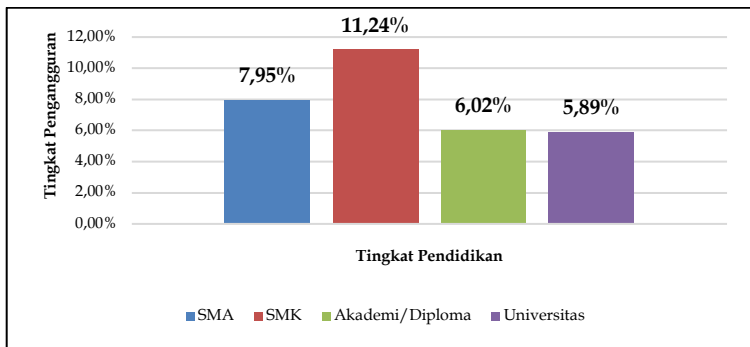
Program dan Komponen Kegiatan Revitalisasi SMK 2020-2024

No.	Program	Kegiatan
1.	Renovasi Bangunan dan Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan • Pembangunan Gedung dan Fasilitas Baru • Penataan Lingkungan Sekolah
2.	Pengadaan dan Revitalisasi Peralatan Praktek	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran Fasilitas Peralatan Praktek • Perbaikan, Perawatan dan Kalibrasi Peralatan • Pengadaan Peralatan sesuai dengan Industri 4.0
3.	Pemutakhiran Sistem Pembelajaran berbasis Industri 4.0 dan Sertifikasi Kompetensi Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan Kurikulum dengan Industri • Penerapan Pendidikan Sistem Ganda (<i>Dual System</i>) melalui Praktek Kerja Lapangan • Implementasi <i>Teaching Factory</i> • Sertifikasi Kompetensi Siswa
4.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Guru Kejuruan dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Guru Kejuruan • Pelatihan/Magang Industri Bagi Guru • Pengadaan Instruktur Kejuruan dari DUDI • Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
5.	Kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jejaring Kerja sama DUDI • <i>Demand Driven School</i> melalui Kelas Industri di SMK • Pemasaran Lulusan SMK
6.	Penguatan Karakter Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Karakter Pendidik dan Tenaga kependidikan • Penguatan Pendidikan Karakter Kerja Siswa • Pengembangan Minat dan Bakat Siswa • Pengembangan Kewirausahaan berbasis Digital

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2019

7. Kurikulum pendidikan vokasi umumnya belum selaras dengan kebutuhan dan perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran untuk lulusan SMK 3,29% lebih banyak daripada lulusan SMA dan persentase tingkat pengangguran untuk lulusan Akademi/Diploma juga 0,13% lebih banyak daripada lulusan Universitas;

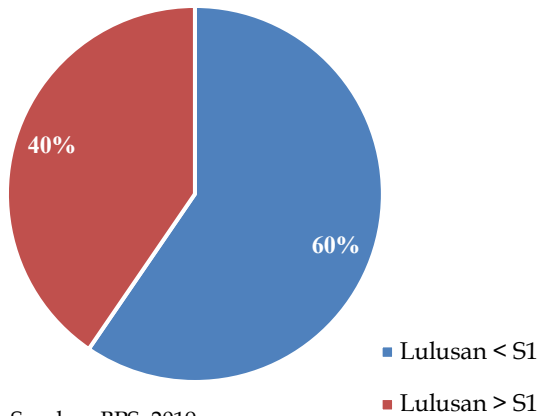
Grafik Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 2018



Sumber: BPS, 2019

8. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum menghasilkan guru produktif SMK untuk seluruh bidang keahlian yang diperlukan (kekurangan guru vokasi yang memiliki keahlian tertentu), terutama karena mutu guru SMK yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi guru SMK dengan pendidikan minimal S1 atau kurang lebih banyak.

Proporsi Guru SMK Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 2018/2019



Sumber: BPS, 2019

9. Kesadaran dan peran serta pemerintah daerah yang kurang dalam meningkatkan kompetensi SDM wilayahnya, khususnya melalui BLK atau pemagangan. Desentralisasi manajemen BLK kepada Pemerintah Daerah mulai diterapkan pada 2001 sejalan dengan penerapan otonomi daerah, sehingga banyak BLK yang tidak berkembang dengan baik.¹⁷⁷ Hingga 2019, pemerintah telah memiliki 294 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 294 BLK tersebut, 13% atau 38 BLK tidak beroperasi dengan baik. Setidaknya, terdapat beberapa persyaratan bagi BLK agar beroperasi secara optimal, antara lain kompetensi kerja, kurikulum, materi pelatihan, tata kelola, instruktur dan tenaga pelatihan, assesmen, sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan;¹⁷⁸

¹⁷⁷ Afrina, Eka, *et al.* 2019. "Praktik Baik Pelatihan Vokasi di Indonesia: Studi Kasus Tiga Balai Latihan Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Piha Swasta". Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

¹⁷⁸ Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. 2016. "8 Standar Mutu Akreditasi LA-LPK".

Kondisi Balai Latihan Kerja Menurut Provinsi - 2019

No.	Provinsi	Beroperasi	Tidak Beroperasi	Total
1.	Aceh	16	3	18
2.	Sumatera Utara	11	3	17
3.	Sumatera Barat	15	1	13
4.	Riau	6	0	5
5.	Jambi	7	1	7
6.	Sumatera Selatan	12	1	13
7.	Bengkulu	5	0	6
8.	Lampung	6	2	6
9.	Kepulauan Babel	1	0	2
10.	Kepulauan Riau	2	1	3
11.	DKI Jakarta	1	0	7
12.	Jawa Barat	24	1	21
13.	Jawa Tengah	32	0	32
14.	DI Yogyakarta	5	0	5
15.	Jawa Timur	27	1	27
16.	Banten	5	0	6
17.	Bali	8	0	7
18.	Nusa Tenggara Barat	8	0	7
19.	Nusa Tenggara Timur	4	4	7
20.	Kalimantan Barat	7	0	7
21.	Kalimantan Tengah	6	3	11
22.	Kalimantan Selatan	10	0	11
23.	Kalimantan Timur	5	0	5
24.	Kalimantan Utara	3	0	2
25.	Sulawesi Utara	2	2	4
26.	Sulawesi Tengah	3	0	8
27.	Sulawesi Selatan	9	2	17
28.	Sulawesi Tenggara	5	3	6
29.	Gorontalo	3	1	5
30.	Sulawesi Barat	1	0	3
31.	Maluku	1	0	4
32.	Maluku Utara	1	1	2
33.	Papua Barat	2	2	3
34.	Papua	3	6	11
Total		256	38	294

Sumber: Ditjen Binalattas, 2019

10. Adanya otonomi daerah. Dalam upaya sosialisasi dan promosi TVET ke daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat, pelaksanaan dari program TVET di daerah tidak selalu sejalan dengan program TVET di pusat dikarenakan adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan daerah masing-masing;
11. Kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja semakin meningkat. Sebagaimana proyeksi kebutuhan tenaga kerja tahun 2022 dari World Economic Forum 2018, kemajuan teknologi meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil khususnya di bidang teknologi, informasi dan komputer (TIK). Selain kemajuan teknologi, berlakunya pasar kerja bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai proses integrasi trans-nasional juga menuntut keterampilan pekerja yang lebih tinggi untuk dapat bersaing di tingkat global.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja - 2022

Proyeksi Pekerjaan yang Mulai Dibutuhkan	Proyeksi Pekerjaan yang Mulai Tidak Dibutuhkan
<i>Data Analysts and Scientists; Big Data Specialists</i>	<i>Data Entry Clerks; Accounting; Administrative and Executive Secretaries</i>
<i>Artificial Intelligence and Machine Learning Specialists; Robotics Specialists and Engineers; Process Automation Specialists</i>	<i>Assembly and Factory Workers; Mechanics and Machinery Repairers, Car, Van, and Motorcycle Drivers</i>
<i>Training and Development Specialists, Service and Solutions Designers, Information Technology Services</i>	<i>Accountants and Auditors; Financial Analysts; Telemarketers; Sales and Purchasing Agents and Brokers; Lawyers</i>
<i>Software and Applications Developers and Analysts</i>	
<i>Digital Marketing and Strategy Specialists; Ecommerce and Social Media Specialists</i>	

Sumber: World Economic Forum, 2018

Implementasi Komitmen Indonesia di Forum G20 Bidang Pendidikan Vokasi

Berdasarkan Presidensi G20 Hamburg 2017, komitmen Indonesia di bidang pendidikan vokasi mencakup: 1) *“Improve women’s access to labour markets through provision of quality education and training, supporting, infrastructure, public services and social protection policies and legal reforms, where appropriate; 2) Promote higher education programmes, which equip young people - and especially young women - effectively with the skills needed for the ICT job market; 4) Build skills for work and life and strengthen links between employment and training inter alia by implementing the G20 Training Strategy, Skills Strategy (2015), the Policy Recommendations to Enhance Employability (2016), and the G20 Initiative on Quality Apprenticeship; 5) Strengthen Technical and Vocational Education and Training systems, programs and institutions to develop skills, meet labor market needs, promote the cooperation with all relevant stakeholders, increase the employability of the workforce and advance towards more equitable and sustainable societies; dan 6) To strengthen humanitarian engagement and reaffirm commitment to addressing the underlying causes of recurrent and protracted crises.*

Komitmen tersebut kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Implementasi Komitmen Indonesia pada G20 Tahun 2018 yang dijabarkan dalam bentuk rencana (Lampiran 3). Secara garis besar, terdapat empat rencana untuk mencapai komitmen, antara lain:

1. Peningkatan literasi dan kemampuan Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) bagi kaum perempuan, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan (*Technical and Vocational Education and Training*/TVET) beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam kewirausahaan yang berorientasi ekonomi digital melalui pengarusutamaan *gender* dan TIK, baik dalam sektor hulu (pendidikan) maupun hilir dari suatu industri bisnis;

3. Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK baik melalui pendidikan, sosialisasi/*workshop* serta pelatihan teknis bersama dengan mitra terkait, baik di daerah, nasional maupun internasional;
4. Mengembangkan kapasitas pendidikan dan keterampilan pelaku pertanian, antara lain melalui perbaikan substansi dan manajemen politeknik pertanian, sertifikasi profesi pertanian, dan pelatihan keterampilan pertanian.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, beberapa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain:

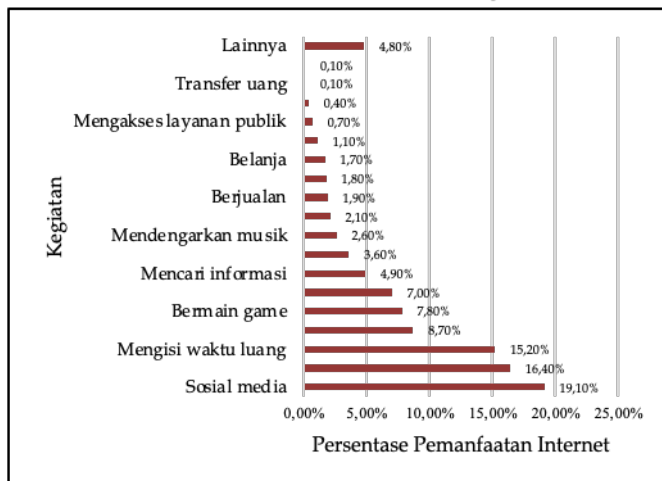
1. Di sektor pendidikan (hulu), telah disusun kurikulum edukasi literasi digital untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah;
2. Dilaksanakan kegiatan pelatihan pemasaran digital #*SheMeansBusiness* bersama Facebook oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di 9 kota di Indonesia (Padang, Jambi, Samarinda, Bogor, Sorong, Jayapura, Tanjung Pinang dan Gorontalo);
3. Indonesia secara aktif berperan dalam *The ASEAN Women's Enterprenership Network*, sebuah platform yang berfungsi mempromosikan pengembangan dan pemberdayaan wirausaha perempuan di kawasan ASEAN dan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dalam berwirausaha;
4. Di tingkat nasional, telah tersedia portal "serempak.id" (Seputar Perempuan dan Anak) sebagai media partisipasi masyarakat dan forum diskusi khususnya bagi perempuan untuk memperoleh informasi dan pengalaman terkait isu-isu seputar perempuan, anak dan pengembangan UMKM;
5. *Off-Air Events* untuk mensosialisasikan eksistensi dan pemanfaatan portal serempak.id di beberapa kota-kota besar dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
6. Kegiatan kemitraan bersama *Open Data Lab* (ODL), dengan pengembangan literasi TIK bagi perempuan dan kaum muda melalui *roadshow* dan pelatihan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti kegiatan *Women's Empowerment through ICT and Leadership Training* di Jakarta dan *Boarding School Digital Literacy Festival* di Cirebon dan Surabaya;

7. Telah dilaksanakan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara aktif berupa pendampingan dan pelatihan yang melibatkan banyak *stakeholder* pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan pemilik usaha atau praktisi bisnis, untuk menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri;
8. Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian memiliki program Penumbuhan Wirausahawan (PW) untuk mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan muda pertanian;
9. Dalam pelaksanaannya Program Penumbuhan Wirausaha melibatkan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
10. Optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja di seluruh Indonesia melalui peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, pemetaan kebutuhan dan standar keahlian, serta peningkatan peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia;
11. Penyusunan buku Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig);
12. Penyusunan buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PPK);
13. Program pendidikan SMK 4 tahun untuk memberikan pengalaman empiris lebih matang di bidang kewirausahaan;
14. Kewajiban pemuatan mapel Simdig dan PPK pada kurikulum seluruh kompetensi keahlian SMK;
15. Pendekatan program yang merupakan penguatan dari pendekatan kurikulum dilakukan melalui: 1) Kerja sama dengan instansi lain atau figur wirausahawan; 2) Identifikasi potensi siswa dan guru yang mengembangkan kewirausahaan; dan 3) Pemberian bantuan pemerintah kewirausahaan kepada 625 SMK pada 2019;
16. Koordinasi Mutu SMK memanfaatkan sistem jaringan/online yang “murah”, “efektif”, dan “efisien” melalui *video conference* 2019 sebagai platform teknologi terintegrasi dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan kejuruan SMK. Program ini melibatkan 9.874 SMK (25% negeri dan 75% swasta). Pada 2018, sistem jaringan/*online* ini telah digunakan sebanyak 37 kali rapat, 124 kali sosialisasi, 27 kali wawancara, 12 kali pelatihan, 15 kali bidang lomba kompetensi siswa SMK, dan 45 seminar.

Keempat rencana tahun 2018 tersebut dijabarkan menjadi 29 poin yang tiap-tiap rencana dicocokkan dengan 15 poin implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga diperoleh *gap* atau *discrepancy* sebesar 14 poin antara komitmen dan implementasi. Artinya, terdapat 14 poin rencana yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Dalam komitmen yang dituangkan ke dalam rencana tahun 2018 tersebut, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan internet masih belum banyak digunakan untuk kepentingan ekonomi atau kegiatan produktif. Menurut Laporan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018, sebagian besar pengguna internet menggunakan waktunya untuk sosial media (19,10%), komunikasi lewat pesan (16,40%), dan mengisi waktu luang (15,20%). Sementara penggunaan internet untuk kepentingan ekonomi atau kegiatan produktif hanya sebesar 8 persen, yaitu untuk mencari informasi produk sebesar 2,1 persen, berjualan sebesar 1,9 persen, tuntutan pekerjaan sebesar 1,8 persen, belanja sebesar 1,7 persen, pesan tiket sebesar 0,4 persen, transfer uang sebesar 0,1 persen, dan *trading* sebesar 0,1 persen.
2. Belum terkoordinasinya *platform-platform* yang mendukung inisiatif dan gerakan perempuan terkait TIK yang dikembangkan melalui

Pemanfaatan Internet Berdasarkan Kegiatan - 2018

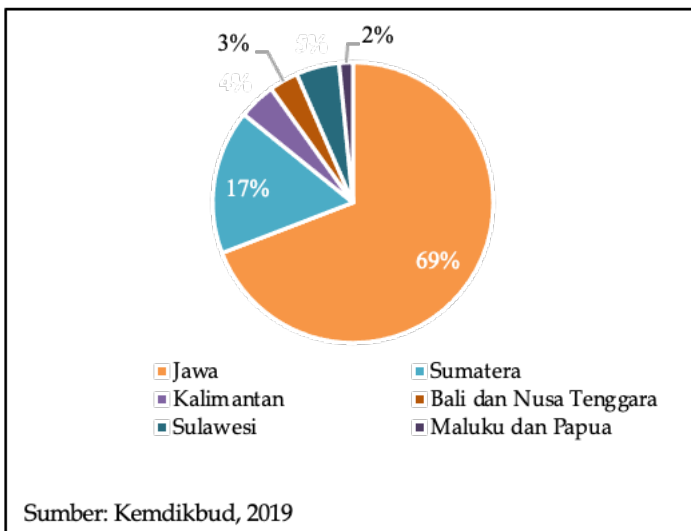


Sumber: APJI, 2018

kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah yang terlibat. Beberapa platform yang dikembangkan oleh aktor non-pemerintah antara lain: a) Pelatihan pemasaran digital #SheMeansBusiness bersama Facebook oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di 9 kota seperti Padang, Jambi, Samarinda, Bogor, Sorong, Jayapura, Tanjung Pinang dan Gorontalo; b) Aktif berperan dalam *The ASEAN Women Entrepreneurs Network* bersama 9 negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Singapura; c) Pelaksanaan kegiatan *Women's Empowerment through ICT and Leadership Training* di Jakarta; dan d) *Boarding School Digital Literacy Festival* di Cirebon dan Surabaya. Sementara beberapa platform yang dikembangkan oleh pemerintah salah satunya adalah portal “serempak.id” (Seputar Perempuan dan Anak) sebagai media partisipasi masyarakat dan forum diskusi khususnya bagi perempuan untuk memperoleh informasi dan pengalaman terkait isu-isu seputar perempuan, anak dan pengembangan UMKM;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang literasi TIK khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Berdasarkan data Kemdikbud, persebaran sarana penunjang literasi TIK seperti

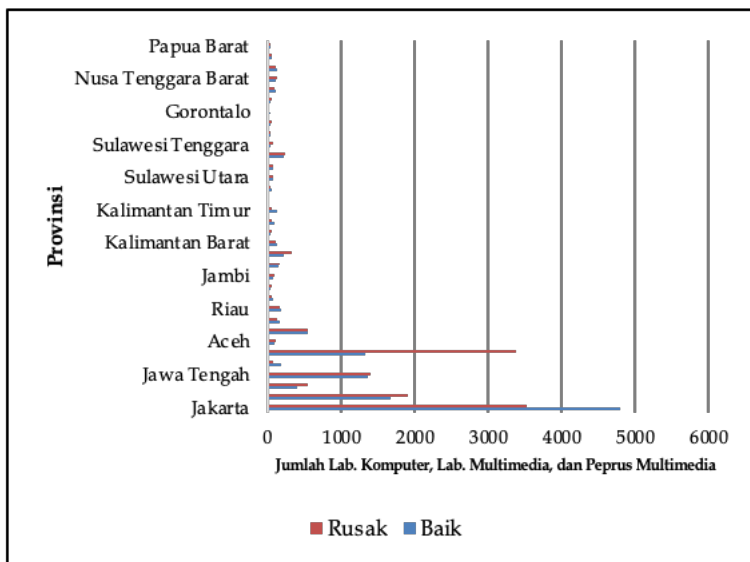
**Kondisi dan Persebaran Sarana Pendukung TIK
di SMK - 2018**



komputer di seluruh wilayah SMK di Indonesia belum merata. Sebagian besar sarana penunjang tersebut terkonsentrasi di wilayah Jawa yang mencapai hingga 69 persen, sementara di luar pulau Jawa hanya sebesar 31 persen yang terdiri dari 17 persen di Sumatera, 4 persen di Kalimantan, 3 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 5 persen di Sulawesi, 2 persen di Maluku dan Papua.

Begitu pula prasarana penunjang seperti laboratorium komputer, laboratorium multimedia, dan perpustakaan multimedia, yang terkonsentrasi di wilayah Jawa hingga mencapai 77 persen, sementara di luar pulau Jawa hanya sebesar 33 persen yang terdiri dari 12 persen di Sumatera, 3 persen di Kalimantan, 3 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 4 persen di Sulawesi, 1 persen di Maluku dan Papua. Di samping itu, persebaran yang tidak merata tersebut masih terkendala dengan kualitas prasarana yang tidak memadai. 52 persen baik prasarana penunjang tersebut berada pada kondisi rusak, sementara prasarana dengan kondisi baik hanya sebesar 48 persen;

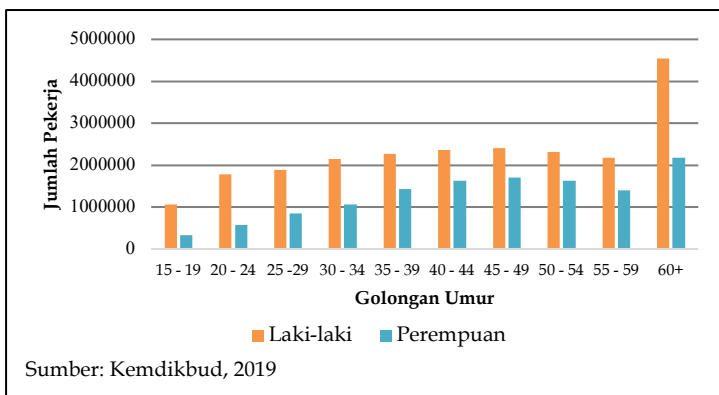
Kondisi dan Persebaran Prasarana Pendukung TIK di SMK - 2018



Sumber: Kemdikbud, 2019

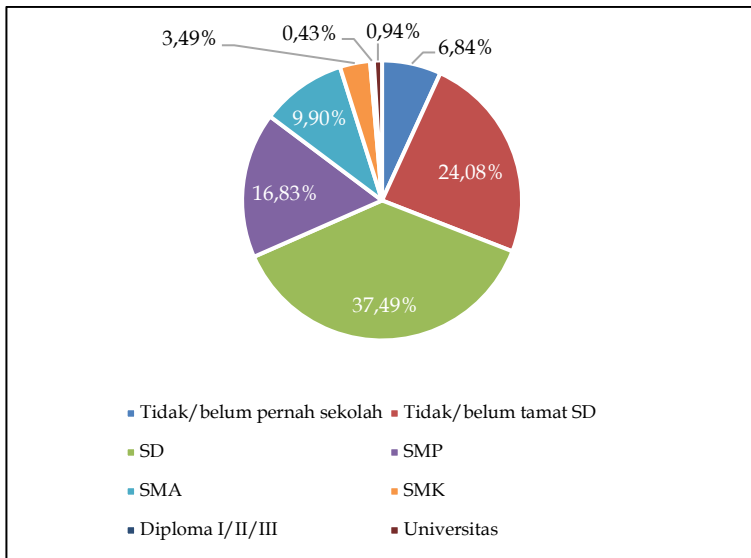
4. Masih terdapat kendala dalam mengkonkritkan inisiatif #Eskills4Girls ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendesain kerja sama dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk mendukung inisiatif ini. Terutama disebabkan oleh keterbatasan data mengenai perempuan dan TIK yang menjadi tantangan dalam mengembangkan *baseline* arah kebijakan berbasis bukti di Indonesia;
5. Semakin menurunnya jumlah dan minat kaum muda, serta menuanya sumber daya manusia di sektor pertanian. Potensi pemberdayaan kaum muda di perdesaan juga masih belum terserap secara optimal khususnya pada kaum muda perempuan, dikarenakan masih tingginya kasus diskriminasi dan kerentanan terhadap perempuan di negara-negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja muda usia 17–25 tahun di sektor pertanian, khususnya perempuan. Pada golongan umur 15–19 tahun, pekerja laki-laki di sektor pertanian mendominasi sebesar 77 persen dibandingkan pekerja perempuan yang hanya sebesar 23 persen. Begitu pun pada golongan umur 20–24 tahun, pekerja laki-laki di sektor pertanian mendominasi sebesar 75 persen dibandingkan pekerja perempuan yang hanya sebesar 25 persen;

Jumlah Pekerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin - 2018



6. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia di sektor pertanian masih rendah. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di sektor pertanian yang sebagian besar adalah lulusan SD (37,49%), tidak/belum tamat SD (24,08%), dan lulusan SMP (16,83%). Sementara lulusan Universitas hanya sebesar 0,94 persen, Diploma I/II/III sebesar 0,43 persen, SMK sebesar 3,49 persen, dan SMA sebesar 9,90 persen.

Pekerja di Sektor Pendidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan - 2018



Sumber: BPS, 2019



PENUTUP

Masih terdapat *gap* antara komitmen Indonesia dalam forum G20 bidang pendidikan vokasi dengan implementasinya. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa dari 4 rencana tahun 2017 yang dijabarkan menjadi 26 poin rencana untuk implementasi komitmen tahun 2016, baru 12 poin implementasi yang berhasil dilaksanakan pada 2017, artinya terdapat *gap* atau *discrepancy* sebesar 14 poin antara komitmen dan implementasi. Sementara, hasil dari analisis menunjukkan bahwa dari 4 rencana tahun 2018 yang dijabarkan menjadi 29 poin untuk implementasi komitmen tahun 2017, baru 16 poin implementasi yang berhasil dilaksanakan pada 2018, artinya terdapat *gap* atau *discrepancy* sebesar 13 poin antara komitmen dan implementasi. Artinya, implementasi komitmen Indonesia di forum G20 bidang pendidikan vokasi masih belum optimal.

Dalam komitmen yang dituangkan ke dalam rencana tahun 2017 tersebut, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Sebanyak 22,48 persen angkatan kerja muda usia 15-24 tahun pada 2018 tidak memperoleh akses baik ke pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan bagi angkatan kerja usia muda menyebabkan rendahnya kualitas pekerja;
2. Sebanyak 59 persen dari total pekerja pada 2018 merupakan lulusan SMP atau lebih rendah sehingga sebagian besar pekerjaan di Indonesia masih diisi oleh tenaga kerja yang memiliki latar belakang

pendidikan lebih rendah daripada kebutuhan (*under-qualified*) yang menyebabkan terjadinya *skill mismatch*;

3. Tingkat pekerja rentan masih sebesar 21 persen dari total angkatan kerja dan pekerja tidak penuh pada 2018 sehingga menyebabkan produktivitas rendah;
4. Inefisiensi pasar tenaga kerja Indonesia dalam pilar daya saing yang disebabkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya sebesar 40,12 persen pada Februari dan menurun menjadi 38,63 persen pada Agustus 2018;
5. Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 296 juta jiwa pada 2030 menjadi tantangan untuk mempersiapkan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing;
6. Koordinasi lintas K/L masih belum terstruktur baku/terorganisir dengan baik khususnya untuk melancarkan Program Revitalisasi SMK yang memerlukan kerja sama antar K/L;
7. Banyak BLK tidak berkembang dengan baik sejalan dengan desentralisasi manajemen BLK sejak 2001 yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM wilayahnya;
8. Kebutuhan tenaga kerja terampil khususnya di bidang TIK semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan berlakunya pasar kerja bebas untuk dapat bersaing di tingkat global;

Dalam komitmen yang dituangkan ke dalam rencana tahun 2018 tersebut, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Penggunaan internet untuk kepentingan ekonomi atau kegiatan produktif hanya sebesar 8 persen pada 2018;
2. Belum terkoordinasinya platform-platform yang mendukung inisiatif dan gerakan perempuan terkait TIK yang dikembangkan melalui kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah yang terlibat;
3. Sebesar 69 persen sarana dan 77 persen prasarana penunjang literasi TIK pada 2018 terkonsentrasi di wilayah Jawa menjadi keterbatasan khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar);

4. Keterbatasan data mengenai perempuan dan TIK menjadi tantangan dalam mengembangkan *baseline* arah kebijakan berbasis bukti untuk mengkonkritkan inisiatif #Eskills4Girls ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendesain kerja sama dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak;
5. Sebesar 76 persen pekerja laki-laki mendominasi di sektor pertanian dibandingkan pekerja perempuan yang hanya sebesar 24 persen pada golongan usia 15-24 tahun menunjukkan turunnya jumlah dan minat kaum muda, serta menuanya sumber daya manusia di sektor pertanian, terlebih potensi pemberdayaan kaum muda perempuan di perdesaan;
6. Tingkat pendidikan pekerja di sektor pertanian sebagian besar adalah lulusan SD (37,49%) pada 2018 menunjukkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di sektor pertanian masih rendah.

Langkah Ke Depan Penguatan Implementasi Komitmen

Terkait dengan implemenasi komitmen yang dituangkan dalam bentuk rencana tahun 2017 untuk:

1. Meningkatkan peran dan akses mutu pelatihan dan pendidikan vokasi, serta pemagangan dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital, melalui: a) Peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi; b) Peningkatan lembaga sertifikasi profesi berlisensi; c) Sertifikasi kompetensi; dan d) Peningkatan produktifitas tenaga kerja nasional, sektoral, dan daerah;
2. Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pendidikan/pelatihan berbasis standar kompetensi, program pemagangan, dan program sertifikasi kompetensi;

3. Pengembangan keahlian tenaga kerja dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas melalui peningkatan sarana dan prasarana pelatihan; b) Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi melalui pelatihan berbasis kompetensi; dan c) Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bagi calon wirausaha.

Beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional yang dapat dilakukan adalah:

1. Perlu adanya dukungan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di negara anggota G20;
2. Berbagi pengalaman *best practices* negara anggota G20 terkait usaha peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penurunan pengangguran, khususnya pengangguran usia muda;
3. Pembentukan *knowledge sharing platform* antara negara anggota G20 dalam penerapan *National Qualification Framework (NQF)* dan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* antar negara/wilayah serta pengawalan Rencana Aksi Implementasi NQF dan MRA;
4. Memperluas akses dan mutu pelatihan dan pendidikan vokasi serta meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja melalui kerja sama pembangunan dengan negara lain;
5. Meningkatkan peran industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi serta program pemagangan melalui kerja sama dengan industri dari negara anggota G20 lainnya;

Terkait dengan implemenasi komitmen yang dituangkan dalam bentuk rencana tahun 2017 untuk menerapkan Program Pemagangan Nasional Kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional yang dapat dilakukan adalah:

1. Menynergikan kebijakan dan pemahaman antar K/L terkait pemagangan;

2. Peningkatan kerja sama dengan perusahaan multimedia negara anggota G20 lainnya terkait inovasi program pemagangan yang terkait teknologi digital;
3. Meningkatkan peran industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi serta program pemagangan melalui kerja sama dengan industri dari negara anggota G20 lainnya;

Terkait dengan implemenasi komitmen yang dituangkan dalam bentuk rencana tahun 2018 untuk:

1. Meningkatkan literasi dan kemampuan Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) bagi kaum perempuan, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan (*Technical and Vocational Education and Training/TVET*) beserta penyediaan sarana dan prasana pendukung;
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam kewirausahaan (*cross cutting issue* dengan agenda *Inclusive Business Agenda*) yang berorientasi ekonomi digital melalui pengarusutamaan *gender* dan TIK, baik dalam sektor hulu (pendidikan dan pelatihan) maupun hilir dari suatu industri bisnis;
3. Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK baik melalui pendidikan, sosialisasi/*workshop* serta pelatihan teknis bersama dengan mitra terkait, baik di daerah, nasional maupun internasional.

Beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan kemampuan TIK bagi kaum perempuan melalui program pengarusutamaan pendidikan/pelatihan teknologi digital yang bertujuan: a) Meningkatkan akses informasi pasar kerja bagi calon tenaga kerja perempuan yang sebagian besar masih berada pada sektor informal; dan b) Mendorong pemanfaatan peluang ekonomi di bidang TIK yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas perempuan;
2. Program-program pengarusutamaan pendidikan/pelatihan teknologi digital bagi kaum perempuan tersebut yang dapat difokuskan pada: a) Pengembangan kreativitas dengan

memanfaatkan TIK; dan b) Pelibatan tenaga ahli tinggi dan spesifik untuk *knowledge transfer*;

3. Perkuatan dukungan dan komitmen dari kemitraan terkait dalam meningkatkan akses serta partisipasi perempuan dalam TIK, melalui *knowledge sharing and transfer* serta kebijakan yang responsif terhadap gender dan TIK.

Terkait dengan implemenasi komitmen yang dituangkan dalam bentuk rencana tahun 2018 untuk mengembangkan kapasitas pendidikan dan keterampilan pelaku pertanian antara lain melalui perbaikan substansi dan manajemen politeknik pertanian, sertifikasi profesi pertanian, dan pelatihan keterampilan pertanian, beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional yang dapat dilakukan adalah:

1. Melanjutkan reformasi substansi pendidikan pertanian yang merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan kompetensi pelajar di bidang pertanian agar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi.
2. Perlunya mendorong lebih banyak kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara maju untuk mempercepat proses transfer pengalaman, teknologi dan pengetahuan di bidang pertanian, khususnya melalui pemberdayaan kaum muda dan usaha tani.

LAMPIRAN

Matriks Implementasi Komitmen Indonesia 2017 Bidang Pendidikan Vokasi Berdasarkan KTT G20 Hangzhou 2016

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2016	Rencana 2017	Implementasi 2017
1.	<i>Human Resource Development and Employment</i> Isu pembangunan dan ketenagakerjaan	<u><i>Development Working Group (DWG)</i></u> <i>Focal point:</i> Kem. PPN/Bappenas <u><i>Employment Working Group (EWG)</i></u> <i>Focal point:</i> Kem. Ketenagakerjaan <u><i>K/L terkait:</i></u> <ul style="list-style-type: none"> • Kem. Ketenagakerjaan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian PPN/Bappenas 	<u><i>Presidensi Hangzhou 2016</i></u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Generating quality employment is indispensable for sustainable development and is at the center of the G20's domestic and global agenda.</i> • <i>Improve access for under-represented groups to TVET.</i> • <i>Increase the number, quality, and diversity of apprenticeship with full engagement of social partners, businesses and workers.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan akses mutu pelatihan dan pendidikan vokasi, serta pemagangan dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi; • Peningkatan lembaga sertifikasi profesi berlisensi; • Sertifikasi kompetensi; • Peningkatan produktifitas tenaga kerja nasional, sektoral, dan daerah. 2. Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan ketentuan peserta pelatihan di BLK yang sebelumnya minimal lulusan SMK, saat ini dapat diikuti siapapun yang sudah berusia kerja (khususnya bagi kaum muda). 2. Sosialisasi dan promosi ke daerah melalui Disnaker setempat tentang TVET. 3. Program <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) ke daerah - daerah. 4. Pengembangan kios 3in1 (pelatihan, sertifikasi, penempatan) di BLK pusat dan daerah. 5. Integrasi kios 3in1 BLK dengan Informasi Pencarian Kerja online (IPK-OL). 6. Pengembangan IPK-OL yang lebih <i>simple</i> dan mudah diakses oleh masyarakat luas dalam mendapatkan informasi pekerjaan dan pelatihan (sistem, aplikasi <i>mobile</i>, dan menjalin <i>networking</i> serta integrasi dengan

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2016	Rencana 2017	Implementasi 2017
		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak • Badan Nasional Sertifikasi Profesi 		<p>Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pendidikan/pelatihan berbasis standar kompetensi, program pemagangan, dan program sertifikasi kompetensi.</p> <p>3. Pengembangan keahlian tenaga kerja dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas melalui peningkatan sarana dan prasarana pelatihan. • Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi melalui pelatihan berbasis kompetensi. • Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan 	<p><i>stakeholders</i> termasuk dunia pendidikan dan industri).</p> <p>7. Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET). TVET dilaksanakan melalui penyusunan standar kompetensi, diklat dan magang berbasis kompetensi, serta sertifikasi kompetensi.</p> <p>8. Pelaksanaan <i>rapid assesment</i> penyusunan standar okupasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).</p> <p>9. <i>Assesment pilot project</i> Pusat Pengembangan Keahlian (<i>Skill Development Center/SDC</i>). <i>Assesment</i> telah dilakukan di 8 kabupaten/kota, yaitu: Medan, Makassar, Singosari, Samarinda, Surakarta, Denpasar, Cilacap, dan Karawang.</p> <p>10. Program dan kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan <i>future of work</i>:</p> <p>11. Penciptaan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja di masa depan;</p>

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2016	Rencana 2017	Implementasi 2017
				<p>pelatihan bagi calon wirausaha.</p> <p>4. Menerapkan Program Pemagangan Nasional Kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang Indonesia.</p>	<p>12. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan keahlian SDM;</p> <p>13. Memberikan intensif sektor industri untuk menyerap tenaga kerja hasil vokasi.</p> <p>14. Program 3R (Re-orientasi, Re-vitalisasi, <i>Re-branding</i>) BLK <i>Pilot Project</i> Tahun 2017 di lima Balai Besar Latihan Kerja (BLK) di Indonesia, yaitu: BBPLK Bandung, BBPLK Serang, BBPLK Bekasi, BBPLK Semarang, BBPLK Medan.</p> <p>15. Pelaksanaan Program Pemagangan (<i>Apprenticeship</i>) baik di dalam negeri maupun luar negeri.</p>

**Analisis Implementasi Komitmen Indonesia 2017 Bidang Pendidikan Vokasi
Berdasarkan KTT G20 Hangzhou 2016**

No.	Rencana	Implementasi dari Komitmen
1.	Meningkatkan peran pelatihan vokasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan ketentuan peserta pelatihan di BLK yang sebelumnya minimal lulusan SMK, saat ini dapat diikuti siapapun yang sudah berusia kerja (khususnya bagi kaum muda). • Pengembangan IPK-OL yang lebih simple dan mudah diakses oleh masyarakat luas dalam mendapatkan informasi pekerjaan dan pelatihan (sistem, aplikasi <i>mobile</i>, dan menjalin <i>networking</i> serta integrasi dengan <i>stakeholders</i> termasuk dunia pendidikan dan industri).
2	Meningkatkan akses mutu pelatihan vokasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	Penciptaan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja di masa depan.
3.	Pengembangan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	
4.	Meningkatkan peran pendidikan vokasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
5.	Meningkatkan akses mutu pendidikan vokasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
6.	Meningkatkan peran pemagangan dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
7.	Meningkatkan akses mutu pemagangan dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	

No.	Rencana	Implementasi dari Komitmen
8.	Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
9.	Peningkatan lembaga sertifikasi profesi (LSP) berlisensi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
10.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pendidikan berbasis standar kompetensi.	Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training (TVET)</i> yang dilaksanakan melalui pengembangan program pendidikan berbasis kompetensi.
11.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan daya saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pendidikan berbasis standar kompetensi.	
12.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pelatihan berbasis standar kompetensi.	
13.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan daya saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pelatihan berbasis standar kompetensi.	Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training (TVET)</i> yang dilaksanakan melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi.
14.	Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	
15.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan	Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training</i>

No.	Rencana	Implementasi dari Komitmen
	Daya Saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program pemagangan.	(TVET) yang dilaksanakan melalui pengembangan program pemagangan berbasis kompetensi.
16.	Tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan program sertifikasi kompetensi.	Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) yang dilaksanakan melalui penyusunan sertifikasi kompetensi.
17.	Sertifikasi kompetensi dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	
18.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, Re-branding) di lima <i>pilot project</i> Balai Besar Latihan Kerja (BBLK), yaitu: BBLK Bandung, BBLK Serang, BBLK Bekasi, BBLK Semarang, BBLK Medan. • Integrasi kios 3in1 BLK dengan informasi pencarian kerja online (IPK-OL).
19.	Peningkatan produktivitas dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	
20.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional, sektoral, dan daerah dalam rangka integrasi pemuda ke pasar tenaga kerja khususnya di era digital.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan promosi ke daerah melalui Disnaker setempat tentang TVET. • Pengembangan kios 3in1 (pelatihan, sertifikasi, penempatan) di BLK pusat dan daerah. • Program Mobile Training Unit (MTU) ke daerah - daerah.
21.	Peningkatan sarana pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja	Menyediakan sarana pendukung pelatihan keahlian SDM.
22.	Peningkatan prasarana pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja	Menyediakan prasarana pendukung pelatihan keahlian SDM.

No.	Rencana	Implementasi dari Komitmen
23.	Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesi dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	
24.	Pengembangan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	
25.	Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dalam rangka pengembangan keahlian tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan <i>Technical and Vocational Education and Training (TVET)</i> yang dilaksanakan melalui penyusunan standar kompetensi. • Pelaksanaan <i>rapid assesment</i> penyusunan standar okupasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
26.	Program Pemagangan Nasional kerja sama Kemnaker dengan Kadin.	Pelaksanaan Program Pemagangan (<i>Apprenticeship</i>) baik di dalam negeri maupun luar negeri.
	Implementasi Pendukung	Memberikan intensif sektor industri untuk menyerap tenaga kerja hasil vokasi.
	Jumlah Rencana untuk Mencapai Komitmen	Jumlah Implementasi dari Komitmen
	26	12
Perbedaan (<i>Discrepancy</i>)		
14		

**Matriks Implementasi Komitmen Indonesia 2018 Bidang Pendidikan Vokasi
Berdasarkan KTT G20 Hamburg 2017**

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2017	Rencana 2018	Implementasi 2018
1.	<p><i>Human Resource Development and Employment</i></p> <p>Isu pembangunan dan ketenagakerjaan</p>	<p><u>Development Working Group (DWG)</u> <i>Focal point:</i> Kem. PPN/Bappenas</p> <p><u>Employment Working Group (EWG)</u> <i>Focal point:</i> Kem. Ketenagakerjaan</p> <p><u>K/L terkait:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kem. Ketenagakerjaan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Koperasi dan UKM 	<p><u>Presidensi Hamburg 2017</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Improve women's access to labour markets through provision of quality education and training, supporting, infrastructure, public services and social protection policies and legal reforms, where appropriate (#Eskills4Girls).</i> • <i>Promote higher education programmes, which equip young people--and especially young women--effectively with the skills needed for the ICT job market.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan literasi dan kemampuan Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) bagi kaum perempuan, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan (<i>Technical and Vocational Education and Training/TVET</i>) beserta penyediaan sarana dan prasana pendukung. 2. Mendorong partisipasi perempuan dalam kewirausahaan (<i>cross cutting issue</i> dengan agenda <i>Inclusive Business Agenda</i>) yang berorientasi ekonomi digital melalui pengarusutamaan gender dan TIK, baik dalam sektor hulu (pendidikan dan pelatihan) maupun hilir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di sektor pendidikan (hulu), telah disusun kurikulum edukasi literasi digital untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah. 2. Dilaksanakan kegiatan pelatihan pemasaran digital #<i>SheMeansBusiness</i> bersama Facebook oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di 9 kota di Indonesia (Padang, Jambi, Samarinda, Bogor, Sorong, Jayapura, Tanjung Pinang dan Gorontalo). 3. Indonesia secara aktif berperan dalam <i>The ASEAN Women's Entrepreneurship Network</i>, sebuah platform yang berfungsi mempromosikan pengembangan dan pemberdayaan wirausaha perempuan di kawasan ASEAN dan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dalam berwirausaha. 4. Di tingkat nasional, telah tersedia portal "serempak.id" (Seputar Perempuan dan Anak) sebagai media partisipasi masyarakat dan forum diskusi khususnya bagi perempuan untuk memperoleh informasi dan pengalaman terkait isu-isu seputar perempuan, anak dan pengembangan UMKM. 5. <i>Off-Air Events</i> untuk mensosialisasikan eksistensi dan pemanfaatan portal serempak.id di beberapa

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2017	Rencana 2018	Implementasi 2018
		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak • Badan Nasional Sertifikasi Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Build skills for work and life and strengthen links between employment and training inter alia by implementing the G20 Training Strategy, Skills Strategy (2015), the Policy Recommendations to Enhance Employability (2016), and the G20 Initiative on Quality Apprenticeship.</i> • <i>Strengthen Technical and Vocational Education and Training systems, programs and institutions to develop skills, meet labor market needs, promote the cooperation with all relevant</i> 	<p>dari suatu industri bisnis.</p> <p>3. Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK baik melalui pendidikan, sosialisasi/ <i>workshop</i> serta pelatihan teknis bersama dengan mitra terkait, baik di daerah, nasional maupun internasional.</p> <p>4. Mengembangkan kapasitas pendidikan dan keterampilan pelaku pertanian, antara lain melalui perbaikan substansi dan manajemen politeknik pertanian, sertifikasi profesi pertanian, dan pelatihan keterampilan pertanian.</p>	<p>kota-kota besar dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</p> <p>6. Kegiatan kemitraan bersama <i>Open Data Lab</i> (ODL), dengan pengembangan literasi TIK bagi perempuan dan kaum muda melalui <i>roadshow</i> dan pelatihan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti kegiatan <i>Women's Empowerment through ICT and Leadership Training</i> di Jakarta dan <i>Boarding School Digital Literacy Festival</i> di Cirebon dan Surabaya.</p> <p>7. Telah dilaksanakan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara aktif berupa pendampingan dan pelatihan yang melibatkan banyak <i>stakeholder</i> pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan pemilik usaha atau praktisi bisnis, untuk menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri.</p> <p>8. Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian memiliki program Penumbuhan Wirausahawan (PW) untuk mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan muda pertanian.</p> <p>9. Dalam pelaksanaannya Program Penumbuhan Wirausaha melibatkan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.</p> <p>10. Optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja di seluruh Indonesia melalui peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, pemetaan kebutuhan dan standar keahlian, serta peningkatan peran</p>

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> Focal Point	Rujukan Komitmen G20 2017	Rencana 2018	Implementasi 2018
			<p><i>stakeholders, increase the employability of the workforce and advance towards more equitable and sustainable.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>To create 1,1 million new jobs by 2022 and to providing innovative skills development programmes for at least 5 million young people over the next five years through Rural Youth Employment initiative.</i> 		<p>dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Penyusunan buku Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig). 12. Penyusunan buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PPK). 13. Program pendidikan SMK 4 tahun untuk memberikan pengalaman empiris lebih matang di bidang kewirausahaan. 14. Kewajiban pemuatan mapel Simdig dan PPK pada kurikulum seluruh kompetensi keahlian SMK. 15. Pendekatan program yang merupakan penguatan dari pendekatan kurikulum dilakukan melalui: 1) Kerja sama dengan instansi lain atau figur wirausahawan; 2) Identifikasi potensi siswa dan guru yang mengembangkan kewirausahaan; dan 3) Pemberian bantuan pemerintah kewirausahaan kepada 625 SMK pada 2019. 16. Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online yang “murah”, “efektif”, dan “efisien” melalui <i>video conference</i> 2019 sebagai platform teknologi terintegrasi dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan kejuruan SMK. Program ini melibatkan 9.874 SMK (25% negeri dan 75% swasta). Pada 2018, sistem jaringan/online ini

No.	Isu Komitmen	<u>Working Group</u> <i>Focal Point</i>	Rujukan Komitmen G20 2017	Rencana 2018	Implementasi 2018
					telah digunakan sebanyak 37 kali rapat, 124 kali sosialisasi, 27 kali wawancara, 12 kali pelatihan, 15 kali bidang lomba kompetensi siwa SMK, dan 45 seminar.

**Analisis Implementasi Komitmen Indonesia 2018 Bidang Pendidikan Vokasi
Berdasarkan KTT G20 Hamburg 2017**

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
1.	Peningkatan literasi TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kurikulum edukasi literasi digital untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah dalam rangka peningkatan literasi dan kemampuan Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) bagi kaum perempuan. • Penyusunan buku Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig). • Kewajiban pemuatan mapel Simdig pada kurikulum seluruh kompetensi keahlian SMK.
2.	Peningkatan kemampuan TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	
3.	Penyediaan sarana untuk meningkatkan literasi TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	
4.	Penyediaan prasarana untuk meningkatkan literasi TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	
5.	Penyediaan sarana untuk meningkatkan kemampuan TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	
6.	Penyediaan prasarana untuk meningkatkan kemampuan TIK bagi kaum perempuan melalui peningkatan kualitas TVET.	
7.	Mendorong partisipasi perempuan dalam kewirausahaan di sektor hulu melalui pendidikan yang berorientasi ekonomi digital dengan pengarusutamaan <i>gender</i> dan TIK.	

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan program yang merupakan penguatan dari pendekatan kurikulum dilakukan melalui: 1) Kerja sama dengan instansi lain atau figur wirausahawan; 2) Identifikasi potensi siswa dan guru yang mengembangkan kewirausahaan; dan 3) Pemberian bantuan pemerintah kewirausahaan kepada 625 SMK pada 2018.
8.	<p>Mendorong partisipasi perempuan dalam kewirausahaan di sektor hulu melalui pelatihan yang berorientasi ekonomi digital dengan pengarusutamaan <i>gender</i> dan TIK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan kegiatan pelatihan pemasaran digital #SheMeansBusiness bersama Facebook oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di 9 kota di Indonesia (Padang, Jambi, Samarinda, Bogor, Sorong, Jayapura, Tanjung Pinang dan Gorontalo). • Indonesia secara aktif berperan dalam <i>The ASEAN Women's Enterprenership Network</i>, sebuah platform yang berfungsi mempromosikan pengembangan dan pemberdayaan wirausaha perempuan di kawasan ASEAN dan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dalam berwirausaha. • Di tingkat nasional, telah tersedia portal “serempak.id” (Seputar Perempuan dan Anak) sebagai media partisipasi masyarakat dan forum diskusi khususnya bagi perempuan untuk memperoleh informasi dan pengalaman terkait isu-isu seputar perempuan, anak dan pengembangan UMKM. • Off-air events untuk mensosialisasikan eksistensi dan pemanfaatan portal serempak.id di beberapa kota-kota besar dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). • Kegiatan kemitraan bersama <i>Open Data Lab (ODL)</i>, dengan pengembangan literasi TIK bagi perempuan dan kaum muda melalui <i>roadshow</i> dan pelatihan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti kegiatan <i>Women's Empowerment through ICT and Leadership Training</i> di Jakarta dan <i>Boarding School Digital Literacy Festival</i> di Cirebon dan Surabaya.
9.	<p>Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK melalui pendidikan dengan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan melibatkan banyak <i>stakeholders</i> pendidikan, termasuk perguruan

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
10.	Memperluas kerja sama nasional peningkatan literasi digital dan TIK melalui pendidikan.	tinggi dan pemilik usaha atau praktisi bisnis dalam rangka peningkatan literasi digital dan TIK.
11.	Memperluas kerja sama internasional dalam peningkatan literasi digital dan TIK melalui pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online melalui <i>video conference</i> 2019 untuk rapat. • Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online melalui <i>video conference</i> 2019 untuk lomba kompetensi SMK.
12.	Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK melalui sosialisasi/ <i>workshop</i> dengan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online melalui <i>video conference</i> 2019 untuk sosialisasi.
13.	Memperluas kerja sama nasional peningkatan literasi digital dan TIK melalui sosialisasi/ <i>workshop</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online melalui <i>video conference</i> 2019 untuk seminar.
14.	Memperluas kerja sama internasional dalam peningkatan literasi digital dan TIK melalui sosialisasi/ <i>workshop</i> .	
15.	Memperluas kerja sama peningkatan literasi digital dan TIK melalui pelatihan teknis dengan daerah.	
16.	Memperluas kerja sama nasional peningkatan literasi digital dan TIK melalui pelatihan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Mutu SMK dengan memanfaatkan sistem jaringan/online melalui <i>video conference</i> 2019 untuk pelatihan.
17.	Memperluas kerja sama internasional dalam peningkatan literasi digital dan TIK melalui pelatihan teknis.	
18.	Perbaiki substansi politeknik pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
19.	Perbaiki manajemen politeknik pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	
20.	Perbaiki substansi politeknik pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	Program Penumbuhan Wirausaha yang melibatkan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.
21.	Perbaiki manajemen politeknik pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	
22.	Perbaiki substansi sertifikasi profesi pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	
23.	Perbaiki manajemen sertifikasi profesi pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	
24.	Perbaiki substansi sertifikasi profesi pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	
25.	Perbaiki manajemen sertifikasi profesi pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	
26.	Perbaiki substansi pelatihan keterampilan pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
27.	Perbaikan manajemen pelatihan keterampilan pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas pendidikan pelaku pertanian.	
28.	Perbaikan substansi pelatihan keterampilan pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian memiliki program Penumbuhan Wirausahawan (PW) dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian untuk mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan muda pertanian.
29.	Perbaikan manajemen pelatihan keterampilan pertanian dalam rangka pengembangan kapasitas keterampilan pelaku pertanian.	
	Implementasi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebutuhan keahlian dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan. • Pemetaan standar keahlian dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan. • Pemetaan kebutuhan keahlian dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelatihan kejuruan. • Pemetaan standar keahlian dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelatihan kejuruan. • Peningkatan sarana lembaga pendidikan dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan. • Peningkatan prasarana lembaga pendidikan dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pendidikan kejuruan. • Peningkatan sarana lembaga pelatihan kerja dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelatihan kejuruan. • Peningkatan prasarana lembaga pelatihan kerja dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelatihan kejuruan.

No.	Komitmen	Implementasi dari Komitmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan literasi digital dan TIK. • Peningkatan peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pelatihan vokasi dalam rangka peningkatan literasi digital dan TIK.
	Jumlah Komitmen	Jumlah Implementasi dari Komitmen
	29	16
	Perbedaan (<i>Discrepancy</i>)	
	13	

Epilog



Tantangan dan Langkah Ke Depan





Mencari Kompas Kekuatan Indonesia

*N*avigasi strategis kebijakan luar negeri Indonesia sentral dalam menentukan pijakannya di dalam kontestasi kekuatan regional dan global. Aspirasi Indonesia untuk menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia tidak hanya termaktub pada Visi Indonesia 2045, namun juga diproyeksi oleh beberapa riset institusi berskala multinasional (PricewaterhouseCoopers, 2017). Meski demikian, penerjemahan *perceived power* menjadi *manifest power* ini akan sangat bergantung dari kapasitas Indonesia dalam mengerahkan instrumen kebijakan yang tepat dan kalkulatif baik di dalam maupun luar negeri. Dengan menguatnya interdependensi antar negara sebagai hasil dari keterbukaan dan interkoneksi ekonomi, orientasi kebijakan yang semata melihat ke dalam bukan lagi merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil. Belum lagi, disrupsi keamanan yang diakibatkan oleh isu-isu non-tradisional dan tidak lagi mengenal batas teritori negara, terasa nyata saat ini dari isu lingkungan, ekstremisme, dan pandemi yang bersifat trans-nasional. **Realita ini menuntut Indonesia untuk dapat merajut kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri yang secara mutual menjawab kepentingan nasional sekaligus menjadi penggerak stabilitas dan pertumbuhan global yang berkualitas.**

Melalui sudut pandang praktis, buku ini hadir untuk menakar segi implementatif dari pilihan instrumen kebijakan dan pelaksanaan prioritas politik luar negeri Indonesia, dikenal pula dengan sebutan prioritas 4+1, yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; peran Indonesia di

kawasan dan global; serta infrastruktur diplomasi. Pemanfaatan ASEAN sebagai soko guru dalam lingkaran konsentris kebijakan kawasan Indonesia, serta keterlibatannya di berbagai forum dan organisasi internasional merupakan manifestasi upaya penguatan peran Indonesia di kawasan dan global. Arahannya untuk berfokus pada diplomasi ekonomi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga tercermin dari keaktifan Indonesia di G20 dan pengerahan Perwakilan RI sebagai garda terdepan perjuangan kepentingan ekonomi Indonesia di luar negeri, salah satunya melalui peran *economic intelligence* untuk menyokong agenda diplomasi ekonomi. Pengerahan seluruh sumber daya Indonesia di luar negeri pun perlu dibangun di atas kebijakan perlindungan yang kokoh, salah satunya terletak pada upaya Pemerintah RI dalam melindungi warga negaranya di luar negeri dari ancaman keamanan non-tradisional seperti ancaman terorisme dan ekstremisme.

Berdasarkan evaluasi buku ini terhadap implementasi beberapa area kebijakan di atas, ditemukan bahwa masih terdapat ruang optimalisasi. Presiden Joko Widodo menekankan perlunya menggeser orientasi politik luar negeri Indonesia yang bersifat formalitas untuk menjadi lebih instrumental dan substantif. Kalkulasi kebijakan luar negeri Indonesia diharapkan selektif, strategis dan berfokus pada hasil yang nyata dan berdampak langsung kepada rakyat. Berkaca pada arahan tersebut, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penajaman instrumen kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Di tingkat global, teridentifikasi beberapa keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional yang sudah tidak lagi relevan untuk menjembatani Indonesia dalam mencapai prioritas kebijakannya dan beberapa yang berisiko tumpang tindih. Alhasil, keanggotaan tersebut berpotensi tidak menghasilkan keuntungan optimal bagi masyarakat Indonesia dan semakin menekan ruang gerak sumber daya yang terbatas.
2. Di tingkat regional, utamanya pada konteks ASEAN, tantangan untuk membumikan ASEAN, kurangnya sinkronisasi penyusunan kebijakan dan pengawalan implementasi kebijakan yang dihadapi oleh Setnas ASEAN-Indonesia mempengaruhi efektivitas perannya dalam mengkoordinasikan kegiatan ASEAN di dalam negeri. Padahal efektivitas Setnas ASEAN di Indonesia

akan ikut menentukan kesuksesan visi ASEAN 2025 dan mengoptimalkan manfaat ASEAN bagi masyarakat Indonesia.

3. Dari sisi instrumen perlindungan Indonesia, utamanya dari ancaman terorisme dan ekstremisme di luar negeri, ditemukan bahwa rantai kebijakan perlindungan yang menghubungkan kebijakan preventif di hulu serta kebijakan kuratif di hilir masih lemah. Akibatnya risiko pemaparan WNI di luar negeri dari ekstremisme dan terorisme masih belum dapat diselesaikan secara holistik dan terintegrasi.

Kemudian, khusus diselidik dalam aspek optimalisasi kebijakan luar negeri di bidang ekonomi, terdapat beberapa temuan tantangan sebagai berikut:

1. Dalam aspek pemanfaatan data *Economic Intelligence*, ditemukan bahwa belum terdapat strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dan kendala sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Hal ini berimbas pada belum besarnya pemanfaatan dokumen *economic intelligence* dalam menjawab kebutuhan pelaku usaha.
2. Dalam aspek penguatan Perwakilan RI, proporsi sumber daya yang dialokasikan pada Perwakilan RI dinilai belum sepadan dengan kontribusi Perwakilan dalam pencapaian tujuan nasional Indonesia yang diakibatkan oleh: a) kendala teknis berupa rantai koordinasi yang kurang akomodatif terkait kelembagaan dan regulasi; serta b) kendala substantif berupa adanya asimetri informasi mengenai potensi negara di mana perwakilan ditempatkan bagi pemenuhan kepentingan nasional.
3. Dalam aspek komitmen Indonesia di forum G-20, khususnya di bidang pendidikan Vokasi, ditemukan kesenjangan antara komitmen dengan implementasi di tingkat domestik yang diakibatkan oleh adanya keterbatasan akses, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, serta koordinasi lintas K/L yang belum optimal.



Membangun Pijakan yang Kokoh di Panggung Dunia

*K*eberhasilan Indonesia untuk membangun pijakan yang kokoh sebagai kekuatan regional dan global akan bergantung dari pilihan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan tantangan-tantangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan hasil penelitian pada buku ini, rekomendasi yang disarankan bermuara kepada tiga hal utama, sebagai berikut:

Pertama, berfokus pada perbaikan dan penguatan simpul koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, utamanya bermula di tingkat domestik. Terma *foreign policy begins at home* dalam hal ini sangat relevan dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Premis utama dari pernyataan tersebut adalah kemampuan dari suatu negara untuk mengamankan kekuatan/ pengaruh di luar negeri bergantung pada sikap negara dalam menyelesaikan tantangan di dalam negeri. Menelisik kondisi di lapangan, masalah koordinasi menjadi benang merah isu kurang optimalnya pengimplementasian prioritas Indonesia di luar negeri.

Dalam lingkup ASEAN, penegasan Setnas ASEAN-Indonesia sebagai koordinator baik dari sisi kelembagaan, perencanaan dan implementasi perlu dilakukan. Diperlukan adanya Rencana Aksi

Nasional Implementasi Cetak Biru ASEAN 2025 yang menjadi payung acuan berbagai kegiatan K/L dalam membumikan ASEAN. Dari sisi ekonomi, diperlukan tim koordinasi diplomasi ekonomi, khususnya perdagangan luar negeri, yang memuat mekanisme koordinasi serta pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan. Secara khusus terkait *economic intelligence*, diperlukan penguatan kolaborasi atau kerja sama multipihak baik pusat maupun daerah dalam penyusunan *economic intelligence* melalui institusionalisasi forum konsultasi publik, khususnya Kemenlu, dengan swasta dan penguatan mekanisme *sharing data* antar instansi. Dukungan terhadap Satu Data Indonesia dalam hal ini juga dapat menjadi salah satu jawaban untuk menyelesaikan permasalahan rujukan data yang sporadis bagi pelaku usaha. Pada Perwakilan RI membenah koordinasi antar pejabat perbantuan dan fungsi di Perwakilan, serta antara Pusat dan Perwakilan juga esensial bagi pencapaian kepentingan Indonesia di luar negeri. Forum multilateral yang mempertemukan Kemenlu, K/L berdimensi hubungan luar negeri yang memiliki Atase, Perwakilan RI serta K/L teknis terkait perencanaan, penganggaran dan kinerja diperlukan untuk mengawinkan formulasi kebijakan alokasi sumber daya yang tepat dan selaras pada Perwakilan di luar negeri.

Sementara itu, terkait komitmen Indonesia pada forum global, koordinasi kebijakan dan penyamaan pemahaman di tingkat domestik dalam hal ini penting dalam rangka mewujudkan komitmen di tingkat global ke level domestik. Dari sisi kebijakan perlindungan, koordinasi seluruh pihak dalam menjalankan fungsi pencegahan di dalam negeri, fungsi penanganan di luar negeri, dan fungsi rehabilitatif dalam proses reintegrasi di dalam negeri, menjadi sentral dalam upaya perlindungan WNI dari bahaya radikalisme dan ekstremisme. Pembenahan rantai kebijakan perlindungan dari hulu dan hilir merupakan kata kunci bagi strategi perlindungan WNI.

Kedua, membasiskan dan meninjau pilihan kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan pemetaan prioritas/ strategi nasional Indonesia baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Guna mempertajam keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional, pemerintah perlu mengkalkulasi secara cermat keanggotaan yang dapat menjadi daya ungkit bagi kepentingan Indonesia. Indonesia memiliki opsi untuk mempertahankan, meninjau ulang, ataupun keluar dari

organisasi internasional yang disesuaikan dengan pemetaan rumusan strategi nasional dalam jangka pendek dan panjang. Rumusan strategi nasional di dalam keanggotaan OI harus terus menjadi instrumen analisis untuk mengidentifikasi secara periodik mana saja organisasi internasional yang masih relevan atau kurang relevan serta organisasi yang berpotensi tumpang tindih dan meningkatkan risiko inefisiensi. Di dalam keanggotaan pada organisasi internasional, Indonesia juga perlu memetakan pendekatan yang tepat, baik itu dalam bentuk *soft balancing* ataupun *hedging*.

Terkait dengan penguatan diplomasi ekonomi, diperlukan pematangan terkait strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam bentuk *grand design* yang berisikan informasi mengenai pemetaan negara yang menjadi pasar prioritas sebagai referensi untuk arah kebijakan penetrasi pasar Indonesia serta pemetaan daftar sektor/komoditas unggulan domestik yang akan dipasarkan secara intensif di luar negeri untuk menyelaraskan potensi ekonomi nasional dengan kebutuhan global. Indonesia juga perlu mengevaluasi kembali kebijakan perdagangan yang sudah ditandatangani untuk memetakan analisis potensi negosiasi perdagangan di masa depan dengan menilai efektivitas perjanjian dagang dan trennya beberapa tahun ke depan. Hal yang sama berlaku pada penguatan peran Perwakilan RI, yaitu dengan melakukan pemetaan perwakilan berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional agar pengalokasian sumber daya di Perwakilan RI dapat dirumuskan secara tepat dan spesifik sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Ketiga, pengawalan perencanaan dan penganggaran kebijakan yang mengungkit peran aktif dan kerja sama pembangunan Indonesia dengan seluruh aktor pembangunan di tingkat global. Pengawalan pada tingkat perencanaan dan penganggaran menjadi penting untuk memastikan adanya pembagian tugas antar pemangku kepentingan yang jelas; mendorong pengalokasian sumber daya memenuhi kriteria kapasitas dan dilakukan pada lini masa yang tepat; serta mengalokasikan pendanaan yang proporsional bagi pencapaian tujuan nasional di panggung regional dan global. Perlu digarisbawahi pula, pencapaian kepentingan nasional tidak dapat dipenuhi semata dari dalam negeri mengingat keterbatasan sumber daya yang melekat pada masing-masing negara. Oleh karena itu, komitmen Indonesia di tingkat global, seperti G-20, perlu menjadi pemantik dalam mendorong lebih banyak kerja sama pembangunan

internasional dengan negara lain untuk mempercepat proses transfer pengalaman, teknologi dan pengetahuan di bidang prioritas kebijakan Indonesia. Proses pengawalan perencanaan dan penganggaran ini perlu dibangun atas pondasi proses evaluatif berbasis bukti. Maka dari itu, diperlukan suatu instrumen pengukuran capaian kebijakan luar negeri agar menjadi informasi dasar penyusunan kebijakan luar negeri yang tepat sasaran. Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam hal ini dapat menjadi salah satu penopang asa penguatan peran Indonesia dalam konstelasi kekuatan dunia. Pemanfaatan teknologi dan *big data* dalam hal ini juga harus dapat mentransformasi proses bisnis perumusan kebijakan luar negeri Indonesia

Ketiga aspek di atas bersifat fundamental dalam menyiapkan Indonesia untuk mengambil momentum pergeseran ekonomi global ke kawasan Asia dengan mengukuhkan pijakan Indonesia sebagai kekuatan penggerak roda perekonomian serta stabilitas kawasan dan global.

Tim Penulis





Wisnu Utomo

Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas. Sepak terjangnya di Bappenas diawali sebagai Staf Perencana di Biro Pembiayaan Proyek-Proyek Pembangunan pada tahun 1991. Pengalaman karirnya di Bappenas sebagai Kepala Biro Umum, Direktur Pertahanan dan Keamanan, dan Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pendidikan Sarjana Pertanian di Jurusan Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian UNS. Gelar Magister di Bidang Manajemen Strategi Pertahanan diperoleh pada Sekolah Pasca Sarjana UGM. Pendidikan doktoral Ilmu Administrasi Publik ditempuh pada Fisipol UGM.

Mengikuti berbagai konferensi internasional, diantaranya UN High Level Conference on SSC BAPA+40 (Argentina), Development Forum OECD (Portugal), Global Partnership for Effective Development Summit (Jenewa), Global Meeting of Development Providers (Paris), Special Think-20 Programme (India), Least Development Cooperation 5 Summit (Qatar), United Nation High Level Political Forum (New York)

Menulis buku Kebijakan Publik Jokowi Menjawab Kebutuhan Masyarakat (2019), Polugri KPI Berdiplomasi (2023).



Priyanto Rohmattullah

Berlatar belakang sarjana ilmu ekonomi yang mendapatkan gelar Master of Arts di bidang International Political Economics di Universitas Kyung Hee Seoul. Berkarir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak 1996. Menangani berbagai bidang seperti pemantauan dan evaluasi, perencanaan dan penganggaran pada Kedeputusan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri, dan Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan.

Berpengalaman mengikuti berbagai program pelatihan internasional antara lain Development Project, Sustainable Development, Sustainable Fiscal Development. Menjadi anggota Delegasi RI antara lain pada UN High Level Conference on SSC BAPA+40, untuk Global Partnership for Effective Development Summit, Development Forum OECD, Least Development Cooperation 5 Summit. Pada 2019 pernah menjadi Pembicara pada United Nation High Level Political Forum di UN.



Astri Kusuma Mayasari

Sejak Januari 2024 bertugas sebagai Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Direktur Politik dan Komunikasi (November 2022-Januari 2024) serta perencana pada Direktorat Hukum dan Regulasi (Januari 2021-November 2022), Direktorat Pertahanan dan Keamanan (Januari 2020-Januari 2021), Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional (Juni 2016-Januari 2020), dan Direktorat Politik dan Komunikasi (Januari 2009-Juni 2016).

Menempuh pendidikan sarjana dan magister di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM), serta mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya adalah *foresight, leadership development program, gender mainstreaming in public sector, planning and budgeting, dan leading transformational change.*



Nourma Nusanti



Perencana Ahli Madya di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dan merupakan *agent of change* Bappenas (2017-2020). Latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Business Administration dari Nanyang Technological University, Singapura.

Keterlibatan, partisipasi dan pengalaman kerja yang mencakup berbagai isu dalam kebijakan publik meliputi: bidang komunikasi, keterbukaan informasi publik, penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri, termasuk Rencana Aksi Nasional ASEAN, dan Pengembangan Indeks Kebijakan Luar Negeri dan partisipasi dalam forum Kerja Sama Pembangunan.

Berbagai pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Foresight di Singapura, Doing Business (Technology and Innovation) di Tsing Hua University, serta Leadership Accelerator di University of California, Berkeley.

Karina Apriladhatin



Perencana Ahli Muda di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional. Mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).

Fika Annisa Nurtrisyanti



Perencana Ahli Pertama di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas. Mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya *gender mainstreaming on development planning*, *foresight methodology*, dan lainnya.

Menulis publikasi ilmiah (jurnal) mengenai topik economic value ruang terbuka hijau dan *public transportation*.

Tri Azmi Khairunnisa



Perencana Ahli Pertama di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, di antaranya *Learning and Acceleration Programme for Effective Development Cooperation* oleh KOICA Korea Selatan, Pelatihan *Foresight* oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), serta Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di UI dan ITB.





Vallisa Aulia Rahmi

Perencana Ahli Muda di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional. Mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), dan menempuh Pendidikan S2 di Duke University. USA.



Omar Farizi Wonggo

Analisis Politik Keamanan di LAB 45. Pernah bertugas sebagai peneliti bidang politik dan hubungan internasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sejak 2018 banyak melakukan analisis kebijakan antara lain rivalitas negara adidaya, kebijakan luar negeri Indonesia, penguatan kapasitas industri pertahanan, pembangunan demokrasi, hingga ekonomi hijau Indonesia.



Dizar Ramadhan Sabana

Analisis Politik Keamanan di LAB 45. Pernah bekerja sebagai staf peneliti kebijakan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dengan fokus pada kajian keamanan. Banyak melakukan analisis kebijakan seputar geopolitik adidaya, modernisasi pertahanan, reformasi sektor keamanan dan Industri pertahanan.

M. Singgih Pangestu



Analisis dan peneliti yang memiliki pengalaman bekerja lebih dari tujuh tahun dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan di Indonesia. Bidang keahliannya mencakup inklusi sosial, ekonomi, dan keuangan, identitas digital, kerja sama pembangunan internasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengenyam pendidikan sarjana di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro.

Pernah bekerja sebagai analis perencana di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Melakukan analisis perencanaan pembangunan dan riset khususnya untuk pengembangan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Saat ini, Singgih bekerja sebagai *Assistant Manager* di *MicroSave Consulting* (MSC) untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif untuk negara-negara di *global south*.





Ghifari Athallah Ramadhan

Associate di Vriens & Partners, sebuah perusahaan konsultan kebijakan publik dan hubungan pemerintah dengan pihak swasta. Bekerja sebagai Staf Pendukung Substansi di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas dari bulan Agustus 2018 hingga Januari 2019. Terlibat dalam penulisan *policy paper* berjudul “Penguatan Diplomasi Perwakilan”.

Ghifari saat ini Tengah menyelesaikan pendidikan *Master of Public Policy and Management* di Monash University, kampus Indonesia. Menempuh pendidikan Sarjana Sosial di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (2014-2018).

Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan lokakarya, beberapa di antaranya terkait dengan politik *post-truth*, evolusi konsep teritori dalam ilmu hubungan internasional, serta penerapan geopolitik dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia.



